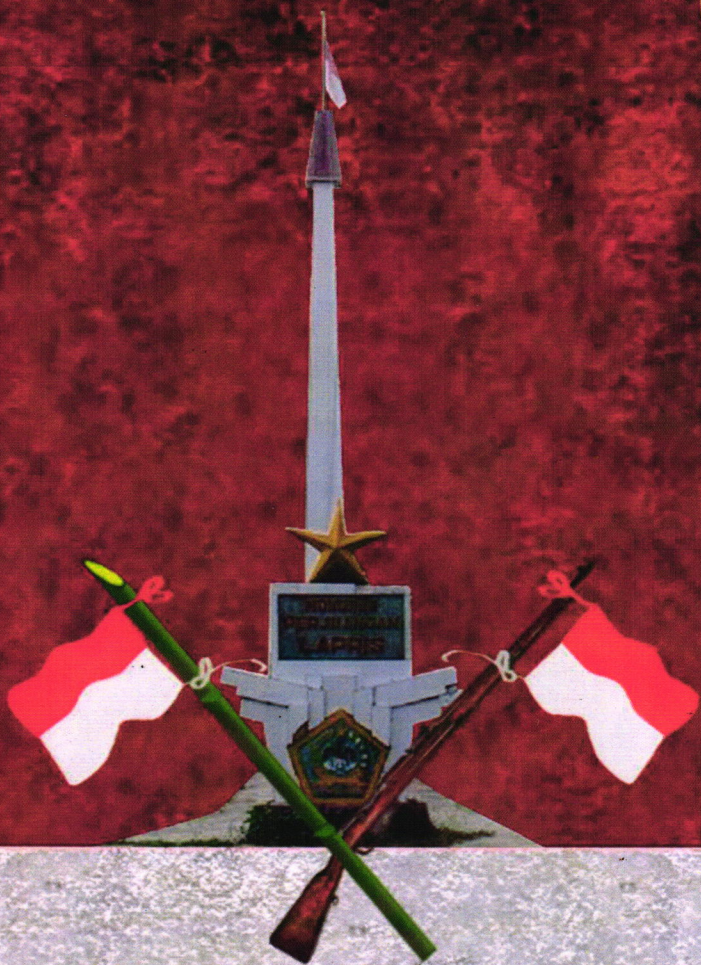




DINAMIKA KEMILITERAN:

**DARI KELASKARAN HINGGA BATALYON 710
DI SULAWESI SELATAN**

**DINAMIKA KEMILITERAN : DARI KELASKARAN
HINGGA BATALYON 710 DI SULAWESI SELATAN**

DINAMIKA KEMILITERAN : DARI KELASKARAN HINGGA BATALYON 710 DI SULAWESI SELATAN

**Bahtiar
Muhammad Amir
Syahrir Kila
Rosdiana Hafid**

Penerbit:



UPT Unhas Press

DINAMIKA KEMILITERAN : DARI KELASKARAN HINGGA BATALYON 710 DI SULAWESI SELATAN

Penulis:

Bahtiar

Muhammad Amir

Syahrir Kila

Rosdiana Hafid

Tata Letak:

Alem Febri Sonni

Penerbit:

UPT UNHAS Press

Alamat Penerbit:

Gedung UPT Unhas Press (depan Fakultas Hukum)

Telepon: 0411-8997706 HP/WA: 085353555569

Kampus Unhas Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10

Makassar | unhaspress@gmail.com | unhaspress.com

Hak Cipta @Bahtiar, Muhammad Amir, Syahrir Kila, Rosdiana Hafid. All rights reserved. Hak Cipta dilindungi undang-undang

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia daerah Sulawesi Selatan) dan Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Cetakan I 2019

ISBN: 978-979-530-233-9

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

PENGANTAR PENERBIT

Menerima naskah dengan latar belakang sejarah perjuangan serta perkembangan kemiliteran di Sulawesi Selatan sebuah kebahagiaan kami sebagai penerbit yang berada dilingkup akademis. Sejarah dalam kemiliteran Indonesia khususnya mengkaji dinamika di Sulawesi Selatan, memberikan gambaran betapa pentingnya peranan militer dalam pembangunan pasca kemerdekaan.

Tahap-tahap dinamika tergambar dengan jelas dari penggalian ilmiah terhadap substansi perjuangan membela kepentingan rakyat. Begitu pentingnya peranan militer dalam mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya dari pergerakan di Barat Indonesia, dalam buku ini tergambar dengan jelas bagaimana Makassar menjadi penggerak persatuan untuk wilayah timur Indonesia.

Para peneliti Balai Pelestarian Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan memberikan gambaran secara ilmiah terhadap perjuangan serta aktivitas militer di daerah ini. Kekuatan tema dan keselarasan naskah menjadikan buku “DINAMIKA KEMILITERAN : dari Kelaskaran hingga Batalyon 710 di Sulawesi Selatan” sebuah dokumentasi abadi serta diharapkan menjadi rujukan terhadap tulisan-tulisan serupa dikemudian

hari. Penggabungan berbagai prespektif terlihat dari 3 tulisan yang tersaji dalam buku ini.

Besar harapan buku ini menjadi manfaat serta berguna bagi bangsa dan negara. Kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperkaya aspek akademik dan informasi kepada masyarakat luas.

Penerbit,
UNHAS PRESS

PENGANTAR PENERBIT

Menarik untuk dilihat dengan latar belakang sejarah perjuangan serta perkembangan kemiliteran di Sulawesi Selatan sebagai kebanggaan kami sebagai bangsa yang sudah dilindungi oleh negara dalam kemiliteran Indonesia khususnya mengenai dinamika di Sulawesi Selatan, memberikan gambaran betapa pentingnya peranan militer dalam pembangunan pasca kemerdekaan.

Tidak terlepas dinamika perjuangan dengan jelas dan pengabdian luhur terhadap bangsa dan negara dalam membela kepentingan rakyat. Begitu pentingnya peranan militer dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya dan bergerak di Barat Indonesia, dalam buku ini tergambar dengan jelas bagaimana Makassar menjadi penggerak pertama untuk wilayah timur Indonesia.

Pada peneliti Balai Pelestarian Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan memberikan gambaran secara liris terhadap perjuangan serta aktivitas militer di daerah ini. Kekuatan tema dan kesetiaan naskah menjadikan buku "DINAMIKA KEMILITERAN : dari Kelaskaran hingga Batalyon 710 di Sulawesi Selatan" sebuah dokumentasi abadi serta diharapkan menjadi rujukan terhadap tulisan-tulisan serupa dikemudian

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	v
Daftar Isi	vii

PERJUANGAN LASKAR PEMBERONTAK RAKYAT INDONESIA SULAWESI (LAPRIS) DI SULAWESI SELATAN

Pendahuluan	3
Profil Lapris	11
Perjuangan Lapris Masa Kemerdekaan	33
Penutup	61
Daftar Pustaka	65

PERJUANGAN KELASKARAN BPRI: Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Di Parepare dan Daerah Sekitarnya	69
--	----

ANDI SELLE DALAM BATALION 710	127
Pendahuluan	129
Mengenal Sosok Andi Selle (MATTOLA)	133
Terbentuknya Wadah Militer dan Bisnismya	147
Gerakan Batalyon 710	163
Penutup	181
Daftar Pustaka	185
BIODATA PENULIS	189

DAFTAR ISI

ix	Daftar Isi
viii	Daftar Pustaka
vii	Daftar Pustaka
vi	Daftar Pustaka
v	Daftar Pustaka
iv	Daftar Pustaka
iii	Daftar Pustaka
ii	Daftar Pustaka
i	Daftar Pustaka
0	Daftar Pustaka
-1	Daftar Pustaka
-2	Daftar Pustaka
-3	Daftar Pustaka
-4	Daftar Pustaka
-5	Daftar Pustaka
-6	Daftar Pustaka
-7	Daftar Pustaka
-8	Daftar Pustaka
-9	Daftar Pustaka
-10	Daftar Pustaka
-11	Daftar Pustaka
-12	Daftar Pustaka
-13	Daftar Pustaka
-14	Daftar Pustaka
-15	Daftar Pustaka
-16	Daftar Pustaka
-17	Daftar Pustaka
-18	Daftar Pustaka
-19	Daftar Pustaka
-20	Daftar Pustaka
-21	Daftar Pustaka
-22	Daftar Pustaka
-23	Daftar Pustaka
-24	Daftar Pustaka
-25	Daftar Pustaka
-26	Daftar Pustaka
-27	Daftar Pustaka
-28	Daftar Pustaka
-29	Daftar Pustaka
-30	Daftar Pustaka
-31	Daftar Pustaka
-32	Daftar Pustaka
-33	Daftar Pustaka
-34	Daftar Pustaka
-35	Daftar Pustaka
-36	Daftar Pustaka
-37	Daftar Pustaka
-38	Daftar Pustaka
-39	Daftar Pustaka
-40	Daftar Pustaka
-41	Daftar Pustaka
-42	Daftar Pustaka
-43	Daftar Pustaka
-44	Daftar Pustaka
-45	Daftar Pustaka
-46	Daftar Pustaka
-47	Daftar Pustaka
-48	Daftar Pustaka
-49	Daftar Pustaka
-50	Daftar Pustaka
-51	Daftar Pustaka
-52	Daftar Pustaka
-53	Daftar Pustaka
-54	Daftar Pustaka
-55	Daftar Pustaka
-56	Daftar Pustaka
-57	Daftar Pustaka
-58	Daftar Pustaka
-59	Daftar Pustaka
-60	Daftar Pustaka
-61	Daftar Pustaka
-62	Daftar Pustaka
-63	Daftar Pustaka
-64	Daftar Pustaka
-65	Daftar Pustaka
-66	Daftar Pustaka
-67	Daftar Pustaka
-68	Daftar Pustaka
-69	Daftar Pustaka
-70	Daftar Pustaka
-71	Daftar Pustaka
-72	Daftar Pustaka
-73	Daftar Pustaka
-74	Daftar Pustaka
-75	Daftar Pustaka
-76	Daftar Pustaka
-77	Daftar Pustaka
-78	Daftar Pustaka
-79	Daftar Pustaka
-80	Daftar Pustaka
-81	Daftar Pustaka
-82	Daftar Pustaka
-83	Daftar Pustaka
-84	Daftar Pustaka
-85	Daftar Pustaka
-86	Daftar Pustaka
-87	Daftar Pustaka
-88	Daftar Pustaka
-89	Daftar Pustaka
-90	Daftar Pustaka
-91	Daftar Pustaka
-92	Daftar Pustaka
-93	Daftar Pustaka
-94	Daftar Pustaka
-95	Daftar Pustaka
-96	Daftar Pustaka
-97	Daftar Pustaka
-98	Daftar Pustaka
-99	Daftar Pustaka
-100	Daftar Pustaka

**PERJUANGAN LASKAR PEMBERONTAK
RAKYAT INDONESIA SULAWESI
DI SULAWESI SELATAN**

Bahtiar

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan belum lama diraih, rakyat Sulawesi Selatan baru saja merasakan kebebasannya dari kerasnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Namun keadaan di Sulawesi Selatan tidak berlangsung lama, setelah Jepang menyatakan diri kalah dalam Perang Pasifik, maka pasukan Sekutu selanjutnya mendapat tugas untuk :

1. Membebaskan secepat mungkin tawanan perang (*Allied Prisoners of War and Internees* disingkat APWI).
2. Melucuti tentara Jepang yang telah menyerah, dan mengirim mereka ke pelabuhan (deportasi) agar secepat mungkin diberangkatkan ke Jepang.
3. Menciptakan ketertiban hukum dan keamanan, sehingga dapat di wujudkan penyerahan kekuasaan yang tertib dari kekuasaan militer Sekutu kepada pemerintah sipil, dari penguasa yang sah berkuasa di wilayah itu (Agung, 1985:4)

Sejak diketahui bahwa di antara tentara Australia yang datang ke Makassar sebagai pasukan Sekutu, terdapat personil *Nederland Indie Civil Administration* (NICA). Kenyataan itu mendorong rakyat yang berada

di Kota Makassar terdorong melancarkan protes dengan melakukan demonstrasi dan pengibaran Bendera Merah Putih pada 27 September 1945 (Harvey, 1989: 136). Kehadiran NICA bersama rombongan tentara Australia menimbulkan gejolak baru dalam kehidupan kaum politikus di Makassar.

Pada dasarnya setelah diketahui dengan pasti bahwa NICA datang ke Makassar bersama tentara Sekutu yaitu Australia, sebagai pasukan yang bertugas untuk menyelesaikan urusan-urusan Perang Pasifik di Sulawesi Selatan. Pemuda pejuang yang biasanya melakukan perlawanan sendiri-sendiri di wilayah masing-masing, kali ini dengan kebulatan tekad membentuk satu kelaskaran yang dimaksudkan sebagai persiapan kekuatan untuk menghadapi tentara yang bernaung di bawa Sekutu. Pasukan ini berusaha memulihkan kembali kedudukan kekuasaan Kolonial Belanda di bumi Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada khususnya, sekaligus untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan mendirikan organisasi kelaskaran bertambah meningkat setelah terjadi gerakan pemuda di Makassar pada 29 Oktober 1945 untuk merebut pos-pos strategi yang diduduki oleh NICA yang berhasil digagalkan oleh pasukan tentara Australia (Kadir, dkk, 1984: 135).

Di Polombangkeng, jauh sebelum peristiwa gerakan pemuda Makassar telah berdiri organisasi pemuda. Pembentukan organisasi pemuda di daerah ini berkat dorongan yang diberikan oleh pemuda-pemuda yang datang dari Makassar untuk mengorbankan jiwa dan semangat perjuangan menentang NICA. Dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Polombangkeng, pada 16 Oktober 1945, berhasil dibentuk satu organisasi perjuangan yang dinamakan Angkatan Muda Bajeng, yang sering juga di sebut Gerakan Muda Bajeng (GMB). Organisasi ini dipimpin oleh Karaeng Polombangkeng, H. Pajonga Daeng Ngalle dan sebagai Wakil Ketua H. Makkaraeng Daeng Manjarungi (Kadir, dkk, 1984:138).

Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh pelosok daerah di Sulawesi Selatan, rakyat bangkit dan berjuang untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Ini terbukti dengan berdirinya berbagai organisasi kelaskaran di daerah-daerah sebagai wadah kekuatan militer untuk membendung dan membinasakan NICA yang berusaha menghidupkan kembali pemerintah dan kekuasaan Kolonial Belanda.

Penangkapan Dr. Ratulangi dan sejumlah Staf Pusat Keselamatan

Rakyat (PKRS), yang dilakukan oleh NICA pada 5 April 1946, karena dianggap pemerintahan lokal di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya kedudukan Ratulangi sebagai gubernur yang resmi bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Di lain pihak, kelaskaran yang selama ini bertujuan secara terpisah di daerah masing-masing, dengan bertujuan yang sama untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan menghancurkan rencana NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan dan Pemerintah Kolonial Belanda dan berusaha mengorganisasikan kesatuan komando dalam suatu wadah (Arfah, dkk, 1991: 88).

Untuk mewujudkan rencana menyatukan kelaskaran-kelaskaran di setiap daerah untuk dibentuk dalam satu wadah, maka diusahakan suatu pertemuan pimpinan-pimpinan kelaskaran. Pertemuan pertama di laksanakan di Komara pada 15 Juli 1946. Hadir pada pertemuan ini adalah pimpinan KRIS Muda Mandar, M. Riri Amin Daud: PPNI Makassar Amiruddin Muchlis, Harimau Indonesia Bahang, Amris Selayar Daeng Bonto, dan Gerakan Tanete Soppeng diwakili oleh Ali Malaka. Dari pertemuan ini dicapai kata sepakat membentuk organisasi kelaskaran, yang kemudian dinamakan Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) seterusnya disebut di singkat LAPRIS, yang dibentuk pada 17 Juli 1946 (Kadir, dkk, 1984: 161).

Setelah LAPRIS terbentuk, kegiatan kelaskaran lebih terkoordinasi dan lebih kuat serta tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Pada dasarnya perjuangan yang dilaksanakan oleh kelaskaran-kelaskaran dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mendapat dukungan dan bantuan sepenuhnya dari rakyat (Arfah, dkk, 1991: 100). Menurut R.W. Mongisidi dalam laporan tertanggal 5 Januari 1947, bahwa lapisan masyarakat pada umumnya menghendaki Negara Kesatuan Indonesia dalam bentuk Republik (Kadir, dkk, 1978: 163). Karena itu rakyat senantiasa mendukung dan memberikan bantuan bagi setiap kegiatan LAPRIS.

Bertolak dari uraian singkat itu, maka kajian ini dimaksudkan untuk mengungkap dan menjelaskan peranan LAPRIS dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Banyak karya sejarah yang silih berganti di tulis, akan tetapi yang membahas mengenai organisasi perjuangan lebih spesifik masih kurang. Dengan alasan tersebut maka kajian ini dapat menambah khasanah tulisan sejarah agar kiranya dapat menjadi bahan bacaan dan

mudah-mudahan menambah referensi ilmu sejarah. Sangat diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat membangkitkan semangat juang dari generasi muda dan semakin cinta kepada tanah air. Selain itu dengan kehadiran kajian ini dapat mengungkap kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan agar dapat menjadi informasi dan masukan bagi pembaca bagaimana para pejuang dahulu rela berkorban jiwa raga demi tanah air. Apalagi era sekarang ini rasa itu sudah mulai pudar, karena lebih banyak yang mementingkan diri sendiri atau golongan, tanpa melihat betapa berartinya kebersamaan, persatuan demi tegaknya bangsa dan negara.

SELAYANG PANDANG SULAWESI SELATAN

Sekilas daerah Sulawesi Selatan

Apabila diperhatikan pada peta Indonesia tentang Pulau Sulawesi bentuknya seperti huruf K dan sangat menarik juga letak pulau ini yang berada di tengah-tengah, yaitu di sebelah barat terdapat Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra di sebelah timur terletak Kepulauan Maluku dan Irian Jaya. Kota Makassar seakan-akan titik pusat Indonesia, oleh karena itu sejak dahulu pusat kota terbesar di Sulawesi ini amat strategis.

Daerah Sulawesi Selatan yang dimaksud dalam kajian ini adalah berdasarkan batasan wilayah pemerintahan administratif sesuai Undang-Undang No. 47 tahun 1960 (PP No. 7). Daratan daerah Sulawesi Selatan hampir seluruhnya dikelilingi oleh laut. Di sebelah barat Selat Makassar, di sebelah selatan Laut Flores dan Teluk Bone di sebelah timur, lebih ke timur lagi terdapat daratan Sulawesi Tenggara. Batas daratan terdapat di sebelah utara, yakni pegunungan Verbeek dan Fennema, yang memisahkan Sulawesi Selatan dengan provinsi tetangganya, Sulawesi Tengah. Sejak 1920-an terdapat hubungan lalu lintas darat yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah (Pawiloy, 1987:15).

Sulawesi Selatan termasuk daerah beriklim tropis dan mengenal hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, temperatur dan tekanan udara daerah ini tidak menunjukkan fluktuasi yang besar. Musim hujan berlangsung antara September hingga Desember pada waktu akhir tahun, dan dari Januari hingga April pada waktu awal tahun. Pada dasarnya curah hujan umumnya tinggi, yakni antara 1000 mm - 3000 mm per tahun, rata-rata temperatur sepanjang tahun

26°C atau 27°C dengan maksimum temperatur 32°C dan minimum temperatur 18°C, temperatur di daerah pegunungan bergantung pada letak ketinggiannya. Tiap-tiap ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, temperatur turun 0,6°C, perbedaan antara temperatur tertinggi dan terendah sepanjang hari rata-rata antara 5-8°C (Mattulada, 1985: 21).

Sulawesi Selatan Sebelum Kemerdekaan

Menjelang 1930-an, ketika di daerah mulai berkembang organisasi-organisasi sosial dan politik, pemerintah mulai mempertimbangkan kekuatan bangsawan “kekuatan-kekuatan nisbi” yang selama ini berhasil ditekan dan dipendam. Pemerintah mulai mendekati kelompok itu untuk menjalin hubungan kerjasama. Pada 1931 bekas Kerajaan Bone dipulihkan kedudukannya menjadi daerah kekuasaan berpemerintahan sendiri. Pada 1938 bekas Kerajaan Gowa juga dipulihkan kembali kedudukannya dan dijadikan sebuah kerajaan atau daerah yang berpemerintahan sendiri (Kadir, dkk, 1984: 60).

Berdasarkan laporan-laporan pemerintahan menyangkut perkembangan organisasi politik di Sulawesi Selatan, tampak bahwa kegiatan kepartaian berkenan di hati rakyat sebagai wadah perjuangan. Itulah sebabnya tidak terjadi perpecahan dari organisasi politik yang berorientasi nasionalisme, permasalahan terletak pada sikap kerjasama dan tidak mau bekerjasama dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda.

Kegiatan organisasi pergerakan nasional kemudian dibekukan oleh pihak Pemerintah Pendudukan Jepang, ketika mereka berhasil mengambil alih wilayah Hindia Belanda dari tangan Belanda pada 1942 (Kadir, dkk, 1984: 68). Sistem pemerintahan yang dicanangkan Jepang memberikan petunjuk bahwa kehadiran Jepang bukan untuk membela akan tetapi menggantikan kedudukan pemerintah colonial Belanda. Semua jabatan yang dahulu dijabat oleh pegawai berkebangsaan Belanda sekarang merupakan tempat bagi pejabat berkebangsaan Jepang. Dengan demikian sistem pengawasan kolonial yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda juga berlaku pada periode pemerintahan Jepang. Namun demikian untuk menetralkan dirinya agar tidak dianggap sebagai penjajah, pihak Jepang melancarkan teori saudara tua dan saudara muda. Dengan maksud agar dapat menarik simpatik rakyat, karena akan merasakan bahwa mereka satu keluarga dengan Jepang. Jepang sebagai saudara tua berkewajiban memimpin rakyat Indonesia yang merupakan saudara muda ke arah kemajuan, karena dibutuhkan

kerjasama. Walaupun demikian nampak bahwa perubahan slogan dari Nippon Indonesia sama-sama menjadi Nippon Indonesia sama-sama menjadi Nippon Sudara Tua telah menimbulkan kecurigaan rakyat terhadap maksud baik yang selalu didengungkan oleh pihak Jepang (Kadir, dkk, 1984: 76).

Tampaknya usaha Jepang tidak berhasil memadamkan rasa permusuhan yang membara dalam diri penduduk, yang pada kondisi tertentu akan meledak sebagai tindakan perlawanan. Di Unra sebuah desayangletaknyakuranglebih15kmke sebelah barat Kota Watampone, pecah pemberontakan pada 1943 menentang petugas-petugas yang diperintahkan oleh Jepang mengambil hasil produksi pangan mereka. Akibat pemberontakan itu sejumlah aparat meninggal, di antaranya seorang anggota pemangku adat (*ade' pitue*) Bone yaitu Andi Abdullah Arung Ponceng. Peristiwa itu memaksa Andi Mappanyukki, raja Bone turun tangan untuk menghindari pertempuran (Kadir, dkk, 1984: 78). Kenyataan-kenyataan dialami dalam Perang Pasifik ternyata mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan tentara pendudukan Jepang di Indonesia. Usaha pertama yang dipikirkan adalah memikat pemuda-pemuda Indonesia untuk dididik dalam bidang kemiliteran, dan bersedia membantu tentara Jepang membendung gerak pasukan Sekutu untuk mengakhiri Perang Asia Pasifik di Kepulauan Jepang.

Pada 1944 kedudukan pertahanan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menjadi goyah, sementara pihak Sekutu mencatat kemenangan-kemenangan gemilang yang dicapai di Pasifik. Bahkan pada tahun itu serangan-serangan Sekutu telah mencapai bagian wilayah Indonesia, di saat-saat itu pihak Jepang semakin giat mempersiapkan pemuda-pemuda untuk dapat memberikan bantuan dalam menghadapi serbuan Sekutu. Di pihak lain, pemerintah Jepang berusaha menggugah simpatik rakyat untuk membantu Jepang, dengan memperdengarkan janji kemerdekaan yang jelas dinyatakan dalam sidang istimewa *Teikoko Gikai* (Parlemen Jepang), yang ke-85 di Tokyo pada 7 September 1944. Dalam sidang itu Perdana Menteri Jepang Kaiso (pengganti Perdana Menteri Tojo) mengumumkan pendirian pemerintah Jepang, untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak dikemudian hari (Kartodirdjo, dkk, 1982: 15).

Di saat itu pihak Jepang semakin giat menggalang dan mempersiapkan pemuda-pemuda untuk dapat memberikan bantuan dalam menghadapi serangan Sekutu. Tampaknya janji pemberian

kemerdekaan dengan tambahan kelak di kemudian hari dapat diulur jauh ke masa depan. Namun kenyataan kekalahan tentara Jepang cukup merisaukan pertahanan Jepang dalam menghadapi sekutu. Karena itu di pihak Jepang berusaha untuk merangkul kaum nasionalis, agar membantu memenangkan Jepang dalam Perang Pasifik.

Di lain pihak kelaskaran-kelaskaran yang telah ini berjuang secara terpuisi di daerah masing-masing dengan tujuan yang sama untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan mempertahankan rencana NICA yang hendak mengagalkan kembali kekuasaan dan kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan berusaha mengorganisasikan seluruh komando dalam satu wadah (Kadik, 1984: 100-101).

Untuk mewujudkan rencana menyusun kelaskaran-kelaskaran yang terpuisi di setiap daerah dalam satu wadah, maka diusahakan suatu pertemuan pimpinan-pimpinan kelaskaran. Pada pertemuan ini, para pemimpin berdiskusi dan berdiskusi di dalam Kota Makassar, beberapa orang telah berhasil menyelinap di tengah-tengah musuh untuk menemui para pemimpin kelaskaran. Untuk itu para pemimpin NICA yang semakin banyak untuk beraksi, untuk itu para pemimpin kelaskaran yang masih mampu bertahan di dalam Kota Makassar mengorganisasikan kepada Ronggong Dg. Rono di Lombangkeng agar berusaha memelopori penyatuan kelaskaran di

II

PROFIL LAPRIS

Nelaya musuh hendak mendirikan negara boneka, Belanda yang diprakarsai oleh Van Mook semakin bertambah kuat dan jelas. Perjuangan dengan akan diadakan konferensi para pendukung Van Mook di Malino pada akhir bulan Juli 1946. Ronggong Dg. Rono amat geram hatinya mendengar hal ini.

Awal Terbentuknya LAPRIS

Seluruh pelosok daerah di Sulawesi Selatan pada 1945 rakyat bangkit dan berjuang untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya berbagai organisasi kelaskaran di daerah-daerah sebagai wadah kekuatan militer, untuk melawan NICA yang berusaha menghidupkan kembali pemerintah dan kekuasaan Belanda.

Dengan penangkapan pimpinan PKRS, Dr. Ratulangi dan sejumlah staf PKRS oleh pihak NICA pada 5 April 1946, dianggap akan dapat mengurangi perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Pemikiran ini didasarkan oleh kenyataan bahwa seluruh pimpinan pemerintah lokal di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya kedudukan Ratulangi. Selain itu, juga dipandang sangat berarti bagi pergolakan rakyat di daerah ini untuk memperjuangkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta. Kenyataannya menunjukkan bahwa setelah Ratulangi dan kawan-kawan ditawan, kegiatan politik diambil alih oleh Tajuddin Noor dengan kegiatan organisasi Pemuda Nasional Inonesia (PNI) yang telah didirikan pada awal Januari 1946 atas anjuran Ratulangi.

Di lain pihak kelaskaran-kelaskaran yang selama ini berjuang secara terpisah di daerah masing-masing dengan tujuan yang sama untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan menghancurkan rencana NICA yang hendak menegaskan kembali kekuasaan dan pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan, berusaha mengorganisasikan kesatuan komando dalam satu wadah (Kadir, dkk, 1984: 160-161).

Untuk mewujudkan rencana menyatukan kelaskaran-kelaskaran yang terbesar di setiap daerah dalam satu wadah, maka diusahakan satu pertemuan pimpinan-pimpinan kelaskaran. Para pejuang yang senantiasa berada dan bertahan di dalam Kota Makassar, beberapa orang telah berhasil menyelip di tengah-tengah musuh menuju Polombangkeng guna menyatukan kesatuan menghadapi musuh NICA yang semakin bernaflu untuk berkuasa. Untuk itu para pejuang khususnya pimpinan kelaskaran yang masih mampu bertahan di dalam Kota Makassar, mengusulkan kepada Ranggong Dg. Romo di Polombangkeng, agar berusaha memepori penyatuan kelaskaran di Sulawesi Selatan (Pawiloy, 1987: 125).

Nafsu musuh hendak mendirikan negara boneka, Belanda yang diprakarsai oleh Van Mook, semakin bertambah kuat dan jelas. Sehubungan dengan akan diadakannya konferensi, para pendukung Van Mook di Malino pada akhir bulan Juli 1946. Ranggong Daeng Romo amat geram hatinya mendengar peristiwa itu, maka segera mengutus kepercayaannya memanggil pimpinan kelaskaran baik yang berdiam di dalam kota maupun di daerah pedalaman. Penentuan hari pertemuan para pimpinan kelaskaran telah ditetapkan oleh Ranggong Daeng Romo bersama stafnya, undangan lisan disampaikan ke Kota Makassar maupun daerah pedalaman melalui kurir (Pawiloy, 1987: 125).

Untuk memberikan dukungan keamanan terhadap tempat pertemuan para pejuang di Polombangkeng, maka dilakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda, dengan demikian patroli musuh menghentikan gerakannya dan tinggal di posnya masing-masing. Dalam keadaan rasa aman terhadap patroli musuh, para pemimpin kelaskaran berangkat menuju Polombangkeng (Arfah, dkk, 1991: 90).

Pada 15 Juli 1946, wakil-wakil dari kelaskaran BPNI, KRIS MUDA, AMRIS Selayar, HI, GAPI Soppeng telah tiba di Komara Polombangkeng. Mereka segera mengadakan suatu pertemuan, wakil-wakil kelaskaran yang antara lain dihadiri oleh M. Riri Amin Daud dari KRIS MUDA Mandar, Aminuddin Muchlis dari AMRIS Selayar, dan Ali Malaka dari GAPI Soppeng.

Dari hasil pertemuan tersebut dicapai kata sepakat membentuk organisasi gabungan kelaskaran, keesokan harinya mereka berangkat menuju markas Lipan Bajeng untuk membicarakan bersama dengan pimpinan Lipan Bajeng, Ranggong Daeng Romo. Dalam pertemuan itu R. Endang sebagai salah satu prakarsa rencana, tampil sebagai pimpinan sidang. Selain dihadiri oleh tokoh-tokoh yang turut serta pada pertemuan pada 15 Juli 1946, hadir pula Ranggong Daeng Romo, Pajonga Daeng Ngalle, Makkaraeng Caddi, Karaeng Palli, Karaeng Temba, Emmy Saelan, Maulwi Saelan, dan lain-lain. Pertemuan ini merupakan pertemuan pembentukan wadah kesatuan organisasi kelaskaran yang dinamakan LAPRIS (Kadir, dkk, 1984: 161).

Dalam catatan pembentukan LAPRIS di Sulawesi Selatan tanggal 16-17 Juli 1946, disebutkan bahwa 16 Juli 1946, lebih dari separuh undangan yang hadir. Mereka mengadakan pertemuan di tempat Ranggong Daeng Romo, inisiatif untuk mengadakan pertemuan berasal dari Endang. Namun cita-cita yang tinggi dan besar pasti akan terbentur dengan berbagai macam kepentingan dan kekuatan, terutama dari pihak Belanda. Endang pula yang memimpin sidang yang berlangsung sehari penuh, bertindak sebagai jurutulis pada sidang malam itu adalah Abdullah, dan yang hadir antara lain: Endang sendiri sebagai ketua sidang, Karaeng Romo, Karaeng Ana Bajeng, Karaeng Jarung, Karaeng Loloa, Karaeng Cadi, Karaeng Sidja, Karaeng Temba, Emmy Saelan, Maulwi Saelan, Daeng Condo, Robert Wolter Mongisidi, Ali Malaka, Dg. Bonto, M. Riri Amin Daud dan beberapa orang lagi (Luhukay, 1980: 15).

Sampai larut malam ide dan cita-cita Endang diperbincangkan, tergambar dengan jelas apa yang diinginkannya, ialah satu kesatuan dalam gerak dan satu jalur dalam komando. Acara demi acara diikuti oleh yang hadir dengan penuh kesabaran sampai selesai, walaupun ngantuk kadang kala datang mengganggu karena sudah capek. Beberapa yang hadir seperti Karaeng Ana Bajeng tidak banyak bicara, demikian juga dengan Karaeng Jarung hanya mendengar saja. Sebaliknya mata Karaeng Romo menyala-nyala, jika terlintas kesan bahwa LAPRIS yang akan di bentuk, akan bersifat lembek saja. Beliau tidak dapat terima sikap demikian, yang banyak bicara pada sidang itu adalah Amiruddin Muchlis dan Amin Daud, cukup jauh jangkauan penglihatan mereka berdua. Bonto dan Ali Malaka sangat tegas dalam sikap mereka. Cukup positif kekuatan-kekuatan yang mereka wakili, Maulwi dan kakaknya Emmy lebih banyak diam dari pada berbicara, dikemukakan hal-hal yang dianggap perlu saja. Cukup jelas bagi mereka berdua pokok-

pokok pikiran dari Endang, demikian juga tujuan dan harapan-harapan yang ingin dicapai dari organisasi LAPRIS ini. Pada saat itu, kondisi dan keadaan di Sulawesi Selatan memungkinkan pelaksanaan keinginan bersama itu.

Pada acara berikutnya R.W. Mongisidi mengusulkan tata tertib dan disiplin yang kuat, putusan apapun yang sudah disetujui, tanpa tata tertib dan disiplin yang kuat tak satupun akan membawa hasil. Malah akan menghancurkan organisasi yang akan didirikan itu, sehingga usul tersebut diterima. Selanjutnya tugas Abdullah sebagai jurutulis sidang diganti oleh R.W. Mongisidi, karena terlalu capek. Pada dini hari 17 Juli 1946 pukul 03.00, anggaran dasar LAPRIS selesai dibahas dan diterima oleh peserta sidang, kemudian diputuskan jam 09.00 pagi LAPRIS akan diresmikan (Luhukay, 1980: 16).

Dari hasil pertemuan tersebut, maka ditetapkan 17 Juli 1946, dilakukan upacara peresmian berdirinya LAPRIS. Upacara ini ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih, yang diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. yang dipimpin oleh Muh. Yusuf. Upacara diselenggarakan di Rannaya pada jam 09.00 yang dihadiri sekitar 100 orang, jalannya upacara oleh Robert Wolter Mongisidi mengisahkannya sebagai berikut :

- Pada 17 Juli 1946, kira-kira jam 09.00 pagi di Rannaya telah disiapkan upacara peringatan 17 sambil meresmikan berdirinya LAPRIS. Tak cukup 100 orang yang hadir disitu.
- Setelah siap semua, maka diadakan pembicaraan pendek oleh Endang tentang hadirnya kami disitu dipandang dari sudut tanggal 17, serta dari sudut berdirinya LAPRIS. Selanjutnya dilakukan penaikan bendera Merah Putih dengan perlahan-lahan dan penuh hikmat.
- Tiap-tiap tanggal 17 Agustus bendera ini telah dikibarkan, berkibarnya bendera Indonesia di atas tanah air Indonesia oleh bangsa Indonesia sungguh senang rasanya, yang tak saya ketahui pada waktu itu. Apalagi Muh. Yusuf di minta untuk membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, di Rannaya di daerah Bajeng pada hari itu dilakukan dengan penuh perasaan. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Bangsa Indonesia dan di atas persada Indonesia di bawah naungan Bendera Indonesia. Sehabis menyanyi Karaeng Jarung mengadakan pembicaraan ringkas tentang berdirinya LAPRIS, beliau mewakili Karaeng

Romo, selain itu Emmy Saelan yang diminta mengeluarkan sepatah kata juga tampil ke muka sambil mengatakan antara lain: aku datang ke sini untuk menyerahkan tenagaku bagi tanah air, upacara berlangsung dan selesai hampir tengah hari.

- Beberapa hari setelah upacara pembentukan berdirinya LAPRIS, utusan-utusan seperti Ali Malaka, Bonto, Aminuddin, Amin Daud dan beberapa orang lainnya berangkat melalui hutan, sungai dan sawah ke Makassar ketempat masing-masing (Arfah, dkk, 1991: 92).

Pada saat berdirinya dan terbentuk organisai LAPRIS, anggaran rumah tangga belum dapat di rampungkan, yang berhasil pada hari itu di rampungkan adalah mengenai anggaran dasarnya.

Struktur Organisasi LAPRIS

Susunan kepengurusan LAPRIS yang diumumkan pada upacara peresmian belum lengkap, disebabkan karena beberapa jabatan yang perlu ditempatkan orang yang dipercayakan untuk tugas itu, belum dapat ditentukan. Ini dinyatakan oleh R.W. Mongisidi ketika ia diadili pada 19 Maret 1948. Kepengurusan LAPRIS pada saat terbentuk tersusun sebagai berikut:

Pelindung : Padjonga Daeng Ngalle (Karaeng Ana Bajeng)

Bagian Organisasi (Administrasi)

Ketua : Makaraeng Daeng Manjarungi

Wakil Ketua : (PPNI)

Sekretaris I : R. W. Mongisidi (LB)

Sekretaris II : (PPNI)

Bagian Ketentaraan

Ketua : Ranggong Daeng Romo

Wakil Ketua : R. Endang (LB)

Sekretaris : Baso Lanto

Organ Advisekurs (Badan Penasihat)

: Abd. Rachman (Pak Jawa)

Daeng Tjando

Daeng Sila Karaeng Loloea

Badan Penyelenggara

Ketua Muda : Abd. Rachman (Hamang)

Ali Malaka

Sekretaris :

Bendahara : Mappasaleng Daeng Sidja (LB).

Tiap-tiap kelaskaran memiliki bendaharawan,
tetapi bendaharawan berada pada bendaharawan LB.

Bagian Penerangan : M. R. Amin Daud (Kris Muda)

Bagian Inlichtingsdient : Bonto (AMRIS)

Bagian Perhubungan : Ali Malaka (Tanete)

Bagian Ketentaraan : R. Endang (LB)

Bagian Palang Merah : Emmy Saelan

Kepengurusan LAPRIS bermarkas pusat di Bajeng, kecuali kepengurusan badan penyelenggara berkedudukan di Makassar (Djarwadi, 1972: 28; Kadir, dkk, 1984: 162; Bahan Arsip, kol. YK).

Organsiasi kelaskaran yang tergabung dalam LAPRIS berjumlah 19 dari berbagai organisasi kelaskaran di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : PBAR (Bulukumba), PPI (Bantaeng), AMRIS (Selayar), LAPTUR A (Jeneponto) LAPTUR B (Bangkala), LIPAN BAJENG (Polombangkeng), BUKA (Limbung Selatan), KERAP (Limbung Utara), PPNI (Makassar) ALR (Makassar), KPS (Makassar), PEMUDA TJAMBA (Maros), HARIMAU INDONESIA (Pangkajene), GPT (Tanete), GAPIS (Soppeng), BPRI (Parepare), KRIS MUDA (Mandar), TPR (Makassar), BPI (Makassar) (Kadir, dkk, 1984: 163). Namun pada mulanya hanya 6 kelaskaran yang bergabung di antaranya: Lipan Bajeng, PPNI, Harimau Indonesia, AMRIS Selayar, KRIS MUDA Mandar dan Gerakan Tanete/Soppeng (Arfah, dkk, 1991: 97; Djarwadi, 1972: 28).

Hubungan fungsional dan kerjasama antara organisasi ketentaraan dalam LAPRIS, bahwa yang berkuasa dan memegang kekuasaan tertinggi seperti keadaan kacau adalah pimpinan ketentaraan. Sebaliknya dalam keadaan aman, maka yang berkuasa adalah pimpinan bagian organsiasi atau administrasi, Sementara badan penyelenggara berkedudukan di Makassar, dan pengurus LAPRIS lainnya bermarkas pusat di Bajeng. Di samping itu telah ditetapkan pula bahwa tugas dan tanggungjawab Gubernur Provinsi Sulawesi telah diambil alih oleh LAPRIS sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat RI. Dengan demikian maka terhitung mulai berdirinya LAPRIS pada 17

Juli 1946, pimpinan penyelenggara dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulawesi berada di tangan panglima LAPRIS, yakni Ranggong Daeng Romo (Arfah, dkk, 1991: 97).

Sejak terbentuknya LAPRIS perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terhadap NICA makin gencar dan organisasi-organisasi kelaskaran-kelaskaran makin teroganisir dalam satu satuan komando. Aksi-aksi sabotase, pertempuran, dan penghadangan, maupun penyerangan yang dilakukan oleh laskar-laskar LAPRIS terhadap pasukan NICA dan kaki tangannya senantiasa terjadi terhadap upaya Kolonial Belanda yang ingin memulihkan kembali kedudukan kekuasaannya di daerah Sulawesi Selatan. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran di Ranaya, Komara pada 8 Agustus 1946. Ketika itu markas besar LAPRIS di Rannaya diserang oleh KNIL yang berkekuatan kurang lebih satu batalyon, terdiri dari pasukan alteleri dan infantri. Serangan tersebut dihadapi dengan perlawanan sengit oleh sekitar 300 orang pasukan LAPRIS di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo. Pasukan KNIL berhasil merebut dan membakar markas LAPRIS, pada peristiwa itu 12 laskar LAPRIS gugur dan KNIL 7 orang (Poelinggomang, dkk, 2004: 192).

Langkah pertama yang diambil oleh Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo adalah penyempurnaan organsiasi dan kekuatan bersenjata dengan cara membentuk pasukan tempur, khusus yang mampu bergerak cepat dalam usaha mengacaukan setiap langkah yang dijalankan oleh pimpinan NICA, terutama untuk operasi militer secara besar-besaran. Untuk itu maka dibentuk tiga kesatuan utama pasukan tempur LAPRIS sebagai berikut :

1. Harimau Indonesia yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuda PPNI, ALRI, BPI, KPS, TPRI dan lain-lain yang dahulunya pernah bergerak dalam kota dan memahami benar liku-liku jalan lorong, kampung, dalam Kota Makassar. Mereka bertugas untuk operasi dalam kota Makassar dan sekitarnya.
2. Lipan Bajeng yang anggota-anggotanya dipilih dari pemuda yang berusia antara 18-25 tahun dan memiliki pendidikan minimum VVS, serta memiliki latar belakang sejarah yang heroik terutama dari daerah Gowa, Bajeng, Ana Bajeng (Polombangkeng), Bontonompo, Galesong, Sanrobone, Topejawa, Laikang, dan lain-lain (Arfah, dkk, 1991: 98).

Jumlah anggota LAPRIS seluruhnya kurang lebih 20.000 orang, yang tersebar di seluruh pelosok daerah Sulawesi Selatan (Arfah, 1998: 42),

hal ini tidak terlepas dari dukungan rakyat. Antara rakyat dan LAPRIS memiliki keinginan yang sama, yaitu mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan negara kesatuan dalam bentuk Republik.

Visi dan Misi LAPRIS

Bermunculannya berbagai kelaskaran di Sulawesi Selatan, adalah merupakan keinginan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan pemerintah Belanda. Dengan satu keinginan yaitu mempertahankan negara dari upaya NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda. Setelah terbentuknya satu wadah dari beberapa kelaskaran ini, maka perjuangan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan semakin lebih kuat dan lebih terorganisir. Tujuan perjuangan yang direncanakan LAPRIS adalah Indonesia merdeka dalam bentuk Republik, yang berkedaulatan rakyat dan sebagai negara kesatuan (Kadir, 1994: 163).

Adapun kegiatan utama LAPRIS adalah bidang kemiliteran, dalam bidang ini ada dua sasaran yang ingin di capai yaitu: pertama memenangkan perjuangan diplomasi politisi-politisi Republik Indonesia. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan untuk menarik perhatian dunia terhadap perjuangan rakyat Indonesia, agar dunia segera mengakui Negara Republik Indonesia. Untuk tujuan itu pasukan selalu siap melakukan gerakan-gerakan dan pertempuran di saat terjadi perundingan-perundingan, hal ini dimaksudkan untuk memenangkan kedudukan diplomat Indonesia di meja perundingan. Sasaran kedua adalah berusaha merobohkan dan membinasakan kedudukan NICA, untuk maksud ini tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi :

1. Menghancurkan dan memusnahkan serdadu-serdadu sewaan NICA dan kaki tangannya.
2. Memusnahkan perbekalan NICA (gudang-gudang dan kantor-kantor serta perusahaan-perusahaan dan menghalangi lalu lintas pasukan NICA.
3. Mengadakan perang urat syaraf dan menyebarkan panflet serta tindakan provokatif.
4. Menyebarkan perpecahan di kalangan tentara dan polisi NICA.
5. Memblokir ekonomi NICA di kota (Kadir, dkk, 1984: 165).

Sedang kegiatan lainnya adalah bidang ekonomi, yaitu mendorong dan menarik simpatik rakyat agar bersedia dan rela sebagai barisan belakang untuk memberi bantuan ekonomi untuk keperluan sehari-

hari bagi keperluan para pejuang. Mengajukan kepada rakyat untuk tidak melakukan jalinan dagang dengan pihak NICA, dan berusaha mendirikan dan menyusun kemampuan pengembangan ekonomi yang berdiri sendiri. Bidang penerangan yang paling utama dilaksanakan adalah memberikan penerangan kepada rakyat menyangkut tujuan perjuangan dan manfaat bagi pengembangan masyarakat, yang merdeka dan berdiri sendiri, bebas dari penindasan dan penjajahan bangsa lain dan menyadarkan mereka untuk berpartisipasi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan (Kadir, dkk, 1984: 164).

Selain itu, ada tiga bidang gerak yang dilakukan, namun hanya sepintas lalu saja yaitu bidang sosial (membantu memberikan penerangan kesehatan dan menolong kelompok lemah dan miskin), bidang kebudayaan (mengembangkan bahasa Indonesia dan mengembangkan sikap perjuangan kepahlawanan), dan bidang komunikasi ke luar (menjalin hubungan warga asing agar mendukung perjuangan kemerdekaan). Kegiatan dalam bidang yang terakhir ini dilakukan kepada mereka untuk tidak menghalangi perjuangan rakyat Indonesia agar keamanan mereka dijamin, menghubungi orang-orang Australia yang berada di Makassar. Menurut Wolter mereka ini sepenuhnya mendukung kemerdekaan Indonesia demikian pula dengan orang-orang Arab. Jalinan dagang orang-orang Arab turut mendorong mereka mendirikan organisasi (Pewarnai) yang bercita-cita Indonesia merdeka (Kadir, dkk, 1984: 164).

Dengan penjelasan tersebut, membuat pemimpin kelaskaran sama sekali tidak menunda-nunda lagi keputusannya untuk tidak menerima berbagai tipu, siasat yang dibuat Belanda. Bagi mereka cukuplah sudah bagaimana keganasan yang ditinggalkan setelah kemerdekaan dicapai, tujuan dari beberapa kelaskaran bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini.

Dari segenap pimpinan yang ada pada 1 Oktober 1946 diadakan rapat yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo dengan mengambil keputusan :

1. Tugas-tugas ketua umum dengan para pembantunya adalah untuk mengatur pemerintahan sipil.
2. Pimpinan pasukan mengadakan latihan umum sebulan lamanya mulai tanggal 4 Oktober sampai 4 Nopember 1946, bertempat di Mandjalling Komara.
3. Mengadakan gerakan serentak untuk: mengadakan pembakaran

secara besar-besaran pada tempat-tempat vital kepentingan musuh, pembasmian kaki tangan musuh, merampas senjata musuh dan kaki tangannya, memutuskan jaringan jalan, merobohkan tiang-tiang telepon dan merusak jembatan (Djarwadi, dkk, 1972: 28).

Untuk melaksanakan keputusan di atas, Ranggong Daeng Romo membuka latihan kemiliteran, yang diikuti tidak kurang dari 1000 orang, dari berbagai kelaskaran pada 4 Nopember 1946. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh panglima LAPRIS dan dibantu oleh pelatih-pelatih antara lain Abd. Djalal Daeng Leo, Parenrengi Daeng Muang, Abd. Chalik Daeng Nyau, Ibrahim Daeng Tule dan lain-lain. Pada 11 Nopember 1946, dimulai dengan gerakan menebang pohon-pohon di tepi jalan, merobohkan tiang-tiang telepon dan merusakkan jembatan Batunipa dan Pappa. Selain itu, dilakukan pula serangan pada tangsi polisi di Takalar, di berbagai tempat lain dilakukan serangan-serangan oleh kegiatan kelaskaran anggota LAPRIS (Djarwadi, dkk, 1972: 29).

Tekad yang benar-benar bulat untuk mempertahankan kemerdekaan terpatri dalam diri setiap anggota kelaskaran. Mereka rela mengorbankan apa saja dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan dalam perlawanan menentang Pemerintah Kolonial Belanda.

Pejuang-Pejuang LAPRIS

Terbentuknya laskar-laskar perjuangan yang tergabung dalam LAPRIS tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh yang ada di dalam laskar tersebut, misalnya Ranggong Daeng Romo, Pajonga Daeng Ngalle, Wolter Mongisidi, Makkaraeng Daeng Manjarungi, R. Endang dan lain-lain. Oleh karena itu dalam tulisan ini tidak luput dibahas beberapa tokoh di dalam LAPRIS.

a. Ranggong Dg. Romo

Ranggong Dg. Romo dilahirkan pada 1915, di Kampung Bonebone, Bate Moncokomba, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Ia adalah putra sulung dari Gallarang Moncokomba Mangngulabbe Daeng Makkio, dan ibunya bernama Bati Daeng Jimo. Saudara-sudaranya adalah : H. Madiyah Daeng Memang, H. Mutti Daeng Lebo, H. Fatimah Daeng Ngasi, H. Makkatang Daeng Sibali, Mappajalling Daeng Kawang. Ayahandanya adalah paman sepupu Karaeng Polombangkeng Pajonga Daeng Ngalle (Arfah, dkk, 1991: 37).

Jadi Ranggong Dg. Romo berasal dari keluarga bangsawan di Polombangkeng. Ranggong Daeng Romo dikawinkan dengan sepupunya yang bernama Bungatubu Daeng Lino, putri Gallarang Bontokandatto, Tarasi Daeng Bantang. Dari hasil perkawinannya dikarunia lima orang anak : Rahmawati Daeng Nginga, Abd. Hafid Daeng Jarung, Saenab Daeng Sanging, St. Fatimah Daeng Ngintang, Mappatoba Daeng Bantang BA (Arfah, dkk, 1991: 37).

Sejak umur 4 tahun Ranggong Daeng Romo dimasukkan belajar pada Pondok Pesantren Cikoang untuk memperoleh pendidikan agama Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren dan *Inlandsche School*, orang tuanya memasukkan ke sekolah *HIS* milik Belanda di Makassar. Namun karena pendiriannya yang teguh dan tidak menyukai sekolah milik Belanda, ia kemudian pindah ke sekolah partikular (*Taman Siswa*) yang telah dikenalnya. Karena sering memimpin teman-temannya dalam penyerangan terhadap murid-murid sekolah *HIS*, sehingga orang tua Ranggong Daeng Romo sering kali berurusan dengan *Politie Inlichting Diest* (PID). Bagi Ranggong Daeng Romo murid-murid sekolah milik Belanda senantiasa mengejek atau menghina murid-murid sekolah partikular (Arfah, dkk, 1991: 47).



Ranggong Daeng Romo

Setelah kembali ke Polombangkeng dengan berbekal ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya di Makassar, ia mulai mendampingi orang tuanya dalam menjalankan roda pemerintah. Selain

itu, ia juga mengurus sawah ladang yang luas dan hewan ternaknya banyak sekali. Bahkan dari hasil pertanian dan peternakan beliau inilah yang banyak memberi bantuan materi terhadap kehidupan perjuangan melawan penjajah Belanda (A.M. Maddateang Daeng Lallo).

Pada masa pendudukan militer Jepang, Ranggong Daeng Romo bekerja pada perseroan Jepang, yakni perusahaan pembelian beras dari militer Jepang di Takalar sampai tahun 1949. Meskipun secara lahiriah ia terlibat kerjasama dengan Jepang, tetapi pada hakekatnya adalah merupakan upaya menyesuaikan diri agar tetap dapat mempertahankan dan melindungi rakyat dari kekejaman penguasa militer Jepang. Sebelum Jepang menyerah, Ranggong Daeng Romo memerintahkan merampas pistol yang dipakai oleh seorang pengawas Jepang (Arfah, dkk, 1991: 54).

Kebijakan-kebijakan selama ia bertugas dalam menangani pembelian padi atau beras, senantiasa menjaga keseimbangan sebagai wakil pemerintah di satu pihak dan sebagai pemimpin di pihak lain. Hal itu dibuktikan setelah penguasa militer Jepang angkat kaki dari daerah itu, organisasi perjuangan yang dipimpinnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat (Amin, 1971: 13; Bahtiar, 2002: 47).

Pada 16 Oktober 1945 dibentuk organisasi Gerakan Muda Bajeng, dalam Gerakan Muda Bajeng ini Ranggong Daeng Romo diangkat sebagai pimpinan kelaskaran untuk wilayah Moncokomba. Peranan Ranggong Daeng Romo pada masa-masa awal kemerdekaan adalah sebagai berikut: 5 Desember 1945, diangkat menjadi salah seorang komandan barisan penerjang Gerakan Muda Bajeng, merangkap sebagai Kepala Wilayah (Bate) Komara. Pada 27 Pebruari 1946, diangkat menjadi komandan barisan penerjang Gerakan Muda Bajeng untuk seluruh Polombangkeng, 2 April 1946 di angkat menjadi Ketua Umum Laskar Lipan Bajeng, kemudia 17 Juli 1946 di angkat menjadi Panglima LAPRIS, yang merupakan gabungan dari 19 organisasi kelaskaran di Sulawesi Selatan. Kemudian 1 Oktober 1946, Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo memimpin rapat di Bungung Masigi, salah satu dari hasil keputusan rapat diantaranya mengadakan latihan militer selama satu bulan yang dimulai 4 Oktober sampai 4 November 1946, dan latihan militer dilakukan pada 4 Oktober 1946. Latihan militer ini diselenggarakan di Manjailing, Komara, yang dibuka oleh panglima LAPRIS sendiri, yang diikuti 1000 orang pemuda dari LAPRIS. Latihan ini dipimpin juga oleh panglima LAPRIS dan dibantu oleh 10

orang diantaranya: Muh. Djalal Daeng Leo, Parenrengi Daeng Muang, Mappasomba (Abd. Chalik Daeng Nyau, Arfah, Ibrahim Daeng Tule, dan lain-lain (Arfah, dkk,1991: 107)

Pada 2-4 November 1946 diselenggarakan rapat komando di Bungung Masigi dipimpin oleh panglima LAPRIS, kemudian diinstruksikan kepada komando pasukan dan pasukan bawahan untuk bergerak serentak mengadakan penyerangan-penyerangan kepada musuh, mengadakan sabotase-sabotase, melumpuhkan gerak musuh. Kota Takalar dijadikan sebagai sasaran penyerangan, karena sejak Juli 1946 kekuatan musuh semakin kokoh, sehingga sengaja diperkuat agar mengimbangi kekuatan pejuang-pejuang Polombangkeng. Setelah para pemuda selesai latihan, Panglima LAPRIS memberikan kepercayaan kepada Mongisdi untuk memimpin penyerangan di dalam kota. Beliau selama ini dianggap berpengalaman dalam strategi penyerangan dalam kota (Pawiloy, 1987: 244).

Sejak peristiwa Batua, gerakan pasukan LAPRIS mulai merosot, karena sebagian pemimpinnya telah gugur, dan ada juga yang ditawan. Selanjutnya ada serangan tiba-tiba dari belakang, para anggota LAPRIS panik dan berusaha menyelamatkan Panglima LAPRIS, akan tetapi pasukan KNIL telah mengunci rapat dan sasaran diarahkan ke Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo. Tembakan penyerangan terus gencar, Ranggong Daeng Romo mengambil pistol dan keluar, sebuah tembakan musuh mengenai pahanya sebelah kiri (kurang lebih 5 cm di atas lutut), sehingga ia jatuh terduduk (kaki kiri terlipat ke dalam), Ranggong Daeng Romo menyuruh adik-adik seperjuangan agar meneruskan perjuangan, selanjutnya ia merebahkan diri sambil bersandar di batu dan menutupi badannya sampai muka dengan sarung seolah-olah sudah tak bernyawa lagi. Beberapa serdadu Belanda memperebutkan segala sesuatu yang berharga yang ada di markas, beberapa orang serdadu Belanda menedkati Ranggong Daeng Romo. Dengan jarak 3 meter Ranggong Daeng Romo menembak satu persatu, tiga orang Belanda langsung tewas, tiga orang luka parah dan dua orang luka ringan. Di antara serdadu Belanda langsung menembak Ranggong Daeng Romo yang kena tepat antara dua keningnya. Salah satu serdadu Belanda dengan rasa dendam dan penuh amarah menetakkan sangkur ke ke dahi Ranggong Daeng Romo, dengan demikian ada tiga yang luka pada diri Ranggong Daeng Romo. Pada akhirnya Ranggong Daeng Romo jatuh tersungkur, 28 Pebruari 1947 gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan Belanda (Sibali, dkk, 1988: 108).

b. Pajonga Daeng Ngalle

Dalam Struktur LAPRIS ada sebuah nama yaitu Pajonga Daeng Ngalle dilahirkan di lingkungan Bonto Kandatto Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sekitar tahun 1901. Ia adalah putra Hajina Daeng Massaung Karaeng I Langa ri Mangkura dan ibundanya adalah Hapipah Daeng Ngintang. Adapun saudara-saudara Pajonga Daeng Ngalle adalah: Tikola Daeng Maleo, Majadi Daeng Sila, Kurotong Daeng Bau, Cincing Daeng Tompo dan Baco Daeng Siantang (Amir, 2001: 30).

Perkawinan Pajonga Daeng Ngalle dengan H. Manila Karaeng Pati, melahirkan putra dan putri masing-masing: Mappatunru Daeng Raja, yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan 1947 di negerinya yang tercinta, Andi Unga, Petta Sompia, Zainal Karaeng Sila, Andi Naki SH, dan Jabal Ria Daeng Rannu. Dari putra beliau yang mengikuti jejak langkah Pajonga Daeng Ngalle sebagai aparat pemerintah adalah Zainal Karaeng Sila yang pernah menjabat Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Andi Naki SH sebagai Kepala Kanwil Departemen Tenaga Kerja Daerah Bengkulu (Arfah, dkk, 1988: 18).

Mengenai riwayat pekerjaan Pajonga Daeng Ngalle, ia pernah menjadi juru tulis dari 1936 sampai 1946, sebagai kepala promotor dari pembentukan Gerakan Muda Bajeng. 1928 dengan Beslit dari Asisten Residen Makassar diangkat menjadi Kepala Onder Distrik Moncongkomba, dengan gelar *Gallarang Moncongkomba* disebut juga Karaeng Loloa. pada 1931 dengan Beslit dari Resident Zuid Celebes, diangkat menjadi kepala distrik dengan gelar Karaeng Polombangkeng (Distrik Hoofd Met Der Titel Karaeng Polombangkeng) (Arfah, dkk, 1988:19).



Pajonga Daeng Ngalle

Abdul Razak Daeng Tompo juga membuat Riwayat Hidup Pajonga Daeng Ngalle seperti berikut:

- 1942-1945 sebagai Polombangkeng Guntjo (Setingkat dengan Kepala Distrik).
- Pada 5-12-1945 dengan terbentuknya *de facto* RI, di Borong Karamase Komara, Karaeng Polombangkeng sebagai Kepala Pemerintahan dan bergelar Karaeng Lompoa. Selain itu terbentuk juga Bate, masing-masing: Bate Malewang, Bate Moncongkomba, Bate Kandatto, Bate Lassang, Bate Komara, dan Bate Pattalassang.
- 1951-1953 Karaeng Polombangkeng Pajonga Daeng Ngalle sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Takalar (Arfah, dkk, 1988: 19).

Tindakan Karaeng Polombangkeng menerima kedudukan sebagai Guntjo adalah upaya menyesuaikan diri sebagai sikap perjuangan terhadap Jepang, dalam upaya mendidik rakyat Polombangkeng berani berkorban harta dan benda, serta jiwa dan raga. Oleh karena kelak akan menghadapi perjuangan yang lebih besar dan tidak kenal menyerah, di samping itu, atas anjuran Pajonga Daeng Ngalle, maka beberapa pemuda menjadi pimpinan dari organisasi *Sei Nen Dan* dan *Bou Teisen Thai*, di antaranya Madina Daeng Ngitung dan H. Makkaraeng Daeng Djarung dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan (Amir, 2001: 34).

Sebagaimana telah di jelaskan di atas bahwa orang tua Hajina Daeng Massaung Karaeng Ilanga ri Mangkura, demikian juga saudara Pajonga Daeng Ngalle bahkan dirinya sendiri, merupakan penentang terhadap kekuasaan Belanda. Hal inilah yang mengakibatkan hidup dalam pengasingan terpisah dari sanak keluarganya, namun tidak mengurangi tekad untuk tetap melawan pemerintah Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia khususnya daerah Sulawesi Selatan (Arfah, dkk, 1995: 47).

Dari jejak langkah orang tua Padjonga Daeng Ngalle dan saudara-saudaranya, ini adalah merupakan keinginan beliau di dalam menghadapi masa pendudukan Jepang dan perjuangan membela tegaknya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di daerah Polombangkeng khususnya dan daerah Sulawesi Selatan pada umumnya. Bahkan mempunyai pengaruh terhadap para pejuang-pejuang di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dijadikannya daerah Polombangkeng sebagai pusat perlawanan,

ini dapat dibuktikan dengan dijadikannya daerah Polombangkeng sebagai pusat perlawanan dan tempat kelahiran organisasi kelaskaran, sebagaimana sudah dikenal misalnya Lipan Bajeng dan LAPRIS (Arfah, dkk, 1988: 20).

Pajonga daeng Ngalle tertangkap bersama pemimpin-pemimpin kelaskaran Lipan Bajeng, maka perlawanan bersenjata paling efektif dan bertahan di Sulawesi Selatan mengalami kelumpuhan. Sejak itu Padjonga daeng Ngalle meringkuk dalam penjara selama kurang lebih dua tahun, dan ia dibebaskan dari penjara berkenaan dengan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada 27 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Padjonga Daeng Ngalle bersama Makkaraeng Daeng Mandjarungi memprakarsai Konferensi Polombangkeng yang berlangsung pada 5-7 Februari 1950 (Amir, 2001: 38)

Demikian gambaran singkat riwayat hidup Karaeng Polombangkeng Pajonga Daeng Ngalle. Dengan dedikasinya dalam memimpin kelaskaran-kelaskaran dalam LAPRIS, dimana Pajonga Daeng Ngalle mempunyai kedudukan sebagai pelindung dalam organisasi kelaskaran-kelaskaran yang terhimpun dalam LAPRIS.

c. Robert Wolter Mongisidi

Salah satu anggota LAPRIS adalah Robert Wolter Mongisidi yang lahir pada 14 Februari 1925 di Desa Malalayang, tidak jauh dari Kota Manado. Robert Wolter Mongisidi merupakan anak ketiga dari keluarga Petrus Mongisidi dan ibunya bernama Linda Suawa. Putra-putri suami istri Petrus Mongisidi dan Lina Suawa ada 11 orang yaitu :

1. Vootje Evert Mongisidi (laki-laki)
2. Jan Albert Mongisidi (laki-laki)
3. Robert Wolter Mongisidi (laki-laki gugur sebagai pahlawan)
4. Opi Matelda Mongisidi (perempuan)
5. Ruth Mongisidi (perempuan-sudah meninggal)
6. Corry Mongisidi (perempuan)
7. Marry Mongisidi (perempuan)
8. Robby Mongisidi (laki-laki)
9. Johannes Mongisidi (laki-laki meninggal dalam usia 1 tahun)
10. Evert Mongisidi (laki-laki meninggal usia 30 tahun)
11. Seorang lagi laki-laki meninggal dalam usia 4 bulan (Sagimun, 1975: 10)

Di dalam lingkungan keluarganya dan teman-teman karibnya,

Robert Wolter Mongisidi sering hanya di panggil Bete saja. Diantara saudara-saudaranya, Wolter memperlihatkan banyak keistimewaan, dialah yang paling gagah dan tampan rupanya. Wolter termasuk anak yang cerdas dan tajam otaknya. Tapi Wolter juga anak yang paling nakal dan paling keras kepala di antara mereka bersaudara, sejak kecil Wolter sudah menampakkan bahwa ia seorang yang mempunyai kemauan keras (Sagimun, 1975: 11).

Sejak kecil Wolter sudah biasa hidup sederhana dan prihatin, ayah Wolter bukan seorang yang berada, Petrus Mongisidi hanya seorang petani biasa saja. Mula-mula Wolter masuk HIS (*Hollands Inlandsc School*) yakni sebuah sekolah dasar pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Setelah tamat, Wolter melanjutkan pelajarannya ke Mulo Frater (Roma Katolik) (Arfah, dkk, 1995: 59). Pada masa pendudukan Jepang pemuda Wolter masuk sekolah bahasa Jepang, kemudian Wolter masuk sekolah *Kapki* yakni sekolah yang mendidik calon pegawai dan guru bahasa Jepang. Wolter lulus dengan sangat baik, ia menonjol terutama dalam bahasa. Oleh karena itu meski masih sangat muda usianya diangkat menjadi guru bahasa Jepang, karena ingin sekali melanjutkan pelajarannya dan menambah ilmu pengetahuannya, maka Wolter meninggalkan Luwuk. Ia menuju ke Makassar (Ujung Pandang), di Makassar Wolter masuk ke CP Gakko, yakni sekolah lanjutan pertama pada zaman pendudukan Jepang (Sagimun, 1975: 14).

Malapetaka menimpa Wolter ketika ia berusia 26 tahun, ibunya meninggal pada 1945, pada waktu revolusi Indonesia mulai pecah. Wolter masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasional di Makassar yang merupakan sumber kader-kader muncul nama-nama seperti: A. Rivai Paerai, Moulwi saelan, Robert Wolter Mongisidi, Syamsul Marief, Laode Hadi, Siradjuddin Salam, dan lain-lain. Setelah dilakukan rapat dan kontak beberapa kali, maka akhirnya diputuskan untuk melakukan gerakan massa serentak beberapa kali, maka akhirnya diputuskan untuk melakukan gerakan massa serentak pada 28 Oktober 1945 dinihari. Tujuan gerakan adalah merebut Kota Makassar serta menguasainya, sasaran yang ingin direbut adalah: Stasiun Radio Maradekaya, Stasiun Radio Mattoangin, Hozo Ki Jokudi Pantai Losari, Tangsi Polisi di Jalan Gowa, Tangsi KIS, Hotel Empre, Conica (kantor gubernur sekarang) (Djarwadi, dkk, 1972: 7).

Serangan yang dilakukan serentak dan tiba-tiba di pagi buta di beberapa tempat, mula-mula memperoleh hasil gemilang seperti

di Stasiun Radio Maradekaya, Stasiun radio Mattoangin dan Nirom, kemudian berhasil direbut dan diduduki. Malah perwira NICA sempat digiring dan dilucuti senjatanya. Usaha untuk menaikkan Bendera Merah Putih di atas Gedung Conica menggantikan Merah putih Biru menemui kegagalan. Belum sempat para pemuda melakukan konsolidasi pada jam 10.00 pagi tentara Australia sebagai penanggung jawab keamanan, serentak bertindak melakukan penggrebrekan dan melucuti kembali senjata-senjata yang telah dirampas pemuda serta menawan beberapa puluh pemuda yang dianggap sebagai pemimpinnya. Sejak saat itu gerakan pemuda di Makassar beralih mencapai bentuk yang nyata yakni perjuangan bersenjata. Sementara gerakan 28 Oktober dinilai oleh group Ratulangi sebagai salah satu provokasi kekerasan yang dilancarkan oleh Yusuf Samah dan Kawan-kawan dan sejalan dengan taktik NICA untuk melibatkan Tentara Australia sebagai lawan bangsa Indonesia (Djarwadi, dkk, 1972: 8).

Dalam perlawanan terhadap tentara Belanda, pemuda Wolter mulai menunjukkan kecakapannya sebagai seorang guru yang mempunyai bakat pemimpin. Demikianlah berkat kecakapannya memimpin dan berkat keberaniannya, maka Wolter dipercayakan sebagai pimpinan operasi LAPRIS (Sagimun, 1975: 25).



Wolter Mongisidi

Ketika Robert Wolter Mongisidi dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dalam penjara, seluruh Kota Makassar menjadi gempar, khususnya di kalangan NICA. Oleh karena itu pemerintah Belanda mengerahkan

kekuatannya; serdadu KL/KNIL, Polisi NICA, pasukan Paccalaya dan mata-mata untuk mencari dan menangkap para pelarian itu, mereka mengumumkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap R.W. Mongisidi akan diberi hadiah sebanyak ± 400. Sehingga R.W. Mongisidi dkk semakin terjepit dan sukar untuk dapat meloloskan diri keluar kota. Akhirnya 26 Oktober 1948, R. W. Mongisidi dapat ditangkap kembali dan selanjutnya dimasukkan ke dalam penjara (Arfah, dkk, 1995: 67, Anonim 1982: 78).

Dalam perkembangan kemudian, setelah menghadapi beberapa kali pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan, akhirnya R.W. Mongisidi dijatuhi vonis hukuman mati pada 26 Maret 1949. Selanjutnya R.W. Mongisidi ditembak mati oleh regu penembak Belanda, bertempat di Tallo pada 5 September 1949, beberapa menit sebelum ditembak mati dengan tenang dia menulis "setia hingga terakhir di dalam keyakinan", ini semacam motto dalam hidupnya (Arfah, 1995: 67).

R. W. Mongisidi dengan beberapa kali keluar masuk penjara, pada akhirnya mendapat hukuman mati dari Belanda. Namun hingga akhir hayatnya tetap berada dalam satu keyakinan mempertahankan kemerdekaan, meskipun nyawanya yang dipersembahkan untuk negara.

d. Emmy Saelan

Dalam organisasi perjuangan LAPRIS ada seorang anggotanya yaitu Emmy Saelan mempunyai nama lengkap Suhartini Saelan, dilahirkan di Makassar pada 15 Oktober 1924. Emmy Saelan anak pertama dari tujuh orang bersaudara. Dari ketujuh bersaudara hanya Maulwi Saelan yang laki-laki, ayahnya bernama Saelan dan ibunya bernama Sukanti. Keluarganya dan teman-temannya di sekolah, baik di sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan memanggilnya dengan nama Emmy Saelan (Provinsi Sulawesi, 1953: 368).

Pendidikan dasar dimulai pada *Eerste Europese Lagere School* di Makassar, kemudian dilanjutkan ke *Hogere Burger School* (HBS) pada 1938. Ketika seluruh wilayah Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang, semua sekolah-sekolah yang ada baik yang didirikan oleh Hindia Belanda maupun yang diusahakan oleh pihak swasta dinyatakan tertutup. Namun Emmy Saelan tetap bergiat untuk dapat menambah ilmunya. Untuk itu ia berusaha agar dapat belajar di Pulau Jawa. Usaha inipun tidak berhasil, karena pihak Jepang melarang penduduk meninggalkan

tempat pada waktu itu. Keadaan itu menyebabkan Emmy Saelan tetap tinggal di Kota Makassar, ketika pihak Jepang membuka sekolah kembali. Emmy Saelan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan selama satu tahun, setelah itu ia meneruskan pendidikannya ke sekolah tabib dan bercita-cita untuk menjadi dokter anak. Namun usahanya tidak berhasil, karena ia tidak mendapat izin dari pemerintah Jepang untuk melanjutkan pendidikannya ke Pulau Jawa (Paeni, dkk, 1987: 6).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Emmy Saelan mengembangkan karirnya sebagai juru rawat. Oleh karena Belanda berusaha untuk kembali menanamkan pengaruh dan kekuasaan pemerintahannya khususnya di Sulawesi Selatan. Emmy Saelan kemudian diterima bekerja sebagai juru rawat di rumah sakit Stella Maris Makassar (Arfah, dkk, 1995: 71)

Ketika Emmy Saelan bekerja sebagai juru rawat di rumah sakit, ia mempergunakan kesempatan sehubungan dengan bidang pekerjaannya sebagai sarana keikutsertaannya dalam perjuangan. Hal ini dipandang sesuai dan memungkinkan, karena memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan oleh para pejuang. Ketika ditugaskan pada bidang konsultasi, ia banyak berhubungan dengan para pejuang yang ditawan oleh Belanda. Emmy Saelan memberikan perawatan dan pengobatan yang baik, bahkan memberikan obat-obatan yang diperlukan oleh para pejuang serta berusaha meloloskan mereka dari tahanan (Paeni, dkk, 1987: 9).



Emmy Saelan

Saat Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi bersama stafnya dan tokoh-tokoh nasional lainnya ditangkap, ditawan dan kemudian diasingkan oleh Belanda. Emmy Saelan tampil bersama beberapa teman kerjanya menyatakan protes terhadap tindakan Belanda itu dengan melakukan aksi pemogokan (Lahadji, 1967: 165).

Setelah Emmy Saelan menyadari bahwa kegiatannya itu telah diketahui oleh pengurus rumah sakit, maka dengan segera meninggalkan pekerjaannya dan pergi menggabungkan diri dengan pejuang-pejuang yang mengorganisasikan diri dalam kelaskaran Lipan Bajeng. Keikutsertaannya Emmy Saelan dalam kelaskaran Lipan Bajeng, dikarenakan adiknya yaitu Maulwi Saelan yang menjadi salah satu anggota kelaskaran Lipan Bajeng, dan selalu berhubungan dengan Emmy Saelan ketika masih aktif bekerja di rumah sakit Stella Maris (Lahadji, 1967: 167).

Ketika Emmy Saelan datang melaporkan diri untuk ikut berjuang melalui wadah kelaskaran Lipan Bajeng, ia diterima dengan senang hati oleh pihak pengurus organisasi kelaskaran itu. Emmy Saelan diangkat sebagai pembantu adiknya Maulwi Saelan kegiatan kepalang merahan kelaskaran Lipan Bajeng, Perawatan diberikan kepada pejuang-pejuang yang luka-luka dalam pertempuran. Kegiatan, semangat dan ambisinya untuk dapat membinasakan pihak Belanda yang ingin kembali menanamkan pengaruh dan kekuasaan pemerintahannya di Sulawesi Selatan, menyebabkan ia semakin mendapat kepercayaan dari pengurus kelaskaran (Said, 1984 : 89; Paeni, dkk, 1987: 10).

Keterlibatan itulah yang mendasari ketika LAPRIS dibentuk secara resmi pada Juli 1946, Emmy Saelan dipilih secara aklamasi untuk menjadi kepala bagian palang merah LAPRIS. Pada saat terbentuknya LAPRIS Emmy Saelan tampil berbicara dengan teriakan merdeka dan berkata aku datang ke sini untuk menyerahkan tenagaku bagi tanah air (Arfah, dkk, 1995: 73).

Semangat itu ditampakkan ketika gabungan pasukan pejuang memasuki Batua 23 Januari 1947, mereka dihadang oleh pasukan Polisi Militer Belanda. Oleh karena pertemuan yang mendadak itu mendorong R. W. Mongisidi tampil dengan segera, dan melepaskan dengan menggunakan Owen Gun sembilan kali, sehingga pasukan Belanda itu melarikan diri. Ketika pasukan pejuang telah menyeberangi Sungai Jeneberang dan beristirahat sebentar di dekat Kampung Bontoramba tiba-tiba datang pasukan Belanda, akibatnya terjadi pertempuran sengit

antara pasukan Belanda dan para pejuang. Emmy Saelan dan beberapa anggota lainnya juga dengan segera mengambil posisi, sementara Emmy Saelan dan kawan-kawan mengatur posisi, tempat mereka telah dikepung oleh Belanda, sehingga perlawanan mereka tidak berarti. Emmy Saelan yang pada waktu itu menderita sakit vermiform-appendix tidak sempat lagi menghindarkan diri, Emmy tampil dengan gigih melancarkan perlawanan, namun musuh semakin dekat dan posisinya telah terkepung. Dalam keadaan seperti itu, dengan tenang bersembunyi sambil menanti pasukan musuh mendekat. Dengan segera Emmy melemparkan granat tangan sebelum tembakan musuh mengenainya, granat meledak tepat di tengah-tengah pasukan musuh yang mendekat. Namun Emmy terjatuh ketika kena ledakan granatnya sendiri bersama musuh yang mendekatnya. Menurut catatan Emmy Saelan gugur, sementara dari pihak musuh meninggal dunia sebanyak delapan orang (Paeni, dkk, 1987: 89; Lahadji, 1967: 167).

Emmy Saelan dapat dikatakan sebagai seorang pahlawan, pengabdianya kepada negara tidak diragukan lagi. Demikian juga dengan pengorbanannya yang rela mengorbankan segalanya, termasuk jiwa dan raga demi kemerdekaan, dia adalah Srikandi Republik Indonesia.

dan berurus kelaskaran (Said, 1987 : 89; Paeni, dkk, 1987: 10).

Ketertarikan Emmy Saelan terhadap LARIS dibantu secara resmi pada Juli 1947. Emmy Saelan dipilih secara sukarela untuk menjadi kepala bagian belah LARIS. Pada saat terbentuknya LARIS Emmy Saelan tampil berbicara dengan tegas dan berkesan. Dia datang ke sini untuk menyerahkan tugasnya bagi tanah air (Artah, dkk, 1987: 23).

Sebelum itu dia telah dikenal ketika dia dan pasukan belah masuk ke Batas 13 Januari 1947, mereka dibantu oleh pasukan Polisi Militer Belanda. Oleh karena perlawanan yang mereka lakukan mendorong R. W. Monggidi tampil dengan segera dan melepaskan dengan menggunakan Owen dan sembilan kali, sehingga pasukan Belanda itu melarikan diri. Ketika pasukan belah itu menyerang kembali, mereka datang dan bersembunyi di dalam kampung Bontomada. Dia adalah pasukan Belanda, skiptanya terjadi perlawanan sengit.

III PERJUANGAN LAPRIS MASA KEMERDEKAAN

LAPRIS dalam Menentang Belanda

Seperti diketahui bahwa kelaskaran yang ada, tidak menyenangi atas kedatangan NICA yang menyertai pasukan Sekutu, Belanda kembali memperlihatkan aksinya. Oleh sebab itu, beberapa kelaskaran yang tergabung dalam LAPRIS berjuang mati-matian melawan Belanda. LAPRIS harus menyelenggarakan rapat pada 16 September 1946, untuk membentuk markas besar. Pembicaraan itu kemudian dilanjutkan pada rapat kedua pada 27 September 1946 di Polombangkeng. Hasil pertemuan itu adalah membentuk markas besar LAPRIS yang bertugas untuk mengorganisasikan aksi perjuangan dan perlawanan terhadap NICA. Yang terpilih sebagai anggota markas besar adalah: Ranggong Daeng Romo, R. W. Mongisidi (Lipan Bajeng), Aminuddin Muchlis Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI), Suratman dan Ongge Angkatan Laskar Rakyat (ALR) (Kadir, 1984: 165).

Pembentukan markas besar ini, juga terdorong oleh kenyataan yang menuntut untuk lebih memperkuat kekuatan dan penataan kekuatan dalam menghadapi pasukan NICA. Tidak terelakkan bahwa dalam rangka menata kepengurusan LAPRIS, pihak NICA telah berusaha untuk menghancurkannya, serangan mendadak ke markas Rannaya yang dilancarkan pada tanggal 8 Agustus 1946, sempat membinasakan dan menewaskan sejumlah pasukan LAPRIS (sekitar 20 orang). Walaupun demikian, kedudukan pusat pasukan dapat dipertahankan di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo dan kemudian demi strategi pertahanan dipindahkan ke gunung Bungung Masigi (Kadir, dkk, 1984: 165).

Latihan militer yang diselenggarakan untuk mendidik dan menggembleng pasukan LAPRIS di manjailing, Komara makin meningkatkan strategi dan kemampuan tempur laskar LAPRIS, sehingga serangan rakyat terhadap NICA pun makin gencar. Pada rapat komando pasukan dan pasukan bawah tanah bergerak serentak dalam rencana penyerangan terhadap kedudukan musuh, melakukan sabotase, dan melumpuhkan ruang gerak musuh (Poelinggomang, dkk, 2005: 193).

Sebagai imbalan, maka pada 15 Agustus 1946 serangan balasan terhadap NICA dilancarkan terus-menerus, sampai 31 Agustus 1946. Menurut laporan serangan-serangan itu dilakukan antara lain terhadap: tangsi militer di Mariso, pihak NICA kehilangan 100 orang tentara, dan beberapa senjata mereka berhasil dirampas oleh pasukan LAPRIS, juga 50 orang tentara NICA mengalami luka-luka, tangsi polisi (4 orang polisi tewas), pertahanan militer dekat Labuang Baji (hasilnya tidak diketahui). Menggranati dua buah kubu tentara NICA di Ujung Tanah (kerugian dipihak NICA 25 orang mati, 10 luka berat, 10 orang luka ringan), kemudian mencoba membakar markas MMD dan MTD tetapi belum berhasil. Aksi penghadangan berhasil menggranati 3 buah mobil Jeep di Jalan Maros 14 orang meninggal, 5 orang luka berat, dan 3 orang luka ringan. Aksi yang sama terhadap 2 Jeep dibagian utara Kampung Baru (8 orang meninggal, 4 orang luka berat dan 2 luka ringan), dan lain-lain. Selain itu juga dilancarkan aksi-aksi pembakaran gudang-gudang pihak Belanda dan rumah-rumah orang yang bekerja sama dengan NICA, serta bangsal yang diperuntukkan bagi kelompok yang dilindungi oleh NICA. Jika diikuti laporan ini tampak tidak sedikit kerugian yang diderita oleh pihak NICA, baik perlengkapan kekuatan militernya, maupun perbekalan lainnya (Poelinggomang, dkk, 2004: 192-193).

» Dalam September 1946, serangan-serangan dari serdadu NICA terhadap pasukan LAPRIS tidak terlalu berarti, di lain pihak pasukan LAPRIS mempergunakan kesempatan tersebut untuk menangkap mata-mata yang sengaja disebarkan oleh musuh disekitar kantong-kantong para pejuang. Hanya sekali mendapat serangan dari musuh, yaitu pada 7 September 1946 di Barombong, Bontonompo. Rombongan pimpinan LAPRIS Makkaraeng Daeng Manjarungi yang dikawal oleh 12 orang pasukan khusus Lipan Bajeng dalam perjalanan tugas ke Makassar, tiba-tiba mereka bertemu dengan patroli musuh, sehingga kontak senjata tidak dapat dihindari dan pertempuran berakhir tanpa ada korban jiwa. Pada 15 September 1946, dengan kekuatan 10 orang di bawah pimpinan mappa, dan Barakati menyerang musuh di Manongkoki, Polombangkeng. Dalam penyerangan tersebut seorang musuh meninggal, dua hari berikutnya pada 17 September 1946 dengan kekuatan sekitar 100 orang di bawah pimpinan Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo dan Makkaraeng Daeng Manjarungi menyerang musuh di Parasangan Beru. Dari pihak LAPRIS 2 orang gugur, dan 8 orang ditawan oleh Belanda, sementara di pihak Belanda hanya seorang yang meninggal (Mandjarungi, 1958: 7, Amin, 1971: 23).

» Panglima LAPRIS Ranggong Dg. Romo pada 1 Oktober 1946 memimpin rapat LAPRIS di Bungung Masigi, salah satu hasil keputusan rapat adalah mengadakan latihan militer selama 1 bulan. Rapat yang akan di mulai 4 Oktober 1946 sampai dengan pada 4 Nopember 1946, untuk melaksanakan hasil keputusan ini, maka pada 4 Oktober 1946 dimulai penyelenggaraan latihan-latihan militer di Manjalling, Komara. Rapat ini diikuti oleh sekitar 1000 orang pemuda-pemuda dari LAPRIS, dipimpin langsung oleh Panglima LAPRIS Ranggong Dg. Romo yang dibantu oleh 10 orang, di antaranya Muh. Djalal Daeng Leo Parenrengi Daeng Muang, Mappasomba alias Abdul Chalik Daeng Nyau, Arfah Ibrahim Daeng Tule, dan lain-lain (Mandjarungi, 1958: 3).

» Berkat latihan militer tersebut, membawa angin segar dalam serangan-serangan dan perlawanan terhadap pihak musuh semakin gencar. Di samping itu, strategi penyerangan pasukan LAPRIS semakin teratur, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan perjuangannya (Arfah, dkk, 1991: 107).

Diselenggarakan rapat komando LAPRIS pada 2-4 November 1946 bertempat di Bungung Masigi, yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo. Hasil keputusan rapat tersebut adalah mengeluarkan instruksi

kepada para komando pasukan dan pasukan bawahan untuk bergerak serentak mengadakan penyerangan-penyerangan terhadap daerah pendudukan musuh, mengadakan sabotase-sabotase, melumpuhkan ruang gerak lalu lintas musuh (Amin, 1971: 22). Kota Takalar dijadikan sebagai sasaran penyerangan, karena sejak Juli 1946, kekuatan musuh di kota itu semakin kokoh, yang sengaja diperkuat agar bisa mengimbangi kekuatan para pejuang di Polombangkeng. Setelah para pemuda-pemuda selesai diberikan latihan militer, Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo memberikan kepercayaan kepada R.W. Mongisidi untuk memimpin penyerangan, karena beliau telah berpengalaman melakukan gerakan-gerakan yang mengejutkan pihak musuh dalam Kota Makassar. Hari penyerangan ditetapkan pada 7 November 1946, beberapa rakyat biasa yang selama ini sering membantu para pejuang minta diperkenankan ikut serta dalam penyerangan ini (Mandjarungi, 1958: 8; Pawiloy, 1987: 24).

Serangan yang terus menerus dilakukan oleh pihak pasukan kelaskaran yang dikoordinasikan lewat LAPRIS, menyebabkan Belanda senantiasa terdesak dalam usahanya untuk memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan Belanda di daerah ini. Tidak jarang terjadi bahwa pihak pasukan Belanda melancarkan serangan terhadap kelaskaran rakyat, tetapi semuanya dapat dihadapi dengan gigih dan penuh semangat. Akhirnya dengan sisa-sisa kekuatan yang ada sambil menanti pasukan bantuan yang telah diminta, pihak Belanda melancarkan aksi militer secara serempak di daerah-daerah pada 20 Nopember 1946. Aksi itu tidak dibiarkan berlalu oleh pasukan rakyat. Pertempuran demi pertempuran terjadi di mana-mana, sehingga kedudukan tentara Belanda semakin menurun (Kadir, dkk, 1984: 166-167).

Kemudian pada 21 Januari 1947 R. W. Mongisidi bersama Lettu A. R. Makmur dan sepasukan tentara LAPRIS (berjumlah 85 orang) yang dipimpin oleh Bapak Jawa dan Mono melancarkan serangan terhadap kedudukan pasukan Belanda. Pada 23 Januari 1947 terjadi pertempuran di Batua dengan tentara Belanda, hal ini mengakibatkan lokasi pasukan LAPRIS mulai dikepung tentara Belanda. Pertempuran mulai berkobar dari jam 14.00 hingga malam hari, Oleh karena pasukannya semakin terkepung, maka diperintahkan untuk memecah pasukan. Sebagian diperintahkan untuk kembali ke Polombangkeng, ke arah Gowa dan sebagian tetap di tempat, pada kesempatan ini turut pula Mongisidi, A. Majid dan Bung Husen. Untuk meloloskan pengunduran pasukan

ini, Mongisidi tampil ke depan untuk menghadapi serbuan tentara Belanda, sementara pimpinan pasukan yang bertahan diserahkan kepada A. Majid. Setelah itu berusaha memasuki Makassar dan sempat menjumpai Yuritman dan A. Majid yang menceritakan bahwa semua teman-teman telah tewas terperangkap pasukan Belanda. Sejak waktu itu ia mengembara di Makassar sambil melancarkan aksi-aksi sabotase hingga ia tertangkap pada akhir Pebruari 1947 (Kadir, dkk, 1984: 168).

Di pihak lain, pasukan Belanda melancarkan serangan ke markas LAPRIS di Langkese pada Pebruari 1947, pasukan Belanda berhasil mengobrak abrik kedudukan pasukan LAPRIS yang berada di bawah pimpinan langsung Ranggong Dg. Romo. Pada pertempuran ini, Ranggong Daeng Romo gugur dalam perlawanan mati-matian untuk mempertahankan daerahnya dari serangan pasukan Belanda. Kematian Ranggong Daeng Romo berakibat besar pula terhadap kedudukan pasukan LAPRIS, keadaan ini semakin menimbulkan kekhawatiran dalam keorganisasian perlawanan karena tokoh lain yang didambakan R. W. Mongisidi juga telah tertangkap. Tokoh penggerak yang diandalkan yang masih bertahan adalah Karaeng Polombangkeng Makkaraeng Daeng Mandjarungi. Setelah Ranggong Daeng Romo gugur digantikan oleh Mappa Daeng Temba, dan Makkatang Daeng Sibali sebagai wakil ketua (Mappa Dg. Temba, 14 Januari 2000).

Pada bulan Januari 1948, berdasarkan berita tentang dicapainya Perjanjian Linggarjati dan kelak akan dilakukan perundingan Renville, maka Makkaraeng Daeng Mandjarungi mengadakan pertemuan dengan staf pemerintahan. Dari hasil pertemuan ini dicapai kesepakatan untuk mengirim utusan kepada pihak Belanda guna membicarakan batas wilayah kekuasaan pihak Belanda di Makassar dan batas wilayah Republik Indonesia di Polombangkeng seperti halnya yang dilakukan di Jawa. Pada 6 Januari 1948 diutus satu delegasi untuk membicarakan rencana itu dengan pimpinan Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL) dan Netherlands East Indies Forces Intelligence Service (NEFIS) di Makassar, rencana itu dinyatakan diterima. Akhirnya pada 8 Pebruari 1948, Makkaraeng Daeng Mandjarungi berangkat bersama dua orang pimpinan Lipan Bajeng ke Makassar untuk membicarakan rancangan penentuan batas wilayah kekuasaan. Ternyata kedatangan mereka itu disambut dengan penangkapan kemudian langsung dijemput ke dalam penjara. Sesungguhnya sejak dicapainya Persetujuan Linggarjati 23 Maret 1947, yang menetapkan wilayah ke fakto Republik Indonesia, Belanda telah mendapatkan akses untuk mematahkan semangat

perlawanan di Sulawesi Selatan. Untuk lebih menguatkan rencana terwujudnya negara federasi Van Mook bersama para pendukung menyelenggarakan Konferensi Denpasar dan berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) (Kadir, dkk, 1984: 168-169).

Walaupun demikian, pada dasarnya perjuangan dalam diri rakyat masih tertanam dan tidak pudar. Gambaran menyangkut perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi Selatan tampak jelas bahwa tekad juang mereka bukan hanya ditujukan untuk menggagalkan dan membinasakan usaha Belanda, melainkan juga ditujukan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan.

LAPRIS Dalam Membantu TRIPS

Terbentuknya Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS), adalah atas berkat jalinan kerjasama antara utusan-utusan yang dikirim oleh pihak pejuang kemerdekaan dan kesatuan bangsa di Sulawesi Selatan dan wadah perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan yang berada di Jawa serta dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Ekspedisi TRIPS yang pertama dikirim 23 Mei 1946, di bawah pimpinan A.M. Yusuf Amir dengan anggotanya sebanyak 62 orang diantaranya adalah Muhammadong dan Husain Ibrahim. Pasukan ekspedisi ini berhasil ditangkap oleh armada Belanda di perairan Bali. Pasukan ekspedisi ini selanjutnya dibawa ke Surabaya dan dipenjarakan di penjara Kalisosok dan baru dibebaskan setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada 1948 (Kadir, dkk, 1984: 174).

Adapun tugas-tugas TRIPS adalah: Melakukan persiapan pembentukan kader dan pasukan yang akan diinfiltrasikan ke Sulawesi, membentuk TRI (Tentara Republik Indonesia) di Sulawesi dengan kekuatan satu Divisi, menyampaikan laporan tentang hasil tugas tersebut kepada Panglima besar, kegiatan utamanya adalah melatih tenaga-tenaga yang bersedia dikirim ke Sulawesi untuk membantu perjuangan melawan NICA (Bahtiar, 2014: 80).

Di lain pihak dari Sulawesi juga senantiasa diusahakan untuk mengirimkan pemuda-pemuda ke Jawa untuk mendapat latihan militer sebagai bekal untuk kembali ke Sulawesi, maksudnya untuk membina kelaskaran yang ada agar lebih terkordinir dan dapat melaksanakan tugas kemiliteran dengan baik. Ada dua kelompok yang berbeda dalam tubuh TRIPS, kelompok pertama, merupakan inti terbentuknya TRIPS pada hakekatnya adalah Batalyon Kemajuan Indonesia (BKI) nya

Kahar Muzakkar, yaitu terdiri dari narapidana yang dibebaskan dari Nusakambangan. Beberapa di antaranya adalah bekas tahanan politik, tetapi beberapa lagi adalah bandit dan penjahat biasa pencopet, pencuri, pembunuh. Sedang kelompok kedua terdiri dari pelajar, atau pemuda seperti Saleh Lahade dan Andi Mattalatta yang umumnya berpendidikan baik (Harvey, 1989: 144; Bahtiar, 2014: 81).

Tidak lama setelah pengiriman utusan pemuda pejuang ke Jawa, tiba di Suppa satu pasukan ekspedisi dari Jawa yang dipimpin oleh Sahid Hasan bin Tahir dan Latif pada Juni 1946. Ekspedisi ini tercatat sebagai ekspedisi kedua yang dikirim oleh TRIPS, pengiriman organisasi ini turut diorganisasikan oleh Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS). Kemudian kedudukan ekspedisi ini di samping sebagai bantuan dari TRIPS, juga mendapat tugas untuk mengembangkan dan mendirikan organisasi baru cabang dari KRIS. Kehadiran ekspedisi TRIPS kedua ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh organisasi kelaskaran BPRI Suppa, untuk menjadi pelatih anggota kelaskaran. Di Suppa pasukan ekspedisi ini juga menjalin kerjasama dengan pimpinan BP Ganggawa A. Cammi, ketika ia dan sebagian anggotanya datang ke Suppa. Pada 1946 TRIPS berhasil mengirim 12 kali pasukan ekspedisi ke Sulawesi Selatan, untuk membantu perjuangan rakyat di Sulawesi Selatan. Di antara 12 kelompok itu hanya 8 orang yang berhasil mendarat di Sulawesi Selatan dengan baik dan melaksanakan tugas (Kadir, dkk, 1984: 175-176).

Salah satu kelompok pasukan itu yang menjalin kerjasama dengan LAPRIS, adalah ekspedisi TRIPS yang dipimpin oleh Letnan Makmur Sitaka. Panglima LAPRIS Ranggong Dg. Romo kemudian memberi tugas kepada Mongisidi untuk menjemput pasukan TRIPS yang waktu itu ada di Jeneponto. Setiba di sana, diketahui bahwa pasukan TRIPS yang berada di bawah pimpinan Letnan Makmur Sitaka telah bergabung dengan pasukan patroli LAPRIS. Tujuannya untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda di Jeneponto pada 2 Januari 1947. Dalam pertempuran itu tentara Belanda dibinasakan kemudian beberapa peralatannya dirampas, sedang dalam sumber lain disebutkan bahwa 5 Januari 1947. Gabungan pasukan LAPRIS-TRIPS di pimpin oleh Mappa Dg. Temba dan pasukan TRIPS di pimpin oleh Letnan Makmur dengan kekuatan sekitar 100 orang menyerang musuh di Bangkala, Buluriring. Dalam peristiwa tersebut pihak pejuang tidak ada korban, sedang pihak Belanda 5 orang yang mengalami luka-luka (Arfah, dkk, 1991: 116).

LAPRIS dibentuk oleh adanya kesepakatan di antara pemimpin laskar

tanpa adanya instruksi militer. Pembentukan LAPRIS di dasarkan oleh adanya kesadaran untuk mempersatukan organisasi kelaskaran sebagai alat perlawanan rakyat dalam menghadapi Belanda. Sebaliknya TRI Divisi Sulawesi Selatan tidak hanya dibentuk atas prakarsa pemimpin-pemimpin laskar yang hadir pada saat itu, melainkan juga dilakukan karena adanya surat perintah penugasan dari Markas Besar Tentara (MBT), yakni Panglima Besar Jenderal Sudirman (Bahtiar, 2014: 114).

Dengan demikian, sebelum diadakan konferensi pembentukan TRI DIVISI Hasanuddin di Paccekke telah terjalin hubungan kerjasama antara LAPRIS dengan TRIPS. Akan tetapi jalinan kerjasama itu tidak dapat merealisasikan hasil pertemuan tersebut, karena selain tidak dapat menyelenggarakan rapat markas daerah yang telah direncanakan secepatnya disebabkan karena situasinya tidak memungkinkan. Tetapi juga karena sebagian pasukan Letnan Makmur yang sedianya akan menyampaikan hasil pertemuan ke pemerintah. Gugur dalam pertempuran ketika gabungan pasukan TRIPS dan LAPRIS menyerang Kota Makassar (Arfah, dkk, 1991: 118).

Setelah pertemuan antara pasukan TRIPS dan LAPRIS tersebut di atas, maka pimpinan LAPRIS menganggap perlu segera melangsungkan rapat komando untuk menetapkan taktik dan strategi dalam menghadapi aksi serdadu Belanda. Khususnya Westerling yang tampak semakin mengganas di wilayah kegiatan LAPRIS. Dalam rapat itu, hadir Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo, Makkaraeng Daeng Mandjarungi, R.W. Mongisidi Letnan A.R. Makmur, Letnan A. Bachri, Win. M. Chatip Lasiny, Muh. Amin Daeng Nai, dan Muh. Saleh Daeng Palallo. Selesai panglima LAPRIS memberikan pengarahan, R.W. Mongisidi berbicara dan mengusulkan agar pasukan LAPRIS mengadakan penyerangan ke Kota Makassar dan sekitarnya sebagai pertimbangan terhadap aksi Westerling (Arfah, 1991: 119).

Dengan perhitungan bahwa pasukan Westerling telah bergerak ke pedalaman, maka sangat tepat usul tersebut, akan tetapi usul ini tidak didukung oleh wakil dari Lipan Bajeng, dan Laptur mengusulkan agar operasi LAPRIS sekitar bagian selatan Sungai Jeneberang. Akhirnya terjadi perdebatan karena masing-masing mempertahankan pendapatannya, akan tetapi usul R. W. Mongisidi diterima setelah melalui pemungutan suara.

Komando pimpinan LAPRIS memutuskan untuk menyerang Kota Makassar dan sekitarnya. Panglima LAPRIS Ranggong Dg. Romo

memperkirakan pimpinan operasi gabungan pasukan LAPRIS dan TRIPS kepada R.W. Mongisidi dan Letnan A.R. Makmur, di samping itu juga diputuskan untuk menyerang Bantaeng dan Bulukumba. Pimpinan operasi dipercayakan kepada Letnan Bachri dan Moh. Chatib Lasiny (Sibali, dkk, 1998: 88).

Di markas LAPRIS, setelah rapat komando pimpinan LAPRIS senantiasa mempersiapkan suatu operasi di sekitar Kota Makassar, di samping dimaksudkan sebagai suatu pertimbangan terhadap operasi Westerling, juga dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian serdadu Belanda agar Konferensi Paccekke dapat berjalan dengan mulus. Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo memperkirakan pimpinan operasi gabungan pasukan LAPRIS dan TRIPS kepada R. W. Mongisidi. Bersama Wolter, Letnan Makmur serta pasukan tentara LAPRIS dengan kekuatan sekitar 85 orang di bawah pimpinan Bapak Mono dan Ranggong Daeng Romo menyarankan kepada mereka agar mendahulukan perhitungan yang cermat dalam melancarkan serangan terhadap musuh. Jangan terbawa semangat muda sebelum pasukan gabungan diberangkatkan agar terlebih dahulu mengirim mata-mata ke Makassar, serta jalur perjalanan yang aman bagi pasukan, agar pasukan dapat lebih cermat memperhitungkan serangan (Arfah, dkk, 1991: 122).

Pada 20 Januari 1947, iring-iringan pasukan gabungan LAPRIS dan TRIPS dengan membawa hampir semua persenjataan LAPRIS berangkat menuju Makassar. Dalam perjalanan mereka berpapasan dengan Sangkala Tinggi, kemudian melaporkan tugas yang diembannya yaitu bahwa Emmy Saelan belum berhasil menyusup ke dalam Kota Makassar. Mendengar laporan itu, tak akan merubah kebulatan tekad mereka, dalam jiwa mereka telah tertanam semangat perjuangan, merdeka atau mati dan sekali merdeka tetap merdeka. Gabungan pasukan LAPRIS dan TRIPS tetap melanjutkan perjalanan untuk menyerang musuh di Makassar. Namun pasukan gabungan tersebut telah sampai di pinggiran kota, dan telah diketahui oleh musuh, sehingga kontak senjata tidak dapat dihindari lagi (Arfah, dkk, 1991: 123).

Dari hasil interogasi tertulis R. W. Mongisidi: kira-kira pada 21 Januari 1947, maka kurang lebih 85 orang pergi ke Makassar, patroli ini dipimpin oleh Bapak Jawa dan Mono. Wolter dan Letnan Ma'mur hanya melihat saja, 23 Januari 1947 terjadi pertempuran di MP Makassar di dekat Bitoa, namun sebelumnya pada 21 Januari 1947 pasukan LAPRIS menyerang musuh di Bantaeng/Bulukumba. Penyerangan itu dipimpin

oleh Moh. Chalib dan Backri (Letnan TRIPS) dengan mengerahkan kekuatan sekitar 50 orang. Dalam peristiwa ini pihak LAPRIS 20 orang gugur, sedang pihak musuh 10 orang meninggal dan luka-luka tidak pasti diketahui. Serangan-serangan dari pasukan LAPRIS dan TRIPS, merupakan jawaban terhadap pemerintah Belanda yang sedang giat-giatnya melakukan aksi anti kekacauan dimotori oleh Westerling yang tidak hanya ditujukan kepada para pejuang. Tetapi juga lebih banyak terhadap rakyat jelata, di mata mereka LAPRIS selama ini selalu berusaha mengorganisir para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, di mana merupakan penghalang utama bagi keinginannya untuk kembali berkuasa di daerah ini (Arfah, dkk, 1991: 129-130).

Usaha-usaha untuk menggagalkan Konferensi Malino yang diprakarsai oleh Van Mook dari pihak kelaskaran terutama kesatuan yang dipimpin oleh Robert Wolter Mongisidi, Raden Endang, dan lain-lain terus dilakukan, sehingga terpaksa Konferensi Malino diteruskan di Denpasar yang menghasilkan Negara Indonesia Timur (NIT). Pasukan-pasukan Ekspedisi TRIPS, ALRIPS, PARA dari Jawa secara berturut-turut melakukan pendaratan sepanjang pesisir pantai afdeling Bonthain sampai afdelin Mandar, sehingga tidak megherankan apabila pihak Belanda terhadap keempat daerah afdeling Makassar, ParePare, Mandar, dan Bonthain dinyatakan dalam keadaan perang (Staat van Orlg) (Said, 1982: 30).

Kehadiran pasukan dari TRIPS dalam bentuk ekspedisi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) divisi VI ke Sulawesi Selatan tidak berhasil megkoordinasikan kesatuan gerak militer dalam suatu komando untuk menghadapi Belanda. Namun perjuangan mereka belum berhasil sebagaimana yang diharapkan disebabkan karena Belanda telah memperkuat kedudukan militernya dengan mendatangkan pasukan bantuan Divisi 7 Desember pada 1 Desember 1946 yang kemudian disusul lagi dengan Detaschement Special Troepen (DST) 5 Desember 1946. Walaupun usaha Belanda berhasil mngacaukan perlawanan rakyat dan mematahkan semangat perjuangan mereka. Tetapi tidak sedikit pertempuran yang dapat dicatat sejak kehadiran TRIPS dan ALRI-PS sebagai wujud sikap perjuangan mereka (Bahtiar, 2014: 102-103).

LAPRIS dalam Perjuangan Politik

Penangkapan tokoh-tokoh PKRS dan pembubaran wadah perjuangan merupakan suatu taktik dan strategi politik yang digunakan untuk melapangkan jalan bagi terselenggaranya rencana Konferensi

Malino. Konferensi itu dimaksudkan untuk membicarakan konsep negara federal, yang jadwalnya dilakukan sehari sesudah penyerahan tanggung jawab pemerintahan dari Sekutu kepada pihak pemerintah Belanda, yakni 15 Juli 1946. Tindakan ini ternyata tidak melumpuhkan perjuangan rakyat, kegiatan PKRS ternyata diambil alih oleh Tajuddin Nur lewat PNI yang didirikan atas anjuran Ratulangi. Walaupun tidak mampu mengimbangi keberhasilan NICA, namun menarik tokoh-tokoh penting karena kebanyakan mereka telah diamankan oleh NICA lewat jalinan kerja sama atau ditawan, maka taktik yang dilakukan oleh PNI adalah lewat keanggotaan langsung dari rakyat serta mendukung dan mendorong lewat organisasi kelaskaran yang ada. Tampilnya kelaskaran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, merupakan tantangan yang hebat bagi program federal yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda (Kadir, dkk, 1984: 186).

Penangkapan, penahanan, dan pengasingan yang dilakukan oleh NICA terhadap tokoh-tokoh nasional dan pembubaran organisasi PKRS merupakan taktik politik NICA memutuskan rencana konferensi yang akan diselenggarakan di Malin untuk mempersiapkan konsep pembentukan negara federal di Indonesia. Di samping itu, penahanan dan pengasingan yang dilakukan oleh NICA (Belanda) mengandalkan kekuasaannya pada kekuatan militer (Poelinggomang, dkk, 2004: 186).

Tokoh-tokoh nasionalis yang ditawan, menjalani pemeriksaan yang dilakukan sesuai menurut selera pemerintah kolonial Belanda. Penahanan ini sebagai salah satu cara untuk memudahkan konferensi yang diadakan di Malino, di dalam rangka mempersiapkan konsep pembentukan negara federal bagi wilayah bekas jajahan Belanda.

Namun sejak permulaan tahun 1946, kedudukan NICA semakin terdesak, karena keberhasilan dicapai oleh Dr. Ratulangi lewat PKRS, yang dijadikan sebagai wadah pemerintahan. Walaupun demikian hal ini tidak dapat berlangsung terus, karena pada 1 Februari 1946 kedudukan tentara Australia digantikan oleh tentara Inggris yang berpihak pada Belanda. Pertemuan pada 30 Desember 1945 dihadiri oleh wakil-wakil dari BPKR, PKR daerah-daerah, raja-raja, karaeng-karaeng, datu-datu, kepala distrik, berhasil mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk membagi wilayah Sulawesi Selatan atas Kota Makassar dibawah pemerintahan Belanda serta daerah pedalaman dibawah pemerintahan badan pemerintah bumiputra. Sementara menunggu nasib Indonesia ditentukan dan ditetapkan, nampak memberi keuntungan bagi

PKRS. Keberhasilan diplomasi tersebut didukung oleh berbagai pihak pemerintah bumiputra dan rakyat Sulawesi Selatan dengan gembira dan senang hati menerima proklamasi kemerdekaan dan mendukung sepenuhnya (Kadir, dkk, 1984: 188; Poelinggomang, dkk, 2004: 187).

Kontrolir Gowa Poll, memandang bahwa periode antara Januari hingga Mei 1946 merupakan *reactietijd* (masa reaksi), berbagai usaha mulai dilakukan oleh pihak NICA untuk dapat menampakkan kekuasaannya. Terlebih setelah mendapat kesempatan yang lebih baik dan memungkinkan dengan kehadiran pasukan Inggris. Walaupun demikian tokoh-tokoh pejuang tetap berusaha mematahkan taktik licik NICA. Dengan demikian partai yang berkedok kemerdekaan, seperti PARKI (pada mulanya dengan nama PKI) diimbangi oleh pihak PKRS dengan lebih menggiatkan PNI. Untuk itu jabatan ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) diserahkan kepada Lanto Daeng Pasewang dan Tajuddin Nur diberikan tugas untuk menggiatkan dan mengembangkan PNI. NICA berusaha mempengaruhi pimpinan pemerintahan lokal agar menjalankan dan penarikan pajak. Tetapi segera ditanggapi oleh KNI, dengan mengirimkan maklumat penolakan terhadap NICA atas anjurannya kepada berbagai pihak yang dipandang kompeten untuk hal itu (Kadir, dkk, 1984: 188-189).

Keberhasilan yang dicapai oleh PKRS di bidang diplomasi, dipandang oleh NICA sebagai ancaman yang berat dan pasti akan menghancurkan tujuan yang telah dicanangkan untuk menghidupkan kembali kekuasaan dan pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Untuk melapangkan jalan bagi pencapaian tujuan, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah menghancurkan PKRS. Itulah sebabnya pada 5 April 1946, pasukan NICA dikerahkan untuk menangkap tokoh-tokoh PKRS, yang sementara mempersiapkan diri untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan lokal dan tokoh-tokoh masyarakat, yang direncanakan akan diselenggarakan pada 6 April 1946. Tokoh-tokoh PKRS misalnya Dr. Ratulangi (Ketua PKRS, mewakili pemerintah RI), Lanto Daeng Pasewang dan beberapa anggota lainnya ditangkap dan ditawan. Selain tokoh-tokoh PKRS, tokoh-tokoh dari Komite Nasional Indonesia (KNI) juga ditangkap oleh NICA. Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa NICA memiliki kewenangan dan kekuasaan yang juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara tokoh-tokoh nasional dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan lokal, golongan bangsawan, serta pemuka masyarakat yang berdatangan ke Makassar memenuhi undangan PKRS untuk melakukan pertemuan

(Kadir, dkk, 1984: 189).

Hingga pada Nopember 1946, pemerintahan militer Belanda tidak mampu menguasai keadaan di Sulawesi Selatan, perlawanan-perlawanan semakin sengit setelah PNI dinyatakan terlarang. Kota Makassar yang merupakan pusat pemerintahan dan markas besar tentara NICA untuk Kalimantan dan Indonesia Timur menjadi semakin terdesak oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh pejuang-pejuang rakyat, di bawah komando LAPRIS. Kenyataan ini menggelisahkan pihak pemerintah militer Belanda, karena markas yang merupakan pusat kegiatan politik untuk Kalimantan dan Timur Besar tidak mampu dikuasai (Kadir, dkk, 1984: 196).

Bagi Pemerintah Belanda, penguasaan Sulawesi Selatan merupakan langkah untuk memenangkan taktik politik bagi rancangan negara federal. Oleh karena Sulawesi Selatan adalah satu satunya daerah di luar Jawa dan Sumatra yang telah mengumumkan pernyataan bahwa wilayah mereka merupakan bagian dari Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu Pemerintah Belanda meminta bantuan pasukan untuk dapat menguasai Sulawesi Selatan, sementara menanti pasukan bantuan, pihak Belanda mulai melancarkan usaha-usaha penangkapan tokoh-tokoh pejuang republik pada awal Nopember 1946. Setelah diketahui pasukan bantuan telah tersedia maka menjelang pendaratan pasukan bantuan, mereka mulai melancarkan serangan terhadap pusat-pusat perlawanan rakyat. Serangan yang dimulai dilancarkan tanggal 20 Nopember 1946 mendapat perlawanan yang kuat dari para pejuang kemerdekaan (Kadir, dkk, 1984: 196).

Keberhasilan operasi tentara Belanda mematahkan perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, tidak dapat dielakkan dari taktik politiknya yang digunakan lewat konsep negara federal. Dengan konsep negara federal, Belanda berhasil menarik sejumlah tokoh-tokoh nasionalis yang cukup memiliki pengaruh di kalangan rakyat, sehingga mampu memudahkan semangat perjuangan mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk negara kesatuan, karena terdapat janji kemerdekaan dalam bentuk negara federal, atau negara persatuan. Rencana negara federal itu diawali pembicaraannya pada Konferensi Malino, kemudian terwujud pada Konferensi Denpasar. Walaupun usaha pemerintah Belanda berhasil mengacaukan perlawanan rakyat dan mematahkan semangat perjuangan mereka, tetapi ia tetap tersirat

di kalbu. Itulah sebabnya, walaupun dalam keadaan terdesak sekalipun mereka tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Tidak sedikit pertempuran yang dapat dicatat sebagai wujud sikap perjuangan mereka (Kadir, dkk, 1984: 180).

Dalam manifest politik dan keterangan pemerintah Perdana Menteri Nadjamoeddin secara tandas ditegaskan bahwa adalah tujuan kebijaksanaan NIT untuk senantiasa mengadakan kerjasama yang erat dengan Pemerintah RI dan akan menjauhkan sikap bermusuhan. Akan tetapi pada saat yang amat genting di mana Pemerintah Belanda memutuskan untuk mengadakan aksi militer untuk memaksakan kehendaknya kepada Pemerintah RI dan sebagai akibatnya terjadinya intervensi (campur tangan) Dewan Keamanan PBB di mana beberapa negara sahabat tampil ke depan untuk membantu Pemerintah RI mempertahankan nasib dan kedudukannya (Agung, 1985: 292).

Dapat dikatakan bahwa setelah 1947 perjuangan bersenjata di Sulawesi Selatan telah dilumpuhkan oleh pasukan Belanda. Para pejuang Sulawesi Selatan kembali mengarahkan kegiatan perjuangan mereka di Jawa setelah penyerahan kedaulatan, para pemimpin rakyat di Sulawesi Selatan yang tidak ingin memperoleh kedaulatan dalam bentuk federal, mendorong mereka untuk berusaha lewat pemerintah RI yang berada di Yogyakarta agar membubarkan RIS. Untuk mewujudkan maksud itu, maka dengan dipimpin Lanto Daeng Pasewang dan sejumlah pimpinan pro republik berangkat ke Yogyakarta. Di antaranya Andi Mappanyukki (mantan raja Bone), Andi Jemma (mantan Datu Luwu), Pajonga Daeng Ngalle (mantan Karaeng Polombangkeng), Andi Sulthan Daeng Raja (mantan Karaeng Gantarang), dan lain-lain (Kadir, dkk, 1984: 244).

Pernyataan keadaan darurat perang yang disusul aksi pembersihan oleh Westerlin dan anak buahnya ternyata tidak melemahkan jiwa dan semangat perjuangan rakyat Sulawesi Selatan dalam menentang Belanda, bahkan makin gigih terhadap upaya NICA yang hendak membangun kembali pengaruh dan kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda di daerah ini, terlebih lagi LAPRIS telah menjalin kerjasama dengan pasukan TRIPS tiba dari Jawa di bawah pimpinan Letnan A.R. Makmur Sitakka dan Letnan M. Backri yang mendarat di daerah Jeneponto. Buktinya, pada 23 Januari 1947, gabungan LAPRIS dan TRIPS yang antara lain dipimpin oleh R.W. Mongisidi, Letnan A.R. Makmur Sitakka, Bapak Jawa, dan Mino, mengomandoi penyerbuan

militer pos-pos NICA di Kota Makassar dan sekitarnya (Poelinggomang, dkk, 2004: 194).

LAPRIS yang selama ini mengorganisir para pejuang dalam melakukan perlawanan terhadap NICA merupakan salah satu ancaman Belanda dalam upayanya memulihkan kekuasaannya di daerah ini. Karena itu pada 27 Februari 1947. Serdadu KNIL menggempur markas LAPRIS di Lenggese. Serangan serdadu-serdadu KNIL itu dihadapi oleh pasukan LAPRIS yang dipimpin langsung oleh Panglima LAPRIS, Ranggong Daeng Romo (Poelinggomang, dkk, 2004: 195).

Perjuangan yang sama, juga dilakukan oleh tawanan-tawanan politik yang merupakan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, setelah mereka dibebaskan 20 Desember 1949. Sehubungan akan dilakukannya penyerahan kedaulatan RIS, tawanan-tawanan politik yang dibebaskan pertama kali itu berusaha membentuk panitia bekas tawanan politik. Panitia yang dibentuk ini dimaksudkan untuk berusaha agar semua tawanan politik dapat dibebaskan dan memperjuangkan merdeka seratus persen, adapun susunan panitia sebagai berikut:

Pelindung : Makaraeng Daeng Mandjarungi (Karaeng Djarung)
Ketua : F. Pondang
Wakil Ketua : J. Kamalirang
Penulis I : M. R. Amin Daud
Penulis II : A. R. Tamma
Pembantu-pembantu : M.J. Unjung R. Sukarto dan Ismail A (Harvey, 1989: 159).

Atas inisiatif dari Karaeng Djarung, panitia bekas tawanan politik berusaha menyelenggarakan satu konferensi dengan mengundang anggota-anggota LAPRIS dan organisasi kelaskaran lainnya, serta setiap pimpinan pemerintah afdeling. Menurut Karaeng Djarung, konferensi ini dimaksudkan untuk membicarakan perubahan tatanan dasar perjuangan dari perjuangan militer menjadi perjuangan politik. Untuk menyelenggarakan konferensi, pengorganisasian dipercayakan kepada LAPRIS dan Lipan Bajeng, untuk jaminan keamanan pengawalan konferensi diserahkan kepada Mobil Brigade Ratulangi (MBR) (Kadir, dkk, 1984: 244). Konferensi ini akhirnya dapat berlangsung 5-7 Februari 1950, dengan sepengetahuan Komisi Militer dan Teritorial Indonesia (KMTIT). Pada upacara pembukaan konferensi, pemerintah NIT

mengirimkan wakilnya untuk hadir. Konferensi ini berhasil membentuk satu wadah yang dinamakan Biro Perjuangan Pengikut Republik (BPRI). Landasan wadah ini dinyatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan sebagai hasil keputusan rapat. Isi pernyataan sebagai berikut :

1. Kami bekas pemberontak dan bekas tawanan politik yang dahulu dikatakan perampok, pengacau, pembunuh dsb, dan kini digelar pahlawan dan prajurit-prajurit perjuangan.
2. Yakin bahwa tidak ada seorangpun buat kami menjadikan nama atau gelar ini sebagai soal utama.
3. Bahwa yang kami ketahui adalah bahwa yang kami cinta itu pertiwi dan dengan sadar, pada waktu yang sudah, kami melakukan siasat destruktif, keluar menerjang segala perkosaan atas Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai suatu ledakan keinginan dan hasrat bangsa Indonesia yang sudah berabad-abad hidup dijajah, ingin hidup bernegara sendiri dan dapat menyumbangkan kebangsaannya untuk ikut serta dalam pembinaan perikemanusiaan dan keadilan di antara bangsa-bangsa di dunia ini.
4. Bahwa sesungguhnya lahirnya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan NIT, karena Belanda dan semata-mata pula didorong oleh cara bapak-bapak kita yang tidak mengakui jiwa dan cara pemuda lekas-lekas ber Malino dan ber Denpasar, sehingga lahirnya RIS dan NIT sebenarnya sedikitpun tidak mengganggu hasrat dan keinginan seluruh bangsa Indonesia. Pada prinsipnya tetap berpegang pada Proklamasi 17 Agustus 1945, baik yang telah ber Malino dan ber Denpasar ataupun yang telah ber Penjara atau ber hutan.
5. Bahwa masih banyak pula rakyat di NIT yang tidak atau belum mendapat kesempatan memperkembangkan atau mengembangkan keinginan itu, bahwa dalam banyak hal kita di NIT banyak ketinggalan (Djarwadi, 1972: 45; Poelinggomang, dkk, 2004: 262).

Pernyataan ini yang dikeluarkan di Polombangkeng pada 7 Pebruari 1950 yang ditanda tangani oleh Badan Pimpinan Pusat BPRI. Dewan pimpinan umum terdiri atas Yusuf Bauty, Makkaraeng Daeng Mandjarungi, Moh. Riri Amin Daud, F. Pondaag, A.R. Tamma, R. Sukarto Hamang, Aminuddin, Muchlis, dan S, Sunari (Djarwadi, 1972: 47).

Pejuang-pejuang yang ingin tetap berjuang di Sulawesi Selatan mengalihkan kegiatannya pada gerakan bawah tanah. Karena

untuk melaksanakan perlawanan bersenjata dipandang sudah tidak memungkinkan lagi. Beberapa tokoh tampil untuk meneruskan perjuangan mereka lewat jalur politik, tekad juang yang tidak sirna oleh tantangan dan rintangan ini (Abd Jadjid Bostan Daeng Mamadja, 16 Juni 2000)

Wujud nyata dari tekad juang ini, yang akhirnya berhasil menghancurkan bentukan negara federal yang dicetuskan oleh pemerintah Belanda dan meluruskan jalan bagi terwujudnya kesatuan bangsa yang telah dicanangkan sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Para pejuang dengan merubah teknik dan tatanan dasar perjuangan, yaitu dari perjuangan militer yang identik dengan perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik.

LAPRIS dalam Menentang NIT

Usaha merealisasikan gagasan politik federal bagi wilayah Hindia Belanda yang telah memproklamasikan kemerdekaan, mendorong Dr. H.J. Van Mook, perancang politik federal itu, menempatkan Sulawesi Selatan dan pulau-pulau di bagian timur Indonesia sebagai basis. Sehubungan dengan hal tersebut maka direncanakan pelaksanaan konferensi bersama pemimpin rakyat dan pemuka-pemuka masyarakat di Indonesia Timur dengan tujuan menyusun suatu bentuk tata negara baru dalam pelaksanaan garis politik Pemerintah Hindia Belanda yang telah diumumkan pada 10 Pebruari 1946 (Kadir, dkk, 1984: 205).

Masa sebelum federal dimulai semenjak Maret 1948, karena pada waktu itu Van Mook melantik suatu Pemerintah Federal Sementara. Pemerintah ini adalah hasil dari permusyawaratan di Jakarta antara anggota-anggota Bijeenkemst Federaal Overleg (BFO). Pemerintah Federal Sementara ini, tidak termasuk Pemerintah RI, karena cara dan isinya tidak sebagai yang dikehendaki oleh Republik. NIT sejak semula pembentukannya oleh Belanda dimaksudkan untuk dijadikan pion untuk menentang RI, telah terang-terangan merobah haluan, dari politik yang bermaksud mendekati dan kerjasama dengan Republik (Anonim, 1953: 125).

Corak dan idea federal serta berpemerintahan sendiri dalam mengatur daerah masing-masing berdasarkan kemampuan sendiri, sebenarnya sudah muncul jauh sebelum di proklamirkannya negara federal oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Di Sulawesi Selatan sebagian

besar kerajaan-kerajaannya dibangun dan dikembangkan melalui sistem federasi (Poelinggomang, dkk, 2004: 216)

Sehubungan dengan kedudukan Sulawesi Selatan, oleh pemerintah Belanda memandang perlu menguasainya lagi pula pergolakan di Sulawesi Selatan mempunyai dampak yang positif bagi daerah lain di Indonesia Timur dan Kalimantan. NICA yang datang setelah Perang Pasifik menyadari kenyataan itu, sehingga mereka berusaha sedapat mungkin menunjukkan kepada masyarakat di daerah lain dalam wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan, bahwa daerah Sulawesi Selatan telah dikuasai. Dalam hubungan itu juga maka dipilih rencana konferensi untuk membicarakan garis politik Pemerintah Belanda (Kadir, dkk, 1984: 206).

Dalam Konferensi Malino itu dibicarakan salah satu masalah pokok yang kelak menjadi alat pencapaian tujuan pemerintah Belanda yaitu susunan ketatanegaraan. Sehubungan dengan ini timbul perdebatan yang cukup ramai sekitar sistem unitarisme (kesatuan) dan federal (persatuan). Dengan mencoba mempengaruhi peserta konferensi tentang kemungkinan yang akan terjadi jika membentuk sistem unitarisme, sebab sistem ini memungkinkan dari satu kelompok untuk menguasai kelompok lain, dan pada akhirnya mengundang perpecahan. Van Mook menyarankan agar diterima sistem federal dengan syarat, bahwa bagian-bagian yang akan merupakan komponen-komponen dari federasi itu haruslah merupakan wilayah-wilayah yang luas dan mempunyai potensi ekonomi, sosial, politik yang cukup mantap, federasi Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat (Agung, 1985: 104).

Gagasan itu ternyata dapat mempengaruhi bagian terbesar dari peserta, sehingga direncanakan pembentukan badan yang akan mengembangkan tugas membicarakan dan merumuskan pembaharuan susunan ketatanegaraan di Timur Besar, Kalimantan, Bangka, Riau, dan Belitung bersama komisararis pemerintahan umum dari Pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai anggota badan itu ditunjuk Tjokorda Gde Rake Soekawati (Bali), Nadjamuddin Daeng Malewa (Sulawesi Selatan), E.D. Dengah (Minahasa), Kapten Tjahya (Maluku Selatan), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan), Oeray Saleh (Kalimantan Barat), dan Dr. Liem Tjoe Le (Bangka) (Kadir, dkk, 1984: 208).

Pada dasarnya hasil Konferensi Malino adalah pembentukan Negara Indonesia Serikat yang meliputi negara-negara bagian yang direncanakan untuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar.

Keinginan untuk membentuk negara federal hasil konferensi Malino, mendapat tanggapan penolakan dari pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan, sehingga lebih bergiat melancarkan perlawanan dan serangan untuk mematahkan kekuasaan dan menghancurkan kedudukan Belanda. Usaha itu ternyata berhasil, keberhasilan perjuangan itu bukan hanya dinyatakan oleh pejuang-pejuang Sulawesi Selatan, seperti yang dinyatakan oleh W.R. Mongisidi bahwa lapisan masyarakat pada umumnya, 98% menghendaki negara Kesatuan Indonesia (*eenheidis staat*) dalam bentuk Republik. Ini adalah suatu kenyataan sampai akhir 1946, tetapi juga pihak pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan mengakui bahwa kedudukan kekuasaan merosot dan hampir tidak berdaya akibat semakin meningkatnya perlawanan dan serangan terhadap kedudukannya. Apalagi dengan kelaskaran LAPRIS telah menjalin hubungan dengan TRI Pusat, dimana pemerintah pusat mengirim tenaganya untuk membantu kelaskaran yang ada di Makassar (Poelinggomang, 1996; Amir, 2001: 39; Bahtiar, 2014: 69-70).

Berbagai usaha sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan, untuk memperkuat kedudukan dan memperluas pengaruh kekuasaannya. Segera setelah serah terima tanggungjawab pemerintahan dan keamanan pada 15 Juli 1946 dari pihak tentara Sekutu kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Belanda telah mengeluarkan larangan untuk mengadakan pertemuan bagi organisasi politik dan semi politik, serta berusaha mematahkan perjuangan rakyat dengan kekuatan bersenjata. Namun rakyat Sulawesi Selatan tetap bergiat terus untuk mewujudkan tujuan perjuangan mereka, yaitu terwujudnya negara Kesatuan Indonesia yang merdeka dan berdaulat dalam bentuk republik.

Tokoh-tokoh PNI kemudian tampil sebagai aktivis penasehat organisasi kelaskaran, menurut laporan R.W. Mongisidi tertanggal 5 Januari 1947. Tercatat tokoh-tokoh PNI yang aktif bekerjasama memimpin LAPRIS dan Lipan Bajeng, misalnya Dr. Safri, M. Joenoes, H. Mansur Daeng Tompo, dan keluarga Saelan. Selanjutnya dinyatakan bahwa tokoh-tokoh yang bergiat sagai penasehat misalnya A.Z. Abidin, Sam, dan seorang tokoh PBI yaitu Phoy. Perlawanan yang hebat dari rakyat Sulawesi Selatan berakibat pemerintah Belanda yang merancang politik federal sebagai langkah untuk mengembalikan kedudukan kekuasaannya di Indonesia. Rencana pelaksanaan konferensi di Denpasar telah mendekat, sementara kedudukan kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan semakin merosot, keadaan itu memaksa pihak pemerintah Belanda harus memulihkan kedudukan

pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan. Pada 1 Desember 1946 tiba di Makassar 1 batalyon tentara Belanda *koninklijk leger* (KL) dari Devisi 7 Desember yang dikirim langsung dari negeri Belanda. Menyusul pemerintah di Batavia mengirim satu pasukan khusus yang dikenal dengan nama *Detachment Speciale Troepen* (DST), yang tiba di Makassar pada 5 Desember 1946. Posisi pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan yang semakin merosot itu cukup merisaukan Letnan Gubernur General Dr. H.J. Van Mook, rencana konferensi di Denpasar sudah akan dibuka pada 7 Desember 1946. Konferensi yang telah dirancang bagi terbentuk NIT yang kelak berpusat di Makassar. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Belanda di daerah itu semakin merosot, kedudukan pemerintahan dan kekuasaan baru tiba di Makassar pada minggu pertama Desember 1946 (Kadir, dkk, 1984: 211-212).

Sementara di Denpasar telah berdatangan utusan-utusan dari daerah untuk menghadiri pembukaan konferensi pada 7 Desember 1946, pertemuan informal berlangsung tiga kali. Hari pertama pada dipimpin oleh Dr. W. Hoven, pertemuan informal selanjutnya pada tanggal 9-11 Desember dipimpin oleh C.H.J.R de Wall. Pertemuan informal itu bertujuan memberikan penjelasan kepada peserta konferensi menyangkut rencana peraturan pembentukan Negara Timur Besar (Agung, 1985: 139).

Utusan dari berbagai daerah dalam wilayah Indonesia Timur berada di Denpasar pada 11 Desember 1946 dini hari, Westerling melaksanakan aksi pembersihan di daerah Batua. Cara tindakan yang ia ajukan kepada pemerintah Belanda di Batavia untuk mematahkan perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan, guna menyelamatkan posisi pemerintah Belanda. Selanjutnya pada siang harinya Letnan Gubernur General mengumumkan pernyataan keadaan perang berlaku di empat afdeling dalam wilayah Resident Sulawesi Selatan yaitu Afdeling Makassar, Afdeling Bonthain, Afdeling ParePare dan Afdeling Mandar pada 11 Desember 1946. Pernyataan keadaan perang itu diikuti dengan “aksi pembersihan”, peristiwa yang kemudian dikenal dengan “Korban 40.000 Jiwa” di Sulawesi Selatan (Kadir, 1984: 213).

Tindakan keganasan ini berlangsung sampai 22 Mei 1947 dengan ditariknya Westerling dan pasukannya kembali ke Jakarta. Kepada Westerling diberikan tanda penghargaan oleh pemerintah Hindia Belanda atas keberhasilannya menjalankan tugasnya di Sulawesi Selatan (Agung 1985: 131).

Satu minggu setelah pernyataan keadaan perang diumumkan, barulah Dr. H.J. Van Mook membuka dengan resmi konferensi di Denpasar, jelasnya pada 18 Desember 1946, konferensi ini yang dikenal dengan Konferensi Denpasar berlangsung hingga 24 Desember 1946. Dalam kata sambutan pembukaan konferensi itu, Van Mook menyatakan antara lain, bahwa di Indonesia Timur sudah berhasil diciptakan suatu keadaan di mana keamanan sudah dapat dijamin dan kehidupan sehari-hari sudah berjalan normal dengan adanya suatu pemerintahan yang mantap, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan untuk menyusun suatu tata pemerintahan dan ketatanegaraan yang baru (Agung, 1985: 130). Namun pernyataan ini sesungguhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Di Sulawesi Selatan telah dinyatakan berada dalam keadaan perang sejak 11 Desember 1946 yang diikuti dengan tindakan aksi pembersihan dengan menggunakan metode yang oleh Westerling disebut *standsrecht*, dan aksi itu hanya diistirahatkan sejenak ketika berlangsung upacara pembukaan secara resmi Konferensi Denpasar. Konferensi Denpasar yang berlangsung dari 18-24 Desember 1946 itu akhirnya berhasil memutuskan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) pada 24 Desember 1946, suatu negara baru yang wilayahnya meliputi bekas wilayah Gouvernement Grote Oost. Yang terpilih menjadi presiden NIT yang pertama adalah Tjokorde Gde Rake Soekawati, setelah dalam pemilihan ulangan yang ketiga berhasil memenangkan 4 suara dari saingannya Tadjoeuddin Noer (Kadir, dkk, 1984: 214; Agung, 1985: 171).

Setelah konferensi ditutup, presiden NIT bersama formatur kabinet NIT, masing-masing Tjokorde Gde Rake Soekawati dan Nadjamuddin Dg. Malewa, berangkat ke Jakarta untuk melakukan pembicaraan menyangkut pembentukan kabinet pertama NIT, suatu kegiatan yang sama sekali aneh karena pembentukan kabinet NIT bukan di Ibukota NIT yaitu Makassar. Selama Soekawati dan Nadjamuddin Dg. Malewa di Jakarta dalam rangka penyusunan kabinet NIT, mereka telah melakukan pembicaraan-pembicaraan dan meminta pertimbangan-pertimbangan dengan pihak pemerintah Belanda. Itulah sebabnya kabinet NIT yang pertama dilantik oleh presiden NIT, Tjokorde Gde Rake Soekawati di Jakarta pada 13 Januari 1947 yang dihadiri oleh Letnan Gubernur General Dr. H.J. Van Mook, para anggota Komisaris Jenderal Belanda, Dr. W. Hoven, Ketua Komisaris Pemerintahan Umum untuk Kalimantan dan Timur Besar bersama stafnya dan pejabat tinggi pemerintah Belanda lainnya (Kadir, dkk, 1984: 214).

Sebelum Konferensi Malino dan Denpasar, Nadjamuddin Daeng Malewa tidak mengenal orang-orang yang dipilih menjadi anggota kabinetnya. Jadi dia menunjuk orang-orang tersebut duduk dalam kabinet tidak berdasarkan suatu pertimbangan persahabatan atau hubungan politik (Agung, 1985: 182).

Namun prosedur pembentukan kabinet Nadjamuddin ini mendapat kritikan yang cukup keras dari lawan-lawan politiknya, yang menyebabkan posisinya tidak menguntungkan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Sementara NIT. Ini merupakan salah satu hambatan bagi kegiatan kabinet yang dipimpinnya, dengan demikian berarti kabinet Nadjamuddin belum memiliki aparat pelaksana pemerintahan. Hal ini pula menjadi masalah yang sulit, sehingga ketika anggota kabinet telah berada di Makassar, Ibukota NIT, mereka tetap tidak dapat berbuat sesuatu untuk mengakhiri pernyataan keadaan perang yang diikuti dengan aksi pembersihan yang masih terus berlangsung di Sulawesi Selatan. Kenyataan ini dapat mengundang tanggapan bahwa apa yang dicetuskan di Denpasar merupakan buatan Belanda (Kadir, dkk, 1984: 217).

Perjuangan rakyat Sulawesi Selatan memang sangat berat, tapi mereka pantang mundur. Untuk mempertahankan eksistensi NIT, Belanda menyerahkan seluruh kekuatannya, terdapat 3 Batalyon infantri di Sulawesi Selatan dan ditambah lagi dengan bantuan 1 batalyon KL dari Divisi 7 Desember terdiri dari 1000 personil yang dikirim langsung dari Nederland ke Makassar. Belum lagi kesatuan DST yang dipimpin oleh Kapten Westerling yang terdiri 1 kompi (123 orang) Baret Merah yang masih diperkuat dengan memberlakukan *Staat van Oorlog Beleg* (SOB) di Sulawesi Selatan (Saetan, 1993: 68).

Menjelang akhir tahun 1948, pada pertengahan Desember, terbentuklah gabungan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang merupakan sebuah federasi dari pelbagai partai politik yang terwakili di Makassar. Di antara anggotanya ada yang mewakili partai asalnya pada Parlemen Sementara NIT sebagai anggota parlemen. Kabinet ini adalah Kabinet Warouw, juga tidak berlangsung lama. Pada 9 Desember 1947, mosi kepercayaan yang diusulkan pemerintah ditolak dengan 51 suara tidak setuju dan 14 suara setuju. Menurut J.E. Tatengkeng, kekalahan yang diderita kabinet Warouw adalah kesalahannya sendiri. Ia terlalu banyak dipengaruhi oleh *Commisaris Van Der Kroon*, Brouwer, khususnya pada waktu ia menjabat sebagai pimpinan Kabinet

Nadjamuddin II yang didemisionerkan. Setelah Kabinet Warrouw dinyatakan jatuh, maka Presiden NIT mengadakan pertemuan bersama pimpinan-pimpinan fraksi. Pada tanggal 11 Desember 1947 Presiden NIT menunjuk Ide Anak Agung Gde Agung sebagai pembentuk kabinet baru. Ide Anak Agung Gde Agung sebagai Perdana Menteri merangkap menteri Dalam Negeri Kabinet Anak Agung I ternyata cukup mendapat dukungan dari parlemen. Politik sintesa yang tegas, yang dijadikan azas program kerja Kabinet Anak Agung I mendapat sambutan yang positif. Sambil mengkonsolidasikan dan menata kembali diri ke dalam dan ke luar, turut mengambil bagian dalam penyusunan kerjasama dengan negara-negara dan badan-badan lain di luar Negara Indonesia Timur (Poelinggman, dkk, 2004: 229).

Namun karena adanya persiapan untuk menerima kedaulatan dari pihak pemerintah Belanda, menuntut Ide Anak Agung Gde Agung harus meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri NIT, karena ia telah dipilih untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat untuk Kabinet Hatta. Atas dasar ini maka dibentuk kabinet NIT baru. Berhubung dengan terbentuknya Parlemen NIT yang baru berdasarkan Pemilihan Umum pada 2 Maret 1950, maka pada tanggal 13 Maret 1950, Kabinet Tatengkeng mengembalikan mandat kepada presiden NIT dan terbentuk Kabinet Diapati.

Sejak pengunduran diri Anak Agung sebagai Perdana Menteri NIT setelah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri RIS, maka digantikan oleh Kabinet J.E. Tatengkeng sebagai cabinet darurat yang bertugas hanya sampai siding Badan Perwakilan Rakyat yang mempersiapkan pemilihan umum akhir 1949. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Diapari yang dibentuk pada 14 Maret 1949 dan berakhir pada 10 Mei 1950. Pada masa Kabinet Diapari inilah gelombang dan arus penetangan terhadap kelanjutan berdirinya NIT untuk menggambarkan diri pada daerah kekuasaan RI semakin gencar (Poelinggomang, dkk, 2004: 230).

Pada 17 Maret 1950 rakyat di Makassar dan sekitarnya melancarkan demonstrasi menuntut agar Negara Indonesia Timur dibubarkan. Dalam kondisi yang diwarnai dengan perjuangan untuk membubarkan NIT, tanpa terduga muncul Andi Azis melancarkan tindakan militer pada 5 April 1950. Kedaulatan yang diperoleh dalam bentuk Negara Serikat tidak dapat bertahan, pembentukan NIT sebagai satu kesatuan dari rakyat Indonesia yang berada di bagian timur. Kemudian ditempatkan sebagai salah satu negara yang tergabung dalam RIS, tidak mendapat

tempat dalam hati rakyat di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya kehadiran Sultan Hamengku Bowono IX sebagai Koordinator Keamanan RIS, yang didampingi oleh Kolonel A. N. Nasution untuk menempatkan seorang Panglima TNI sebagai gubernur militer untuk menerima kekuasaan teritorial Indonesia Timur dari Belanda mengalami kegagalan. Keadaan ini mendesak sehingga dicapainya suatu persetujuan untuk membentuk suatu Komisi Militer dan teritorial Indonesia Timur. Komisi itu diketuai oleh Ir. Putuhena dan beranggotakan Letkol A.J. Mokoginta sebagai wakil TNI, dan May. KNIL Nahlohy sebagai wakil dari KNIL (Kadir, dkk, 1984: 234).

Dalam Parlemen NIT, dengan gigih tampil Lanto Daeng Pasewang, pimpinan Fraksi Kesatuan mengajukan mosi pembubaran NIT, dan di luar parlemen muncul kelompok-kelompok yang menamakan diri kaum republiken menyelenggarakan rapat di Polombangkeng, sebutan wilayah yang setelah Proklamasi RI 17 Agustus 1945 menyatakan wilayahnya merupakan bagian wilayah dari Republik Indonesia pada 5²⁷ Februari 1950. Pertemuan ini berakhir dengan dibentuknya Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia pada 7 Februari 1950. Perkumpulan ini berusaha baik melalui parlemen maupun di luar parlemen menuntut agar NIT dibubarkan. Kegiatan itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk demonstrasi menuntut pembubaran NIT pada 17 Maret 1950. Perjuangan yang menuntut agar diwujudkan identitas bangsa dan kesatuan bangsa berakibat meletusnya pemberontakan di Makassar antara pihak yang menghendaki kesatuan republik dengan tentara kolonial. Peristiwa ini disebut "Peristiwa Andi Azis" yang meletus pada 5 April 1950. Tokoh utama yang sesungguhnya mencetuskan pemberontakan ini adalah Menteri Kehakiman NIT, Dr. Soumokil. Itulah sebabnya setelah pemberontakan ini dapat dikuasai kembali oleh pasukan TNI di bawah Mayor Pieters pada 19 April 1950, Dr. Soumokil tampil dengan segera pada 25 April 1950 memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon. Sebaliknya di Sulawesi Selatan khususnya dan di wilayah NIT pada umumnya rakyat menyatakan diri keluar dari NIT dan bergabung dengan Republik Indonesia (Kadir, dkk, 1984: 234-235).

Tindakan militer Andi Azis sebenarnya berpangkal pada rencana pengiriman tambahan pasukan APRIS/TNI dari Jawa ke Makassar, lagi pula menurut rencana semula peleburan mautan KNIL menjadi anggota APRIS ternyata tidak dilaksanakan secepat mungkin. Hanya satu unit pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Azis yang dilantik pada 30 Maret 1950, sedangkan pasukan KNIL lainnya belum dilebur

menjadi APRIS. Sebagaimana diketahui Sulawesi Selatan merupakan daerah pemusatan pasukan KNIL, karena daerah ini terkenal dengan perlawanan yang begitu hebat terhadap NICA. Jumlah pasukan KNIL di daerah ini sekitar 3.000 sampai 4.000 orang, sedangkan pada Maret 1950, TNI yang menjadi anggota dari KMTIT hanya 40 orang dan satu pleton CPM sejumlah 70 orang. Untuk persiapan bagi pejuang yang akan dilebur menjadi APRIS baru sekitar 360 orang, yang sedang ditampung dipandang-pandang untuk mengikuti latihan (Kadir, dkk, 1984: 237).

Pada pagi hari Rabu 5 April 1956 tepat jam 05.00 pasukan militer mantan KNIL di bawah pimpinan Andi Azis melancarkan tindakan militer. Hingga jam 10.00 dapat dikatakan seluruh Kota Makassar telah dikuasai oleh pasukan Andi Azis. Kapten Andi Azis menyatakan dengan perantaraan pers tindakan ini dimaksudkan untuk:

1. NIT harus dipertahankan supaya tetap berdiri.
2. Pasukan KNIL yang telah masuk APRIS saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT dan apabila ternyata kurang barulah dapat ditambah dengan pasukan APRIS lainnya yang berasal dari TNI.
3. Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak akan bertindak untuk mengizinkan NIT dibubarkan dengan cara kekerasan (Poelinggomang, dkk, 2004: 269).

Oleh karena sampai pada 13 April 1950, Andi Asis belum juga melaporkan diri ke Jakarta, maka pada malam itu, jam 20.15, Presiden Sekarno sebagai panglima Tertinggi APRIS menyampaikan pidato melalui radio pada intinya menyatakan Andi Asis adalah pemberontak dan tidak loyal terhadap kekuasaan Pemerintah RIS. Dengan adanya jaminan keamanan dari RIS jika melapor ke Jakarta, maka Presiden NIT Soekawati mendesak Andi Asis segera melaporkan diri ke Jakarta. Pada 14 April 1950 dengan diantar Mokoginta dan Dr. Ratulangi berangkat ke Jakarta (Poelinggomang, dkk, 2004: 270).

Peristiwa Rabu pagi di Makassar diselesaikan oleh KMTIT, sebelum divisi pasukan ekspedisi tiba di Makassar. Kelompok yang mendalangi gerakan itu Dr. Soumokil dan pendukung-pendukungnya meninggalkan Makassar dengan menggunakan pesawat angkatan perang Belanda menuju Ambon. Batalyon Worang yang mendarat di Pattontongan dapat memasuki Makassar atas bantuan laskar LAPRIS. Pasukan ini yang kemudian menata pendaratan divisi pasukan ekspedisi untuk melakukan pendaratan, sehingga tidak banyak mengalami hambatan

(Kadir, dkk, 1984: 240-241).

Sementara itu, statement BPPRI di Polombangkeng sebagai halilintar menggeledak di siang bolong tentu saja pemerintah NIT agak gusar, karena statemen BPPRI Polombangkeng ditujukan langsung kepadanya. Mereka merupakan utusan resmi BPPRI dan rakyat Sulawesi Selatan, agar NIT segera dibubarkan. Pada tanggal 16 Maret, Fraksi Kesatuan (republikan) yang diketuai oleh Lanto Dg. Pasewang mengajukan mosi pembubaran NIT pada tanggal 17 Maret. Rakyat Kota Makassar dan sekitarnya melancarkan demonstrasi pembubaran NIT, dua belas partai politik ambil bagian disertai dukungan rakyat sekitar 20.000 orang (Pawilloy, 1979: 376-377).

Setelah pertemuan itu BPPRI bergiat menggerakkan kelompok Republikan untuk berusaha membubarkan NIT yang dipandang boneka Belanda dan merusak citra perjuangan kemerdekaan. Tekad ini melibatkan mereka membina jalinan kerjasama yang masih bergerilya. Disamping itu mereka juga mengirim utusan ke Yogyakarta untuk melaporkan kegiatan dan perkembangan yang ada di Sulawesi Selatan. Pada 23 Februari 1950 berangkat Makkaraeng Daeng Mandjarungi dan Moh. Riri Amin Daud sebagai wakil BPPRI ke Yogyakarta untuk menemui pemerintah RIS dan RI (Kadir, dkk, 1984: 246).

Mereka merupakan utusan resmi BPPRI dan rakyat Sulawesi Selatan, agar NIT segera dibubarkan, hasil pertemuan yakni suatu pernyataan yang disebut proklamasi di Polombangkeng. Isi proklamasi yang sesungguhnya hanyalah suatu ikrar dan pernyataan terbuka, bahwa daerah Sulawesi Selatan tidak tunduk lagi pada pemerintah dan Undang-undang NIT. Dinyatakan pula satu-satunya pemerintah yang diakui ialah pemerintah RI di Ibukota Yogyakarta, Undang-undang yang diakui dan ditaati ialah UUD 1945. Penandatanganan pernyataan, ialah Makkaraeng Daeng Mandjarungi, Riri Amin Daud, serta A. Jalal Leo dan Andi Selle atas nama Kesatuan Gerilya Teritorium Sulawesi. Kemudian pada 26 April 1950 di Makassar, Dewan Sulawesi Selatan menyatakan dengan resmi, melepaskan dari NIT (Pawiloy, 1979: 377-378).

Pergolakan-pergolakan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada khususnya dan di NIT pada umumnya sangat berpengaruh terhadap perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Presiden NIT, Soekawati. Wakil dari Negara Sumatera Timur dengan Wakil Presiden RIS, Muhammad Hatta pada 3-5 Mei 1950, dalam pertemuan ini dicapai kata sepakat untuk menetapkan satu negara kesatuan. Pada 9 Mei 1950

Wakil Presiden RIS, Muhammad Hatta menjelaskan dalam pidato radio bahwa negara kesatuan harus dibentuk melalui cara-cara yang legal, dan bukan melalui tindakan-tindakan yang bersifat sepihak, dipaksakan (Kadir, dkk, 1984: 248).

Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bubarnya NIT pada 15 Agustus 1950 menimbulkan keheranan di banyak kalangan tentang cepatnya sistem federasi terhapus di Indonesia. Kurang lebih enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah RIS bentuk negara sudah berubah menjadi satu negara kesatuan. Terutama di kalangan Pemerintah Belanda perubahan asas negara meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Pemerintah Belanda menuduh pihak Indonesia tidak jujur dalam pelaksanaan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB), dan berhubungan dengan itu menyatakan kekecewaannya. Teristimewa bagi Perdana Menteri Dr. W. Drees yang senantiasa memperlihatkan rasa tidak puas yang sangat mempengaruhi sikapnya kemudian dalam pemecahan masalah Irian Barat secara sangat negatif (Agung, 1985: 774).

Dengan tercapainya kesepakatan dalam perundingan-perundingan menyangkut ketatanegaraan untuk mengganti negara RIS menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yang diumumkan oleh Presiden RI Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1950, maka berakhir pula Negara Indonesia Timur, kabinet Putuhena juga dinyatakan berakhir. Anggota-anggota bekas Kabinet Putuhena kemudian dilibatkan dalam Panitia Penyelenggaraan Perubahan Tata Negara Indonesia Timur.

V PENUTUP

Kesimpulan

Terbentuknya kelaskaran LAPRIS adalah karena didorong rasa ingin mempertahankan kemerdekaan yang begitu lama diperjuangkan. Oleh karena NICA berusaha memulihkan kembali kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda berkeinginan meraihnya kembali setelah kemerdekaan Indonesia. Pemerintah NICA yang datang kembali ke Makassar dengan ikut menyertai pasukan Sekutu, ingin menguasai dan menjajah kembali seluruh daerah Sulawesi Selatan. Namun di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan telah berdiri beberapa kelaskaran untuk mempertahankan daerahnya dari NICA.

Kelaskaran-kelaskaran itu melakukan kesepakatan untuk terhimpun dan bersatu dalam satu wadah dengan satu tujuan Indonesia Merdeka dalam bentuk Republik yang berkedaulatan rakyat dan sebagai negara kesatuan. Beberapa kali para pemimpin kelaskaran yang pada awalnya berjumlah 6 kelaskaran dan akhirnya bertambah menjadi 19 kelaskaran mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan

terbentuknya organisasi kelaskaran yang baru. Akhirnya pada 17 Juli 1946 di Rannaya jam 10 pagi dengan diadakan upacara bendera dan pada saat itulah dinyatakan LAPRIS resmi berdiri. Upacara tersebut dihadiri kurang lebih 100 orang.

Kekejaman yang dilakukan oleh NICA, sehingga hal ini yang mendorong beberapa pemimpin kelaskaran merasa perlu membentuk suatu organisasi yang terhimpun dalam satu wadah, agar lebih terkoordinir, oleh sebab itu, maka dibentuk LAPRIS. Seperti tujuan LAPRIS, yaitu Indonesia Merdeka, maka kelaskaran-kelaskaran yang ada tidak mau lagi ada campur tangan seperti yang telah dilakukan oleh NICA. LAPRIS juga bertujuan untuk membela negara, selain itu juga sangat besar peran TRIPS dari Jawa. Yang membantu dan bekerjasama melawan NICA, oleh TRIPS yang juga sebagian anggotanya berasal dari Sulawesi Selatan banyak membantu melatih militer kepada anggota LAPRIS beberapa ekspedisi gagal dilakukan oleh TRIPS, beberapa di antaranya ditangkap oleh NICA. TRIPS dan LAPRIS banyak terlibat kerjasama dalam pertempuran melawan NICA. Setelah TRIPS pulang ke Jawa bahkan beberapa orang-orang TRIPS asal Sulawesi Selatan juga ke Jawa. Jadi kegiatan LAPRIS agak mulai tidak konsentrasi, apalagi setelah Ranggong Daeng Romo Panglima LAPRIS gugur dalam satu pertempuran. Namun pimpinan LAPRIS misalnya Makkaraeng Dg. Madjarungi, Mappa Daeng Temba, Jalal Daeng Loe masih terus berjuang.

Kedudukan Sulawesi Selatan, oleh pemerintah Belanda memang merasa perlu untuk menguasainya, lagi pula penguasaan di Sulawesi Selatan mempunyai dampak politik bagi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan Kalimantan. NICA datang setelah perang pasifik, menyadari hal itu, sehingga mereka berusaha sedapat mungkin menunjukkan kepada masyarakat di daerah lain dalam wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan bahwa daerah Sulawesi Selatan telah dikuasai. Sehubungan dengan itu juga maka di rencanakan sebuah konferensi, konferensi ini bertujuan untuk membicarakan garis politik pemerintah Belanda, konferensi itu berlangsung di Malino pada 16 Juli 1946.

Keinginan untuk kelak membentuk negara federal hasil Konferensi Malino, mendapat tanggapan penolakan dari pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan. Karena itu pejuang-pejuang Sulawesi Selatan giat melancarkan perlawanan dan serangan untuk mematahkan kekuasaan dan menghancurkan kedudukan Belanda.

Kelanjutan dari Konfrensi Malino adalah Konferensi Denpasar, yang diselenggarakan dari 8-24 Desember 1946, akhirnya berhasil mempersatukan wilayah wilayah di Indonesia timur, seperti: Provinsi Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil menjadi satu negara yang tergabung dalam NIT. Setelah pembentukan NIT nampak perjuangan politik dan perjuangan bersenjata sedikit berkurang, bukan hanya disebabkan oleh banyaknya pembentukan negara-negara bagian di NIT, yang berada di Indonesia bagian timur dan kemudian ditempatkan sebagai salah satu negara yang berdampingan dengan RIS, namun kehadiran NIT tidak mendapat tempat dalam hati rakyat di Sulawesi Selatan.

Setelah Kabinet Putuhena dibubarkan dan NIT juga telah dibubarkan, maka pada 26 April 1950 Sulawesi Selatan menyatakan keluar dari NIT dan bergabung dengan Republik Indonesia sebagai satu republik. Terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara pada 1950 yang disahkan merupakan keberhasilan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Saran-saran

1. Semoga tema-tema sejarah terus digali dan dikaji, karena masih banyak kejadian atau peristiwa yang sejarah belum disentuh dan dikaji oleh pemerhati sejarah.
2. Sangat disadari oleh penulis banyak sekali kesalahan dalam menyusunnya, namun sangat diharapkan kritikan yang membangun untuk dapat dikoreksi kembali agar keobjektifitasnya dapat lebih baik.
3. Semoga laporan penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumber tulisan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ide Gde Anak Agung. 1985 *Dari Negara Indonesia Timur Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amin Daud, H.M.R. 1971. *Alharhum Ranggong Daeng Romo*. Ujung Pandang:
- Amir, Muhammad. 2001. *Pertentangan Antara Golongan Unitaris dan Federali di Sulawesi Selatan*. Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Anonim, 1982. *Sejarah Pahlawan-Pahlawan Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Anonim. 1953. *Provinsi Sulawesi*. Kementerian Penerangan. Makassar: Djawatan Penerangan.
- Arfah, dkk. 1988. *Biografi Pahlawan Pajonga Daeng Ngalle*. Ujung Pandang: Depdikbud.

- _____. 1991. *Biografi Pahlawan Ranggong Daeng Romo Panglima LAPRIS*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- _____. 1995. *Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa, Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Bahtiar. 2002. *Riwayat Hidup Perjuangan Ranggong Daeng Romo*. Makassar: Buletin Bosara, No. 20 Tahun XI, Balai Kajian Sejarah dan nilai Tradisional Makassar.
- _____. 2014. *TRIPS dalam Perjuangan Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan di Sulawesi Selatan (1945-1950)*. Makassar: De La Macca.
- Djarwadi, Radik, dkk. 1972. *Naskah Sejarah Corps hasanuddin Prajurit Tempur dan Pembangunan*. Makassar: Sekretaris Djenderal CORHAS
- Harvey, Barbara Silars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tk. I Sulsel dan Unhas.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Lahadjaji, Patang 1967. *Sulawesi dan Pahlawan Pahlawannya*. Jakarta: YKGM
- Luhukay Honoch. 1980. *LAPRIS di bentuk di Sulawesi Selatan Tanggal 16-17 Juli 1946, Artikel Pedoman Rakyat*. Ujung Pandang: Yayasan Kaitupa.
- Mandjarungi, Makkaraeng. 1958. *Sejarah Berdiri Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS)*. Makassar: LVRI No. 46/III.
- Mattulada. 1985. *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paeni, Mukhlis, dkk. 1987. *Monumen Perjuangan di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.

Patunru, Abd. Razak Daeng. 1969. *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Pawiloy, Sarita. 1979. *Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Dewan Harian Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 1985 Universitas Indonesia.

Poelinggomang, Edward L. 1996. *Strategi Politik Pemerintah Kolonial dan Peristiwa Sulawesi Selatan*. Makalah Seminar. Ujung Pandang: Depdikbud.

_____. 1983. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan, Makassar 1905-1942*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.

Saelan, Maulwi H. 1993. *Posisi Strategi Perjuangan Rakyat di Sulawesi Selatan Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah Pada Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur. Ujung Pandang: Depdikbud.

Said, M. Natsir. 1982. *Lahirnya TRI Divisi Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan Tenggara*. Makassar: Team Penelitian Sejarah Perjuangan Rakyat SulSelRa Bekerjasama Kodam XIV Hasanuddin, UNHAS, IKIP Ujung Pandang.

_____. 1984. *SOB 11 Desember 1956 Penyebab Banjir Daerah dan Lautan Api, Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan*. Makassar: Yayasan Penerbit Unin.

Sagimun MD. 1975. *Robert Wolter Mongisidi*. Jakarta: Bratara.

Sibali, Makkatang, dkk. 1988. *Sejarah Perjuangan LIPAN/LAPRIS*. Polombangkeng

Wawancara

Abd. Jadjid Boston Dg. Mamaja, 16 Juni 2000,

Mappa Dg. Temba, Canrego Takalar, bekas Panglima LAPRIS 14 Juni 2000.

**PERJUANGAN KELASKARAN BPRI:
Mempertahankan Proklamasi
Kemerdekaan Di Parepare dan Daerah
Sekitarnya**

Muhammad Amir

Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, mendapat sambutan dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Sambutan dan dukungan itu makin marak ketika berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, secara resmi diketahui oleh rakyat Sulawesi Selatan. Berita resmi itu diketahui setelah delegasi dari Sulawesi ke sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kembali dari Jakarta pada 24 Agustus 1945 (Wati, 1984: 8). Delegasi dari Sulawesi itu terdiri atas Dr. Ratulangi, Andi Pangerang Petta Rani, Andi Sultan Daeng Radja, dan Mr. Zainal Abidin sebagai sekretaris. Mereka membawa berita antara lain tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengangkatan Dr. Ratulangi menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi (Harvey, 1989: 109). Kedua berita penting itu, disambut dengan gembira dan mendapat dukungan penuh dari rakyat Sulawesi Selatan, termasuk rakyat di Parepare dan daerah sekitarnya.

Suasana kegembiraan menyambut kemerdekaan tersebut, kembali diselimuti oleh awan kelabu karena pemerintah Belanda menolak memberikan pengakuan kepada bangsa Indonesia yang telah

memproklamlirkan kemerdekaannya. Bahkan pemerintah Belanda berusaha untuk memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan koloninya di Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan sikap Sekutu yang tampil sebagai pemenang dalam Perang Dunia II, yang tidak mengakui sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan pemerintah Republik Indonesia. Semua ini terjadi karena proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapat dukungan dari Jepang, dan proklamasi kemerdekaan dan penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia, merupakan tokoh-tokoh yang terlibat kerjasama dengan Jepang. Selain itu, juga karena perumusan pembentukan negara yang dilaksanakan PPKI, merupakan wadah ciptaan Jepang. Itulah sebabnya Inggris dan Australia yang mewakili Sekutu untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, tampaknya membenarkan keinginan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya (Poelinggomang, 2002:6).

Awan kelabu yang menyelimuti suasana kegembiraan dalam menyambut kemerdekaan semakin tampak, ketika tentara Australia atas nama pasukan Sekutu mendarat di Makassar pada September 1945. Sebab, di antara pasukan Australia itu, terdapat pula aparat-aparat NICA yang bertugas untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan (Harvey, 1989:112). Bukan hanya itu karena kehadiran pasukan Sekutu (Australia) yang semula bertugas untuk membebaskan para tawanan Perang Dunia II, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, serta memulihkan keamanan dan ketertiban, tetapi dalam kenyataannya banyak membantu aparat-aparat NICA dalam mewujudkan keinginannya. Atas dukungan dan bantuan dari pasukan Sekutu, aparat-aparat NICA berhasil memperkuat kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah ini (Agung, 1985:40).

Kenyataan itu tidak hanya menyebabkan terjadinya berbagai pergolakan rakyat yang bertujuan menentang kehadiran NICA, tetapi juga terbentuknya berbagai organisasi perjuangan atau kelaskaran yang bertujuan menentang usaha-usaha NICA. Reaksi rakyat itu tentu tidak terlepas dari dukungan dan peranan penguasa-penguasa tradisional yang bergiat mendorong rakyatnya tampil dengan gigih menentang kehadiran dan usaha NICA yang mendapat dukungan dan bantuan dari

pasukan Australia. Hal ini dibuktikan ketika raja-raja di Sulawesi Selatan menyelenggarakan pertemuan di Watampone pada September dan di Jongaya pada tanggal 15 Oktober 1945 (Harvey,1989:115). Dalam pertemuan di Jongaya itu, dicapai kesepakatan untuk menyampaikan kepada wakil Sekutu di Makassar, bahwa mereka mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menyatakan wilayah kekuasaan dan aparat-aparat pemerintahannya adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia dan aparat pemerintah Indonesia. Pernyataan sikap itulah yang memotivasi rakyat di daerah ini bergiat membangun kekuatan untuk menentang kehadiran dan usaha NICA. Usaha-usaha itu akhirnya melapangkan pembentukan kelaskaran di berbagai afdeling di Sulawesi Selatan (Poelinggomang,2002:4).

Salah satu organisasi perjuangan yang giat melakukan perlawanan terhadap NICA di Sulawesi Selatan adalah Badan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) Suppa. Organisasi kelaskaran BPRI Suppa yang dipimpin langsung oleh Datu Suppa, Andi Abdullah Bau Massepe, bukan hanya berperan penting dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, melainkan juga dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Itulah sebabnya Afdeling Parepare terutama Suppa, selain menjadi basis perlawanan terhadap NICA, juga sebagai tempat pemberangkatan utusan dan pemuda-pemuda ke Jawa untuk menjalin hubungan dengan pemerintah pusat di Yogyakarta. Hal ini dibuktikan ketika diselenggarakan pertemuan yang dipimpin Andi Abdullah Bau Massepe pada November 1945, yang memutuskan pengiriman utusan ke Jawa untuk menjalin hubungan dengan Republik Indonesia atau pemerintah pusat di Yogyakarta. Sebagai realisasi dari keputusan itu, maka diberangkatkanlah dari Parepare utusan antara lain: La Nakka, Muh. Saleh Lahade, S. Daeng Mangatta, La Halede, Muh. Amin, Andi Mattalatta, dan Lanca pada 25 November 1945 (Kadir,dkk.,1984:136).

Jalanan tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa rakyat Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan kedudukan pemerintah pusat Republik Indonesia, melainkan juga dimaksudkan untuk melaksanakan perjuangan secara menyeluruh dan penentangan total terhadap kehadiran dan usaha NICA. Selain itu, juga untuk menjalin kerjasama dalam pembinaan perjuangan (bantuan latihan militer dan persenjataan) dan sebagai sarana diplomasi politik bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung

proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia. Wujud dari jalinan kerjasama itu adalah terbentuknya “Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS)” dan adanya bantuan kekuatan pasukan ekspedisi TRIPS yang sebagian besar mendarat di Suppa, daerah kekuasaan Andi Abdullah Bau Massepe serta terealisasinya pembentukan TRI Divisi Hasanuddin pada Konferensi Paccekke pada Januari 1947. Itulah sebabnya kendatipun Andi Abdullah Bau Massepe telah ditangkap oleh Belanda, ia tetap dipilih dan dilantik secara *in absentia* (tidak hadir) menjadi Panglima TRI Divisi Hasanuddin pada Konferensi Paccekke tersebut (Djawardi,dkk.,1972:36; Said,1980:273).

Sepak terjang BPRI Suppa dan ekspedisi TRIPS serta dukungan penuh Andi Abdullah Bau Massepe bersama rakyat yang dipimpinnya, sehingga Afdeling Parepare menjadi salah satu basis perlawanan yang paling sengit terhadap NICA di Sulawesi Selatan. Basis perlawanan lainnya adalah Afdeling Makassar yang berpusat di Polombangkeng. Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah kolonial Belanda mengumumkan “*Staat van Orloog en Beleg*” (negara dalam darurat dan perang, disingkat SOB) pada 11 Desember 1946, yang isinya menyatakan bahwa Afdeling Makassar, Banthaeng, Parepare, dan Mandar, termasuk daerah SOB. Pernyataan itu disusul pula oleh “Perintah Harian” (*Dag Order*) dari Letjen S. Spoor kepada seluruh jajaran militer Belanda yang berada di bawah perintahnya untuk melaksanakan aksi militer (Poelinggomang,2002:7; Harvey,1989:136). Pernyataan SOB yang disertai dengan aksi militer yang dilakukan oleh Westerling bersama pasukannya itu, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia yang tidak sedikit, termasuk Andi Abdullah Bau Massepe. Peristiwa penting di Sulawesi Selatan itu, kemudian dikenal dengan nama “Korban Empat Puluh Ribu Jiwa”.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, pengungkapan dan penjelasan tentang perjuangan rakyat Parepare dan daerah sekitarnya dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, patut mendapat perhatian karena memiliki makna yang amat penting bagi pemahaman sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun hingga kini, perjuangan rakyat dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, khususnya dalam menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Parepare dan daerah sekitarnya, masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti dan belum terungkap secara utuh. Oleh karena itu, kajian ini sangat

relevan dan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang amat berarti dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, selain dapat memberikan pemahaman tentang dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia di daerah tersebut, juga diharapkan dapat menyadarkan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang baik dalam penataan dan pemantapan integrasi bangsa agar terluput dari gejala disintegrasi bangsa di dalam membangun kekinian dan hari esok.

Pokok persoalan yang akan diungkap dan dijelaskan dalam kajian ini, adalah bagaimana latar belakang pembentukan dan perjuangan BPRI Suppa dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? serta dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Parepare dan daerah sekitarnya? Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya, mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan sebab-musabab dan faktor kondisional yang mendasari terjadinya perjuangan, baik dalam perlawanan terhadap kehadiran dan usaha NICA, maupun dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Karena itu kajian ini juga bertujuan menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan semangat nasionalisme dan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekilas Tentang Onderafdeling Parepare

Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden) pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bukan hanya meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (sekarang), melainkan juga Sumbawa, Dompu, Bima, dan Sanggar di Nusa Tenggara Barat (sekarang). Berdasarkan keputusan pemerintah (gouvernements-besluit) pada 11 Februari 1909 No. 48 (*Indische Staatsblad* 1909 No. 129) dinyatakan bahwa Pulau Sumbawa dan bagian barat Flores (Manggarai) yang masuk dalam Distrik Bima dipisahkan dari Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden dan digabungkan dengan Resident Timor dan daerah sekitarnya (Ardhana, 2005:123).

Wilayah *Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden* dipimpin oleh seorang pejabat pemerintahan yang disebut gubernur. Wilayah ini dibagi ke dalam tujuh afdeling (bagian pemerintahan), yaitu Afdeling Makassar, Afdeling Bonthain, Afdeling Bone, Afdeling Parepare, Afdeling Luwu, Afdeling Mandar, dan Afdeling Buton dan Pesisir Timur Sulawesi. Di bagian pemerintahan (afdeling) ditempatkan seorang asisten residen yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan di wilayah tersebut. Bagian pemerintahan (afdeling) dibagi ke dalam beberapa onderafdeling atau cabang pemerintahan dan setiap onderafdeling dipimpin oleh seorang kontrolir. Setiap onderafdeling dibagi ke dalam beberapa distrik dan setiap distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik (*Staatblad*, 1910, No.573).

Afdeling Parepare bukan hanya meliputi wilayah kerajaan-kerajaan di Ajatappareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Mallusetasi), melainkan juga kerajaan-kerajaan di wilayah Massenrempulu (Maiwa, Enrekang, Malua, Alla, Buntubatu, Kassa, dan Batulappa), Tanete, Barru, dan Soppeng Riaja. Pusat pemerintahan Afdeling Parepare berkedudukan di Parepare. Wilayah Afdeling Parepare dibagi ke dalam lima cabang pemerintahan yang disebut onderafdeling: yaitu Onderafdeling Parepare meliputi wilayah Kerajaan Suppa dan Mallusetasi; Onderafdeling Pinrang meliputi wilayah Kerajaan Sawitto, Kassa, dan Batulappa; Onderafdeling Sidenreng Rappang meliputi wilayah Kerajaan Sidenreng dan Rappang; Onderafdeling Barru meliputi wilayah Kerajaan Tanete, Barru, dan Soppeng Riaja; dan Onderafdeling Enrekang meliputi wilayah Kerajaan Maiwa, Enrekang, Malua, Alla, dan Buntubatu (*Staatblad*, 1916, No.352; *Staatblad*, 1917, No.249).

Onderafdeling Parepare meliputi beberapa distrik, di antaranya Distrik Ujung dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Sabbang. Distrik ini terdiri atas lima kampung, yaitu Kampung Ujung Sabbang, Lapadde, Bulu Sogae, Ujung Bulu, dan Labukkang. Berikutnya Distrik Soreang dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Parepare yang meliputi Kampung Ujung Baru, Lakessi, dan Watang Soreang. Sementara Distrik Bacukiki dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Sumpangminangae meliputi Kampung Baru, Cappagalung, Pangkoro, Tonrangeng, Lumpue, Watang Bacukiki, Mangimpuru, Labeua, Lontange, LompoE, Galung Maloang, Lawalano, Caramele, dan Bilalange. Selain itu, Onderafdeling Parepere juga meliputi Distrik Suppa yang meliputi hampir seluruh wilayah bekas Swapraja Suppa (Pemda, 1991:441 dan 466).

Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI

Pemerintah Jepang ketika menyadari tanda-tanda mengenai kekalahannya dalam Perang Asia Timur Raya, Perdana Menteri Kaiso mengeluarkan pernyataan “Janji Kemerdekaan terhadap Indonesia di kelak kemudian hari”. Langkah pelaksanaan janji itulah yang mendasari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*, disingkat BPUPKI). Janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI ini menghasilkan rancangan rumusan dasar negara, rancangan Undang-undang Dasar, dan semangat untuk memproklamasikan kehadiran negara Indonesia. Pada awal Agustus 1945, pihak pemerintah Jepang telah mengetahui dengan pasti akan kekalahannya. Oleh karena itu untuk merealisasikan janjinya, BPUPK diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jika pembentukan BPUPKI hanya menjaring pengurus dan keanggotaannya dari tokoh-tokoh masyarakat yang berdomisili di Jakarta, maka pada pengurus dan keanggotaan PPKI, akan dijarah pula keanggotaan dari daerah-daerah. Setelah pembentukan PPKI tersebut, Uni Sovyet menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Radjiman diberangkatkan ke Saigon untuk menemui Marsekal Terauchi Hisachi. Delegasi ini berhasil menemui Terauchi Hisachi di Dalat pada 11 Agustus. Pada pertemuan itu, Terauchi Hisachi menyatakan kepada Soekarno dan kawan-kawan bahwa kemerdekaan akan dianugerahkan kepada seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, tidak termasuk Malaysia dan jajahan Inggris di Kalimantan. Selain itu, juga ditetapkan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua dari PPKI. Delegasi Indonesia ini kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 1945 (Gonggong, dkk, 1993:1-3).

Sementara itu di lain pihak, Dr. Ratulangi menerima undangan pada 7 Agustus 1945, untuk menghadiri rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akan diadakan di Jakarta. Setelah membaca undangan itu, Dr. Ratulangi kemudian berkonsultasi dan bertanya kepada dua orang penasehat terdekatnya, yaitu Lanto Daeng Pasewang dan Mr. Zainal Abidin, tentang siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Pertanyaan yang muncul dari Dr. Ratulangi ini, adalah untuk menentukan tentang siapa yang sebaiknya yang akan dikirim untuk memenuhi undangan PPKI dalam sidang yang sangat penting untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Dr. Ratulangi bertanya, bahwa siapa yang paling besar pengaruhnya

di Sulawesi Selatan, di antara pemimpin-pemimpin organisasi politik dan kaum bangsawan, raja-raja/karaeng-karaeng? Kedua penasehat Dr. Ratulangi itu memberikan jawaban, bahwa pengaruh para kaum politisi kecil dibandingkan dengan kaum bangsawan dan bila tiba saatnya untuk memikul tanggung jawab dan resiko, maka kaum bangsawan lebih dapat diandalkan dari pada kaum politisi. Kaum politisi akan diliputi ketakutan dituduh sebagai *colloborator*, penjahat perang oleh Sekutu (Lahade, 1982:367).

Selain itu, Dr. Ratulangi juga menanyakan sikap dari kaum *ambtenaar* (pamong praja) dan dijawab oleh Lanto Daeng Pasewang, bahwa mereka terpecah dua, yaitu ada yang mendukung kemerdekaan dan ada yang memihak kepada penjajah Belanda. Mereka akan lebih banyak mempertimbangkan tiupan angin, dari mana paling deras datangnya itulah yang akan didukungnya (Lahade, 1982:368). Masukan dari kedua penasehat terdekat Dr. Ratulangi itulah yang mendasari ditampilkan kelompok bangsawan dalam delegasi Sulawesi untuk menghadiri sidang PPKI di Jakarta. Di samping itu, juga merupakan masukan yang sangat berharga bagi Dr. Ratulangi dalam menentukan kebijakan politik selanjutnya di daerah Sulawesi Selatan. Setelah dipertimbangkan dengan seksama pada pertemuan tokoh-tokoh nasional di Makassar, tentang siapa yang sebaiknya akan diutus untuk menghadiri sidang PPKI di Jakarta, maka diputuskanlah untuk mengutus Dr. Ratulangi (ketua rombongan), Mr. Andi Zainal Abidin (sekretaris), Andi Pangerang Petta Rani dan Andi Sultan Daeng Radja sebagai anggota.¹ Delegasi Sulawesi ke sidang PPKI bertolak meninggalkan Makassar menuju Surabaya pada 9 Agustus, dan dari Surabaya mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta pada 14 Agustus 1945 (Wati, 1984:8; Arfah, dkk., 1993:300).

1 Menurut Hamid Abdullah bahwa para wakil dari Sulawesi Selatan ini merupakan pencerminan kesatuan sosial di Sulawesi Selatan pada waktu itu. Maksudnya, pihak kelompok aristokrat diwakili oleh Andi Pangerang Petta Rani dari pihak intelektual atau pimpinan politik diwakili oleh Dr. Ratulangi (Abdullah, 1991:52). Sedang Menurut Manai Sophiaan, bahwa keputusan yang akan berangkat ke sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta, yang semuanya ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Pemimpin-pemimpin daerah yang sejak zaman pergerakan sudah berakar di kalangan rakyat, tidak terpilih. Jepang lebih menaruh kepercayaan kepada golongan raja-raja, yang tentunya dapat dimengerti dari sudut kepentingan Jepang yang masih ingin meneruskan peperangan. Perutusan yang dikirim waktu itu adalah Dr. Ratulangi, Andi Pangerang dan Sultan Daeng Radja, disertai seorang sekretaris, Mr. Andi Zainal Abidin, salah seorang rombongan Dr. Ratulangi ketika datang ke Makassar. Orang-orang pergerakan rakyat disingkirkan dan raja-raja diberi kepercayaan. Bagi orang awam, perutusan itu dianggap wajar karena diketuai Dr. Ratulangi yang dihormati. Tapi bagi

Sehari setelah delegasi Sulawesi tiba di Jakarta, pemerintah Jepang menyatakan “menyerah tanpa syarat” kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Hal ini tentunya menyulitkan kedudukan PPKI untuk mengambil langkah segera dalam merealisasikan janji kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Sebab pemerintah pendudukan Jepang harus menjamin dan memelihara kondisi yang ada setelah pernyataan itu dan tidak diperkenankan munculnya kegiatan politik. Itu berarti jika PPKI mengambil tindakan politik memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sudah pasti harus berhadapan dengan pemerintah militer Jepang, karena mereka berkewajiban mempertahankan status quo. Dalam kondisi kekalutan seperti itu, muncul gagasan kelompok pemuda progresif yang didukung oleh Sjahrir untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar kerangka yang dipersiapkan Jepang (Poelinggomang, 2002:4).

Namun tidak ada tokoh yang ingin melakukannya tanpa peran dari Soekarno dan Hatta. Dalam hubungan inilah dua tokoh itu “diculik” oleh tokoh-tokoh pemuda dari kediaman mereka dan membawanya ke markas PETA di Rengasdengklok pada hari itu. Tindakan itu diambil mengingat dua tokoh sentral itu tidak memberikan persetujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar kerangka PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Selain itu, untuk melindungi mereka dari kemungkinan penyerangan PETA dan Heiho. Vice-Admiral Maeda Tadashi, seorang Jepang yang berpandangan progresif tentang nasionalisme Indonesia dan bertugas pada lembaga tentara Angkatan Laut di Jakarta, mengirimkan pesan agar Soekarno dan Hatta dikembalikan dengan selamat ke Jakarta, dan ia akan merencanakan agar pihaknya memikirkan cara lain untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena itu Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah Maeda Tadashi, dan di tempat itulah dirumuskan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 (Poelinggomang, 2002:4).

Setelah proklamasi kemerdekaan, para negarawan yang terhimpun dalam PPKI menyelenggarakan sidang yang berlangsung pada 18-22 Agustus 1945. Pada sidang inilah semua rancangan yang telah

mereka yang mempelajari *interplay of forces*, permainan tali temali politik di Makassar, merasa bahwa perutusan itu kurang kuat, karena meninggalkan unsur pergerakan nasional. Sebetulnya tidak perlu raja diwakili 2 orang. Tapi pertimbangan itu tidak tergantung pada kita sendiri. Orang-orang Minseifu lebih menentukan (Sophiaan, 1991:60).

dipersiapkan BPUPKI dirumuskan dan dijadikan Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara. Selain itu, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Pusat sebagai lembaga musyawarah darurat. Karena itu pembentukan negara dan penataannya telah diatur sepenuhnya dalam hasil sidang PPKI. Terlepas dari proses ini, proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia, merupakan muara dari janji Jepang. Itulah sebabnya pihak Sekutu (Inggris) bersedia menyetujui *Civil Affairs Agreement* dengan pihak pemerintah Belanda pada 24 Agustus 1945, yang isinya menerima dan menempatkan NICA sebagai bagian yang integral dari pasukan Sekutu dalam melaksanakan tugas di Indonesia. Persetujuan ini sesungguhnya telah dilakukan sejak Desember 1944 antara Van Mook dengan Mac Athur, namun pengabsahannya baru terjadi kemudian (Poelinggomang, 2000:44). Hal ini menunjukkan bahwa Sekutu bukan hanya belum mengakui sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh PPKI, tetapi juga proses pembebasan dan pembentukan negara berada dalam ancaman, karena Sekutu mengakui kehadiran NICA untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan piagam penyerahan Jepang kepada Sekutu yang ditandatangani pada 15 Agustus 1945, bahwa segala sesuatu di wilayah Indonesia dinyatakan tetap berada di bawah pengawasan balatentara Jepang hingga Sekutu tiba untuk mengambil alih. Oleh karena itu, usaha untuk mengumumkan berita tentang proklamasi kemerdekaan ke seluruh Indonesia, dilarang atau mendapat rintangan dari Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya sempat diumumkan melalui siaran radio dari Kantor Berita Domei yang berlangsung dua menit pada 17 Agustus 1945. Hambatan itulah yang menyebabkan tidak merata dan tidak cepatnya diketahui oleh rakyat yang berada di pelosok-pelosok tanah air secara tepat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di pulau Jawa saja, banyak daerah yang terlambat mengetahui tentang berita proklamasi kemerdekaan itu, apalagi untuk kawasan Sulawesi Selatan yang dipisahkan oleh lautan yang jaraknya ribuan mil dari Jakarta. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada segelintir tokoh-tokoh nasional yang telah mendengar berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, baik melalui siaran radio yang didengar secara sembunyi-sembunyi, pemberitaan dari teman, maupun dari pihak pejabat Jepang yang

berbaik hati menyampaikan berita itu, sebelum delegasi Sulawesi ke sidang PPKI kembali dari Jakarta. Umpamanya, Andi Abdullah Bau Massepe di Parepare dan Andi Ahmad di Palopo. Andi Abdullah Bau Massepe sendiri mendengar berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui warta berita siaran luar negeri pada 19 Agustus 1945. Hal ini dimungkinkan karena Andi Abdullah Bau Massepe sebagai Bunken Kanrikan Parepare, diizinkan untuk memiliki radio oleh pemerintah militer Jepang (Abdullah, 1991:55).

Berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, baru secara resmi diketahui oleh rakyat di Sulawesi Selatan setelah delegasi dari Sulawesi ke sidang PPKI kembali dari Jakarta dan tiba di Makassar pada 24 Agustus 1945.² Mereka membawa berita antara lain tentang proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia serta pengangkatan Dr. Ratulangi menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi. Semua berita penting itu, disambut dengan gembira dan mendapat dukungan penuh dari rakyat Sulawesi Selatan, termasuk rakyat Parepare dan daerah sekitarnya. Selain tentang siapa yang pertama kali mendengarkan berita mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan, yang terpenting dalam hal ini adalah maknanya terhadap masyarakat setelah mendengarkan secara resmi tentang proklamasi kemerdekaan tersebut. Umpamanya, bagaimana reaksi spontan masyarakat serta bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap pernyataan kemerdekaan bangsanya? Itulah antara lain yang paling penting untuk diketahui dengan jelas tentang berita proklamasi kemerdekaan, khususnya di Sulawesi Selatan. Sebab, persepsi dan sikap masyarakat tersebut, sudah tentu ada kelompok yang pro dan kontra terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu perbedaan itu turut pula mewarnai keadaan politik dalam perkembangan selanjutnya di kawasan Sulawesi Selatan.

Suasana di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar setelah penduduknya secara resmi mendengar berita proklamasi kemerdekaan, memperlihatkan suasana yang lain dari biasanya. Jika menjelang proklamasi kemerdekaan, terutama saat-saat terakhir masa

2 Delegasi dari Sulawesi yang terdiri atas Dr. Ratulangi dan Andi Pangerang Petta Rani,, yang didampingi oleh Andi Sultan Daeng Radja dan Mr. Andu Zainal Abidin sebagai sekretaris, mendarat di lapangan terbang darurat Limbung karena lapangan terbang Mandai sudah tidak aman dan terus menerus dibom oleh Sekutu. Mereka disambut oleh tokoh-tokoh nasional seperti; Lanto Daeng Pasewang, Nadjamuddin Daeng Malewa, Tadjuddin Noor, Manai Sophiaan, A. Wahab Tarru, dan lain-lain (Harvey, 1989:109; Sophiaan, 1991:61; Wati, 1984:9).

pendudukan militer Jepang, hampir semuanya diliputi oleh suasana ketakutan dan perasaan tertekan. Akan tetapi setelah proklamasi kemerdekaan, suasana itu berubah menjadi suasana yang diliputi kegembiraan dan dalam masa yang relatif singkat meledak ke atas permukaan. Mereka memperlihatkan tingkah laku yang agresif dan revolusioner. Semua lapisan sosial di masyarakat, dari semua tingkatan umur dan kelompok etnik penduduk Kota Makassar, menyambut berita proklamasi kemerdekaan itu dengan perasaan syukur. Perasaan gembira terlihat dari wajah-wajah mereka dan terpenting adalah perasaan siap bertarung untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan jika Belanda akan menjajah kembali. Perasaan yang demikian itu, terutama terlihat di kalangan generasi muda yang dalam perkembangan perjuangan selanjutnya banyak menentukan berhasil tidaknya pertarungan militer dalam melawan serdadu-serdadu Belanda. Tenaga muda progresif revolusioner tersebut, berdiri di front paling depan dalam menghadapi serdadu NICA (Belanda) yang berusaha untuk menghancurkan perlawanan rakyat Sulawesi Selatan (Abdullah, 1991:57; Kementerian Penerangan, 1953:227).

Dalam waktu beberapa hari saja, gelorah revolusi 45 telah merata dirasakan dan sekaligus berkobar di dalam dada setiap warga masyarakat Kota Makassar. Bahkan di kalangan penduduk keturunan Cina yang lahir di kota ini dan telah menyatu kehidupannya dengan kelompok pribumi, telah mengambil sikap dan menjatuhkan pilihannya untuk mendukung proklamasi kemerdekaan dengan antusias. Mereka mengibarkan bendera Merah Putih dan ada pula yang ikut pawai menyambut hari bersejarah itu. Namun, tidak dapat pula disangkal bahwa tentu ada sebagian warga masyarakat yang diliputi keraguan akan kejayaan bangsa kita di dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Bahkan ada sekelompok bumiputra yang bersikap sinis terhadap Republik Indonesia. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah kelompok sosial yang menganut paham *opportunistis* dalam hidupnya dan merupakan kelompok parasit dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sikap *opportunistis* ini terlihat dalam kehidupan masyarakat, bagaikan debu yang mengikuti ke mana arah angin bertiup. Maksudnya, jika NICA atau pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Sulawesi Selatan atau di kawasan lain, maka ia menghambakan dirinya pada NICA (Belanda). Akan tetapi jika republik yang berkuasa, ia pun bersedia membudakkan dirinya dengan cara menjilat pemimpin yang berkuasa. Potret kelompok ini dapat dilihat dalam periode dari masa

peralihan Republik Indonesia ke Negera Indonesia Timur (NIT) dan dari NIT ke Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada zaman NICA, mereka bersikap sinis terhadap perjuangan republik, dan di zaman republik, mereka pun menonjolkan dirinya sebagai “pahlawan kesiang”. Mereka tanpa malu menyatakan ikut berjuang dengan para gerilyawan di hutan, tetapi sebenarnya selama perjuangan itu berlangsung, mereka hidup di kota bersama keluarganya dengan tenang sambil makan roti dan keju Belanda (Abdullah, 1991:58).

Namun, yang paling memprihatinkan lagi adalah kelompok bumiputra yang bersikap anti republik. Mereka umumnya adalah kelompok manusia yang mendapatkan perlakuan istimewa dan berbagai kemudahan dari pemerintah Hindia Belanda di zaman penjajahan. Umpamanya, jabatan tinggi di dalam dunia pemerintahan yang dikenal dengan nama *Binnenlandsche Bestuur* (BB) atau pegawai tinggi pamong praja Belanda, mereka yang bekerja sebagai polisi atau serdadu KNIL. Mereka kerjanya menangkap orang yang berjuang untuk kepentingan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ironisnya karena tidak sedikit di antara mereka justru menjadi pembunuh terhadap bangsanya sendiri. Kelompok inilah yang merindukan kembali berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda. Apalagi ketika republik di zaman revolusi mulai terjepit, kelompok inilah yang merasa gembira atas kemajuan propaganda politik dan operasi militer Belanda karena memimpikan kejayaan mereka dan keluarganya mendapat status yang tinggi dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun di depan matanya, bangsanya diperas dan dijatuhkan martabatnya oleh pemerintah kolonial Belanda (Abdullah, 1991:57).

Sementara itu, langkah kebijakan pertama yang dilakukan Dr. Ratulangi sebagai pimpinan formal puncak di Sulawesi, adalah menghimpun semua kekuatan sosial yang terdapat di masyarakat, khususnya di kawasan Sulawesi Selatan yang menjadi pusat pemerintahannya. Hal ini penting karena meskipun ia secara resmi telah diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai gubernur, tidak tertutup kemungkinan banyak kendala yang akan dihadapinya jika tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari semua lapisan sosial di masyarakat. Itulah sebabnya Dr. Ratulangi dalam mencari dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengadakan pendekatan dan menggalangan terhadap raja-raja dan kaum bangsawan yang mempunyai pengaruh dan kewibawaan yang mengakur di masyarakat, seperti yang disarankan oleh kedua orang penasehat terdekatnya (Lahade, 1982:367; Arfah, dkk., 1993:166).

Staregi Dr. Ratulangi yang menggunakan pengaruh raja-raja dan kaum bangsawan dalam menegakkan proklamasi kemerdekaan di Sulawesi Selatan, mulai tampak ketika ia mengutus atau menugaskan kepada Lanto Daeng Pasewang dan A.N. Hadjarati untuk menghubungi Andi Mappanyukki, Andi Pangerang Petta Rani, dan Andi Abdullah Bau Massepe, serta kelompok aristokrat lainnya. Sebab, ketiga tokoh aristokrat yang sangat berpengaruh itu, setelah dihubungi berjanji untuk memenuhi harapan dari Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi. Bahkan mereka berjanji untuk mendukung sepenuhnya dan akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia serta akan menghubungi kelompok aristokrat lainnya. Kemudian, ketiga tokoh aristokrat itu menghubungi kelompok aristokrat lainnya, dan memberikan penjelasan sekaligus mengajak mereka untuk mendukung republik, khususnya kepada Dr. Ratulangi dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas ini tidaklah ringan sebab walau bagaimana pun tidak seluruhnya kelompok aristokrat di daerah ini, senada, sehaluan pikiran, dan sependirian dengan Andi Mappanyukki, Andi Pangerang Petta Rani, dan Andi Abdullah Bau Massepe. Tentu ada yang masih diliputi oleh keraguan dengan terjadi perubahan zaman yang sangat mendadak, ada kelompok yang masih membayangkan statusnya yang enak di bawah pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi kelompok kecil dari aristokrat yang mungkin masih kekurangan informasi atau tidak terjadi dialog langsung dengan kelompok nasionalis itu, akhirnya menyatakan pula dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (Arfah,dkk., 1993: 167; Abdullah,1991:57).

Kebijakan dan stratrgi Dr. Ratulangi yang menggunakan pengarangr uh raja-raja dan kaum bangsawan dalam menegakkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan, dampaknya memang hebat karena hampir semua raja-raja (kecuali raja-raja yang kemudian diangkat oleh NICA) mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan menyatakan wilayah kekuasaan mereka menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Andi Abdullah Bau Massepe misalnya, setelah mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia segera menyatakan dukungannya dan menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan itu kepada semua sanak keluarga dan warga masyarakat. Dukungan itu kembali dipertegasnya, ketika para utusan Gubernur Ratulangi datang menemuinya di Parepare. Bahkan Andi Abdullah Bau Massepe kemudian mengorganisir pertemuan antara

tokoh-tokoh masyarakat dengan pemuda-pemuda di Parepare pada awal September 1945, untuk membentuk wadah pemerintahan yang berdiri di belakang Republik Indonesia. Pada pertemuan itu, dicapai kesepakatan mengubah organisasi perjuangan SUDARA menjadi Penunjang Republik Indonesia (PRI) Cabang Parepare. PRI Parepere sebagai wadah pemerintahan, bertujuan untuk menegakkan, membela, dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, serta berusaha menginsafkan segenap lapisan masyarakat yang berada di Parepare dan daerah sekitarnya, tentang perlunya usaha pembelaan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (Kadir,dkk.,1984:128; Bichman,tt:11).³ Sejak itu, Parepare dan daerah sekitarnya telah dinyatakan sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena sebelum proklamasi kemerdekaan, Andi Abdullah Bau Massepe telah diangkat menjadi Ketua SUDARA Cabang Parepare dan telah menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat kegiatan gerakan nasionalisme yang terpenting untuk kawasan Sulawesi Selatan.

Demikian pula dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tidak perlu diragukan lagi. Sebab, “budaya panutan” atau hubungan “*joa-ajjoareng*” masih amat kuat berperan dalam kehidupan masyarakat ketika itu, sebagaimana yang tercermin dalam ungkapan “*polo pang polo panni assaleng puakku moa, narekko naposiri’ni puatta, napomate ni tu joana*” (saya merelakan paha dan sayap/tangan saya patah, asalkan di dalam membela rajaku, kalau rajaku sudah merasakan sesuatu yang memalukan, maka rakyat pengikutnya sudah harus bersedia mati).⁴ Dari ungkapan ini tampak bahwa tampilnya raja-raja dan kaum bangsawan yang berkaitan dengan konsep *joa-ajjoareng*, terkait pula dengan *siri na pesse*. Artinya ketika raja-raja dan kaum bangsawan terjun untuk mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, maka dorongan untuk mempertahankannya

3 Dalam sumber lain disebutkan bahwa Penunjang Republik Indonesia (PRI) dibentuk pada 8 September 1945. Bedirinya PRI adalah merupakan cikal bakal wadah penghimpun kekuatan para pejuang kemerdekaan di Parepare dan sekitarnya (Kila,1996:30).

4 Para pengikut dari raja atau bangsawan disebut *joa*, sedangkan raja atau bangsawan yang diikutinya disebut *ajjoareng*. Tampilnya sebagian besar raja-raja dan kaum bangsawan di Sulawesi Selatan dalam memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai dampak yang amat besar di dalam masyarakat. Artinya, sikap dan dukungan mereka mendorong pula masyarakat luas untuk mengikuti langkah dari raja dan bangsawan yang dikenal dan diikutinya. Pada sisi ini, tentu amat terkait dengan konsep kepemimpinan tradisional, yaitu *joa-ajjoareng*. Konsep ini berkaitan dengan sistem sosial pada kerajaan tradisional. Raja atau bang-

adalah dilapisi oleh *siri na pesse*. Demikian pula ketika para *joa* yang mengikuti jejak raja-raja dan kaum bangsawannya, maka yang dilakukan itu adalah demi menegakkan *siri* yang didasari oleh *pesse*. Karena itu *siri na pesse* tampak pula sebagai salah satu faktor pendorong di dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah sebabnya pembentukan organisasi kelaskaran yang bertujuan untuk menentang kehadiran dan usaha NICA, mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat yang diwujudkan dalam kesediaan mereka untuk berkorban dan secara sukarela menjadi anggota dari kelaskaran yang pada umumnya dipelopori dan dilindungi oleh raja-raja dan kaum bangsawan.

Raja-raja dan kaum bangsawan yang menjadi panutan atau *ajjoareng* tersebut, menerima pengabdian total para pendukung atau *joa*-nya di dalam kaitan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah keunikan dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Sebab, tidak ada suatu bentuk pertentangan antara kelompok aristokrat dan rakyat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik berdarah. Demikian pula hubungan antara kelompok aristokrat dan para ulama di daerah ini tidak ada pertentangan. Bahkan dalam sejarah kerajaan-kerajaan di daerah ini tidak pernah terjadi pertentangan antara kelompok aristokrat dan para ulama dalam konteks persaingan untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Para ulama memang mempunyai pengaruh di bidang urusan keagamaan, tetapi dalam hal kekuasaan pemerintahan sepenuhnya di tangan kelompok aristokrat. Fungsi para ulama tidak lebih daripada sebagai penasehat (Arfah,dkk.,1993:168).

Berbeda halnya dengan keadaan di Aceh, dimana terjadi pertentangan antara para ulama dan *uleebalang* (raja/bangsawan). Begitu pula halnya di Sumatra Timur, yang menunjukkan adanya pertentangan yang tajam sawan yang mempunyai sejumlah orang yang mengikuti dan setia kepadanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keikutsertaan warga masyarakat di dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan tidaklah semuanya karena ikatan *joa-ajjoareng*, melainkan juga tidak sedikit karena dorongan dan kehendak sendiri. Hal ini terlihat dengan tampilnya beberapa "tokoh lepas" yang mempunyai peranan yang tidak kecil. Sejalan dengan tampilnya raja-raja dan kaum bangsawan untuk memimpin perjuangan di dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti yang disebutkan di atas, maka di dalam proses pembentukan kekuatan dalam wujud organisasi kelaskaran yang bertujuan menentang kehadiran dan usaha NICA (Belanda), tampil pula para raja-raja dan kaum bangsawan untuk membentuk organisasi kelaskaran di daerah masing-masing. Pada sisi inilah terlihat hubungan *joa-ajjoareng* sebagai hal yang amat dominan di dalam pembentukan kelaskaran dan penunjukan pimpinannya (Gonggong, 2000:228).

antara raja (aristokrat) dan rakyat. Pertentangan antarkelompok, baik di Sumatra Timur maupun di Aceh, telah menyebabkan terjadinya revolusi sosial di kedua daerah tersebut. Hal seperti itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan, justru antara aristokrat, ulama, dan rakyat ada ikatan historis yang kokoh dalam melawan kolonial Belanda, yang menyebabkan mereka bahu-membahu atau melakukan kerjasama yang harmonis dalam kaitannya untuk mengusir penjajah Belanda. Kekuatan mereka itu terpadu dalam kehidupan masyarakat, dan akan makin kuat ikatannya ketika mereka menghadapi ancaman dari pemerintah Hindia Belanda (Arfah,dkk., 1993:168). Itulah sebabnya semangat perjuangan dalam melawan kolonial Belanda tetap berkobar dan mereka bahu-membahu dalam mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan tersebut sekaligus merupakan suatu bukti bahwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia, bukan hanya merupakan keinginan dari para *kolaborator* Jepang di mata Sekutu, melainkan juga keinginan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

Namun ketika raja-raja dan bangsawan serta tokoh-tokoh politik dan para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia baru memulai konsolidasi, tentara Australia atas nama pasukan Sekutu telah mendarat di Sulawesi Selatan (Makassar) pada September 1945. Di antara pasukan Australia itu, ternyata ikut serta pula aparat-aparat NICA yang bertugas untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Kebijakan Sekutu yang menempatkan NICA sebagai bagian yang integral dari pasukan Sekutu dalam melaksanakan tugas di Sulawesi Selatan tersebut, jelas memberikan keuntungan politis yang luar biasa kepada NICA, sehingga dalam waktu yang singkat mereka berhasil memperkuat kedudukan kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang mendorong beberapa tokoh aristokrat mengorganisasikan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin rakyat di Sulawesi Selatan. Atas pengaruh dari Raja Bone Andi Mappanyukki, Datu Luwu Andi Djemma, Datu Suppa Andi Abdullah Bau Massepe, dan Andi Pengerang Petta Rani, maka diselenggarakanlah pertemuan di Jongaya, bertempat di rumah Andi Mappanyukki pada 15 Oktober 1945 (Harvey,1989:115; Arfah,dkk.,1993:172).

Selain itu, hadir pula tokoh-tokoh lain dalam pertemuan di Jongaya tersebut. Di antaranya Andi Makkasau dari Parepare, Ibu Depu (Maradia Balannipa-Mandar), Andi Abdul Madjid dari Mandar, Padjonga Daeng Ngalle (Karaeng Polombangkeng), Andi Sultan Daeng Radja

(Karaeng Gattareng), Arung Cilireng dari Wajo, dan lain-lain. Pada akhir pertemuan itu dicapai kesepakatan yang kemudian dikenal dengan nama "Pernyataan Jongaya", yang isinya mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan menyatakan wilayah kekuasaan dan aparat pemerintahan mereka merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia dan aparat pemerintah Indonesia (Polinggomang, 2002:4; Kadir, dkk, 1984:106). Pernyataan sikap itu, bukan hanya merupakan suatu bukti bahwa raja-raja di Sulawesi Selatan sepenuhnya mengintegrasikan diri dan kerajaan mereka masing-masing dalam wadah negara Republik Indonesia, melainkan juga semakin memotivasi rakyat di daerah ini bergiat membentuk kekuatan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan serta menentang kehadiran dan usaha NICA.

Pernyataan sikap raja-raja di Sulawesi Selatan tersebut, ditanggapi dingin oleh pihak Sekutu dan NICA karena dipandang diputuskan secara emosional dan tidak menyurutkan keinginannya untuk memulihkan kembali pengaruh dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini. Oleh karena itu, maka diselenggarakan kembali pertemuan raja-raja di Watampone pada 1 Desember 1945. Pertemuan itu diharapkan dapat mempengaruhi raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menjalin kerjasama dengan NICA, karena atas desakan dan kebijakan Sekutu beberapa tokoh politik dan masyarakat telah bersedia bekerjasama dengan NICA pada saat itu. Demikian pula dengan pemilihan tempat pertemuan itu, diharapkan dapat mengubah sikap para penguasa di daerah ini, mengingat beberapa daerah khususnya Bone telah diduduki oleh NICA pada waktu itu. Akan tetapi sikap raja-raja di Sulawesi Selatan pada pertemuan itu, ternyata tetap pada pendiriannya yang mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan negara Republik Indonesia. Dalam salah satu laporan pemerintah kolonial Belanda (NICA) dinyatakan bahwa raja-raja terpenting, misalnya Raja Bone Andi Mappanyukki dan Datu Luwu Andi Djemma, menyatakan mendukung Republik Indonesia (Poelinggomang, 2003:4; Arfah, dkk., 1993:179). Sikap para pemegang kendali kekuasaan di Sulawesi Selatan yang demikian kokohnya itu, sehingga usaha-usaha untuk membatalkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upaya-upaya untuk memecah belah wilayah Republik Indonesia senantiasa ditolak rakyat Indonesia di Sulawesi Selatan.

Reaksi Atas Kedatangan Sekutu dan NICA

Pasukan Australia atas nama Sekutu mendarat di Sulawesi Selatan (Makassar) pada 21 September 1945. Di antara pasukan Australia itu, terdapat pula aparat-aparat NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang dipimpin Mayor J. G. Wegner yang bertugas untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Menurut Barbara Sillars Harvey, bahwa "Pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian, Letnan Gubernur Jenderal Dr. Humbertus J. van Mook, telah tinggal di Australia selama perang, dan dengan mudah dapat mengatur para pejabat NICA menyertai pasukan Australia ketika mendarat di Indonesia Timur (Harvey, 1989:112). Oleh karena itu, kendatipun pasukan Australia yang semula hanya bertugas untuk membebaskan para tawanan Perang Dunia II, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, serta memulihkan keamanan dan ketertiban, tetapi dalam kenyataannya telah banyak membantu aparat-aparat NICA dalam mewujudkan keinginannya. Sebab, kebijakan pimpinan pasukan Australia yang mengintegrasikan NICA ke dalam kesatuan pasukan Australia yang bertugas di wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan, serta menugaskan NICA untuk menjalankan pemerintahan sipil di wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh pasukan-pasukan Sekutu. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, pasukan Australia juga mengizinkan pasukan-pasukan Belanda mendarat di wilayah yang telah diduduki oleh pasukan Australia, dan kepada pasukan-pasukan Belanda itu diberikan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Poelinggomang, 2002:6).⁵

Kebijakan pimpinan pasukan Australia yang bertugas di wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan tersebut, amat berbeda dengan kebijakan yang dijalankan pimpinan pasukan Inggris yang bertugas di

5 Kebijakan pimpinan pasukan Australia yang bertugas di wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan tersebut, amat berbeda dengan kebijakan yang dijalankan pimpinan pasukan Inggris yang bertugas di Jawa dan Sumatra. Di Jawa, Panglima Tentara Inggris Letnan Jenderal Christison melarang campurtangan penguasa Belanda dalam soal pemerintahan atau keamanan, sehingga pegawai sipil Belanda yang tergabung di dalam organisasi yang disebut AMACAB (*Allied Military Administration Civil Affairs Branch*) tidak berfungsi. Sampai bulan Februari 1946, Panglima Angkatan Perang Inggris di Jawa, Christison, melarang pasukan tentara Belanda mendarat di Jawa. Sebaliknya Christison minta bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk turut bersama dengan tentara Inggris menjaga keamanan dan membantu tentara Inggris di dalam tugasnya menjalankan tugas Sekutu, yaitu mendemobilisasi Angkatan Perang Jepang dan membebaskan tawanan perang (Agung, 1985:40).

Jawa dan Sumatra. Di Jawa, Panglima Tentara Inggris Letnan Jenderal Christison melarang campurtangan pemerintah Belanda dalam soal pemerintahan atau keamanan, sehingga pegawai sipil Belanda yang tergabung di dalam organisasi yang disebut AMACAB (*Allied Military Administration Civil Affairs Branch*) tidak berfungsi. Sampai Februari 1946, Panglima Angkatan Perang Inggris di Jawa, Christison, melarang pasukan Belanda mendarat di Jawa. Sebaliknya Christison minta bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk turut bersama dengan tentara Inggris menjaga keamanan dan membantu tentara Inggris di dalam tugasnya menjalankan tugas Sekutu, yaitu mendemobilisasi Angkatan Perang Jepang dan membebaskan tawanan perang (Agung, 1985:40).

Atas kebijakan pasukan Australia tersebut, aparat-aparat NICA segera menjalankan pemerintahan sipil di bawah naungan pasukan Australia. Pemerintah Belanda mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan memperkuat kedudukan di wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh pasukan Australia. Mereka kemudian dibantu oleh pasukan-pasukan Belanda dan bekas-bekas pegawai pamong praja (*Corps Binenlands Bestuur*), yang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda bertugas di wilayah tersebut sebagai residen, asisten residen, kontroleur, dan jabatan-jabatan lainnya. Di daerah-daerah yang pada zaman Hindia Belanda berkuasa seorang residen Belanda, diangkat seorang CO-NICA (*Commanding Officer NICA*), dan di tempat lain yang dulu berkuasa seorang asisten residen atau kontroleur, ditempatkan seorang opsir NICA. Pemerintah kolonial Belanda dalam waktu yang singkat berhasil melakukan konsolidasi kedudukan politiknya dan memfungsikan kembali aparat pemerintahannya yang dikenal dengan nama NICA di wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan. Kebijakan pimpinan pasukan Australia tersebut, jelas memberikan keuntungan politis yang luar biasa kepada pihak Belanda. Hal inilah yang menyebabkan keadaan dan kondisi politik di wilayah Indonesia Timur amat berbeda dengan keadaan di Jawa, yang tentunya mempengaruhi perkembangan politik di Indonesia Timur pada masa-masa berikutnya (Agung, 1985:41).

Menurut Ide Anak Agung Gde Agung, bahwa berdasarkan laporan dari Chief CO-NICA De Rooy yang berkedudukan di Morotai mengenai perkembangan politik di wilayah Indonesia Timur (Timur Besar termasuk Irian Barat, kecuali Bali) dari November 1945 sampai Maret 1946, tampak jelas kerjasama yang erat antara aparat-aparat NICA

dengan Tentara Australia dalam pendudukan wilayah tersebut oleh Sekutu. Bahkan aparat NICA berperan sangat menentukan dalam mewujudkan pemerintahan sipil yang tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Hindia Belanda sebelum Perang Pasifik. Dari laporan-laporan tersebut dapat juga disimpulkan bahwa aparat NICA tidak mudah mewujudkan lagi tata pemerintahan kolonial Belanda, karena setelah proklamasi kemerdekaan di mana-mana di Indonesia Timur termasuk di Bali dibentuk komite nasional daerah sesuai dengan instruksi Pemerintah Republik Indonesia. Itulah sebabnya di beberapa daerah terdapat perlawanan pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi kelaskaran atau perjuangan kemerdekaan dan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia (Agung,1985:42).

Salah satu basis perlawanan yang paling sengit di Indonesia Timur, menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda adalah daerah Sulawesi Selatan (Poelinggomang,2002:7). Namun tidak menyurutkan keinginan aparat NICA yang mendapat dukungan dan bantuan dari pasukan Australia untuk memulihkan kembali pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Aparat-aparat NICA di bawah pimpinan Wegner mulai bergiat mengambil alih pemerintahan sipil dari tangan Jepang dan bertindak sebagai pemerintah yang sah. Pimpinan NICA itu kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas dan memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda pada sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Ia bertindak secara sepihak mengangkat kembali bekas pegawai pamong praja Belanda untuk menduduki jabatan pemerintahan dan menggantikan pejabat-pejabat pada masa Jepang. Juga menyatakan tidak berlakunya lagi uang Jepang dan sebagai penggantinya dikeluarkan uang NICA. Mempersenjatai orang-orang Belanda, Indo Belanda, dan Ambon yang baru dibebaskan dari tahanan, serta mendemonstrasikan arak-arakan mobil yang penuh dengan orang Belanda sambil menyanyikan lagu-lagu Belanda (Kadir, dkk., 1984:100; Harvey,1989:113).

Tindakan-tindakan aparat NICA tersebut, mendorong rakyat di daerah ini untuk melancarkan protes yang kemudian menyebabkan terjadinya berbagai pergolakan menentang kehadiran NICA dan terbentuknya berbagai organisasi perjuangan atau kelaskaran yang bertujuan menentang dan menggagalkan usaha NICA. Reaksi rakyat

itu tentu tidak terlepas dari sikap dan dukungan serta peran raja-raja di Sulawesi Selatan yang bergiat mendorong rakyatnya tampil dengan gigih menentang kehadiran dan usaha NICA. Namun karena kebijakan pimpinan pasukan Australia yang menempatkan NICA sebagai bahagian yang integral dari pasukan Sekutu dalam menjalankan tugasnya di Sulawesi Selatan, sehingga dalam waktu yang singkat NICA berhasil memperkuat kedudukannya di Kota Makassar dan daerah-daerah pedalaman. Misalnya, Parepare diduduki pada 6 Oktober 1945, Sungguminasa diduduki pada 10 Oktober 1945, Bantaeng diduduki pada 14 Oktober 1945, dan Maros diduduki pada 15 Oktober 1945. Meskipun pada awalnya kehadiran pasukan Australia dan NICA di daerah-daerah itu, mendapat perlawanan dari pihak pemuda-pemuda yang didukung sepenuhnya oleh raja-raja atau para bangsawan setempat, tetapi pada akhirnya aparat-aparat NICA berhasil memperkuat kedudukannya di daerah-daerah tersebut (Kadir,dkk.,1984:104).

Kedudukan NICA di Sulawesi Selatan, secara politis menjadi lebih kuat lagi setelah terjadi pergantian pimpinan pasukan Australia dari tangan Brigjen Iwan Dougherty kepada Brigjen F.O. Chilton pada 19 Oktober 1945 (Harvey, 1989:114). Sebab, kebijakan-kebijakannya yang amat mendukung dan membantu NICA untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pimpinan pasukan Australia Brigjen F.O. Chilton yang diumumkan pada 21 Oktober 1945, yaitu antara lain sebagai berikut: (1) Tentara Australia bertanggungjawab tentang keamanan, (2) NICA adalah bagian integral dari Komando Tentara Australia, dan (3) Semua pasukan Australia diperintahkan untuk memberikan pengamanan kepada NICA dalam menjalankan pemerintahan sipil di Sulawesi (Agung,1985:54; Kadir,dkk.,1984:104).

Pengumuman tersebut jelas semakin memberikan kesempatan kepada aparat NICA untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi setelah Letnan Kolonel Dr. C. Lion Cache⁶ tampil menggantikan Wegner, dan diberi pangkat Commanding Officer NICA

6 Letkol Dr. C. Lion Cache adalah seorang anggota Korps Pamong Praja Belanda (Corps Binnenlands Bestuur) yang berpengalaman. Sebelum Perang Pasifik ia pernah bertugas di Bali sebagai Sekretaris Residen Bali dan Lombok dan kemudian dipindahkan ke Makassar di mana dia diangkat sebagai Sekretaris Gubernur Timur Besar pada waktu itu. Letkol Dr. C. Lion Cache terkenal sebagai pegawai kolonial Belanda yang sangat reaksioner yang ingin mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia (Agung, 1985:53).

(CO-NICA) yang membawahi semua opsir-opsir dan kesatuan NICA yang bertugas di Sulawesi Selatan. Ia tetap melanjutkan kebijakan pendahulunya dan semakin memantapkan strategi penguasaan kembali wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, khususnya di Sulawesi Selatan. Atas desakannya kepada pimpinan pasukan Australia, sehingga Chilton menyetujui pengiriman beberapa batalyon pasukan untuk menduduki wilayah-wilayah terpenting, seperti Bone dan Banthæen, serta memerintahkan kepada pasukannya agar membantu NICA dalam memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan sipil di wilayah-wilayah itu. Lion Cache kemudian mengirim satu pasukan Australia di bawah pimpinan opsir NICA, yaitu L. A. Emmanuel (mantan kontrolir Wajo) yang disertai oleh Eldring dan Wesseling ke Bone, dan mereka mulai berhasil menduduki Bone pada 25 Oktober 1945. Seperti halnya di daerah-daerah lain, kehadiran pasukan Australia dan NICA di Bone juga mendapat perlawanan dari pihak pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi perjuangan Pengawal Tanah Bone (PTB) dan Badan Pemberontak Rakyat Bone (BPRB) yang mendapat dukungan sepenuhnya dari Raja Bone Andi Mappanyukki (Harvey, 1989:115; Sophiaan, 1991:90).

Kenyataan-kenyataan itulah yang antara lain yang menyebabkan pemuda-pemuda di Makassar mengorganisir kekuatan untuk melancarkan perlawanan terhadap kedudukan Sekutu dan NICA di Makassar. Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda tersebut, mereka berhasil melahirkan kesepakatan bersama pada 28 Oktober 1945, untuk melancarkan penyerangan secara serentak terhadap kedudukan NICA dan tempat-tempat strategis yang berada di Kota Makassar pada dini hari 29 Oktober 1945. Serangan yang dilancarkan secara mendadak oleh pemuda-pemuda pada hari itu, berhasil menguasai beberapa tempat strategis dan pos-pos NICA yang terpenting, antara lain Stasiun Radio Maradekaya dan Mattoangin, Asrama Polisi NICA, Kantor CO-NICA, dan Hotel Empress. Selain itu, mereka berhasil juga melucuti senjata beberapa perwira NICA (Said, 1984:51; Kadir, dkk., 1984:110).

Tindakan pemuda-pemuda itu menyebabkan pimpinan pasukan Australia sangat marah dan menganggapnya sebagai suatu pelanggaran keamanan dan ketertiban yang amat besar di wilayah yang merupakan tanggungjawabnya. Pasukan Australia segera turun tangan melakukan pengamanan dan berhasil melumpuhkan pemuda-pemuda. Bahkan mereka berhasil merampas kembali senjata-senjata yang telah direbut

oleh pemuda-pemuda serta menangkap dan menawan sekitar 50 orang pimpinan pemuda yang melancarkan aksi penyerangan. Oleh karena itu, untuk mencegah tindak perlawanan rakyat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, maka Panglima Tentara Australia mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh Chilton pada 29 Oktober 1945. Dalam maklumat tersebut dengan tegas dinyatakan akan diadakan tindakan keras terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban, yaitu sebagai berikut :

Kejahatan terhadap pemerintah militer Sekutu di Sulawesi Selatan :

1. Memakai atau mempunyai senjata apapun, termasuk segala rupa senjata api, granat tangan, senjata-senjata peledak, parang, keris, badik dan tombak. Barang siapa yang memakai senjata-senjata tersebut dapat ditembak mati.
2. Mengadakan perarakan atau pertunjukan semacam apapun.
3. Paksaan kekejaman atau ancaman terhadap barang siapapun.
4. Menolong atau menyokong barang siapa yang telah membuat kejahatan.
5. Tidak mau menjual makanan, pakaian atau keperluan sehari-hari dengan alasan perbedaan bangsa atau derajat.
6. Menghalangi pemakaian jalan dengan leluasa.
7. Merusak, membinasakan, menghalangi segala urusan umum atau pembangunan Sekutu, termasuk juga pembangunan weterleiding, perusahaan listrik dan gas, telepon, telegraf, dan stasiun radio. Barang siapa yang melakukan kesalahan itu akan ditembak mati ditempat.
8. Pencurian dan pembakaran rumah orang.
9. Memakai pakaian militer atau uniform lain apabila bukan anggota pasukan Sekutu atau Polisi.
10. Turut latihan secara militer dalam bentuk apa pun.

Segala peraturan tersebut di atas pasti akan dilaksanakan oleh semua serdadu-serdadu di bawah perintah saya.

Makassar, 29 Oktober 1945

Brigadir Panglima Tentara Australia

Di Makassar

F. O. Chilton (Arsip NIT, No.162)

Maklumat Panglima Tentara Australia tersebut, jelas sangat merugikan bagi perjuangan dalam menegakkan membela dan

(CO-NICA) yang membawahi semua opsir-opsir dan kesatuan NICA yang bertugas di Sulawesi Selatan. Ia tetap melanjutkan kebijakan pendahulunya dan semakin memantapkan strategi penguasaan kembali wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, khususnya di Sulawesi Selatan. Atas desakannya kepada pimpinan pasukan Australia, sehingga Chilton menyetujui pengiriman beberapa batalyon pasukan untuk menduduki wilayah-wilayah terpenting, seperti Bone dan Banthoen, serta memerintahkan kepada pasukannya agar membantu NICA dalam memulihkan kembali kekuasaan pemerintahan sipil di wilayah-wilayah itu. Lion Cache kemudian mengirim satu pasukan Australia di bawah pimpinan opsir NICA, yaitu L. A. Emmanuel (mantan kontrolir Wajo) yang disertai oleh Eldring dan Wesseling ke Bone, dan mereka mulai berhasil menduduki Bone pada 25 Oktober 1945. Seperti halnya di daerah-daerah lain, kehadiran pasukan Australia dan NICA di Bone juga mendapat perlawanan dari pihak pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi perjuangan Pengawal Tanah Bone (PTB) dan Badan Pemberontak Rakyat Bone (BPRB) yang mendapat dukungan sepenuhnya dari Raja Bone Andi Mappanyukki (Harvey, 1989:115; Sophiana, 1991:90).

Kenyataan-kenyataan itulah yang antara lain yang menyebabkan pemuda-pemuda di Makassar mengorganisir kekuatan untuk melancarkan perlawanan terhadap kedudukan Sekutu dan NICA di Makassar. Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda tersebut, mereka berhasil melahirkan kesepakatan bersama pada 28 Oktober 1945, untuk melancarkan penyerangan secara serentak terhadap kedudukan NICA dan tempat-tempat strategis yang berada di Kota Makassar pada dini hari 29 Oktober 1945. Serangan yang dilancarkan secara mendadak oleh pemuda-pemuda pada hari itu, berhasil menguasai beberapa tempat strategis dan pos-pos NICA yang terpenting, antara lain Stasiun Radio Maradekaya dan Mattoangin, Asrama Polisi NICA, Kantor CO-NICA, dan Hotel Empress. Selain itu, mereka berhasil juga melucuti senjata beberapa perwira NICA (Said, 1984:51; Kadir, dkk., 1984:110).

Tindakan pemuda-pemuda itu menyebabkan pimpinan pasukan Australia sangat marah dan menganggapnya sebagai suatu pelanggaran keamanan dan ketertiban yang amat besar di wilayah yang merupakan tanggungjawabnya. Pasukan Australia segera turun tangan melakukan pengamanan dan berhasil melumpuhkan pemuda-pemuda. Bahkan mereka berhasil merampas kembali senjata-senjata yang telah direbut

oleh pemuda-pemuda serta menangkap dan menawan sekitar 50 orang pimpinan pemuda yang melancarkan aksi penyerangan. Oleh karena itu, untuk mencegah tindak perlawanan rakyat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, maka Panglima Tentara Australia mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh Chilton pada 29 Oktober 1945. Dalam maklumat tersebut dengan tegas dinyatakan akan diadakan tindakan keras terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban, yaitu sebagai berikut :

Kejahatan terhadap pemerintah militer Sekutu di Sulawesi Selatan :

1. Memakai atau mempunyai senjata apapun, termasuk segala rupa senjata api, granat tangan, senjata-senjata peledak, parang, keris, badik dan tombak. Barang siapa yang memakai senjata-senjata tersebut dapat ditembak mati.
2. Mengadakan perarakan atau pertunjukan semacam apapun.
3. Paksaan kekejaman atau ancaman terhadap barang siapapun.
4. Menolong atau menyokong barang siapa yang telah membuat kejahatan.
5. Tidak mau menjual makanan, pakaian atau keperluan sehari-hari dengan alasan perbedaan bangsa atau derajat.
6. Menghalangi pemakaian jalan dengan leluasa.
7. Merusak, membinasakan, menghalangi segala urusan umum atau pembangunan Sekutu, termasuk juga pembangunan weterleiding, perusahaan listrik dan gas, telepon, telegraf, dan stasiun radio. Barang siapa yang melakukan kesalahan itu akan ditembak mati ditempat.
8. Pencurian dan pembakaran rumah orang.
9. Memakai pakaian militer atau uniform lain apabila bukan anggota pasukan Sekutu atau Polisi.
10. Turut latihan secara militer dalam bentuk apa pun.

Segala peraturan tersebut di atas pasti akan dilaksanakan oleh semua serdadu-serdadu di bawah perintah saya.

Makassar, 29 Oktober 1945

Brigadir Panglima Tentara Australia

Di Makassar

F. O. Chilton (Arsip NIT, No.162)

Maklumat Panglima Tentara Australia tersebut, jelas sangat merugikan bagi perjuangan dalam menegakkan membela dan

mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan, dan sangat memberi keuntungan politis kepada NICA pada sisi yang lainnya. Bahkan jika disimak lebih dalam, dapat dikatakan bahwa maklumat F.O. Chilton itu, bukan hanya sebagai jawaban atas serangan umum yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda, melainkan juga sebagai permulaan dari pada kekejaman yang dilakukan oleh Sekutu dan NICA di Sulawesi Selatan. Sebab, melakukan penembakan tanpa melalui proses peradilan merupakan tindakan di luar batas kemanusiaan. Jadi dapat pula dikatakan bahwa kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh NAZI di Eropa, ternyata dipraktekkan pula oleh Sekutu dan NICA di Sulawesi Selatan. Oleh karena sejak maklumat itu, pihak Sekutu telah memberi legitimasi kepada aparat NICA untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang kejam tanpa proses terhadap siapapun yang dianggap musuh atau dapat menggagu keamanan dan ketertiban di mata mereka. Menurut *Saleh Lahade*, bahwa serangan umum yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda pada 28-29 Oktober 1945 tersebut, merupakan tindakan provokatif dari pihak NICA dan kakitangannya, sehingga berakibat fatal bagi perjuangan menentang kehadiran dan usaha NICA di Sulawesi Selatan (*Lahade, 1982:368; Harvey, 1989:115*).

Serangan yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda terhadap kedudukan NICA di Makassar, yang kemudian disusul oleh maklumat Chilton pada 29 Oktober 1945 tersebut, mendorong Dr. Ratulangi untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan pasukan Australia pada awal November 1945.⁷ Dalam pertemuan itu, pimpinan pasukan Australia Chilton antara lain meminta agar Dr. Ratulangi mau bekerjasama dan mengusahakan supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi serta mengajukan usul menyangkut cara pemerintahan di Sulawesi Selatan. Selain itu, Chilton juga mengakui bahwa "ia tidak percaya NICA mampu menjalankan pemerintahan dan menjamin keamanan". Dr. Ratulangi lalu menyarankan agar semua asisten residen dan kontrolir NICA ditarik dari pedalaman, dan mengusulkan supaya Kota Makassar diperintah oleh suatu panitia RI-NICA, serta daerah pedalaman akan berada di bawah yurisdiksi pemerintah Republik Indonesia dengan Watampone (di Bone) sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Sulawesi. Chilton belum dapat memenuhi usul Dr. Ratulangi itu

7. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pertemuan antara Dr. Ratulangi dengan pimpinan pasukan Australia Brigjen F.O. Chilton terjadi pada 2 November 1945 (*Hervey, 1989:116; Agung, 1985:59*). Sedangkan menurut Harun Kadir, dkk., bahwa pertemuan antara Dr. Ratulangi dengan F.O. Chilton di Kantor Panglima Tentara Australia itu pada 3 November 1945 (*Kadir, dkk., 1984:113*).

karena masih harus dipertimbangkan dan minta persetujuan dari pimpinan komandan pasukan Sekutu dan Australia di Indonesia. Bahkan Chilton sebaliknya menekankan kepada Dr. Ratulangi agar keamanan di Sulawesi Selatan segera dipulihkan dan minta kepada Dr. Ratulangi agar dalam waktu singkat mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan raja-raja, kepala-kepala adat, dan pemuka-pemuka masyarakat dalam rangka memulihkan keamanan, sehingga di dalam tiga minggu keamanan sudah pulih kembali. Dr. Ratulangi tampaknya percaya beberapa dari tuntutananya akan dipenuhi kalau ia mampu memulihkan keamanan dalam waktu tiga minggu (Harvey, 1989:116; Kadir, dkk., 1984:112).

Setelah pertemuan tersebut, Dr. Ratulangi berusaha untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin rakyat dan raja-raja di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Dr. Ratulangi bersama Lanto Daeng Pasewang segera berangkat ke Watampone. Mereka berhasil menyelenggarakan pertemuan bersama dengan Raja Bone (Andi Mappanyukki) dan Datu Luwu (Andi Djemma) yang masing-masing didampingi oleh dewan hadatnya di Watampone pada 5 November 1945. Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan antara lain bahwa semua aparat NICA atau pegawai Belanda harus ditarik kembali dari pedalaman. Kesepakatan itu kemudian dikirim kepada Chilton dalam bentuk telegram pada 6 November 1945.⁸ Setelah pertemuan khusus itu, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan umum pada 6-7 November 1945. Dalam pertemuan itu, Dr. Ratulangi melaporkan tentang hasil pertemuannya dengan Chilton dan hasil pertemuan pendahuluan yang dilakukan bersama raja Bone dan datu Luwu yang disertai dengan dewan hadat masing-masing. Pada dasarnya peserta pertemuan menerima baik hasil-hasil pertemuan terdahulu tersebut.⁹

Dr. Ratulangi setelah pertemuan itu tetap menetap di Watampone dan ia hanya mengirimkan laporan pertemuan itu kepada pihak Sekutu. Sehubungan dengan itu ada baiknya disimak pernyataan dari Andi

8 Adapun isi telegram itu adalah : "Konperensi dengan raja-raja Bone, Luwu, dan Palopo kemarin dihadiri hadatnya lengkap titik beliau setuju permusyawaratan kita akan tetapi bertekad penarikan kembali orang NICA dan pegawai Belanda dari pedalaman titik dalam demikian beliau garansi bertanggung jawab atas damai ketenteraman dan penyelenggaraan makanann serta akan menjalankan undang-undang yang berlaku titik raja Luwu istimewa minta militer dan sipil Jepang dikeluarkan dari daerahnya karena menimbulkan banyak perselisihan dengan rakyat Dr. Ratulangi, Watampone 6.11.1946"(Kadir, dkk., 1984:114).

9 Di samping itu, juga dibicarakan antara lain; masalah penarikan pajak oleh

Pangerang Petta Rani, sebagai berikut:

“Dalam bulan September 1945, tentara Sekutu yang terdiri dari suatu kontingen Australia, mendarat di Makassar. Oleh sebab itu, Dr. Ratulangi dan para pembantunya berpindah ke Watampone sebagai tempat kedudukan sementara Pemerintahan Propinsi Sulawesi... Beliau bersama semua raja-raja dan pemimpin-pemimpin partai/organisasi se Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Tenggara) untuk berapat di bawah pimpinan beliau sebagai gubernur. Beliau menjelaskan situasi politik dan pemerintahan berhubung dengan keadaan pada kesempatan itu, raja-raja dan pemimpin-pemimpin partai/organisasi di Sulawesi Selatan menyatakan lagi dukungan dan kesetiaan mereka terhadap Proklamasi dan Republik” (Abdullah, 1991:129).

Namun hal itu tidak berlangsung lama karena pihak NICA dapat membaca peta politik perjuangan di Sulawesi Selatan dan melihat Bone sebagai pendukung utama Republik Indonesia. Raja Bone Andi Mappanyukki dengan sikap non-kooperatifnya dinilai oleh pihak NICA dapat mengacaukan taktik dan strategi Belanda dalam usaha memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonialnya di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya pihak NICA kembali menempuh jalan sebagaimana yang lazim dipergunakan kolonial Belanda selama penjajahannya di Indonesia, yaitu dengan memecah belah kekuatan politik yang ada di Bone. Andi Pabbenteng¹⁰ ditampilkan sebagai ujung tombak pada taktik dan strategi mereka itu, kemudian melumpuhkan sisa-sisa kekuatan republik yang masih ada.

Dengan tampilnya Andi Pabbenteng di pihak NICA, maka perjuangan pihak pemerintah yang dimaksudkan untuk dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan. Dalam pembicaraan ini peserta rapat menerima baik usul Dr. Ratulangi untuk menunda rencana itu hingga pihak Sekutu memberikan jawaban atas usul pelaksanaan pemerintahan yang telah diajukan. Juga menyangkut maklumat tentang kejahatan terhadap pemerintah Militer Sekutu yang dikeluarkan oleh Chilton pada 29 Oktober 1945, dalam pembicaraan menyangkut hal itu, dicapai kata sepakat untuk mengusulkan kepada Komandan Tentara Sekutu agar sangsi tembak mati di tempat bagi mereka yang membawa senjata tanpa izin digantikan dengan sangsi penyitaan senjata dari mereka yang membawa senjata tanpa izin penggunaan senjata (Kadir,dkk.,1984:115; Harvey, 1989:117).

¹⁰ Andi Pabbenteng adalah putra dari Petta PonggawaE Baso Pagilingi Abdul Hamid dan cucu dari Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri. Setelah Kerajaan Bone dipulihkan kembali pada 1931, Andi Pabbenteng kemudian diangkat menjadi Arung Macege salah satu anggota Dewan Hadat Tujuh Kerajaan Bone. Namun karena suatu kesalahan yang diperbuatnya, yaitu membunuh salah seorang Arung, sehingga ia diasingkan oleh Hadat Tujuh Bone ke Pulau Buton selama 8 tahun, kendatipun pembunuhan yang dilakukannya berpangkal pada masalah siri. Setelah Jepang menyerah, ia kembali ke Bone. Ia hanya menjalani hukuman selama 3 tahun. Tampaknya Belanda mengetahui hal ini, sehingga didekatinya Andi Pabbenteng untuk menyingkirkan Raja Bone Andi

dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Bone mengalami kelumpuhan. Aksi-aksi pemuda yang dikoordinir oleh berbagai organisasi perjuangan tidak dapat berkembang dan berbuat banyak setelah perpecahan tersebut (Arfah,dkk.,1993:178).

Demikian pula terhadap Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi, karena ketika ia pindah ke Watampone dan sebagian besar tokoh-tokoh penting golongan republik tidak berada di Kota Makassar, pihak NICA yang telah mengetahui adanya perpecahan di antara tokoh-tokoh politik di Sulawesi Selatan mulai memanfaatkan kesempatan untuk memikat lawan-lawan politik dari Dr. Ratulangi. Pada November 1945, usaha NICA itu berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan Nadjamuddin Daeng Malewa yang kemudian diikuti oleh Baso Daeng Malewa, Abdoellah Daeng Mappoedji, Hoesain Poeang Limboro, Mr. S. Binol, H.K.W. Tambunan, dan J. H. Hattu." Setelah berhasil menjalin Mappanyukki tanpa kekerasan. Andi Pabbenteng dianggap sebagai seorang tokoh yang dapat menyaingi Andi Mappanyukki, sehingga ia ditampilkan untuk menyelah di antara kaum bangsawan dalam Kerajaan Bone dan diharapkan untuk mempengaruhi para bangsawan agar menarik dukungannya terhadap Andi Mappanyukki yang pro republik. Taktik dan strategi Belanda itu untuk sementara tampaknya memang berhasil. Sebab, dengan berdirinya Andi Pabbenteng di pihak NICA, perjuangan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan di Bone mengalami perkembangan lain. Pihak yang dulunya masih ragu-ragu dalam menentukan sikap, kembali meragukan perjuangan dari Andi Mappanyukki. Sebaliknya mereka melihat kekuatan yang dimiliki oleh Andi Pabbenteng yang diangkat sebagai kepala keamanan Kerajaan Bone oleh NICA dengan pangkat Kapten KNIL titular. Dengan jabatan itu, semakin mempertegas pertentangan dari dua kekuatan yang saling berlawanan. Sementara mereka yang ragu-ragu itu, menyatakan sikap berdiri di belakang Andi Pabbenteng. Dukungan terhadap republik di bawah Andi Mappanyukki mulai kehilangan banyak pengikut. Mulai dari raja-raja kecil sampai pada pegawai-pegawai, dan sebagian aparat kerajaan. Hal ini disebabkan karena besarnya pengaruh dari Komisaris Tingkat I Andi Pabbenteng. Perlahan-lahan perjuangan Merah Putih mengalami masa surut. Andi Mapanyukki menempati posisi sangat sulit. Organisasi perjuangan PTB dan BPRB tidak dapat memberikan dukungan yang berarti dan mengalami kelumpuhan. Bahkan tidak mampu bertahan dari tujuan semula setelah beberapa pengurusnya yang terdiri dari aparat kerajaan mendukung Andi Pabenteng yang pro NICA. Perpecahan itu merupakan titik lemah yang sangat menentukan dalam perkembangan perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan selanjutnya di Bone (Shahib,1980:74).Sedangkan menurut Andi Mappasissi Petta Awampone, bahwa Andi Pabbenteng pernah berkata "*Menengngngi gennei duwa lino uwalai taceddikku Andi Mappanyukki*" (Andaikan cukup dua dunia saya tidak mau bersama dengan Andi Mappanyukki). Oleh karena pada waktu itu Andi Mappanyukki berada di pihak republik, maka Andi Pabbenteng ke pihak NICA. Ini adalah sumpah yang ditepatinya, karena seorang Bugis sejati tidak akan mengingkari janjinya (Andi Mappasissi, wawancara di Watampone pada 1 September 1992; Arfah, dkk., 1993:202).

11 Pada akhir Oktober 1945, Dr. Ratulangi mengadakan pembicaraan empat mata dengan Nadjamuddin Daeng Malewa, tokoh politik Sulawesi Selatan yang ter-

kerjasama dengan beberapa tokoh politik dan pemuka masyarakat Sulawesi Selatan, pihak NICA melaporkan kepada pimpinan pasukan Australia bahwa berdasarkan salah satu laporan yang berhasil disita dari hasil pertemuan Dr. Ratulangi dengan raja-raja dan pemimpin rakyat di Watampone, menunjukkan adanya usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah hasil perundingan antara Dr. Ratulangi dengan Chilton dan memohon agar Dr. Ratulangi segera dipanggil kembali ke Makassar. Pengaduan yang disampaikan pada 20 November 1945 itu, berhasil mempengaruhi pimpinan pasukan Australia, sehingga ia memanggil pulang Dr. Ratulangi yang pada waktu itu berada di Watampone. Ketika Dr. Ratulangi tiba di Makassar, CO-NICA berupaya untuk menangkap dan menawaninya, tetapi usaha itu tidak berhasil karena dicegah dan dibatalkan oleh Komandan Pasukan Sekutu yang berada di Morotai (Harvey, 1989:117; Kadir, dkk. 1984:118; Agung, 1985:61).

Kegagalan NICA menangkap Dr. Ratulangi tersebut, tidak mematahkan semangat dan berusahanya untuk menyudutkan pihak republik. Dengan berbagai cara CO-NICA, Lion Cachet berhasil mempengaruhi pimpinan pasukan Australia, sehingga Chilton mengeluarkan pengumuman yang semakin memperkuat kedudukan NICA pada 21 November 1945, yang dengan tegas dinyatakan bahwa NICA adalah bagian yang integral dari pemerintahan militer Sekutu, perintah dan peraturan-peraturannya mempunyai kewenangan dari "Komandan Tentara Sekutu", serta setiap kegiatan atas nama pemerintah republik dilarang (Harvey, 1989:117). Atas pengumuman itu, pihak NICA mengharapkan dapat memperoleh dukungan dari raja-raja di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diselenggarakanlah serangkaian kemuka. Kendatipun hasil pembicaraan itu tidak diketahui orang lain, tetapi keesokan harinya Nadjamuddin Daeng Malewa mengadakan pidato radio yang menyatakan kesanggupannya untuk bekerjasama dengan NICA. Tentunya pernyataan itu sangat mengemparkan masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam daftar pejabat-pejabat NICA yang dikeluarkan oleh kantor CO-NICA di Makassar pada November 1945, sudah tercantum nama Nadjamuddin Daeng Malewa sebagai pejabat NICA dengan pangkat sebagai pemimpin perahu transport dan kemudian sebagai *handelsconsulent* (penasehat perdagangan). Demikian pula dalam laporan *Chef* CO-NICA di Morotai De Rooy dari periode 21 sampai 30 November 1945, antara lain dinyatakan tentang kerjasama Nadjamuddin Daeng Malewa dengan NICA yang diikuti oleh Baso Daeng Malewa, Abdoellah Daeng Mapoedji, Husain Puang Limboro, Mr.S. Binol, M.K.W. Tambunan, dan J. H. Hattu. Atas kerjasama itu Baso Daeng Malewa diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Makassar, Abdoellah Daeng Mappoedji dan Mr.S. Binol diangkat sebagai Pengganti Hakim Pengadilan Negeri, serta Husain Puang Limboro, M.K.W. Tambunan, dan J.H. Hattu diangkat sebagai Panitera Pengadilan Negeri Makassar (Agung, 1985: 60-61).

pertemuan dengan raja-raja dan tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan. Pada 28 November 1945, Lion Cachet yang disertai Mayor Hearman dari pasukan Australia mengadakan pertemuan dengan Raja Bone Andi Mappanyukki, yang kemudian dilanjutkan pertemuan besar dengan raja-raja Sulawesi Selatan di Watampone pada 1 Desember 1945 (Arfah, 1993:179).

Lion Cachet bersama Mayor Hearman kemudian mengadakan pertemuan dengan Raja Gowa di Sungguminasa pada 6 Desember 1945. Berikutnya Lion Cachet disertai Letkol Picken dari pasukan Australia mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat di Makassar pada 13 Desember 1945, serta dengan raja-raja dan pemuka-pemuka masyarakat di Parepare pada 17 Desember 1945. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pokok pembicaraan terpenting antara lain menyangkut tugas pasukan Australia untuk menjaga keamanan, dan tugas NICA sebagai bagian dari pasukan Sekutu untuk memulihkan pemerintahan sipil di Sulawesi Selatan, serta mendesak raja-raja dan pemuka-pemuka masyarakat untuk mengadakan kerjasama dan memberikan bantuan seperlunya kepada NICA. Selain itu, juga dicapai kesepakatan untuk melangsungkan suatu pertemuan besar di Makassar pada 29 Desember 1945. Namun beberapa raja tetap menolak dan bersedia dipecat dari pada harus menerima dan mengakui NICA.¹² Di antara raja-raja yang menolak dengan tegas ialah Raja Bone Andi Mappanyukki, Datu Luwu Andi Djemma, dan Datu Suppa Andi Abdullah Bau Massepe. Meskipun mendapat penolakan dari sebagian raja di Sulawesi Selatan, pihak NICA tetap menempatkan diri sebagai pemerintah yang sah. Kenyataan itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai pergolakan rakyat dan terbentuknya organisasi-organisasi kelaskaran yang bertujuan menentang NICA (Arsip NIT, No.103; Kadir, dkk., 1984:118).

Selain mengadakan pertemuan dengan raja-raja dan para pemuka masyarakat Sulawesi Selatan, CO-NICA Lion Cachet juga melakukan perundingan dengan wakil-wakil dari Pusat Keselamatan Rakyat (PKR) pada 18 dan 20 Desember 1945. Wakil-wakil dari PKR itu terdiri

12 Atas kebijakan-kebijakan pimpinan pasukan Australia itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangan selanjutnya beberapa di antara mereka, terutama yang senantiasa diliputi keraguan akan kejayaan bangsa kita kelak dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, bersedia bekerjasama dengan NICA. Mereka itu antara lain Andi Pabbenteng, Laode Palihi, La Tjibu, Nadjamuddin Daeng Malewa, Abdullah Daeng Mappuji, Baso Daeng Malewa, Abdul Radjab, dan lain-lain. Mereka inilah yang kemudian menjadi pendukung utama konsep federal van Mook (Amir, 2001:30).

atas Dr. Ratulangi (bertindak sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia di Sulawesi), Lanto Daeng Pasewang (Wakil Komite Nasional Indonesia), H. Mansur Daeng Tompo (Ketua Umum Djamiah Islamiah Selebes), Inche Mohammad Saleh Daeng Tompo (Bestuursassistent yang mewakili golongannya), L. Latumahina (Anggota Pengurus Dewan Kristen Selebes), Makki (wakil golongan buruh), H. Sewang Daeng Moentoe (Ketua Muhammadiyah Selebes), dan Sam Kepala Bagian Pendidikan PKR (Arsip NIT, No.10). Pertemuan itu merupakan pertemuan yang pertama kalinya antara CO-NICA dengan Dr. Ratulangi dan anggota-anggota PKR. Dalam pertemuan itu disepakati antara lain akan menyelenggarakan pertemuan besar bersama-sama dengan raja-raja, kepala-kepala adat, dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi Selatan pada 30 Desember 1945. Sehari sebelum pertemuan besar itu, berlangsunglah pertemuan antara pihak NICA dengan raja-raja, kepala-kepala adat, dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi Selatan di Makassar pada 29 Desember 1945. Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Chilton itu, kembali dijelaskan bahwa tugas pasukan Australia untuk menjaga keamanan, dan tugas NICA sebagai bagian dari pasukan Sekutu untuk memulihkan pemerintahan sipil di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu diminta kesediaan semua golongan untuk menjalin kerjasama dan memberikan bantuan seperlunya (Kadir,dkk.,1984:120).

Sesuai dengan rencana, maka pada 30 Desember 1945 dilangsungkanlah pertemuan besar bersama antara pihak NICA dengan wakil-wakil PKR, raja-raja, kepala-kepala adat, dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi Selatan di Kantor CO-NICA Makassar yang dihadiri 41 orang.¹³ Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan untuk menata pemerintahan sementara sampai tercapainya keputusan tentang nasib Indonesia dalam perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan sementara yang disepakati itu ialah pembagian wilayah Sulawesi Selatan atas dua bagian, yaitu Kota Makassar berada di bawah pemerintahan sipil NICA dan daerah pedalaman berada di bawah pemerintahan bangsa Indonesia. Untuk

13 Di antaranya Co-NICA Makassar bersama stafnya, beberapa raja terkemuka seperti Raja Bone Andi Mappanyukki, Datu Luwu Andi Djemma, Raja Gowa, Datu Suppa, Arung Mallusetasi, Arung Soppeng Riaja, Maradia Balanipa, Arung Bila Soppeng, Arung Buló-Bulo Barat dan Timur, Karaeng Bonthain, Galesong, Pangkajene, Binamu, Ujung Tanah, Addatuang Sidenreng, Arung Bonto Batu, Tomailalang Gowa, Tomarilaleng Bone, Hadat Balanipa, Arung Macege (Andi Pangerang Petta Rani), dan lain-lain, sementara wakil-wakil dari PKR seperti Dr. Ratulangi, Inche Mohammad Saleh Daeng Tompo, Lanto Daeng Pasewang, W.S.T. Pondaag, dan lain-lain (Arsip NIT, No. 10).

itu dibentuklah “Panitia Persiapan” yang akan membahas mengenai usul pembentukan suatu badan pemerintahan baru di Sulawesi Selatan. Anggota Panitia Persiapan itu terdiri atas: Andi Maddoesila (Tomarilaleng Bone), Andi Pangerang (Arung Macege, Bone), Abdoellah Bau Massepe (Datu Suppa), Andi Boerhanoeddin (Karaeng Pangkajene), Mappatoba (Arung Bulu-Bulu Timur), Abdul Razak (Baginda Maharadja Lola), Inche Mohammad Saleh Daeng Tompo (PKR), W.S.T. Pondaag (PKR), Dr. J.W. de Klein (Co NICA Makassar), dan Mr. Tjia Kok Tjiang (Wakil Kotapraja Makassar) (Arsip NIT, No. 10; Agung, 1985: 73).

Pada 12 Januari 1946, panitia persiapan itu mengadakan pertemuan yang dipimpin Lion Cachet. Dalam pertemuan itu muncul dua usul, yaitu pembentukan Dewan Penasehat Sulawesi Selatan dan badan/dewan yang mempunyai wewenang dalam bidang pemerintahan. Selain itu, CO-NICA Lion Cachet juga melakukan pertemuan dengan kelompok Nadjamuddin Daeng Malewa dan kawan-kawan pada 16 Januari 1946, untuk membicarakan mengenai hasil dari serangkaian pertemuan dengan pihak PKR, raja-raja, kepala-kepala adat, dan pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi Selatan. Dari kedua usul itu, tampaknya pembentukan Dewan Penasehat Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan dalam waktu singkat. Itulah sebabnya Lion Cachet segera menyampaikan usul pembentukan dewan penasehat tersebut kepada Chief CO-NICA, De Rooy di Morotai dan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (*Binnenlands Bestuur*), Dr. W. Hoven di Jakarta (Agung, 1985: 73; Kadir, dkk., 1984: 121).

Untuk mewujudkan usulan tersebut, Hoven lalu menyiapkan rencana dan mengirim tenaga teknis dalam bidang perundang-undangan ke Makassar guna menyusun rancangan pembentukan Dewan Penasehat Sulawesi Selatan. Pada 16 Februari 1946, Hoven tiba di Makassar untuk menangani sendiri penyelesaian penyusunan undang-undang pembentukan dewan penasehat itu. Hoven dan pembantu-pembantunya bekerja keras dalam menyelesaikan peraturan pembentukan dewan penasehat tersebut, sehingga ia dapat menandatangani peraturan pembentukan Dewan Penasehat Sulawesi Selatan di Makassar pada 25 Februari 1946, yang peraturan pelaksanaannya dikeluarkan pada 9 Maret 1946. Wewenang utama Dewan Penasehat Sulawesi Selatan, antara lain disebutkan bahwa di samping tugasnya memberi nasihat, dewan juga berhak jika keadaan menghendaki, memperoleh wewenang lain dalam kedudukannya sebagai badan pemerintah (Kadir, dkk., 1984: 122; Agung, 1985: 81).

Sebelum terbentuknya dewan penasehat tersebut, kedudukan Belanda di Sulawesi Selatan makin kuat setelah Markas Besar Chief CO-NICA di Morotai dipindahkan ke Makassar dan pasukan Australia yang dipimpin oleh Brigjen F.O. Chilton digantikan oleh pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigjen D.E. Touten pada akhir Januari 1946. Oleh karena dalam maklumat perpisahannya, Chilton menegaskan kembali bahwa kedudukan dan pekerjaan NICA tetap dan tidak ada perubahan. Selain itu, juga karena pasukan Belanda, termasuk satuan-satuan KNIL yang telah terhimpun dan dipersenjatai kembali, semakin dilibatkan dalam memikul tanggungjawab untuk menjaga keamanan (Agung, 1985:85; Harvey, 1989:118). Terlebih lagi setelah terbentuknya Dewan Penasehat Sulawesi Selatan karena anggota-anggotanya adalah mereka yang bersedia bekerjasama dengan NICA, seperti Andi Pabbenteng, Laode Palihi, La Tjibu, Nadjamuddin Daeng Malewa, Sonda Daeng Mattang, dan lain-lain. Mereka inilah yang kelak muncul sebagai wakil Dewan Penasehat Sulawesi Selatan dalam Konferensi Malino (Kadir, dkk., 1984:183).

Setelah menganggap kedudukannya sudah cukup kuat, pihak NICA mulai melakukan tindakan terhadap mereka yang dapat merintanginya dalam memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya aparat-aparat NICA melakukan penangkapan dan penahanan terhadap beberapa raja atau karaeng seperti Karaeng Bantaeng Andi Mannapiang dan Karaeng Gattareng Andi Sultan Daeng Radja. Demikian pula terhadap wakil-wakil PKRS seperti Dr. Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, Inche Mohammad Saleh Daeng Tompo, W.S.T. Pondaag, J. Latumahina, dan I.P.L. Tobing ditangkap pada 5 April 1946. Tokoh-tokoh PKRS yang ditangkap itu kemudian diasingkan ke Serui (Irian Jaya). Hal yang sama juga dilakukan terhadap Datu Luwu Andi Djemma yang ditangkap pada 2 Juni 1946. Andi Djemma kemudian digantikan oleh Andi Djelling, seorang bangsawan Luwu yang pernah menjadi anggota pemerintahan Kerajaan Luwu. Andi Djelling sejak awal pemilihan Andi Djemma sebagai Datu Luwu sudah menunjukkan ketidaksetujuannya, dan ia mempunyai ambisi untuk menjadi Datu Luwu. Tindakan-tindakan itu dilakukan oleh NICA untuk memuluskan jalan bagi penyelenggaraan Konferensi Malino yang direncanakan akan mulai berlangsung pada 16 Juli 1946, yaitu sehari sesudah rencana penyerahan kekuasaan dan tanggungjawab pemerintahan atas wilayah Indonesia dari Komando Asia Tenggara (Tentara Inggris) kepada

pemerintah Belanda untuk Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada 15 Juli 1946 (Suwarno,1982:11; Gonggong,1992:93).

Dari uraian di atas terlihat bahwa atas dukungan dan bantuan serta kebijakan-kebijakan pasukan Sekutu (Australia dan Inggris), aparat-aparat NICA berhasil memperkuat kedudukan kekuasaan pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi setelah mereka berhasil menjalin kerjasama dengan sebagian tokoh-tokoh politik, raja-raja dan bangsawan yang pro Belanda atau mereka yang ragu-ragu akan kejayaan bangsa kita kelak dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, serta menyingkirkan tokoh-tokoh politik, raja-raja dan bangsawan yang pro Republik Indonesia. Meskipun demikian nanti akan terlihat pula bahwa para pejuang yang terorganisir dalam wadah kelaskaran terus menurus melakukan konsolidasi, dan mencari waktu yang tepat untuk memperlihatkan kekuatannya.

Kelaskaran BPRI dan Perkembangannya

Perjuangan membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hanya dilakukan melalui diplomasi politik, melainkan juga melalui perjuangan fisik. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya organisasi perjuangan dan kelaskaran di berbagai wilayah pemerintahan di Sulawesi Selatan. Salah satu diantaranya adalah organisasi “Penunjang Republik Indonesia” (PRI) yang dibentuk di Makassar pada awal September 1945. Pembentukan organisasi perjuangan PRI Makassar yang disponsori oleh Lanto Daeng Pasewang, pada dasarnya dimaksudkan untuk menggantikan wadah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada akhir masa pendudukan militer Jepang, yaitu SUDARA. Selain itu, juga didirikan organisasi perjuangan pemuda yang kemudian dikenal dengan nama “Pemuda Nasional Indonesia” (PNI) di Makassar pada pertengahan September 1945. Pembentukan organisasi perjuangan pemuda tersebut, dimaksudkan untuk mengorganisasikan pemuda-pemuda dalam satu wadah dalam rangka perjuangan membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (Kadir,dkk.,1984:128).

Setelah pembentukan organisasi perjuangan PRI dan PNI Makassar tersebut, segera dibentuk pula cabang-cabangnya di berbagai daerah atau wilayah pemerintahan di Sulawesi Selatan. Di Parepare misalnya,

Andi Abdullah Bau Massepe setelah menerima penyampaian dari Lanto Daeng Pasewang melalui telepon menyangkut pembentukan PRI dan PNI, ia segera mengorganisasikan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat dengan pemuda-pemuda di Parepare pada 8 September 1945. Pada pertemuan itu berhasil disepakati pergantian nama SUDARA Cabang Parepare menjadi PRI (Penunjang Republik Indonesia) dan pembentukan wadah perjuangan pemuda dengan nama Pemuda Nasional Indonesia (PNI) Cabang Parepare. Dalam kegiatannya PRI Parepare merupakan wadah pemerintahan yang berdiri di belakang Republik Indonesia. Selain berusaha untuk menginsafkan seluruh lapisan masyarakat Parepare dan daerah sekitarnya tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, juga melakukan pemasangan papan nama PRI di depan rumah kediaman Andi Abdullah Bau Massepe, yang sekaligus dijadikan sebagai pusat kegiatan PRI. Kemudian atas prakarsa Andi Abdullah Bau Massepe dilakukanlah mengibarkan bendera Merah Putih di lapangan Labukkang yang dihadiri ribuan rakyat pada 12 September 1945. Sedangkan PNI Parepare, di samping sebagai wadah para pemuda dalam melakukan kegiatan penerangan kepada rakyat tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, juga membentuk kesatuan tentara pemuda untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (Arfah,1980:36; Kila,1996:30).

Organisasi perjuangan Pemuda Nasional Indonesia (PNI) Parepare yang dibentuk setelah pertemuan di Parepare tersebut, berhasil membentuk susunan kepengurusannya pada pertengahan September 1945. Adapun susunan pengurus PNI Parepare adalah sebagai berikut:

Pelindung	: Andi Abdullah Bau Massepe
Penasehat	: Andi Makkasau
Ketua Umum	: La Nakka
Wakil Ketua	: Andi Mappatoba
Sekretaris Umum	: Achmad Munassar Daeng
	Malewa
Sekretaris	: A.M. Amin Situru
Bendahara	: A. Hamid Saleh
Bagian Angkutan	: L. Rachman Syah
Bagian Penerangan	: Ukkas
Bagian Perelengkapan	: La Kuruseng
Kelompok Penggempur	: Andi Kangkong

Kelompok Heiho : Sadiran
 Kelompok Pelajar : Palnewan
 Kelompok Pemuda : M. Djasin
 Kelompok Penghubung : Harahab, Ajuba Hullata
 Jalangkara, dan Oha (Kadir,dkk.,
 1984:128; Arfah,1980:37).

Pada awal berdirinya PNI Parepare hanya beranggotakan 200 orang, tetapi tidak lama kemudian jumlah anggotanya meningkat menjadi kurang lebih 3.000 orang pada awal November 1945. Organisasi perjuanga PNI parepare yang didirikan ini, selain sebagai wadah yang penampung pemuda-pemuda untuk diorganisasikan dalam melakukan kegiatan penerangan kepada rakyat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, juga membentuk kesatuan tentara pemuda untuk membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk maksud itu, maka anggota-anggota PNI Parepare dibina dalam kegiatan militer di kampung Ujung Baru di bawah asuhan Andi Mappatoba dan Manongko. Pemuda-pemuda yang mengikuti latihan militer ini dibagi dalam lima pleton (Bahan Arsip ARA, dalam Kadir,dkk.,1984:258).

Sementara itu, pada akhir September 1945, setelah diselenggarakan pertemuan antara pemimpin-pemimpin pemerintahan dan masyarakat dari Parepare dan daerah sekitarnya, maka disepakatilah perubahan nama PRI Parepare menjadi Badan Penunjang Republik Indonesia (BPRI) Parepare.¹⁴ Adapun susunan pengurus BPRI Parepare adalah sebagai berikut:

Penasehat : Andi Makkasau
 Ketua Umum : Andi Abdullah Bau Massepe
 Sekretaris Umum : La Halede
 Sekretaris : A. Amin

14 Menurut Syahrir Kila bahwa BPRI adalah merupakan pengembangan dari organisasi yang ada sebelumnya yaitu PRI yang dibentuk pada 8 September 1945. PRI adalah masih merupakan badan pemerintah militer yang masih bersifat darurat di bawah Gubernur Sulawesi, Dr. Ratulangi. Untuk itu maka pada 29 September 1945, berubah menjadi Badan Penunjang Republik Indonesia yang disingkat BPRI, dan pimpinan tertinggi adalah Datu Suppa Andi Abdullah Bau Massepe (Kila,1996:31). Sementara sumber lain menyebutkan bahwa perubahan PRI menjadi BPRI terjadi pada akhir September 1945 (Kadir, dkk.,1984:129).

Bendahara I : H. Andi Abubakar
 Bendahara II : A.M. Amin Daeng Situru
 Juru Bicara : Usman Isa
 Komisaris-Komisaris: M. Daeng Parani, Andi Kangkong,
 M. Said Daeng Manassa, A. Hamid
 Saleh, La Kuruseng, A. Gaffar, La
 Nakka, L. Rachman Syah, Ambo
 Dohang, A.M. Kasim Jafar, A. Madjid
 Muhajeng, dan Mustafa (Arfah, 1980:
 35).¹⁵

BPRI Parepare dalam kegiatannya merupakan wadah pemerintahan. Itulah sebabnya pembentukan BPRI Parepare hanya memiliki badan pengurus dan tidak berusaha mendapatkan keanggotaan. Usaha untuk mendapatkan keanggotaan hanya dilakukan oleh organisasi pemuda yang bernaung di bawah BPRI, yaitu oragnisasi perjuangan PNI. Organisasi pemuda yang pada mula pembentukannya diberi nama Pemuda Nasional Indonesia (PNI), tetapi atas usul dan saran dari Dr. Ratulangi nama Pemuda Nasional Indonesia digantikan menjadi Pandu Nasional Indonesia, dan tetap disingkat PNI. Atas dukungan dan peran dari Andi Abdullah Bau Massepe dan tokoh-tokoh lainnya, sehingga dalam waktu yang singkat PNI Parepare telah menjangkau beberapa daerah seperti; Suppa, Sidenreng, Rappang, Pinrang, Mandar, Barru, Tanete, Wajo, dan Enrekang.¹⁶

Ketika Andi Abdullah Bau Massepe sedang bergiat mengorganisir para pemuda, baik melalui wadah BPRI maupun PNI untuk menegakkan proklamasi kemerdekaan, pasukan Sekutu memasuki Parepare pada 6 Oktober 1945. Pada mulanya rakyat khususnya para pemuda tidak melakukan kekacauan, melainkan berusaha menjamin keamanan

¹⁵ Sedangkan Menurut Harun Kadir, dkk., bahwa susunan kepengurusan PRI Parepare adalah: Ketua (A. Makkasau), Wakil Ketua (Abdullah Bau Massepe), Sekretaris I (Moh. Said), Sekretaris II (Moh. Amin), Bendahara (Abd. Hamid), dan dibantu oleh Komisaris-Komisaris (Usman Isa, Mustafa, La Halede, Daeng Parani, Ambo Dohang, Sulaiman, Gaffar, Kangkong, Binol, dan La Nakka) (Kadir, dkk., 1984:149).

¹⁶ Organisasi perjuangan PNI di daerah-daerah tersebut, juga dibentuk koordinator para pemuda pejuang, seperti; di Suppa koordinatornya Andi Selle, di Sidenreng markasnya di Amparita dengan koordinatornya Pabbicara Amparita, di Rappang koordinatornya Ressang Daeng Pawellang yang kemudian digantikan oleh Andi Tjammi, di Anakbanua koordinatornya Baranti, di Pinrang/Sawitto koordinatornya Andi Pawilloi

dan ketertiban. Namun keadaan itu berubah ketika diketahui bahwa di antara pasukan Sekutu itu terdapat pula aparat-aparat NICA yang berusaha untuk memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Sejak itu, keadaan menjadi tidak tenteram dan aman. BPRI dan PNI selain mulai mengorganisir pemuda-pemuda untuk melakukan aksi-aksi menentang kehadiran dan usaha NICA, juga mengorganisir wadah pedagang untuk tidak menjalin hubungan dagang dengan pihak NICA, serta memboikot uang NICA dan pengiriman barang ke Kota Makassar. Untuk itu, didirikan Serikat Dagang Indonesia (SEDIS). Di samping wadah ini, didirikan pula wadah koperasi bagi rakyat seperti Perkumpulan Nelayang dan Perkumpulan Pedagang Pasar. Organisasi-organisasi tersebut dimaksudkan untuk memboikot barang-barang dari NICA dan barang-barang yang dibutuhkan oleh NICA (Arfah, 1980:36; Kadir,dkk.,1984:150).

Usaha NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda, telah mengundang reaksi pemuda-pemuda, dan mendorong Andi Abdullah Bau Massepe untuk lebih banyak mencurahkan perhatian pada perjuangan bersenjata dan pembentukan organisasi kelaskaran dalam rangka persiapan kekuatan untuk menghadapi pasukan NICA. Itulah sebabnya setelah diadakan pertemuan antara Andi Abdullah Bau Massepe dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk Andi Makkasau, kepala-kepala kampung, dan pemuda-pemuda Suppa yang tergabung dalam KNI yang dikoordinir Andi Selle, maka dibentuklah organisasi kelaskaran yang diberi nama Badan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) di Suppa pada Oktober 1945 (Siraje,1976:3; Tassakka, 1992:7).¹⁷ BPRI Suppa dipimpin langsung oleh Andi Abdullah Bau Massepe dan sebagai wakilnya diserahkan kepada Andi Selle serta dilengkapi dengan sejumlah staf pembantu, yaitu antara lain; Andi Arsyad, Ambo Siraje, La Bangnga, Ambo Nontji, Pettana Irajeng, dan Ambo Bunga. Dalam perkembangan selanjutnya, atas persetujuan Andi Abdullah Bau Massepe, PNI Pinrang di bawah

dan Pabbicara Sawitto, di Mandar bermarkas di Balannipa-Tinambung dengan koordinatonya Ibu Depu, di Tanete/Barru bermarkas di Pancana dengan koordinatonya Andi Muis, di Wajo bermarkas di Gilireng dengan koordinatonya Andi Makkulau, dan di Massenrempulu bermarkas di Enrekang dengan koordinatonya H.A. Abubakar (Arfah,1980:37; Kadir, dkk.,1984:129; Mannaungi,1958:2).

17 Dengan terbentuknya BPRI Suppa, maka telah ada dua organisasi perjuangan dengan nama BPRI, yaitu BPRI Parepare yang telah dibentuk sebelumnya dan BPRI Suppa. Menurut Syahrir Kila bahwa walaupun BPRI Parepare dan BPRI Suppa berbeda pengertiannya, tetapi tujuan dan misi yang diembannya tetap sama, yaitu mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (Kila, 1996:33).

pimpinan Andi Pawilloi dan laskar Pemuda Pemberontak Merah Putih (PPMP) yang dipimpin oleh Andi Saping, menggabungkan diri ke dalam BPRI Suppa (Kila,1996:33).

Selain itu, para pejuang juga melakukan pembentukan organisasi kelaskaran Badan Pembentontak atau Perjuangan Ganggawa (disingkat BP Ganggawa) di Sidenreng Rappang (Sidrap).¹⁸ Ogranisasi kelaskaran BP Ganggawa yang dibentuk di Sidrap (Bindoro atau Carawali) pada November 1945, dipimpin oleh Andi Tjammi (komandan) dan Andi Nohong (wakil). Sebelum BP Ganggawa dibentuk, Andi Tjammi telah ditunjuk sebagai pimpinan pertahanan sektor Sidrap dari BPRI Parepare pimpinan Andi Abdullah Bau Massepe dan koordinator pemuda pejuang di Sidrap dari PNI Parepare pimpinan La Nakka. Dengan demikian Andi Tajammi telah lama mendapat kepercayaan dari Andi Abdullah Bau Massepe dan La Nakka. Dalam perkembangan kemudian kedua organisasi kelaskaran (BP Ganggawa dan BPRI Suppa) yang berjuang secara terpisah di daerah masing-masing dengan satu tujuan yang sama, yaitu membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan serta menggagalkan usaha-usaha NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan, digabung menjadi satu kesatuan komando yang kemudian dikenal dengan nama kelaskaran BPRI-Ganggawa.¹⁹

Sejalan dengan pembentukan oragnisasi kelaskaran tersebut, maka dilakukan pula berbagai upaya untuk mendapatkan senjata, baik dengan jalan perampasan maupun melalui pembelian. Sebab, kurangnya alat persenjataan merupakan salah satu kendala utama yang dialami oleh organisasi kelaskaran dalam perjuangan melawan pasukan NICA. Perlengkapan senjata yang dimiliki oleh laskar ala kadarnya dan tidak memadai, kebanyakan adalah sitaan bekas milik Jepang, sedangkan yang dihadapi adalah pasukan militer yang terdidik dengan pelatihan modern. Hal ini sangat merisaukan hati Andi Abdulah Bau Massepe,

18 Nama Ganggawa diambil dari nama Panglima Perang Kerajaan Bone dalam melawan Belanda pada 1905, yaitu putra dari Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri yang bernama Petta PonggawaE.

19 Penggabungan BPRI Suppa dengan BP Ganggawa menjadi BPRI Ganggawa, ada beberapa sumber yang berbeda, misalnya Sarita Pawiloy menyebutkan bahwa penggabungan BPRI Suppa dengan BP Ganggawa menjadi BPRI Ganggawa dilakukan pada Juni 1946, dengan susunan pengurus Andi Tjammi selaku pimpinan tertingi dan Andi Selle sebagai wakil pimpinan (Pawiloy, 1987:174). Sementara sumber lain menyebutkan bahwa penggabungan itu terjadi sekitar September 1946, yaitu beberapa saat setelah gugurnya Andi Tajammi (Andi Tjammi gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di Carawali pada Agustus 1946 (Kila,1996:49).

sehingga ia memerintahkan kepada Andi Selle untuk mengirim utusan (Abu Nawas dan La Dowang) ke Kalimantan guna mencari senjata dengan membawa beberapa ton beras dengan maksud untuk ditukar dengan senjata. Selain itu, juga direncanakan pengiriman pemuda-pemuda pejuang ke Jawa untuk menjalin kerjasama dalam pembinaan perjuangan, baik berupa bantuan latihan militer maupun persenjataan. Sebab sebelumnya atas anjuran Dr. Ratulangi diberangkatkanlah beberapa tokoh pemuda pejuang antara lain Manai Sophiaan, J. D. Siyaranamual, dan Suaib Pasang dari Makassar ke Jawa pada November 1945, untuk melaporkan situasi di Sulawesi Selatan kepada pihak pemerintah pusat Republik Indonesia (Sophiaan, 1991: 73-74; Kadir, dkk., 1984: 170).²⁰

Merespon anjuran dari Dr. Ratulangi tersebut, maka diselenggarakan pertemuan di Parepare pada November 1945. Pada pertemuan itu berhasil diputuskan untuk mengirim utusan secara bertahap ke Jawa, baik dalam rangka menjalin hubungan dengan pihak pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah pusat di Yogyakarta, maupun untuk memperoleh bantuan pasukan dan persenyataan. Sebagai realisasi dari keputusan itu, maka diberangkatkanlah utusan yang antara lain terdiri atas La Nakka, Muh. Amin, Andi Mattalatta, Muhammad Saleh Lahade, La Halede, S. Daeng Mangatta, dan L. Rachman Syah (Lanca) dari Parepare pada 25 November 1945. Berdasarkan hasil penelitian Harun Kadir, dkk., bahwa pengiriman utusan itu dimaksudkan untuk; (a) menjalin hubungan dengan pihak Republik Indonesia di Jawa, (b)

20 Hal ini dibuktikan ketika diselenggarakan pertemuan di Parepare pada November 1945. Sebab, atas pengaruh dan dukungan penuh dari Andi Abdullan Bau Massepe, sehingga pada akhir pertemuan itu berhasil diputuskan untuk mengirim utusan ke Jawa guna menjalin hubungan dengan pihak pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah pusat di Yogyakarta. Sebagai realisasi dari keputusan itu, maka diberangkatkanlah utusan yang antara lain terdiri atas; La Nakka, Muh. Amin, Andi Mattalatta, Muhammad Saleh Lahade, La Halede, S. Daeng Mangatta, dan L. Rachman Syah (Lanca) dari Parepare pada 25 November 1945. Menurut hasil penelitian Harun Kadir, dkk., bahwa pengiriman utusan itu dimaksudkan untuk; (a) menjalin hubungan dengan pihak Republik Indonesia di Jawa, (b) untuk mendapatkan instruksi-instruksi dan bahan-bahan propaganda, dan (c) untuk mendapatkan bantuan senjata api bagi persiapan menghadapi NICA. Delegasi ini juga membawa serta sebuah surat untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang isi pokoknya menyatakan bahwa "rakyat di Sulawesi Selatan hanya mengakui Republik Indonesia dan oleh karena itu akan membantu mempertahankan kedaulatan yang diinginkan Republik Indonesia, jika perlu dengan kekerasan (Kadir, dkk., 1984: 136). Setelah pengiriman utusan itu menyusul pula secara bergelombang pengiriman pemuda-pemuda yang diberangkatkan dari Parepare atau Suppa (Bichman, tt: hlm. 13).

untuk mendapatkan instruksi-instruksi dan bahan-bahan propaganda, dan (c) untuk mendapatkan bantuan senjata api bagi persiapan menghadapi NICA. Delegasi ini juga membawa serta sebuah surat untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang isi pokoknya menyatakan bahwa “rakyat di Sulawesi Selatan hanya mengakui Republik Indonesia dan oleh karena itu akan membantu mempertahankan kedaulatan yang diinginkan Republik Indonesia, jika perlu dengan kekerasan (Kadir, dkk., 1984:136). Kelompok berikutnya antara lain M. Daeng Malewa, Andi Oddang, Andi Sapada Mappangile, Arsyad B, Andi Sapada Wette, Abdullah, dan Musa Gani berangkat dari Parepare pada awal Januari 1946. Setelah itu menyusul pula pemberangkatan pemuda-pemuda pejuang lainnya dari Parepare atau Suppa ke Jawa (Kadir, dkk., 1984:171; Bichman, tt:hl.13).

Para pemuda pejuang yang berangkat tersebut, kemudian berhasil menjalin kerjasama dengan para pejuang di Jawa dan pihak pemerintah pusat Republik Indonesia. Misalnya, Manai Sophiaan diterima oleh Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS),²¹ sementara M. Saleh Lahade dan Andi Mattalatta berhasil mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno pada tanggal 12 Januari 1946. Setelah M. Saleh Lahade dan Andi Mattalatta melaporkan tugas yang diembannya kepada Presiden Soekarno, mereka diminta supaya menemui Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Untuk memudahkan dan segera mungkin menyelesaikan tugas yang diembannya, maka mereka membagi diri. Sebagian dari mereka di bawah pimpinan M. Saleh Lahade bertugas menemui Perdana Menteri Sutan Syahrir di Jakarta, dan yang lainnya di bawah pimpinan Andi Mattalatta bertugas menemui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah mereka melaksanakan tugas masing-masing, lalu mereka berusaha agar mendapat bantuan bagi perjuangan rakyat Sulawesi Selatan dari lembaga kemiliteran yang berada di Yogyakarta pada

21 Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, yang singkat KRIS didirikan di Jakarta pada 10 Oktober 1945, atas inisiatif dari beberapa pemuda yang berasal dari Sulawesi, antara lain A. Zus Ratulangi, Barth Ratulangi, H.M. Idrus G.P., Kahar Muzakkar, dan lain-lain. Menurut beberapa mantan pimpinan KRIS dinyatakan bahwa nama KRIS ini adalah usul dari Kahar Muzakkar. Kepengurusan KRIS terdiri atas; Ketua (Barth Ratulangi), Wakil Ketua (Baharuddin), Sekretaris I (Kahar Muzakkar), Sekretaris II (Boetje Wowo-roentoe), Bendahara I (H.M. Idrus G.P.), Bagian Penerangan (F. Palenewen), Bagian Pertahanan (Kahar Muzakkar dan J. Rapar), Koordinator (Daan Mogot), dan Komisaris-Komisaris (Moh. Idrus, J. D. Pontoan, dan Machmud). Dalam waktu singkat organisasi ini telah berkembang pesat di kota-kota di seluruh Jawa, dan sudah dapat didirikan cabangnya di Yogyakarta dan Surabaya (Kadir, dkk., 1984:171; Harvey, 1989:138).

waktu itu. Dari usaha itu akhirnya mereka berhasil menjalin hubungan dengan Kahar Muzakkar, Komandan dari Batalyon Kemajuan Indonesia (BKI).²²

Realisasi dari jalinan kerjasama tersebut, adalah terbentuknya Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS). Kegiatan utamanya adalah melatih tenaga-tenaga yang bersedia dikirim ke Sulawesi untuk membantu perjuangan melawan NICA (Belanda). Di lain pihak, dari Sulawesi juga senantiasa diusahakan untuk mengirimkan pemuda-pemuda ke Jawa untuk mendapatkan latihan militer sebagai bekal untuk kembali ke Sulawesi guna membina kelaskaran yang ada atau yang telah didirikan, agar lebih terorganisir dan dapat melaksanakan tugas kemiliteran dengan baik. Dari jalinan kerjasama itu, TRIPS berhasil mengorganisir pasukan dan mengirim 12 kali ekspedisi ke Sulawesi Selatan. Pada tanggal 23 Mei 1946, pasukan ekspedisi TRIPS yang pertama dikirim dipimpin Kapten Muhammadong dan A.M. Yusuf Amir dengan jumlah anggota sebanyak 62 orang. Rombongan yang berangkat dari Situbondo ini tidak berhasil sampai ke tujuan karena ditangkap oleh armada Belanda di perairan Bali, lalu mereka dipenjarakan di penjara Kalisosok, Surabaya. Pasukan ekspedisi TRIPS

²² Dari jalinan kerjasama itu, muncul suatu gagasan untuk mengajukan usul kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, bantuan pasukan bagi perjuangan rakyat Sulawesi Selatan. Kemudian Kahar Muzakkar dan Andi Mattalatta menghadap dan mengusulkan kepada Jenderal Sudirman, agar membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) untuk diberangkatkan ke Sulawesi. Usul tersebut diterima oleh Jenderal Sudirman, bahkan dijadikan sebagai salah satu bagian dari rencana Markas Besar Tentara (MBT). Dengan diterimanya usul pembentukan TRIPS tersebut, maka keluarlah Surat Keputusan Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tanggal 16 April 1946, yang berisi penugasan kepada Kahar Muzakkar, Andi Mattalatta, dan M. Saleh Lahade untuk: (1) melakukan persiapan dalam pembentukan kader dan pasukan lengkap dengan peralatan tentara yang akan berangkat secara ekspedisi ke Sulawesi, (2) membentuk Tentara Republik Indonesia (TRI) di Sulawesi dengan kekuatan satu Divisi, sehingga kesatuan terkecil, guna menegakkan, membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan (3) menyampaikan laporan tentang hasil tugas tersebut kepada Panglima Besar. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Besar Jenderal Sudirman tersebut, maka diadakanlah reorganisasi kekuatan bersenjata di antara pejuang-pejuang yang berasal dari Sulawesi. Akhirnya tugas tersebut dapat diwujudkan dengan dibentuknya kesatuan TRI Persiapan Sulawesi pada tanggal 24 April 1946. Adapun struktur organisasi atau susunan personalia TRIPS ketika itu adalah sebagai berikut; Komandan (Letkol Kahar Muzakkar), Wakil Komandan (Mayor Andi Mattalatta), Kepala Staf (Mayor M. Saleh Lahade), dan dilengkapi dengan beberapa Seksi dan Sekretaris. Kedudukan Komando Resimen ditempatkan di Yogyakarta, sementara tempat pendidikan militer bagi calon perwira berada di Solo, dan bagi calon bintang dan tantama di Balong-Jember Jawa Timur (Harvey, 1989:141; Djarwadi, dkk.,1972:33; Kadir, dkk.,1984: 172-173).

yang kedua dipimpin Kapten M. Tahir Daeng Tompo yang didampingi oleh Letnan Sahid Hasan Bin Tahir dan Letnan Latief, berhasil mendarat dengan selamat di Suppa pada Juli 1946. Kemudian, disusul pasukan ekspedisi TRIPS yang ketiga di bawah pimpinan Letnan Abd. Latief, dan pasukan ekspedisi TRIPS yang keempat di bawah pimpinan Letnan Andi Manjulai, berhasil mendarat di Suppa. Mereka kemudian bergabung dengan BPRI Suppa dan Harimau Indonesia di Enrekang. Sedang pasukan ekspedisi TRIPS yang kelima di bawah pimpinan Letnan M. Said dan Letnan Murtala, bertempur dengan serdadu KNIL sesaat setelah mendarat di Suppa ((Djawardi,dkk.,1972:36-37; Said, 1980: 235-236).

Tempat pendaratan pasukan ekspedisi TRIPS dari Jawa tersebut, tampaknya dapat terbaca atau diketahui oleh pihak Belanda, sehingga pendaratan pasukan ekspedisi yang kelima di bawah pimpinan Letnan M. Said dan Letnan Murtala yang mendarat di Suppa, dikepung dan diserang oleh serdadu KNIL. Meskipun pasukan ekspedisi TRIPS tersebut, memberikan perlawanan hingga tetesan darah yang terakhir dengan gugurnya sebagai kusuma bangsa seluruh anggota pasukan yang terdiri atas 18 prajurit dan 3 orang awak perahu. Akan tetapi perlawanan yang mereka lakukan memberikan kesan kepada pihak kolonial Belanda, betapa kuat tekad juang mereka. Dengan semangat perjuangan yang pantang mundur dan menyerah, mereka bertempur habisan-habisan dalam menghadapi serangan yang dilancarkan oleh serdadu KNIL (Belanda). Pertempuran heroik tersebut, kini terkenal dengan sebutan pertempuran Garessik sehari suntuk (Kadir, dkk.,1984:176; Harvey, 1989:141).

Pendaratan pasukan ekspedisi TRIPS berikutnya dipimpin Mayor Muhammad Saleh Lahade yang mendarat di Suppa pada Desember 1946. Selain itu, juga tercatat sekali pendaratan pejuang dari Kalimantan dipimpin Lapatekkai Puanna Massalassa yang melakukan pendaratan di Suppa pada 1946. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman ekspedisi TRIPS dari Jawa ke Sulawesi Selatan sebanyak 12 kali, dan lima di antaranya yang melakukan pendaratan di Suppa. Pendaratan pasukan ekspedisi TRIPS di Suppa tersebut tidak terlepas dari peran Andi Abdullah Bau Massepe. Bahkan ia bersama Andi Pawilloi dan Andi Isa berperan dalam pengumpulan bahan-bahan makanan bagi pasukan TRIPS yang mendarat di Suppa. Kehadiran pasukan TRIPS itu, semakin membangkitkan jiwa dan semangat perjuangan rakyat di wilayah Parepare untuk terus berjuang melawan pasukan kolonial Belanda. Di samping itu, kehadiran mereka juga sangat bermanfaat bagi organisasi

kelaskaran di wilayah ini, terutama dalam hal pendidikan militer bagi anggota-anggota kelaskaran serta dalam menyusun taktik dan strategi dalam melancarkan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda (Amir, 2008:159).

Pendaratan pasukan ekspedisi TRIPS di Suppa tersebut, menunjukkan bahwa daerah ini termasuk salah satu basis perjuangan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya Suppa menjadi daerah yang paling banyak dipilih sebagai tempat pendaratan pasukan ekspedisi TRIPS di Sulawesi Selatan. Dengan adanya bantuan pasukan dan persenjataan terhadap organisasi kelaskaran di Parapare dan daerah sekitarnya, terutama kelaskaran BPRI Suppa dan BP Ganggawa, maka terjadilah peningkatan serangkaian peristiwa berupa kontak senjata atau pertempuran antara pemuda pejuang dengan pasukan NICA, serta penyergapan dan penghadangan-penghadangan, atau aksi-aksi sabotase lainnya terhadap aparat-aparat NICA dan kaki tangannya di wilayah Afdeling Parepare dan daerah sekitarnya. Umpamanya; kontak senjata di Padang Loangnge (20 Oktober 1945) dan di Kariango (Pajojoreng) pada tanggal 25 Oktober, dan penghadangan di jalan poros Parepare menuju Sidrap dan Pinrang (November 1945). Berikutnya pertempuran di Bonrongnge (Januari 1946), Batjukiki (Februari), Polejiwa (Maret), dan Tiroang-Pinrang (Maret), penghadangan di Menuang-Alitta (Mei), kontak senjata di Maggarongkong (Mei), Allameang-Suppa (Mei), dan Lakessi-Lauleng (Mei), serangan umum terhadap kedudukan NICA di Rappang (Juli 1946), dan pertempuran di Corawali pada 26 Agustus 1946 (Said, 1980:237-240; Kila, 1996: 33-42; Pawiloy, 1987:277-280).

Selain itu, terjadi pula beberapa kali kontak senjata antara laskar (BPRI Suppa dan BP Ganggawa) bersama TRIPS dengan pasukan Belanda sepanjang tahun 1946, yaitu antara lain; di Libukang-Kabaena, Uli-Uli Tanae, Langsangenge, Bulu Maggarongkong, Tangsi KNIL Cappa Galung, Latjori (Alitta), TeppoE (Alitta), Wae SibokorengngE, Bungi Kelapa Dua, Buttu (Suppa), ToE (Alitta), PucuE, InrukinruE, LabuangngE, AllameangngE, Lajojoreng, Batu Terpedo, Leppangeng, Bongim-ponging, Labalakang, Mattiro Sompe, Lamajjakka/Suppa, TeppoE (Alitta), Lasekko (Suppa), Lamaulu (Kariango), Garessi (Ujung PaladangngE, Parengki (Suppa), Karabello, AllakarajaE, dan Garessi (Suppa). Pada kontak senjata yang terakhir disebutkan di Garessi/Suppa tersebut, laskar BPRI dibawah pimpinan Andi Selle dan dibantu laskar

BP Ganggawa bertempur melawan serdadu KNIL yang menyerang markas BPRI Suppa. Namun pada penghujung pertarungan yang cukup sengit itu, pihak BPRI gugur 3 orang, sementara di pihak musuh komandannya yang bernama Mayor F. La Roy terluka parah dan dalam perjalanan ke Parepare, ia meninggal dunia sehingga bendera Belanda dikibarkan setengah tiang (Arsip NIT, No. 109; Kadir, dkk., 1984:176; Bunga, 1976: 2; Tassakka, 1992: 4).

Serangan-serangan yang senantiasa dilakukan oleh pasukan gabungan TRIPS dan organisasi kelaskaran tersebut, mengakibatkan semakin goyahnya kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan, bahkan dapat dikatakan mencapai titik kehancuran. Keberhasilan perjuangan itu bukan hanya dinyatakan oleh pejuang-pejuang Sulawesi Selatan, melainkan juga pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan mengakui bahwa hampir seluruh rakyat di daerah ini berjuang untuk membinasakan kedudukan kekuasaannya, sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankannya. Tambahan pula dinyatakan bahwa telah terjalin hubungan kerjasama antara para pejuang di daerah ini dengan pemerintah Republik Indonesia di Jawa. Juga kelaskaran-kelaskaran di daerah ini semakin terorganisir dalam wadah perjuangan LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) dan bahkan telah direncanakan pembentukan Divisi Tentara Republik Indonesia (Divisi TRI) di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda yang mencanangkan pembentukan negara federal sebagai langkah politik untuk dapat mengembalikan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan semakin merosot (Poelinggomang, 1996:3; Amir, 2001:39).

Kemerosotan kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan tersebut, bukan saja karena sikap non-kooperatif raja-raja terhadap kolonial Belanda, tetapi juga karena dukungan dan peranan mereka yang bergiat mendorong rakyatnya menentang pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, juga karena semakin meningkatnya perlawanan bersenjata seperti yang telah diungkapkan di atas, tanpa mengabaikan perjuangan diplomasi politik. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menggantikan kedudukan PKRS misalnya, di bawah pimpinan Tadjoeuddin Noor bergiat terus mendorong jiwa dan semangat perjuangan rakyat demi terwujudnya kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya pemerintah kolonial Belanda berupaya dengan kelicikannya mempengaruhi Dewan Penasehat Sulawesi Selatan untuk

menuntut dibubarkannya PNI. Usaha mereka itu akhirnya berhasil dan PNI dinyatakan organisasi terlarang pada 10 September 1946, dengan alasan telah menimbulkan gangguan keamanan dan keteriban (Arsip NIT, No. 64; Kadir,dkk.,1984:210).

Selain itu, pemerintah kolonial Belanda terus pula melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemimpin-pemimpin perlawanan atau terhadap mereka yang tidak bersedia bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Umpamanya, Karaeng Banthaeng Andi Mannapiang, Karaeng Gattareng Andi Sultan Daeng Radja, Dr. Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, Inche Mohammad Saleh Daeng Tompo, W.S.T. Pondaag, J. Latumahina, I.P.L. Tobing, Datu Luwu Andi Djemma, Raja Bone Andi Mappanyukki, Karaeng Polombangkeng Padjongan Daeng Ngalle, Mara'dia Balanipa Ibu Depu, Andi Makkasau, Andi Pangerang Petta Rani, Andi Makkulau, Andi Mallinggaan, Andi Abd. Muis, dan lain-lain. Sementara Andi Abdullah Bau Massepe sendiri ditangkap pada 17 Oktober 1946. Ia kemudian ditahan di Makassar dan diinterogasi. Dalam pemeriksaan itu, Andi Abdullah Bau Massepe mengaku bersama ayahnya (Andi Mappanyukki) menjadi republikan dan juga memberikan bantuan kepada pemuda pejuang. Bahkan ia juga dituduh berusaha menegakkan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan.²³ Penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang tersebut, bukan hanya dimaksudkan untuk melincinkan jalan bagi pemulihan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda, tetapi juga untuk mematahkan semangat perlawanan rakyat Sulawesi Selatan pada umumnya dan di wilayah Parepare pada khususnya.

Meskipun demikian perjuangan terus berlangsung dan perlawanan bersenjata bahkan semakin meningkat. Kenyataan itulah yang mendorong pemerintah kolonial Belanda di Makassar memohon kepada pemerintah kolonial Belanda di Batavia, agar segera mengirimkan bantuan militer dan menyatakan daerah Sulawesi Selatan berlaku hukum "keadaan perang", demi untuk memulihkan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan terwujudnya pembentukan negara federal. Untuk itu maka dikirimlah bantuan pasukan yang didatangkan langsung dari Negeri Belanda, satu

²³ Mengenai penangkapan Andi Abdullah Bau Massepe ada beberapa sumber berbeda, misalnya Manai Sophiaan dalam buku "Apa Yang Masih Teringat" yang dikutip dari Willem Ijzereef dalam buku "De Zuid Celebes Affaire" disebutkan bahwa Andi Abdullah Bau Massepe ditangkap pada 14 Agustus 1946 (Sophiaan,1991:98). Sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa Andi Abdullah Bau Massepe ditangkap pada 17 Oktober 1946 (Petta Kanjenne,1968:3; Bichman,tt:15; Arfah, 1980: 56).

batalyon Tentara Belanda (*Koninklijk Leger* yang singkat *KL*) dari Divisi 7 Desember dan tiba di Makassar pada 1 Desember 1946. Kemudian menyusul pula dikirim satu pasukan khusus yang dikenal dengan *Detachment Speciale Troepen (DST)* di bawah pimpinan Westerling dan mereka tiba di Makassar pada 5 Desember 1946.²⁴ Pengiriman bantuan militer itu dimaksudkan untuk dapat mengembalikan dan memulihkan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan, agar rencana pembentukan negara federal dapat terlaksana. Itulah sebabnya, perintah lisan yang diberikan kepada Westerling adalah “teruskan latihan di Sulawesi Selatan dan usahakan memperbaiki kembali ketertiban dan ketentraman” (Poelinggomang, 1996:29; Kadir,dkk.,1984:211).

Kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan yang semakin merosot tersebut, cukup merisaukan Van Mook. Sebab, rencana pelaksanaan konferensi yang akan dibuka di Denpasar pada 7 Desember 1946, yang dicanangkan bagi pembentukan Negara Indonesia Timur yang kelak akan berpusat di Makassar (Sulawesi Selatan). Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa perlawanan rakyat Sulawesi Selatan justru semakin hebat dan lebih meningkat, sementara kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini semakin lemah dan merosot. Itulah sebabnya Van Mok mengirimkan bantuan militer untuk memulihkan dan memperbaiki kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Bantuan militer yang baru tiba itu, segera menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mematahkan dan menumpas perlawanan kelaskaran rakyat Sulawesi Selatan (Amir, 2001:40; Kadir,dkk.,1984:212).

Untuk menumpas perlawanan rakyat Sulawesi Selatan berdasarkan pada keterangan yang dihimpun, Westerling berkesimpulan bahwa

24. Sebenarnya pasukan khusus yang dipimpin oleh Westerling itu telah dipersiapkan sejak Juli 1946. Namun sebelum mendapatkan perintah untuk berangkat ke Sulawesi Selatan dengan tugas membinasakan dan membersihkan teror yang dilakukan oleh kelaskaran rakyat, ia telah mengutus sebagian pasukannya di bawah pimpinan Vermeulen pada 15 November 1946. Mereka bertindak sebagai tenaga sipil untuk mengumpulkan keterangan-keterangan tentang keadaan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu ketika Westerling tiba di Makassar, ia tidak bersusah payah mengumpulkan data dan keterangan tentang keadaan di Sulawesi Selatan. Berpatokan pada data-data tentang perlawanan rakyat yang diperoleh dari Dinas Penerangan Militer (*Militaire Inlichtingen Dienst/MID*), Dinas Kesatuan Intelegen Belanda (*NEFIS*), pegawai-pegawai pemerintah, dan dari Vermeulen, ia dapat langsung menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memenuhi tugas yang dipercayakan kepadanya (Ijzereef, 1984: 96; Poelinggomang, 1996: 29; Kadir,dkk., 1984:119).

pusat perlawanan yang paling kuat adalah di daerah Polombangkeng (Afdeling Makassar) dan di Suppa (Afdeling Parepare), dan harus diambil tindakan kekerasan militer. Ditumpas dengan tindakan-tindakan yang tegas dan keras dengan sistem yang ia sebut “standrecht”, yaitu metode menggiring rakyat untuk berkumpul di tempat-tempat umum, memilih di antara mereka yang diperkirakan mengetahui dan diperintahkan menunjuk anggota kelaskaran rakyat, mengadakan di tempat dan menjatuhkan hukuman, kemudian menembak mati di hadapan rakyat banyak yang berkumpul itu. Menurut Westerling, jika bukan metode ini yang dilaksanakan, maka kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda pasti akan semakin lemah dan tidak berdaya (Ijzereef, 1984:97). Metode Westerling itu mendapat persetujuan dari pihak pemerintah kolonial Belanda di Batavia, karena Van Mook hanya memikirkan bagaimana cara untuk mewujudkan gagasan politik federalnya. Itulah sebabnya Van Mook menunda pelaksanaan Konferensi Denpasar dan mengumumkan pernyataan “negara dalam keadaan darurat dan perang” (*Staat van Oorlog en Beleg*, disingkat SOB) pada 11 Desember 1946, yang berlaku bukan hanya untuk Afdeling Makassar, Bantaeng, Parepare, dan Mandar, tetapi pada hakekatnya berlaku untuk seluruh daerah Sulawesi Selatan. Sebab pernyataan SOB itu, kemudian diikuti surat perintah harian (*dag order*) pada 11 Desember 1946, dari Kolonel H.J. de Vries atas perintah Jenderal S. Spoor, kepada seluruh jajaran tentara yang berada di bawah pengaruhnya untuk serentak menjalankan “aksi pembersihan” atau tindakan pengamanan berdasarkan “keadaan darurat dan perang” di seluruh daerah Sulawesi Selatan (Agung, 1985:130; Poelinggomang, 1996:29; Harvey, 1989:134).

Pernyataan keadaan darurat dan perang, yang kemudian diikuti dengan “aksi pembersihan” tersebut, merupakan suatu bukti bahwa rakyat Sulawesi Selatan pada umumnya, dan di wilayah Afdeling Parepare khususnya bangkit dan berjuang untuk membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan wilayah Afdeling Parepare dengan pusatnya di Suppa merupakan salah satu basis perlawanan yang paling sengit terhadap NICA di Sulawesi Selatan. Basis perlawanan lainnya adalah Afdeling Makassar yang berpusat di Polombangkeng, dan Afdeling Mandar, Banthaeng, dan Luwu. Namun aksi pembersihan itu juga telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia yang tidak sedikit. Kejadian yang memiluhkan dan memedihkan itu, kemudian dikenal dengan peristiwa “Korban

Empat Puluh Ribu Jiwa” di Sulawesi Selatan. Westerling dan pasukan DST-nya dalam melakukan aksi pembersihan di Sulawesi Selatan, tidak membedakan status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Pendeknya semua yang memperlihatkan sikap anti kolonial Belanda menjadi sasaran utamanya dan dibunuh dengan kejam, seperti yang dilakukan terhadap Datu Suppa Andi Abdullah Bau Massepe, Datu Suppa Towa Andi Makkasau, Andi Abdul Muis, dan lain-lain.

Sementara pasukan kolonial Belanda di bawah pimpinan Westerling melancarkan aksi militer atau aksi pembersihan di Sulawesi Selatan, para pejuang berhasil menyelenggarakan pertemuan di Paccekke pada 20-21 Januari 1947. Pertemuan yang kemudian dikenal dengan Konferensi Paccekke tersebut, dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dari kurang lebih sembilan organisasi perjuangan atau kelaskaran di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan perjuangan bersenjata dalam satu komando untuk menghadapi pasukan kolonial Belanda.²⁵ Pada konferensi itu, berhasil dibentuk TRI Divisi Hasanuddin, sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oleh karena tokoh yang dipilih dan disetujui untuk menjadi Panglima TRI Divisi Hasanuddin, adalah Andi Abdullah Bau Massepe dan telah ditangkap oleh pasukan kolonial Belanda, sehingga ia dilantik secara *in absentia* (tidak hadir atau berhalangan) dan staf sementara TRI Divisi Hasanuddin dipimpin Mayor Andi Mattalatta dan Mayor M. Saleh Lahade sebagai Kepala Staf.²⁶

Sehari setelah penutupan Konferensi Paccekke, pihak pemerintah Belanda melakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai persoalan Andi Abdullah Bau Massepe di Makassar pada 22 Januari 1947. Pertemuan itu antara lain dihadiri oleh Kolonel de Vries, Direktur

25 Adapun peserta organisasi kelaskaran pada Konferensi Paccekke itu, antara lain: (1) KRIS MUDA Mandar dipimpin Andi Parenrengi, (2) BPRI Suppa dipimpin Andi Selle, (3) BPRI Enrekang dipimpin Andi Abubakar dan Hamid Ali, (4) BP Ganggawa dipimpin L. Rachman Syah dan Andi Mannaungi, (5) KRIS Soppeng Riaja dipimpin Andi Tjambang, Andi Domeng, Usman Sani, dan Azis Tamimi, (6) Harimau Indonesia dipimpin Muhammad Syah dan M. Kasim DM., (7) LAPRIS dipimpin atau diwakili oleh Daeng Bonto dan Maulwi Saalan, (8) GAPIS Soppeng dipimpin M. Idris Palunggeng dan M. Arsyad Tamin, dan (9) TRIPS dipimpin Mayor Andi Mattalatta dan Mayor M. Saleh Lahade. Pelaksanaan konferensi ini dikawal kurang lebih 700 pasukan dengan kekuatan senjata sekitar 300 pucuk (Djarwadi,dkk.,1972:35-36; Harvey,1989: 142).

26 Staf TRI Divisi Hasanuddin ini dibagi ke dalam empat seksi yang masing-masing secara berurutan dipimpin oleh; Kapten Muhammad Syah, Kapten Maulwi Saalan, Kapten Andi Sapada, dan Kapten Andi Oddang. Untuk melaksanakan tugas kemiliter, TRI Divisi Hasanuddin dibagi dalam tiga resimen dan masing-masing resimen mem-

Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Hoven, Komisaris Kerajaan Belanda untuk Indonesia Timur Dr. Lion Cache, Kepala Staf Komando Tentara Borneo dan Sulawesi Letkol Breemouer, Oditur Militer Mr. A.G. Veldhuis, dan Dr. G.L. dari NEFIS. Pada akhir pertemuan itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Andi Abdullah Bau Massepe dinyatakan sebagai pemberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda dan harus dieksekusi. Bahkan pada mulanya Oditur Militer Veldhuis berkeras bahwa Andi Abdullah Bau Massepe harus dieksekusi dan mengusulkan supaya ditembak di hadapan rakyat. Akan tetapi tiba-tiba ia ingat bahwa menurut tradisi, kematian seorang bangsawan tidak bisa ditumpahkan darahnya di tanah. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Andi Abdullah Bau Massepe dinaikkan di perahu kemudian menembaknya di laut dan rakyat disuruh menonton di tepi pantai. Kalau tidak demikian, bisa juga ditempuh jalan biasa dengan alasan ditembak karena melarikan diri (Sophiaan, 1991:101; Ijzereef, 1984:97).

Usulan tersebut ternyata disetujui karena pemerintah kolonial Belanda hanya memikirkan bagaimana cara untuk memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonialnya. Sebab, jika Andi Abdulah Bau Massepe tidak dieksekusi, menurut perhitungan mereka wilayah Parepare dan daerah sekitarnya tidak mungkin dapat dipulihkan kemanannya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar pengaruh dan peranan Andi Abdullah Bau Massepe dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah sebabnya Andi Abdullah Bau Massepe dibawa ke Parepare ketika Westerling dan pasukannya melancarkan operasi aksi militer di wilayah Parepare dan daerah sekitarnya. Pada kesempatan itulah Andi Abdullah Bau Massepe bersama para pejuang lainnya dieksekusi pada awal Februari 1947.²⁷ Terlepas dari proses kematiannya, Andi Abdullah Bau Massepe telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam perjuangan menentang pemerintah kolonial Belanda dan dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

bawahi beberapa komandan Batalyon dari resimennya. Resimen pertama yang berpusat di Parepare dipercayakan kepada Andi Selle Mattola, pimpinan gabungan kelas-karan BPRI Suppa dan BP Ganggawa. Resimen kedua dengan daerah operasi di wilayah Makassar berada di bawah pimpinan Padjonga Daeng Ngalle Karaeng Polombangkeng. Dan Resimen ketiga dengan wilayah operasi Luwu diangkat Datu Luwu Andi Djemma sebagai pimpinan/komandan resimen (Kadir, dkk., 1984:179; Djarwadi, dkk., 1972:36).

27 Ada beberapa sumber yang berbeda mengenai waktu dan proses kematian Andi Abdullah Bau Massepe. Umpamanya, ada menyebutkan bahwa pada 2 Februari

Meskipun demikian semangat perjuangan dan perlawanan rakyat Parepare dan daerah sekitarnya tidak pernah pudar. Itulah sebabnya, walaupun dalam keadaan terdesak mereka tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Tidak sedikit pertempuran yang tercatat sebagai wujud sikap perjuangan mereka. Pertempuran di Nepo, Malino, Maroanging, Kulo, Kali-Saddang, Batu-Batu, Bunging, dan Alitta. Di Desa Salo Wajo pasukan Andi Selle Mattola, pimpinan resimen I TRI Divisi Hasanuddin yang pada waktu itu menyertai Mayor M. Saleh Lahade bersama pengawalnya, terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Belanda pada 13 Maret 1947. Demikian juga dengan Komandan TRI Divisi Hasanuddin, Mayor Andi Mattalatta terlibat dalam penyerangan terhadap pos pasukan Belanda di Bilokka, Poro, dan Pong Durian (Amir,dkk.,2005:45).

Namun dalam perkembangannya, karena keadaan mereka semakin terdesak dan kekurangan perlengkapan perang serta semakin gencarnya operasi militer Belanda, sehingga sebagian pejuang akhirnya memilih untuk kembali ke Jawa dan melanjutkan perjuangan di Jawa. Pada April 1947, Andi Selle, Andi Oddang, dan kelompoknya menyeberang ke Jawa. Disusul kemudian dengan rombongan M. Saleh Lahade pada Mei 1947, rombongan Achmad Lamo pada Juni 1947, dan rombongan Andi Mattalatta pada Agustus 1947. Dari perkiraan 1000 orang pasukan yang diberangkatkan sebagai anggota pasukan ekspedisi TRIPS ke Sulawesi Selatan, hanya sekitar 100 orang anggota pasukan yang berhasil meloloskan diri kembali ke Jawa untuk melanjutkan perjuangan (Harvey, 1989:143).

1947, Andi Abdullah Bau Massepe dibunuh secara berlahan-lahan dengan jalan diseret oleh mobil yang ditarik dengan kencang, kemudian setelah pejuang ini hancur leceh seluruh tubuhnya barulah ditembak (Patang, Lahadjji, 1976:119). Sedang sumber lain menyebutkan bahwa pada 1 Februari 1947, Andi Abdullah Bau Massepe terbunuh dalam usaha pelariannya dalam perjalanan dari Majene menuju Parepare. Ketika itu, Andi Abdullah Bau Massepe dikawal oleh dua tentara DST, dan dalam perjalanan itu ia meminta untuk buang air. Menurut salah seorang tentara pengawal, Andi Abdullah Bau Massepe mencoba menyerang salah satu pengawal, dan pengawal lain menembaknya hingga tewas (NPS Survey for training ATV-documentary on action of the Dutch Special Forces on Sulawesi; baca Fajar, 17 April 2003). Versi lain yang mirip sama dengan yang terakhir ini, disebutkan bahwa pada 1 Februari 1947, Andi Abdullah Bau Massepe dibawa dari Parepare ke Majene, bertepatan waktunya dengan aksi pembersihan yang dilakukan oleh Westerling bersama pasukannya. Oleh karena Andi Abdullah Bau Massepe lari maka ia ditembak oleh Baret Merah yang mengawalinya (VARA, "Achter het nieuws ini Zuid-Celebes", Omroepverening VARA, Hilversum, Juli 1969; Sophiaan,1991:112).

Penutup

Pembentukan organisasi kelaskaran BPRI, tidak hanya bertujuan menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Parepare dan daerah sekitarnya, tetapi juga untuk membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembentukan BPRI tentu tidak terlepas dari dukungan dan peranan para penguasa tradisional yang bergiat mendorong rakyatnya untuk tampil dengan gigih menentang kehadiran dan usaha NICA yang mendapat dukungan dan bantuan dari pasukan Sekutu. Sebab para penguasa tradisional bukan hanya mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan juga menyatakan bahwa wilayah kekuasaan dan aparat-aparat pemerintahannya adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia dan aparat pemerintah Indonesia. Pernyataan sikap itulah yang memotivasi rakyat, bergiat membangun kekuatan menentang kehadiran dan usaha NICA. Usaha-usaha itu akhirnya melapangkan pembentukan organisasi kelaskaran di Parepare dan daerah sekitarnya.

Perlawanan bersenjata yang diorganisir kelaskaran BPRI bersama pasukan ekspedisi TRIPS, menyebabkan terjadi serangkaian peristiwa atau kontak senjata antara para pejuang dengan pasukan NICA di wilayah Parepare dan daerah sekitarnya. Rentetan peristiwa itu, bukan saja merupakan suatu bukti betapa gigihnya perlawanan rakyat terhadap NICA, tetapi juga menyebabkan rencana NICA yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda berada pada ambang ketidakberhasilan. Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah kolonial Belanda mengumumkan “keadaan darurat dan perang” (*staat van oorlog en beleg*, disingkat SOB) pada 11 Desember 1946, untuk wilayah Afdeling Makassar, Parepare, Bantaeng, dan Mandar. Pernyataan SOB yang selanjutnya diikuti oleh aksi militer, mengakibatkan jatuhnya beribu-ribu korban jiwa manusia yang kemudian dikenal dengan peristiwa “korban empat puluh ribu jiwa” di Sulawesi Selatan.

Meskipun demikian jiwa dan semangat perjuangan rakyat tetap bergelora hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Parepare dan daerah sekitarnya melalui organisasi kelaskaran BPRI dalam menentang kehadiran dan usaha NICA, merupakan suatu bukti bahwa

proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia yang dicanangkan oleh tokoh-tokoh pendiri negara, adalah merupakan perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya keinginan dan peran dari para kolaborator Jepang di mata Sekutu, melainkan juga keinginan dan peran dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Parepare dan daerah sekitarnya. Perjuangan rakyat secara menyeluruh itulah yang telah melegitimasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus terhadap hasil keputusan dari rapat PPKI setelah proklamasi. Sebab, jika rakyat Indonesia tidak bangkit berjuang dengan jiwa kesatria dan semangat nasionalisme Indonesia, niscaya kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hamid. 1991. *Andi Pangerang Petta Rani Profil Pimpinan Yang Manunggal Dengan Rakyat*. Jakarta: Grasindo.
- Agung, Anak Agung Gde. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Amir, Muhammad. 2001. *Pertentangan Antara Golongan Uinteris dan Federalis di Sulawesi Selatan 1945-1950*: Makassar: Depdikbud, Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.
- Amir, Muhammad, dkk. 2005. *Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa Di Sulawesi Selatan Seri 2*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Amir, Muhammad. 2008. *Andi Abdullah Bau Massepe: Profil Patriot yang Konsekuensi Hingga Tetesan Darah Terakhir*. Makassar: Matapena.
- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial Belanda 1915-1950*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
- Arfah, Muhammad. 1980. *Biografi Andi Abdullah Bau Massepe*. Ujung pandang: Depdikbud.
- Arfah, Muhammad, dkk. 1993. *Biografi Haji Andi Mappanyuki Sultan Ibrahim*. Ujung Pandang : Depdikbud.

- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), Nomor; 10, 64, 103, 109, 130, dan 162. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bichman, Ida. tt. Ibu Datu Kisah Heroik Wanita Pejuang Dari Sulawesi Selatan. Sarina No. 50.
- Binol, H. A. J. 1976. Sekelumit Kenang-Kenangan Semasa Perjuangan Mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 di Parepare dan sekitarnya. Parepare: Depdikbud.
- Bunga, Ambo. 1976. Laporan Singkat Sejarah Perjuangan Almarhum Andi Abdullah Bau Massepe. Suppa: Depdikbud
- Chaniago, J. R. 2002. Revolusi, Politik Lokal dan Integrasi Nasional Pengalaman Sulawesi Selatan dan Sumatra Timur Memasuki Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950. Yogyakarta: Disertasi Universitas Gadjah Mada.
- Djarwadi, Radik, dkk. 1972. Naskah Sedjarah Corps Hasanuddin, Prajurit Tempur dan Pembangunan. Makassar : Corhas.
- Gonggong, Anhar. 1992. Abdul Qahhar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak. Jakarta : Grasindo.
- Gonggong, Anhar, dkk. 1993. *Sejarah Nasional VI*. Jakarta: Depdikbud.
- Gonggong, Anhar. 2000. Militerisme dan Dampaknya Terhadap Budaya Lokal di Sulawesi Selatan, dalam *Dunia Militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*. Yogyakarta: Gajah Mada university Press.
- Harvey, Barbara Sillars.1989. Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII. Jakarta : Grafiti.
- Ijzereff, Willem. 1984. *De Zuid Celebes Affaire, Kapiten Westerling en de Standrechtelijhe Executie*. De Bataafsche Leew.
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Pemda Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unhas.
- Kementerian Penerangan. 1953. *Provinsi Sulawesi*. Makassar: Djawatan Penerangan Republik Indonesia.
- Kila, Syahrir. 1996. Kelaskaran 45 di Sulawesi Selatan (BPRI Suppa dan

- BP. Ganggawa), dalam *Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar*. Ujung Pandang: Depdikbud,
- Lahade, Moh. Saleh. 1982. *Korban 40.000 Jiwa Di Sulawesi Selatan dan Artinya Bagi Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Mannaungi, Andi, dkk. 1958. *Pergolakan Daerah Parepare dalam Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia*.
- Paramadjeng, Andi Kusmiati, 1986. *Andi Makkasau: Profil Bangsawan Dalam Pergerakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Patang, Lahadjji. 1967. *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta : YKGM.
- Pawiloy, Sarita. 1987. *Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: DHD 45 Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pemda. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemda Tk. I Sulawesi Selatan.
- Petta Kanjenne, Andi Sodji. 1968. *Sejarah dan Pengalaman Mendampingi Andi Abdullah Bau Massepe Dalam Perjuangan Membela Proklamasi 17 Agustus 1945*. Parepare: Depdikbud
- Poelingomang, Edward L. 1996. *Strategi Politik Pemerintah Kolonial Belanda dan Peristiwa Sulawesi Selatan*. Makalah pada Seminar Regional Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Depdikbud, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.
- Poelinggomang, Edward L. 2000. *Militer dan Budaya Politik Indonesia, dalam Dunia Militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Makalah pada Seminar dan Temu Tokoh, yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar pada 27 Juli 2002.
- Poelinggomang, Edward L. 2003. *Integrasi Bangsa Dalam Perspektif Sejarah Daerah*. Makalah pada Seminar dan Diskusi tentang Integrasi Dalam Perspektif Sejarah di Daerah, yang

- diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar pada 2003.
- Said, Muh. Natzir. 1980. *Lahirnya TRI Divisi Hasanuddin di Sulawesi Selatan dan Tenggara, Jilid I. Ujung Pandang: Kerjasama Kodam XIV Hasanuddin, UNHAS dan IKIP Ujung Pandang.*
- Said, Muh. Natzir. 1984. *SOB 11 Desember 1946 Penyebab Banjir Darah dan Lautan Api, Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Yayasan Penerbit Udin.*
- Siraje, Baba. 1976. *Sekelumit Sejarah Perjuangan Laskar Rakyat Suppa Menentang Penjajah Belanda. Suppa: Depdikbud*
- Shahib, M. Roem. 1980. *Bone Kartu Mati Bagi Perjuangan Merah Putih di Sulawesi Selatan Pada Tahun "45-50". Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Unhas.*
- Sophiaan, Manai. 1991. *Apa Yang Masih Teringat. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.*
- Suwarno, G. 1982. *Peranan Pasukan Ekspedisi Dalam Mempertahankan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Makalah pada Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing. Jakarta: Depdikbud.*
- Tassakka. 1992. *Riwayat Singkat Perjuangan Angkatan 45 Kabupaten Pinrang. Pinrang: Depdikbud*
- Wati, Arena. 1984. *Laporan Delegasi Sulawesi ke Sidang PPKI di Jakarta, 8-24 Agustus 1945.*

ANDI SELLE DALAM BATALION 710

Syahrir Kila
Rosdiana Hafid

PENDAHUAN

Tentara atau militer secara konvensional lembaga ini bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara ataupun masyarakat lain, dalam konteks negara modern, secara fungsional istilah “militer” merujuk pada suatu lembaga pemaksa yang termanajemen secara sah yang berada di bawah pengendalian negara. Dengan demikian militer adalah bagian dari aparatur negara atau birokrasi dan berada di bawah kendali pemerintah negara yang bersangkutan dalam menjalankan segala aktifitasnya.

Setelah revolusi selesai dengan penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan R.I Tanggal 29 Desember 1949, para pejuang gerilya menghadapi masalah atas aspirasi dan tuntutan mereka. Pihak Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) menginginkan agar penerimaan mereka ke dalam APRI (TNI) dilakukan secara utuh atau keseluruhan tanpa adanya persyaratan-persyaratan tertentu. Namun aspirasi dan tuntutan itu ditolak oleh pemerintah yang menghendaki sistem penerimaan perbatalyon, bukan secara utuh

keseluruhan sebagaimana tuntutan para gerilya. Akibat perselisihan inilah merupakan salah satu pemicu lahirnya kemelut dan gerakan separatisme di Sulawesi Selatan.

Sejak Andi Selle dipercaya memimpin Batalyon 710 kemudian diorganisir menjadi Korem 4 Polewali, ia berusaha terus memperkuat pasukannya. Ia melengkapi persenjataannya dengan sistem modern dan menambah pasukannya. Beliau kemudian membentuk pasukan Tentara Bantuan Operasi (TBO) sebanyak 1.000 orang. Mereka ini direkrut sebagian besar orang Pinrang sementara para pucuk pimpinannya terdiri dari kerabat dekat Andi Selle. Pasukan Tentara Bantuan Operasi (TBO) inilah sebagai pasukan inti atau pengawal Andi Selle.

Alasan Andi Selle memperkuat pasukannya tentu saja ada. Mereka mempunyai pemikiran dan mensinyalir bahwa suatu ketika pemerintah RI akan dikuasai komunis. Mengapa, sejak peristiwa Madiun Desember 1948, orang-orang komunis berusaha terus menyusup masuk ke segala bidang. Apalagi Andi Selle menduga bahwa beberapa oknum pejabat di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sudah dicemari partai itu melalui agen-agennya atau pembina-pembinanya menyusup ke dalam Angkatan Darat. Hal yang sama tentu dilakukannya juga dalam Angkatan Udara dan angkatan-angkatan lainnya. Senada dengan itu, dan sesuai dengan peta penyebaran komunis, Andi Selle melihat kemungkinan masuknya komunis ke Sulawesi Selatan melalui Sulawesi bagian Barat. Untuk itu ia memperkuat pasukannya di wilayah Polmas dengan demikian apabila komunis masuk lewat Barat akan dihadapi oleh pasukannya (Wawancara Nurdin Hamma, Polman, 27 Agustus 2018).

Selain alasan tersebut, hal yang menarik dari Andi Selle adalah ingin mendirikan Negara Federasi Sulawesi. Ia melihat, ketika berdiri Negara Kesatuan R.I, ada ketimpangan dalam pembangunan. Hasil pembangunan lebih banyak dilakukan di Jawa sementara di Sulawesi pembangunan yang dilihatnya hanya sedikit. Padahal bila melihat kondisi alam Sulawesi mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Makanya Andi Selle kurang suka dengan orang Jawa yang datang ke Sulawesi, apalagi menjadi seorang pemimpin. Andi Selle merasa kedatangan orang-orang Jawa ke Sulawesi hanya ingin memerintah orang Sulawesi kemudian mengeksploitasi kekayaan alam Sulawesi, hasilnya lalu diangkut ke Jawa. Inilah yang tidak diinginkan Andi Selle. Alasan itu pula sehingga Andi Selle dimata petinggi Kodam XIV Hasanuddin sebagai

seorang yang tidak disiplin. Inilah yang membuatnya dipensiunkan lebih awal dari ketentaraan sebelum waktunya dengan pangkat Letnan Kolonel. Setelah itu, Batalyon 710 melepaskan hubungan komando dengan Kodam XIV Hasanuddin pada Tahun 1964, meskipun demikian, Andi Selle masih mempunyai banyak pasukan. Dari Batalyon 710 yang dipimpinnya itu meskipun hanya 2 kompi, namun hampir seluruhnya tetap ikut kepadanya. Belum lagi tambahan pasukan TBO-nya (Tentara Bantuan Operasi) sebanyak 10.000 personil sehingga Andi Selle masih mempunyai banyak anak buah (Tangke, dkk, 2011: 11-12).

Untuk membiayai dan memperkuat persenjataan, Batalyon 710 melakukan monopoli perdagangan komoditi kopra yang merupakan hasil utama daerah Polmas pada khususnya dan Mandar pada umumnya. Dalam aturan pembelian kopra, biasanya pihak Batalyon 710 hanya membayarnya 50 persen dari harga kopra di pasaran. Menurut pihak Batalyon 710 melalui para anggota TBO, rendahnya harga kopra yang dibeli oleh TBO disebabkan para petani tidak perlu lagi menghitung biaya pengangkutan dari wilayah produsen ke agen perwakilan pihak TBO, petani sering dipaksa menyerahkan buah kelapanya secara langsung kepada anggota TBO dengan perbandingan minimal 9: 1. (Asba, 2007: 227). Itulah sebabnya sehingga muncul tokoh-tokoh seperti; Riri Amien Daud, Andi Depu, Baharuddin Lopa adalah tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang menentang Batalyon 710. Untuk itu, tokoh-tokoh masyarakat Mandar membentuk sebuah organisasi bernama: Front Pembebasan Rakyat Tertindas Mandar (FPRTM) yang berpusat di kota Makassar (Gonggong, 2004: 337).

Selain itu Batalyon 710 juga melakukan perdagangan dengan pasukan DII/TII dengan cara barter. Pasukan DII/TII membeli senjata dari pasukan Batalyon 710 secara barter dengan hasil bumi seperti rotan, merica, damar dll, kemudian hasil bumi itu dijual ke pedagang dari Malaysia untuk dibarter dengan senjata. Perdagangan antara Batalyon 710 dengan pasukan DII/TII tercium sampai ke kodam XIV Hasanuddin. Tanggal 5 April 1964 Panglima Kodam XIV Hasanuddin Kolonel Muhammad Yusuf kemudian meminta bertemu dengan Andi Selle di Pinrang untuk membicarakan masalah tersebut. Pertemuan diputuskan dilaksanakan pada 5 April 1964 di sebuah gudang Dolog di Leppangeng sekitar 10 km. dari kota Pinrang (Tangke, dkk., 2011: 22-23).

Setelah pertemuan itulah terjadi insiden saling tembak menembak antara kedua pihak. Sejak itu pula Batalyon 710 di bawah pimpinan Andi

Selle dianggap sebagai pemberontak karena melawan pemerintahan yang sah sampai akhirnya Andi Selle dikabarkan meninggal September 1964. Pada saat itu, seluruh pasukannya tidak mampu lagi mengkonsolidasikan diri. Di beberapa wilayah pasukan Batalyon 710 menyerah kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah melaksanakan operasi kilat.

Perubahan gerakan Batalyon 710 di bawah pimpinan A. Selle, tentunya memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji dari perspektif sejarah dan ditelaah secara ilmiah guna memperkaya sejarah lokal yang selama ini hanya menjadi cerita bagi kalangan generasi muda kita. Berangkat dari realita sejarah tersebut maka penulis merasa perlu untuk menulis gerakan “ Batalyon 710 di Polmas (1951-1964)”.

Selain itu Batalyon 710 juga melakukan pertambangan dengan pasukan DITP dengan cara barter. Pasukan DITP membeli senjata dari pasukan Batalyon 710 secara barter dengan hasil bumi seperti rotan, minyak, damar dll kemudian hasil bumi itu dijual ke pedagang dari Malaya untuk diantar dengan kapal. Pertambangan antara Batalyon 710 dengan pasukan DITP berakhir sampai ke kodam XIV Hasanudin tanggal 5 April 1964 Panglima Kodam XIV Hasanudin Kolonel Muhammad Yusuf kemudian meminta pertemuan dengan Andi Selle di Piring untuk mendiskusikan masalah tersebut. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 5 April 1964 di kebun Gubang Dolog di Leppang sekitar 10 km dari kota Pinarang (Lange, dkk, 2011: 33-35).

Setelah pertemuan terjadi insiden saling tembak menembak antara kedua pihak. Sejak itu pula Batalyon 710 di bawah pimpinan Andi

Profil Andi Selle

Andi Selle Mattola mempunyai saudara sebanyak delapan orang, dan ada beberapa di antara saudaranya yang turut ambil bagian dalam pergolakan menjelang kemerdekaan di masa mempertahankan kemerdekaan : antaranya Andi Arsyad dan Andi Usman Isa. Andi Arsyad adalah orang terdekat Andi Selle Mattola dan boleh dikatakan bahwa

Andi Arsyad adalah wakil Andi Selle Mattola dalam kelasykaran yang beliau pimpin. Kedua saudara Andi Selle Mattola yang disebutkan di atas, dalam pergolakan yang dipimpin beliau, telah gugur sebagai perisai bangsa bersama beberapa orang kawan seperjuangannya. Menurut La Hasang, bahwa Andi Selle Mattola mempunyai anak sebanyak 13 orang. Anak-anak beliau hingga kini telah tumbuh dewasa dan hidup di tengah-tengah orang kebanyakan dan hidup seperti mereka pula, padahal secara otomatis keturunan beliau adalah bangsawan-bangsawan murni. Begitu juga dengan saudara beliau yang masih hidup hingga kini ada di antaranya yang hidup sebagai wiraswasta dan mereka tergolong cukup sukses (Dokumen hasil wawancara, La Hasang, Pinrang, 1999).

Andi Selle Mattola pada zaman menjelang kemerdekaan pernah menjabat sebagai kepala Kampung Alitta pada tahun 1941 - 1945. Kampung ini kemudian merupakan salah satu daerah pergolakan yang cukup penting, oleh karena di daerah ini pula terdapat salah satu benteng pertahanan kekuatan BPRI Suppa. Dalam kedudukannya sebagai kepala Kampung Alitta, Andi Selle Mattola mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kalangan rakyat Alitta dan sekitarnya, ditambah pula pengaruh dari ayahanda beliau yang dikenal sebagai pejuang yang tak pernah takut menghadapi segala bentuk penindasan dari penjajah asing yaitu bangsa Belanda. Dukungan rakyat Alitta terhadap para pejuang kemerdekaan tidak dapat disanksikan lagi, hal ini dapat dibuktikan sewaktu kemerdekaan baru saja diproklamasikan di Jakarta, maka di Suppa-pun segera dikibarkan Bendera Merah Putih dan seluruh rakyat di Alitta dikerahkan oleh Andi Selle untuk berangkat menuju ke Suppa dalam rangka mengamankan Bendera Merah putih yang dikibarkan di daerah Suppa. Pengerahan rakyat Alitta ini dimaksudkan sebagai langkah pengamanan, sebab tidak tertutup kemungkinan adanya anasir-anasir Pihak penjajah yang tidak menginginkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa yang dikhawatirkan tentang gangguan dari pihak Belanda dan antek-anteknya, ternyata tidak ada sehingga Sang Saka Merah Putih dapat dikibarkan beberapa waktu lamanya. Untuk itu Datu Suppa memaklumkan kepada rakyatnya bahwa daerah Suppa yang sedang dibawah perintahnya dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang baru saja diproklamasikan kemerdekaannya (Dokumen hasil wawancara: La Hasang, Pinrang, 1999).

Memasuki zaman pergerakan kemerdekaan, Andi Selle pernah diangkat "sebagai koordinator "Pemuda Suppa". Tujuannya adalah untuk rnengkoordinasikan teman-temannya dalam rangka menghadapi

kaum penjajah atau bangsa Belanda yang saat itu ingin kembali menjajah bangsa Indonesia yang baru saja dinyatakan kemerdekaannya. Dari sinilah kepemimpinan Andi Selle Mattola mulai menanjak dan dapat dilihat kemampuannya untuk para pemuda militan yang ada di daerah Suppa saat itu, di samping sebagai kepala kampung di daerah Alitta yang merupakan tempat lahirnya para pemuda pejuang yang banyak tampil ke depan membela negara dari kaum penjajahan.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pimpinan BPRI Suppa, maka dalam bulan Desember 1946 atau menjelang diadakannya Konfrensi Paccekke, Andi Selle Mattola mengadakan perjalanan inspeksi kepelbagai daerah pertahanan anak buahnya di bagian utara. Pertama rombongan Andi Selle Mattola tiba di Kampung Paja, daerah ini pada saat itu di bawah perlindungan Ambo Dondi. Di daerah ini beliau mengadakan rapat kilat tentang strategi yang sedang dilaksanakan. Selesai pertemuan, maka seluruh pasukan kembali ke pangkalannya masing-masing untuk mengatur pasukan untuk menghadapi pergolakan berikutnya. Menurut Ali bahwa setelah itu, kemudian rombongan Andi Selle Mattola, meneruskan perjalanannya ke daerah Kaballangan dan meneruskan perjalanan ke daerah Ratte, sedang Andi Arsyad sendiri tetap tinggal di Kampung Paja. Setelah kepergian Andi Selle Mattola ke Ratte, seorang kurir datang ke Paja melaporkan kepada Andi Arsyad bahwa Andi Mattalatta dan Saleh Lahade telah mendarat dan ingin bertemu dengan pimpinan BPRI Suppa yaitu Andi Selle Mattola. Akhirnya Andi Selie Mattola kembali ke Kaballangan untuk menemui Andi Arsyad sehubungan dengan kedatangan Andi Mattalatta dan Saleh Lahade. Sehabis pertemuan dengan Andi Arsyad, maka diputuskan untuk datang mengikuti komprensi seperti yang diemban oleh Andi Mattalatta sebagai pemegang mandat dari Panglima Besar Jenderal Soedirman. Setelah itu, Andi Selle Mattola bersama rombongannya menuju ke daerah pertahanan Andi Abubakar Lambogo di Enrekang. Beliau melalui beberapa daerah seperti Kampung Bila, Padang Lolo, Bilajeng, Bulisu terus masuk ke daerah Enrekang. Selesai kunjungan beliau kembali ke Suppa mempersiapkan diri untuk mengikuti komprensi di Paccekke (Dokumen wawancara La Djide, Pinrang, 2002).

Sebagai wakil dari Andi Abdullah Bau Massepe, maka Andi Selle Mattola yang menjalankan roda kelasykaran sehingga beliau lebih dikenal sebagai pimpinan BPRI Suppa ketimbang Datu Suppa sendiri. Hal ini disebabkan karena kesibukan yang teramat banyak yang menghadang Andi Abdullah Bau Massepe, sehingga semua waktunya

tidak ada diluangkan untuk BPRI Suppa. Kesibukan lain dari beliau adalah karena pada saat itu beliau juga menjabat sebagai Bungken Kanrikan di samping jabatan lain yang dipegang di dalam keorganisasian dan kelaskaran.

BPRI Suppa yang dimotori oleh Andi Selle Mattola, yang sejak awal dibentuknya mempunyai wilayah yang cukup luas dan berpengaruh sangat besar di kalangan rakyat biasa. Memasuki jaman mempertahankan kemerdekaan, Andi Selle Mattola bertambah sibuk dengan bertambah luasnya wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Setelah diadakannya Komprensi Paccekke pada 20-22 Januari 1947, Andi Selle Mattola diangkat sebagai komandan Resimen I Devisi Hasanuddin dengan pangkat Letnan Kolonel. Kekuatan pasukan resimen I pimpinan Andi Selle Mattola adalah sebanyak lima Batalion atau sekitar 5000 orang personil dengan persenjataan yang cukup memadai (Kila, 1996:53).

Perlengkapan persenjataan yang dimiliki kelima batalion Andi Selle Mattola, boleh dikatakan yang terbanyak dimiliki di antara semua kelasykaran yang ada di Sulawesi Selatan saat itu. Hal ini dapat dimengerti, oleh sebab Andi Selle Mattola di masa kekuasaannya di daerah Suppa-Pinrang meliputi lima kabupaten. Seluruh aspek perdagangan yang ada di lima kabupaten tersebut, dimonopoli oleh beliau terutama komoditi dagangan yang sangat potensial yaitu beras dan kopra. Komoditi dagangan ini diangkut keluar daerah seperti ke Tawau dan Singapura, kemudian ditukar/dibarter dengan senjata ketimbang dijual kepada konsumen. Walaupun harus dijual, akan tetapi seluruh hasil penjualan dibelikan kembali senjata guna perjuangan resimen Andi Selle Mattola di Sulawesi Selatan (Dokumen wawancara Ladjide, Pinrang, 2002). Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa lancarnya arus perdagangan Mattola oleh karena didukung oleh sarana kapal yang dimiliki secara pribadi oleh beliau. Kapal ini yang mengangkut beras dan kopra yang kemudian ditukar dengan senjata. Senjata-senjata tersebut kemudian disalurkan ke dalam jajaran Batalion Andi Selle Mattola untuk memperkuat pertahanan dalam menghadapi tentara Belanda.

Dari hasil perdagangan yang dimonopoli oleh Andi Selle Mattola di lima wilayah kabupaten guna menunjang kelancaran perjuangannya, telah pula membawa Andi Selle Mattola menjadi orang kaya. Kekayaan beliau diperkirakan ada Rp. 4,3 milyar yang terdiri dari macam-macam

bentuk seperti emas, permata, perusahaan, simpanan di Bank, gedung-gedung, dsb. Jumlah tersebut di atas, tidak termasuk di dalamnya sawah-sawah, empang-empang dan binatang berupa sapi 500 ekor serta tiga buah kapal, akan tetapi yang terakhir itu ditenggelamkan di daerah jajahan Inggris oleh TNI. Harta kekayaan yang tersebut di atas tadi, telah dimiliki dan diambil alih pemerintah (Anwar, 1980: 451).

Dalam peristiwa Pinrang yang terjadi 5 April 1964, Andi Selle Mattola yang pernah menguasai empat kabupaten di Sulawesi Selatan, terkena tembakan pada bagian kakinya dan kemudian atas kesetiaan para bawahannya, Andi Selle Mattola ditandu dan dilarikan untuk mencari perlindungan. Kemudian pertempuran yang terjadi pada tanggal 1 September 1964 di sekitar kompleks Parambu salah satu benteng pertahanan Andi Selle Mattola di Bungin Pinrang, dalam pertempuran itu beliau mendapat luka berat dan masih sempat dilarikan oleh anak buahnya untuk menghindari sergapan. Namun, Andi Selle Mattola terdesak di sebuah jurang yang sangat terjal yang mempersempit ruang geraknya. Di sinilah beliau dibawa lari oleh anak buahnya dan disembunyikan di suatu tempat yang jauhnya sekitar 50 meter dari tempat pertempuran hingga beliau menemui ajalnya. Tempat menyembunyikan mayat beliau adalah dalam sebuah lubang batu, yang cukup besar (Dokumen hasil wawancara, La Matta, Pinrang).

Nanti esok harinya, tanggal 2 September 1964, mayat Andi Selle Mattola bisa diketemukan. Mayat beliau diketemukan dalam keadaan utuh dan kemudian dibawa ke Rumah-Sakit Parepare untuk diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan. Pasca kematiannya, seluruh harta benda beliau disita oleh negara untuk dipergunakan membangun wilayah yang pernah dijadikan sebagai basis perjuangannya, yaitu Mandar secara keseluruhan. Penyitaan harta yang dimiliki oleh beliau berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia NO.291 Tahun 1964, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 1964.

Konfrensi Pacekke

Pertemuan Andi Mattalatta dengan Panglima Besar Sudirman di Markas Besar Tentara (MBT), kemudian dilanjutkan dengan kontak bersama dengan Kahar Muzakkar yang pada saat itu menjabat sebagai komandan BKI (Badan Keamanan Indonesia), kemudian melahirkan usul pembentukan TRIPS. Usul ini diterima baik Markas Besar Tentara yang pada akhirnya menjadi salah satu bagian atau usaha Markas Besar

Tentara. Tanggal 16 April, dikeluarkan surat keputusan atau mandat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang isinya menugaskan kepada Kahar Muzakkar, Andi Mattalatta dan M. Saleh Lahade untuk :

1. Melakukan pembentukan kader dan pasukan lengkap dengan peralatan militer untuk diberangkatkan ke Sulawesi Selatan secara ekspedisi.
2. Membentuk Tentara Republik Indonesia di Sulawesi Selatan, disingkat TRIPS, dengan kekuatan satu divisi, guna menegakkan dan membela Republik Indonesia.
3. Menyampaikan laporan tentang hasil dari tugas tersebut kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai tindak lanjut dari isi keputusan (mandat) tersebut, maka dibentuklah stap komando Tentara Republik Indonesia - Persiapan Sulawesi yang kemudian dinamakan Resimen Hasanuddin pada tanggal 24 April 1946, adalah:

Komandan	: Letnan Kolonel Kahar Musakkar
Wakil	: Mayor Andi Mattalatta
Kepala Staf	: Mayor Saleh Lahade
Seksi I	: Kapten Bazuki Effendi
Seksi II	: Letnan Nurdin Marlin
Seksi III	: Letnan Ali Abdullah
Seksi IV	: Letnan Said dan Kapten Usman Massepe
Sekretaris	: Letnan Dungga (Djarwadi,dkk.1972:33).

Komando berkedudukan di Jalan Trimargo No. 10 Jogjakarta. Stap Komando inilah yang merupakan cikal bakal adanya Tentara Republik Indonesia (TRI) Sulawesi Selatan. Sebelum para TRI dikirim ke Sulawesi Selatan, mereka semua dilatih tentang dasar-dasar keprajuritan di Solo. Maksud ekspedisi ini adalah dalam rangka membantu para pejuang di Sulawesi Selatan yang saat itu sangat terdesak oleh tentara NICA/ Belanda. Juga diharapkan agar supaya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tetap dapat dipertahankan dari segala bentuk ronrongan musuh (Pawiloi : 1987 : 340). Selanjutnya rombongan ekspedisi yang dikomandoi oleh Mayor M. Saleh Lahade, beranggotakan Letnan Satu Andi Oddang, Letnan Muda Sukamo, Letnan Muda Dg. Gassing dan Kopral Parasai sudah tiba. Rombongan ini tiba di pedalaman yang masih dikuasai oleh pasukan lasykar sehingga dapat memperkuat

konsolidasi. Tentara Republik Indonesia. Dengan segera direncanakan untuk mengadakan pertemuan antara semua badan-badan perjuangan bersenjata yang ada di daerah Sulawesi Selatan, berdasarkan isi surat atau mandat yang diberikan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Undangan segera disebarkan kesemua kelasykaran yang ada di Sulawesi Selatan dengan kurir yang terpercaya. Pertemuan ini disepakati dalam undangan adalah di Dusun Pacakke, Kecamatan Mangkoso, 15 KM dari poros jalan utama Makasar - Parepare. Pertemuan ini berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 24 Januari 1947. Pimpinan Komperensi adalah Andi Mattalatta yang dibantu oleh Saleh Lahade sebagai pemegang mandat dari Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Pada pertemuan ini, yang sempat hadir adalah hanya 8 utusan kelasykaran bersama pasukannya. Dari delapan utusan ini diperkirakan sekitar 700 Pasukan yang hadir dengan kekuatan senjata 300 pucuk dari berbagai jenis. Pertemuan ini dilangsungkan di atas sebuah rumah bertiang (rumah kayu) khas dusun Paccekke dan yang paling besar di daerah ini.

Kedelapan kelasykaran yang hadir bersama pasukannya adalah:

1. KRIS Muda Mandar, oleh Andi Parenrengi dkk.
2. BPRI Suppa, oleh Andi Selle dkk.
3. BPRI Enrekang, oleh Abubakar Lambogo dkk.
4. BP. Ganggawa Barru, L. Rahmansyah dkk.
5. Gapis Soppeng oleh M. Idris Palunggeng dkk.
6. KRIS, oleh Andi Cabambang dkk.
7. Harimau Indonesia oleh Muhammad Syah.
8. Banteng Makassar oleh Daeng Bonto (Pawiloi, 1987 : 341).

Tokoh-tokoh lain yang hadir adalah Hamid Ali, Andi Azis Tamimi, La Domeng, Usman Sani, Maolwi Saelan, • mereka adalah peserta inti. Para peserta j Andi Sapada, Andi Oddang, Andi Arsyar, Andi Paramajeng, H. M. Tayib, Ambo Siraje, Sirajuddin Salam, Abd. Gaffar, La Indi, Daud Sija, La Pagasa, Bachtiar, M. Daud, Alim Bachri, M. Daeng Patompo, Andi Sode Maramat, Yusuf Rasul, Edi Mangilep, Said Muhammad, Makkarodda, Mahmud Sewang, Kasim Dm, Muharram Jaya, M. Arsyad B. Harjono, Ambo Bunga, Puang Toreang dan terakhir adalah "La Djide" alias Tjakkodo yang diberitakan gugur pada pertempuran di Parangki Suppa melawan Belanda dalam rangka membantu pasukan ekspedisi Murtala dkk untuk mendarat. Padahal beliau pada saat penelitian

dilakukan masih dalam keadaan sehat wal'afiat dan beliau rupanya sudah mulai terlupakan. Dan dari pertempuran itulah, beliau kemudian diberi gelaran Tjakkodo, oleh karena pada saat bertempur beliau duduk di atas sepucuk senjata brengun yang gaya duduknya persis seperti kodok (Dokumen wawancara : La Djide dan La Hasang 2002,1999).

Kerja keras dan keuletan dari Andi Mattalatta bersama Saleh La Hade sebagai pemegang mandat dari Panglima Besar Sudirman, maka Konfrensi Paccekke dimulai pada tanggal 20 sampai dengan 24 Januari 1947 ada yang menyatakan dimulai tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 1947, perbedaan itu memang masih memerlukan penelitian lebih mendalam.

Pada Konfrensi Paccekke yang berlangsung dari tanggal 20 Januari 1947, direncanakan membentuk satu divisi di Sulawesi Selatan dengan kekuatan empat resimen termasuk 1 Resimen persiapan untuk Sulawesi Tenggara, adalah:

1. Satu resimen di Polongbangkeng bagian Selatan
2. Satu resimen di sekitar Pare-pare
3. Satu resimen di sekitar Palopo
4. Satu resimen dipersiapkan untuk Sulawesi Tenggara (Bahtiar, 2014:105).

Datu Suppa, Andi Abdullah Bau Massepe pada saat akan dilaksanakan konfrensi, beliau tidak bisa hadir oleh karena telah ditangkap tentara NICA/ Belanda, sehingga waktu beliau diangkat atau dilantik sebagai hasil konfrensi, beliau hanya dilantik secara "*in abcentia*" sebagai Panglima Divisi Hasanuddin dengan pangkat kolonel. Susunan Resimen I Divisi Hasanuddin adalah :

Komandan : Letkol Andi Selle (Mattola)

Kepala Staf/wakil : Mayor A. Arsyad
H. Thayeb Kallado

Kepala Bagian : Andi Paramajeng

Komandan Batalion :

1. Batalion Satu Komandan L. Rahmansyah
2. Batalion Dua Komandan Ambo Siradje
3. Batalion Tiga Komandan Abubakar Lambogo
4. Batalion Empat Komandan Andi Parenrengi (Amir, 2001:54).
5. Batalion Lima Komandan La Kallo Ambo Dondi
(batalion ini belum dilantik saat itu).

Ditetapkan pula/diresmikan secara “*in abcentia*” adalah Resimen II Devisi Hasanuddin di Polombangkeng bagian selatan dengan komandan Pajonga Daeng Nalle. Diresmikan pula Resimen III Devisi Hasanuddin yang beroperasi di daerah Luwu dan sekitarnya dengan komandan Datu Luwu, Andi Djemma. Sejak saat itulah maka kelasykaran-kelasykaran tersebut di atas berubah menjadi Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (Kila, 1996: 53).

Sebenarnya dari beberapa sumber yang diperoleh di lapangan menyatakan bahwa saat pelantikan Resimen Satu Devisi Hasanuddin sebagai hasil dari Kompetensi Paccekke, Andi Selle memperoleh dua jabatan dan dua pula pangkat. Jabatan pertama adalah sebagai Panglima Devisi Hasanuddin dengan pangkat Kolonel, hal ini terjadi oleh sebab Andi Abdullah Bau Massepe tidak sempat hadir karena tertangkap oleh Belanda, sehingga secara otomatis beliau harus digantikan oleh Andi Selle yang pada saat itu juga menjabat sebagai wakil komandan BPRI Suppa. Untuk itu, Andi Selle-lah yang menggantikan beliau untuk menghadiri Komprensi Paccekke di Barru. Jabatan kedua adalah sebagai komandan Resimen Satu Devisi Hasanuddin dengan pangkat Letnan Kolonel (Dokumen hasil wawancara: La Hasang, Pinrang 1999).

Dari peristiwa tertangkapnya beliau Andi Abdullah Bau Massepe oleh Belanda, sehingga pada saat pembukaan dan penutupan Komprensi Paccekke beliau tidak hadir dan hanya di gantikan (dalam bahasa Bugis Mattola) oleh Andi Selle yang pada saat itu, menjabat sebagai wakil pimpinan BPRI Suppa. Dari sinilah awalnya sehingga nama Andi Selle ditambahkan kata Mattola (pengganti) dibelakangnya sehingga menjadi Andi Selle Mattola. Perihal pemberian kata *mattola* “Bermula ketika Andi Selle dikabarkan telah meninggal dunia karena tertembak oleh pasukan Belanda, namun belakangan ia muncul kembali memimpin pasukannya. Kejadian seperti itu berulang kali terjadi sehingga akhirnya diberi nama AS. Mattola, alias Andi Selle Mattola artinya pengganti Andi Selle (Tangke, dkk. 2011:22).

Versi tersebut sangat berbeda dengan sumber lain yang menyatakan bahwa kata *mattola* yang tertulis di belakang nama asli Andi Selle adalah muncul ketika akan diselenggarakan pertemuan di Kampung Pacekke. Pada pertemuan tersebut, rencananya akan dilantik Andi Abdullah Bau Massepe sebagai Komandan Devisi Hasanuddin, namun yang bersangkutan berhalangan hadir sebab terlebih dahulu telah ditangkap oleh tentara Belanda. Oleh sebab itu, maka Andi Selle-lah

yang menggantikan posisi beliau dalam pertemuan itu. Karena dia sebagai pengganti (*mattola*) maka akhirnya kata itu melekat pada namanya yaitu Andi Selle Mattola. Pengetahuan tentang nama beliau itu memang belum populer di kalangan masyarakat, tapi keluarga dan para bekas anak buahnya memahami proses muncul nama tersebut.

Sementara nasib Datu Suppa, Andi Abdullah Bau Massepe belum diketahui, maka koordinator Devisi berusaha mencapai Luwu, bahkan sampai ke lereng Gunung Latimojong. Tujuannya adalah untuk mengadakan kompresi lanjutan (kompresi kedua) untuk melengkapi personil-personil yang telah dibentuk pada saat Kompresi Paccekke akan tetapi belum lengkap. Akan tetapi hal ini tidak terlaksana oleh karena keadaan Sulawesi Selatan saat itu sangat sulit, sebab operasi-operasi yang dilancarkan oleh tentara KNIL sebagai langkah pembersihan dalam rangka mengamankan Sulawesi Selatan dari serangan-serangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan.

Selesai pelantikan Andi Selle Mattola sebagai Komandan Resimen I TRI-PS Sulawesi Brigade XVI, maka beliau memberikan perintah dan instruksi kepada para komandan batalion agar segera; 1) Bergiat dan menampakkan kegiatan-kegiatan kerja dan mengatur serta menyusun stap dan benteng pertahanan yang kuat. 2) segera melakukan persiapan-persiapan bagi anggota pasukannya untuk mengadakan sabotase dan perlawanan serta penyerangan terhadap musuh (Dokumen Ambo Bunga: 2001: 3). Selanjutnya dijelaskan bahwa setelah selesai memberikan pengarahan kepada para Komandan Batalionnya, maka komandan Resimen I TRI-PS Andi Selle Mattola dan rombongan kembali ke pangkalannya di Suppa. Dalam perjalanannya pulang, di tengah perjalanan beliau dan rombongan mendapat serangan, sehingga terjadi pertempuran yang cukup seru. Korban di pihak TRI-PS adalah satu orang yang tewas yaitu La Paleseng dan luka seorang yaitu La Kalu. Usai pertempuran perjalanan diteruskan ke DuriangngE, kemudian diteruskan ke Massenrengpulu untuk membicarakan tentang kelanjutan perjuangan.

Sejak selesainya Kompresi Paccekke yang dibuka pada tanggal 20 Januari 1947 yang dipimpin oleh Andi Mattalatta bersama M. Saleh Lahade dan ditutup pada tanggal 23 Januari 1947, beberapa kelasykaran yang ada di Sulawesi Selatan yang hadir di kompresi secara resmi dilantik sebagai Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi yang disingkat T.R.I. PS. Juga termasuk di dalamnya BPRI Suppa dan BP. Ganggawa di Rappang.

Sesudah Komprensi Paccekke dilangsungkan dalam rangka pembentukan Devisi Hasanudddin (TRIPS), pendaratan ekspedisi dari Pulau Jawa tetap dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu para pejuang di Sulawesi Selatan yang sudah disatukan oleh satu wadah perjuangan yaitu Tentara Republik Indonesia-Persiapan Sulawesi untuk menghalau/mengusir para penjajah. Keadaan pasukan TRIPS pada awal pembentukannya, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat tidak memadai.

Sehubungan dengan hal yang dimaksud di atas, maka dari kesatuan Markas Besar Angkatan Laut pada tahun 1946 telah dikirim perwira dari staf MPA VI/M Lawang untuk belajar mengenai hal ihwal keprajuritan, mereka adalah :

1. Lettu M. Amir untuk wilayah Mandar.
2. Kapt. Abdullah DM untuk wilayah Pare-Pare/Pinrang
3. Kapten Wahab Pancana untuk wilayah Barru dan Pangkep
4. Kapten Syamsul Arief untuk Kota Makassar/Maros
5. Lettu Arsyad Temba untuk Takalar sampai Sinjai (Pawilloi, 1987 : 145)

Sementara pembersihan mulai dilakukan algojo Belanda yaitu Westerling di Sulawesi Selatan, beberapa kelayakaran yang ada, tetap memberangkatkan wakilnya ke Pulau Jawa untuk mengadakan hubungan dan mencari bantuan guna perjuangan di Sulawesi Selatan dalam rangka mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Anggota rombongan yang berangkat masing-masing adalah :

1. BPRI Suppa, diwakili oleh Andi Selle Mattola.
2. BP. Ganggawa diwakili oleh Puang Toreang.
3. Dari TRIPS diwakili oleh Andi Oddang, A. R. Malaka dan Azis Tamimi.
4. Dari ALRI Yon I daerah III oleh Kapt. Muh. Syah.
5. Ekspedisi ALRI-SS diwakili Kapten Hasan Rala, Lettu S. Abdullah, Lettu A. Rivai.

Mereka itulah yang berangkat ke Pulau Jawa, dimana keberangkatan mereka adalah merupakan hasil pertemuan di Gunung Nepo yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 1947. Rombongan itu berangkat pada tanggal 4 Mei 1947 dengan menggunakan perahu jenis sande, tiba di Bondowoso pada tanggal 15 Mei 1947, keesokan harinya sebagian melapor kepada Kahar Muzakkar (Kila,1996:56).

Setelah keberangkatan Andi Selle ke Pulau Jawa, maka daerah Suppa dan sekitarnya mulai mendapat perhatian yang serius dari serangan musuh. Hal ini disebabkan oleh karena sejak dulu Suppa dan sekitarnya adalah merupakan suatu daerah yang berbahaya, atau daerah momok bagi tentara KNIL atau Belanda. Hal ini disebabkan karena daerah ini adalah tempat bercokolnya para pemimpin pejuang kemerdekaan, di samping Suppa saat itu diperintah oleh Andi Abdullah Bau Massepe (saat itu masih datu). Andi Abdullah Bau Massepe sendiri hingga akhir hayatnya terkenal sebagai orang yang paling anti terhadap segala bentuk penjajahan dan tidak mau kerjasama dengan Belanda walau apapun resikonya.

Tidak sedikit korban yang jatuh di daerah Suppa dan Rappang dalam mempertahankan Kemerdekaan, apalagi dengan masuknya Westerling untuk melakukan penangkapan dan penyiksaan, bahkan yang paling mengesankan adalah pembunuhan secara sadis, baik terhadap para pejuang, maupun terhadap rakyat biasa yang tidak berdosa. Manusia dibantai ibaratnya oleh beberapa ekor binatang buas yang sewaktu-waktu dapat menerkam orang, begitulah yang terjadi hingga Andi Selle kemudian kembali ke daerah ini (Suppa) untuk melanjutkan perjuangan melawan bangsa penjajah (Belanda atau NICA).

Peranan Kelasykaran '45 di Sulawesi Selatan

Kelaskaran di Sulawesi Selatan sejak berdirinya selalu menghadapi ronrongan-ronrongan yang bermaksud ingin menguasai, baik itu dari luar maupun yang datang dari dalam. Hal-hal seperti itu memang paling sering terjadi dalam rangka memperluas suatu wilayah kekuasaan, hal ini berlanjut hingga memasuki zaman Kolonial Belanda sampai diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia. Ronrongan-ronrongan yang dilakukan oleh bangsa asing (bangsa Belanda dan bangsa Jepang) di Sulawesi Selatan mendapat tanggapan positif dari seluruh rakyat dan para pemuda pejuang dan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh kuat saat itu. Tanggapan positif yang dimaksud di atas adalah bangkitnya masyarakat dan tokoh masyarakat serta para pemuda pejuang untuk membentuk satu wadah yang dapat menampung mereka untuk melawan ronrongan dan penindasan yang dilakukan bahwa Belanda dan Jepang.

Peran aktif para pemuda pejuang dan tokoh masyarakat dan para pemimpin formal saat itu menentang segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan yang sangat mengganggu kehidupan di

tengah-tengah masyarakat yang tak berdaya. Bentuk penentangan yang mereka lakukan yaitu terutama sekali kelihatan yaitu saat-saat menjelang maupun setelah diproklamasikannya kemerdekaan. Mereka secara sadar dan serentak membentuk beberapa kelasykaran guna melawan para penjajah yang telah berlaku sewenang-wenang dan telah merampas hak rakyat sehingga membawa penderitaan di mana-mana. Kelasykaran-kelasykaran yang dibentuk saat itu kemudian dikenal dengan kelasykaran '45' Sulawesi Selatan. Kelasykaran yang dibentuk ini memang lahir pada era tahun 45 sehingga diberi nama demikian itu, kelasykaran tersebut antara lain : BPRJ Suppa, BP Ganggawa, KRIS Muda Mandar, Lipang Bajeng, Harimau Indonesia, Laptur, dsb.

Kelasykaran 45 di Sulawesi Selatan pada dasarnya dibentuk sebagai salah satu wadah tempat berkumpulnya para pemuda pejuang, tokoh masyarakat yang mempunyai cita-cita tinggi melepaskan diri dari belenggu bangsa Asing demi mengangkat nama dan harkat bangsanya. Di samping sebagai pusat pemusatan kekuatan dalam rangka memperjuangkan bangsa dan negaranya menuju cita-cita kemerdekaan. Serta berperan sebagai pusat penyebarluasan ide menuju kemerdekaan.

Peranan dari kelasykaran ini adalah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia agar dapat terbebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Setelah memasuki era kemerdekaan, kegiatan dari setiap kelasykaran semakin bertambah dan semakin berat oleh karena kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan tetesan keringat dan darah harus dipertahankan dari segala bentuk rongrongan-rongrongan yang tidak menghendaki atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Memasuki zaman kemerdekaan dengan mulainya sistem pemerintahan dibenahi, maka di Dusun Paccekke, Kabupaten Barru, diadakan suatu komperensi untuk menyatukan kelasykaran-kelasykaran yang ada di Sulawesi Selatan di bawah satu wadah yang bersifat nasional. Dari hasil komperensi itu, melahirkan beberapa kesatuan (devisi) di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah BPRI Suppa dan BP. Ganggawa sebagai hasil komperensi kemudian dilebur juga ke dalam divisi Paccekke (divisi Hasanuddin) dengan 5 batalion, sejak saat itulah BPRI Ganggawa sudah tidak ada lagi. Dengan leburnya kelasykaran-kelaskaran tersebut di atas, maka boleh dikatakan bahwa itulah yang merupakan cikal bakal lahirnya Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin (sekarang Komando Daerah Militer VII Wirabuana disingkat KODAM VII

Wirabuana). Untuk jelasnya tentang hal ini, lihat pada bagian lampiran tentang "Pertumbuhan Satuan Tempur Awal Kodam XIV Hasanuddin tahun 1950-1982. (Jarah Dam XIV Hasanuddin, 1982 : 622).

Walaupun Andi Selle hanya menduduki jabatan sebagai wakil dari Andi Abdullah Bau Massepe di dalam tubuh kelasykaran BPRI Suppa, akan tetapi di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan menyangkut kelanjutan organisasi, terletak di tangan Andi Selle Mattola. Hal ini disebabkan oleh karena kesibukan Andi Abdullah Bau Massepe yang saat itu menjabat sebagai datu (raja) di Suppa, juga menjabat sebagai "Bunken Kanrikan" di dalam wilayah hukum *afdeling* Parepare yang meliputi 5 daerah (*onder afdelling*). Ditambah lagi kesibukan lainnya yaitu, menduduki beberapa jabatan dalam beberapa organisasi kelasykaran yang ada di *afdeling* Parepare.

III

TERBENTUKNYA WADAH MILITER DAN BISNISNYA

Terbentuknya Kesatuan Militer

Lembaga yang menaungi masalah pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan negara adalah tentara atau militer. Dalam konteks negara modern seperti sekarang, secara fungsional istilah “militer” menunjuk pada suatu lembaga pemaksa yang termanagemen secara sah berada di bawah pengendalian negara. Dengan demikian secara nyata militer adalah bagian dari aparatur negara atau birokrasi dan berada di bawah kontrol pemerintah negara yang bersangkutan dalam menjalankan segala aktifitasnya. Lembaga kemiliteran di Indonesia mempunyai tugas dwi fungsi atau dua fungsi, yaitu fungsi pertahanan-keamanan dan fungsi sosial politik.

Fungsi sebagai militer di Indonesia pada awal kemerdekaan dipegang oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang mulai bertugas pada 20 Agustus 1945 atau tiga hari setelah diproklamámkannya kemerdekaan

itu. Badan ini adalah bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) bertugas untuk memelihara keamanan bersama-sama rakyat dan jawatan pemerintah lainnya di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia (KNI) yang juga dibentuk pada saat yang sama. Perubahan itu tetap membuat para pemuda kecewa dan tetap berkeinginan untuk memiliki tentara. Oleh sebab itu, para pemuda lalu membentuk berbagai kekuatan bersenjata lain dengan pembentukan berbagai laskar di daerah, bahkan sebenarnya sudah dibentuk mendahului BKR (Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990:107-109).

Memasuki bulan September 1945, kondisi berubah dengan kehadiran tentara Sekutu yang diikuti oleh kekuatan militer Belanda karena menimbulkan persoalan baru. Kehadirannya telah menyebabkan terjadi berbagai insiden. Oleh sebab itu, pemerintah menyadarinya bahwa harus dibentuk atau mendirikan sebuah lembaga militer yang bertugas bukan sekedar menjaga keamanan belaka. Kenyataan itulah menyebabkan sehingga pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Oktober 1945 untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kalau diperhatikan dengan cermat, Tentara Keamanan Rakyat sebenarnya adalah jelmaan dari BKR yang kemudian diberi tanda pangkat untuk membedakannya dari yang sebelumnya. Selain itu, struktur keorganisasiannya kemudian ditetapkan sesuai dengan organisasi militer yang profesional. Meski telah dibentuk TKR sebagai wadah resmi kemiliteran di Indonesia, namun tidak serta merta menghilangkan kelompok-kelompok pemuda bersenjata atau laskar yang banyak terdapat di daerah. Pada 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diubah lagi namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Selanjutnya pada 24 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat diubah lagi namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan di luarnya masih terdapat kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang dikoordinasikan oleh masing-masing kelompoknya. Karena kedua kelompok ini berjalan sendiri-sendiri sehingga pemerintah mengkhawatirkan jika terjadi bentrokan-bentrokan antara keduanya. Itulah sebabnya pada 5 Mei 1947, pemerintah dengan cepat merangkul keduanya di bawah satu komando, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia kemudian diresmikan namanya pada 3 Juni 1947 (Purwanto, 2000:149).

Di Jogyakarta, disusun suatu komando yang akan diberangkatkan ke Sulawesi Selatan untuk membentuk satu kesatuan tentara

dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu, juga beberapa orang pejuang berangkat ke Jakarta atas kuasa Gubernur Ratulangi untuk bertemu Presiden Soekarno. Mereka yang berhasil bertemu dengan Presiden adalah; Saleh Lahade, Andi Mattalatta, La Nakka, Muh.Amin, Haji Abdul Karim dan Muh. Yahya. Mereka kemudian berdialog dengan Presiden dan menjelaskan tentang situasi perjuangan di Sulawesi Selatan, setelah itu Presiden menanyakan "Apa yang saudara butuhkan?". Dijawab oleh Saleh Lahade bahwa "Kami membutuhkan Perintah dari Pemerintah Agung mengenai soal-soal pemerintahan serta perhubungan". Lebih lanjut dijelaskan, bahwa atas usul La Nakka, maka dimintalah pemancar radio dari Presiden. Kemudian Presiden menegaskan lagi bahwa "Soal Sulawesi akan saya bicarakan dengan Wakil Presiden Moh. Hatta dan Panglima Sudirman". Selanjutnya utusan diperintahkan menemui Perdana Menteri, Sutan Sjahrir yang berada di Pegangsaan Timur 56, yang berkantor di Jalan Cilacap No.2, Jakarta. Setelah pertemuan itu berlangsung, PM. Syahrir memerintahkan beberapa menterinya untuk membantu rombongan dari Sulawesi dengan memberikan bantuan untuk dibawa, antara lain berupa; obat-obatan, alat-alat radio pemancar dan penerima, dan sejumlah gula pasir, rokok (Djarwadi,dkk.,1972:33).

Sementara rombongan kedua yang dipimpin oleh Andi Mattalatta berangkat ke Yogyakarta untuk menemui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah bertemu Jenderal Sudirman, rombongan lalu menemui Abdul Kahar Muzakkar sebagai Komandan Batalion Kamajuan Indonesia (BKI) yang tergabung dalam Brigade Pendidikan Intel pimpinan Zulkipli Lubis. Dari pertemuan itu, lalu diusulkan untuk membentuk TRI-PS untuk diberangkatkan ke Sulawesi dan merupakan bagian dari rencana Markas Besar Tentara (MBT). Sehubungan dengan itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman pada 16 April 1946 menugaskan kepada: Abdul Kahar Muzakkar; Andi Mattalatta; dan M. Saleh Lahade untuk melakukan persiapan pembentukan kader dan pasukan serta membentuk Tentara Republik Indonesia (TRI) di Sulawesi dengan kekuatan satu divisi hingga kesatuan yang terkecil. Mereka yang tergabung dalam TRI-PS di Jawa ini kemudian setelah mendapat pelatihan, kemudian diekspedisikan ke Sulawesi Selatan setelah mendapat pelatihan dasar kemiliteran dan bergabung dengan badan-badan perjuangan yang ada di daerah ini (Limbugau, 2000:321).

Ekspedisi militer dari Jawa berlangsung beberapa kali, di antaranya ada yang gagal karena dicegat di perjalanan dan juga ada yang gagal

karena sewaktu mendarat ketahuan oleh tentara Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Mesdki demikian, para pejuang daerah ini tidak pernah surut semangatnya untuk membela tanah airnya melawan tentara Belanda yang masih ingin berkuasa meski Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan para tentara yang diekspedisikan dari Jawa, maka di Dusun Paccekke dilangsungkan suatu konfrensi yang disebut Konfrensi Pacakke, Barru untuk membentuk TRI-PS dan Tenggara dengan kekuatan satu divisi dan empat resimen, salah satunya dipimpin oleh Andi Selle Mattola dengan wilayah kekuasaannya meliputi; Parepare dan Mandar.

Persoalan Gerilya Di Sulawesi Selatan

Setelah terbentuknya TKR, maka fungsinya bukan lagi sekedar memelihara keamana rakyat dan negara, tetapi ia telah berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, kemudian diperkuat melalui doktrin dan reorganisasi birokrasi. Oleh karena itu, BKR yang kemudian berubah menjadi TNI dikenal memiliki tugas Dwi fungsi, yaitu keterlibatannya dalam lembaga eksekutif dan birokrasi. Sejak tahun 1960an, TNI sudah diketahui memiliki tanggungjawab untuk aktif dalam semua bidang pemerintahan. Termasuk keterlibatan anggota TNI dalam melakukan bisnis, tak terbantahkan kebenarannya. Inilah dwi fungsi TNI yang tidak dipertegas secara jelas.

Bisnis militer bukan hanya di tingkat pusat, tetapi di daerah pun demikian halnya. Pada tingkat Kodam, militer juga berbisnis melalui yayasan dan koperasi. Keterlibatan militer dalam berbagai sektor bisnis, pada awalnya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Alasan itu masuk akal sebab kehidupan para prajurit di awal kemerdekaan sangat jauh dari sebuah kehidupan yang dianggap layak. Penyebab utama kekurangan tersebut, karena anggaran pemerintah (sejak 1950an) tidak pernah tercukupi pada bidang kemiliteran, hanya berkisar 30 % dari total anggaran. Keterlibatan militer dalam dunia bisnis, kemudian dianggap terlampau jauh keluar dari tugas dan fungsi yang sesungguhnya, yaitu dwi fungsi ABRI (Limbugau, 2000: 328).

Kondisi itu perlu dicermati sebab pada awal kemerdekaan atau ketika Indonesia baru merdeka, kondisi perekonomian kita berada di dalam kondisi ketidakcukupan. Kondisi itu disebabkan pengeluaran-pengeluaran akibat perang yang berkepanjangan sangat besar. Oleh sebab itu, bisnis militer dimulai sejak Indonesia baru saja mencapai

kemerdekaannya, atau bisnis militer itu lahir hampir bersamaan dengan lahirnya wadah kemiliteran di Indonesia.

Proses terbentuknya wadah kemiliteran di Indonesia, diawali dari ketidakcukupan anggaran, apalagi ketika kondisi keamanan rakyat belum begitu stabil. Proses pembentukan kemiliteran juga berjalan tersendat-sendat terutama di Sulawesi Selatan. Persoalan itu dilatari oleh begitu besarnya jumlah gerilyawan yang akan direkrut masuk menjadi anggota tentara. Selain itu, persoalan perekrutan ini mempunyai persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang calon tentara, sementara persyaratan yang dimaksud itu, 90 % tidak dimiliki oleh para gerilyawan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Oleh sebab itu, akhirnya menjadi persoalan di kemudian hari yang melahirkan perang antara tentara dengan para gerilyawan.

Awal terbentuknya wadah kemiliteran di Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian Timur umumnya, digoyang oleh berbagai permasalahan yang cukup panjang. Boleh dikatakan bahwa penyelesaian dan pemebentukan itu memakan waktu yang sangat panjang. Berlarut-larutnya persoalan pembentukan itu terjadi sebab adanya persoalan yang tidak dapat diketemukan ujung pangkalnya antara kedua pihak. Meski sebenarnya bahwa pembentukan alat-alat militer di daerah ini, telah ditetapkan sebelumnya yang dikoordinir oleh pasukan Kesatuan Gerilya Seberang (KGS) dipimpin oleh Letkol Abdul Kahar Muzakkar. Wilayahnya meliputi Pulau Kalimantan, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Ketika kondisi dan situasi yang tidak menentu bagi anggota gerilyawan Sulawesi Selatan, tampil Abdul Kahar Muzakkar untuk menetralisirnya. Ia telah menggagas suatu rencana bahwa bekas anggota gerilya di Sulawesi Selatan harus diakomodir keberadaannya sebagai pejuang sejati ke dalam suatu wadah, yaitu APRI/S. Itulah sebabnya, Letkol Mokoginta dan Mayor Saleh Lahade pada bulan Februari 1950 mengusulkan kepada Menteri Pertahanan cq. Koordinator Keamanan yaitu Hamengkubono IX, suatu konsep untuk mengakui lima Batalyon Teritorial Hasanuddin yang anggotanya terdiri dari bekas-bekas pejuang gerilya dari lima wilayah yang dimaksud di atas (Jarah Dam XIV Hasanuddin, 1982:32).

Konsepsi Letkol Mokoginta dan Mayor Saleh Lahade seperti tersebut di atas ditolak oleh karena adanya pendapat dan masukan dari tiga orang kolonel yaitu ; Kolonel Simatupang, Kolonel A.H Nasution, dan

Kolonel Hidayat. Usulan konsepsi itu lalu tenggelam bersamaan dengan terjadinya peristiwa Kapten Andi Azis 5 April 1950 (Harvey, 1989:163-164). Bahkan setelah Kolonel A.E Kawilarang menjadi Panglima KTT-IT, maka kebijakan Menteri Pertahanan sama sekali melarang untuk menerima eks gerilya secara pasukan ke dalam APRIS, kecuali melalui rekrutmen perseorangan. Konsepsi semula, baru dibuka kembali ketika Kolonel Kawilarang digantikan oleh Kolonel Gatot Subroto sebagai panglima.

Sebelum peristiwa Kapten Andi Azis terjadi pada 5 April 1950, sejumlah rentetan peristiwa terjadi untuk membentuk kesatuan pertahanan di Sulawesi Selatan, yaitu memasukkan para anggota gerilyawan menjadi anggota tentara secara resmi. Untuk persoalan itu, Abdul Kahar Musakkar tampil ke depan untuk memperjuangkan masalah itu. Hal itu memungkinkan mengingat bahwa pada waktu yang bersamaan, beliau juga merupakan komandan Kesatuan Gerilya Seberang (KGS). Selain itu, beliau juga mengirim tentara dari Jawa ke Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Itulah sebabnya sehingga di Sulawesi antara 1946-1948 telah berdiri setidaknya ada empat batalion pejuang yang masing-masing dipimpin oleh Kaso Abdul Gani, Andi Selle, Andi Sose dan Arief Rate (Bahtiar, 2014:110).

Dalam rangka untuk membenahi masalah gerilya di Sulawesi Selatan yang jumlahnya begitu besar, menjadi persoalan yang berlarut-larut. Maka dilangsungkan suatu konperensi di Dusun Pacekke pada 20 Januari 1947 dan telah menghasilkan satu divisi dengan kekuatan tiga resimen yang salah satunya dipimpin oleh Andi Selle Mattola. Organisasi kemiliteran ini berada di bawah Tentara Republik Indonesia (TRI), namun tidak berjalan sesuai harapan. Penyebabnya adalah karena di tengah kemelut yang melanda untuk usaha penyelesaian Perang Kemerdekaan dalam menghadapi Belanda, ialah melalui Komperensi Meja Bundar. Maka Letkol Kahar Muzakkar mengambil inisiatif melakukan langkah reorganisasi kelaskaran pejuang gerilya di Sulawesi Selatan yang cukup banyak jumlahnya (Gonggong, 1992:94).

Sehubungan dengan itu, Letkol Kahar Muzakkar menugaskan Saleh Syahban untuk berangkat ke Sulawesi Selatan untuk menghubungi para komandan gerilya. Misi itu berhasil, akhirnya disepakati untuk mengadakan suatu pertemuan di Maros pada bulan Agustus 1949, hasilnya ialah terbentuknya Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang digambarkan memiliki kekuatan sebanyak 10 batalion. Pertemuan itu

mengajukan usul kepada pemerintah Republik Indonesia agar KGSS diterima menjadi Divisi Hasanuddin dan mengangkat serta menetapkan Kahar Muzakkar sebagai Komandan Divisi.

Alasan mengajukan Kahar Muzakkar sebagai Panglima Divisi karena dianggap telah berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, mereka menganggap bahwa hanya Kahar Muzakkar yang dapat menyelesaikan kemelut yang ada di tubuh KGSS. Selain itu, diusulkan juga agar seluruh anggota pejuang kemerdekaan diterima masuk sebagai anggota APRI(S) sesuai dengan jasa-jasa dan pendidikan serta pengalaman mereka dalam perjuangan membela Proklamasi 17 Agustus 1945, empat setengah tahun yang lalu. Usulan itu justru menjadi pemicu dalam penyelesaiannya di kemudian hari dan berkembang menjadi benih yang tumbuh sebagai alasan pertentangan antara pemerintah dengan KGSS yang tidak dapat mempertemukan ujung pangkalnya.

Sehubungan dengan hasil pertemuan di Maros itu, maka Kahar Muzakkar berangkat ke Sulawesi Selatan bersama Letkol Mursito atas izin dari Kepala Stap Teritorial Kolonel Bambang Supeno. Kepergiannya ke Sulawesi Selatan, sebenarnya tidak diinginkan oleh Kepala Stap Angkatan Darat A.H. Nasution. Kahar lalu mengadakan perjalanan ke daerah-daerah pedalaman untuk menemui dan meminta keterangan dari para komandan Batalion KGSS dan anak buahnya yang kebetulan adalah bekas anak buahnya sewaktu di Jawa Timur atau di Yogyakarta dulu. Keterangan yang diperoleh oleh beliau bahwa keseluruhan anggota gerilya menginginkan agar mereka secara keseluruhan diterima sebagai anggota APRIS yang ditampung dalam satu Brigade dengan komando Kahar Muzakkar.

Pertemuan yang diselenggarakan pada 1 Juli 1950 yang juga dihadiri oleh Kahar Muzakkar, Panglima TT VII Wirabuana mengeluarkan suatu pernyataan yang bertolak belakang dengan keinginan Kahar Muzakkar dan para gerilya yang ada di Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Panglima TT VII menyatakan bahwa "Pembubaran KGSS sebagai organisasi kelaskaran gerilya, KGSS dan organisasi gerilya di luar APRIS dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan kembali organisasi tersebut, termasuk larangan tentara" (Gonggong, 1992: 96).

Kahar Muzakkar bagai disambar petir mendengar dekrit yang dikeluarkan oleh Kawilarang. Kahar Muzakkar merasa dihianati dan

disa-siakan oleh Kawilarang atas usahanya untuk menyelesaikan permasalahan yang melilit antara KGSS dengan APRIS. Oleh sebab itulah Kahar Muzaakkar merasa malu (*masiri*) atas perlakuan Kawilarang melalui pernyataannya. Ketika itu juga Kahar Muzakkar menanggalkan tanda pangkatnya dan melemparkannya di atas meja di hadapan Kawilarang sebelum meninggalkan tempat pertemuan.

Sejak peristiwa itu, Kahar Muzakkar tidak lagi menjadi anggota APRIS yang efektif (belum dikeluarkan dari APRIS). Dan pada malam harinya, Kahar Muzakkar diculik oleh salah seorang pemimpin gerilya dan dibawa ke Baraka, suatu tempat yang tidak jauh dari Enrekang. Tempat ini sebenarnya adalah merupakan markas besarnya selama beberapa tahun. Menjelang 5 Juli 1950, semua satuan KGSS yang belum berbuat demikian mengundurkan diri ke hutan, demikian pula Lipan Bajeng dan satu kompi dari Batalion Mattalatta yang dipimpin oleh Letnan Syamsul Bahri (Harvey, 1989:175).

Ketika Kahar Muzakkar sudah menyatakan diri bukan lagi anggota TNI dan masuk hutan bersama para gerilyawan (KGSS), maka ia melakukan rasionalisasi dan konsolidasi organisasi dengan melakukan Konperensi di Campa pada 22 Oktober 1950 dan menghasilkan keputusan:

Komandan : Abdul Kahar Muzaakkar

Kepala Staf : M. Saleh Syahban

Batalion I Bau Masseppe : Andi Selle

Batalion II Batu Pute : Andi Tenriajeng

Batalion III Arief Rate : Azis Taba

Batalion IV Wolter Monginsidi : Andi Sose

Batalion V 40.000 : Syamsul Bahri

(Harvey, 1989:178).

Meskipun Kahar Muzakkar bersama anggota gerilya telah masuk hutan sebagai bentuk pembangkangan terhadap APRIS karena usulnya ditolak oleh Kawilarang sebagai Panglima TT-VII, namun pihak pemerintah tetap mencari jalan penyelesaian. Itulah sebabnya pemerintahan Natsir mengeluarkan keputusan dengan memerintahkan agar para pejuang/gerilyawan Sulawesi Selatan diterima sebagai anggota TNI. Selain itu, pemerintahan Natsir juga menghimbau agar mereka tidak ditindak sebagai akibat dari tindakan-tindakan mereka sebelumnya. Oleh sebab itu, dibuatlah suatu pedoman yang diberikan

kepada pimpinan Angkatan Darat untuk pemecahan masalah gerilya seperti berikut:

1. Saat para pejuang nasional di Sulawesi Selatan diterima menjadi anggota TNI, kedudukan mereka adalah sebagai anggota batalion-batalion latihan.
2. Akan ada masa peralihan yang mempersiapkan batalion-batalion latihan itu menjadi batalion-batalion infanteri TNI; masa peralihan berakhir apabila suatu batalion diresmikan menjadi batalion infanteri TNI.
3. Di Sulawesi Selatan akan dibentuk suatu Brigade Hasanuddin dan batalion-batalion yang telah diresmikan itu akan menjadi bagian daripadanya.
4. Selama masa peralihan, pimpinan-pimpinan para pejuang yang sekarang kedudukannya tetap seperti sekarang (Provinsi Sulawesi, 1972:340-341).

Apa yang menjadi keputusan pemerintah Natsir seperti tersebut di atas, kemudian ditindaklanjuti oleh Panglima Indonesia Timur pada 9 Desember 1950. Panglima lalu mengeluarkan suatu pernyataan yang mendukung sikap pemerintah menyangkut gerilya yang ada di Sulawesi Selatan. Pernyataan Panglima itu adalah bahwa karena sekarang “kaum pengacau dan perampok” telah dilenyapkan, maka telah tiba waktunya untuk memberi tempat kepada para pejuang yang sesungguhnya di dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Suatu seruan lalu dikeluarkan kepada para pejuang gerilya untuk memasuki rayon yang telah ditetapkan antara 15 Desember 1950 sampai 6 Januari 1951 (Harvey, 1989:181).

Himbauan itu kurang mendapat respon dari Kahar Muzakkar, sebaliknya dari Saleh Syahban peduli tentang himbauan itu sehingga ia mencoba untuk mengumpulkan komandan gerilya untuk menanggapi himbauan pemerintah (TNI). Sampai batas waktu habisnya pemanggilan, Kahar Muzakkar masih bersifat diam. Bahkan kemudian mengeluarkan perintah agar semua gerilya mengundurkan diri ke pegunungan. Dan kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Saleh Syahban selaku Kepala Stafnya. Saleh Syahban lalu memutuskan bahwa semua anggota Brigade Hasanuddin agar masuk asrama atau rayon yang telah ditetapkan, yaitu di Baraka. Perintah ini adalah dua perintah yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh unsur pimpinan gerilya. Kahar menginstruksikan agar semua pasukan masuk hutan, sementara Saleh Syahban menginginkan agar semuanya masuk rayon (Hafid, 2015:159).

Perintah yang dikeluarkan oleh Saleh Syahban ternyata disetujui oleh lebih banyak pasukan daripada masuk hutan sesuai perintah Kahar Muzakkar. Kenyataan itu lalu disampaikan kepada Kahar Muzakkar yang membuatnya terdiam beberapa saat lamanya. Bahkan setelah beliau mau berbicara, ia lalu menyatakan bahwa ia bersedia mengikuti rapat atau komperensi yang akan diselenggarakan di Baraka dengan beberapa persyaratan. Dan persyaratan yang diminta oleh beliau disetujui oleh TNI, persyaratan itu adalah:

1. Kahar Muzakkar minta disediakan mobil Jeep dengan pengawalan yang ketat dengan persenjataan yang lengkap dan rangkap.
2. Pos-pos TNI yang akan dilalui supaya mundur sejauh 200 meter dari jalanan yang akan dilalui.
3. Tempat-tempat yang dilalui, supaya ia diperbolehkan mengadakan rapat umum dimana ia akan berbicara kepada anggotanya (Djarwadi, dkk, 1972:66-67).

Cara penyelesaian tersebut di atas untuk sementara berhasil baik sebab para gerilya telah dilantik pada 24 Maret 1951 di Lapangan Hasanuddin sebagai Cadangan Tentara Nasional (CTN). Pada pelantikan itu, hadir dari pihak gerilya antara lain; Kahar Muzakkar, Saleh Syahban, Andi Selle, Andi Sose, Andi Tenriajeng, Asis Taba, dan Syamsul Bahri. Sedangkan pihak dari Komando TT- VII adalah Letkol Kosasi, Letkol S. Sukowati, dari pihak MBAD adalah Letkol Mursdito, Letkol Suwido dan Ackting Gubernur Lapien. Pada pelantikan itu, para gerilya dibagi dalam lima batalion yang ditempatkan pada empat wilayah yaitu; Pinrang untuk Batalion I Bau Massepe, Makale-Rantepao untuk batalion II Batu Putih, Limbung untuk Batalion III Arief Rate, dan untuk daerah Enrekang ditempatkan Batalion IV Monginsidi dan batalion V 40.000. Setelah mereka dilantik sebagai CTN, mereka kembali ke rayon masing-masing untuk menunggu penyelesaian akhir (Harvey, 1989:183).

Hasil pertemuan bersama dengan keputusannya, ternyata kurang disetujui oleh Kahar Muzakkar, ia menghendaki agar seluruh anggota CTN hanya ditempatkan pada daerah-daerah yang menurutnya baik dan strategis. Menurut beliau bahwa wilayah yang baik untuk ditempatkan para batalion-batalion yang telah dibentuk sebagai CTN, adalah wilayah Kabupaten Majene, Kota Parepare, dan Luwu. Selain itu, pada wilayah-wilayah yang dimaksud, semua pasukan TNI dikeluarkan dari daerah tersebut. Tentu saja persoalan itu sangat sulit dikabulkan oleh Panglima Teritorial VII (TNI). Alasannya bahwa anggota TNI sudah terlatih

dalam menghadapi berbagai persoalan sebab sudah dilatih dalam hal keprajuritan, sementara CTN belum pernah dilatih secara resmi.

Rupanya persoalan itu akan menjadi rintangan kedua bagi TNI untuk menyelesaikan masalah gerilya yang telah dilantik sebagai CTN ke dalam TNI. Rencana peresmian CTN menjadi TNI akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1951 di Lapangan Hasanuddin. Sementara sebagian dari anggota CTN itu telah dilantik pada 7 Agustus 1951 mendahului peresmian secara serentak dari lima batalion CTN yang telah dilantik sebelumnya. Batalion yang dilantik itu adalah Batalion 1 Bau Massepe yang dipimpin oleh Andi Selle menjadi Batalion 719. Pelantikan itu sebenarnya kurang disetujui oleh Kahar Muzakkar, namun pada hari itu, ia tetap mengadakan pertemuan dengan komandan-komandan batalionnya untuk menentukan syarat-syarat yang akan di bawah ke dalam pertemuan (Djarwadi,dkk.1972:68).

Ternyata pertemuan antara pihak Kahar Muzakkar dengan pihak TNI pada 7 Agustus 1951, menghasilkan beberapa pasal yang ternyata tidak disetujui oleh Kahar Muzakkar. Anehnya sebab pertemuan itu dianggap telah selesai dan berhasil, tapi mengapa masih ada dua pasal yang ternyata tidak disetujui antara kedua belah pihak. Persoalan itulah yang menyulut sehingga Kahar Muzakkar bersama anak buahnya secara perlahan-lahan meninggalkan rayonnya masing-masing dan masuk kembali ke hutan pada 16 Agustus 1951. Dengan demikian acara pelantikan yang direncanakan akan dilakukan pada 17 Agustus 1951 batal total dan mobil-mobil yang dikerahkan untuk menjemput para gerilyawan di Baraka, terpaksa kembali kosong (Jarrah Dam XIV Hasanuddin: 1982:46-47).

Pemerintah sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh anggota gerilyawan dan Kahar Muzakkar yang telah mengingkari janjinya untuk dilantik pada 17 Agustus 1951 di Lapangan Hasanuddin. Sementara itu, persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan acara itu telah dipersiapkan dengan matang, namun akhirnya kandas di tengah jalan. Kekecewaan itu juga dirasakan oleh Menteri Dalam Negeri yang sudah datang sehari sebelumnya untuk mengikuti pelantikan itu, namun tidak jadi sebab yang akan dilantik pada kabur kembali masuk hutan bersama dengan pimpinannya, yaitu Kahar Muzakkar. Oleh sebab itulah sehingga komanda TT-VII lalu mengeluarkan suatu pengumuman terkait apa yang akan dilakukan oleh TNI berkaitan dengan Kahar Muzakkar dan anggota-anggotanya (Gonggong, 1992: 160-161).

Itulah sebabnya Panglima TT-VII menganggap peristiwa itu sebagai tamparan yang menyakitkan bagi pemerintah, khususnya TNI sebab ternyata anggota gerilya mulai meninggalkan rayon-rayonnya sejak tanggal 14 Agustus 1951 dan aparat pemerintah tidak mengetahuinya. Seharusnya TNI menjaga situasi dan kondisi yang mungkin terjadi dengan menempatkan pasukan TNI tidak jauh dari rayon-rayon mereka di Enrekang. Dan hal ini tidak dilakukan sehingga terjadi peristiwa itu, padahal mereka seharusnya mengawasinya sebab mereka sudah tahu perilaku politik dari komandannya yang selama ini sering membangkan terhadap perintah dari pemerintah.

Pelarian Kahar Muzakkar masuk hutan berarti telah menjadi disersi yang harus ditanggulangi dengan kekuatan senjata melalui operasi-operasi yang cukup lama dan telah memakan korban yang tidak sedikit antara kedua pihak. Untuk menghadapi kekuatan militer pemerintah, maka Kahar Muzakkar menyatakan bahwa pasukannya yang telah dilantik menjadi CTN dengan kekuatan empat batalion diubah namanya menjadi Tentara Kemerdekaan Rakyat yang disingkat TKR. Pernyataan itu sangat perlu dilakukan mengingat bahwa selama ini mereka bernaung di bawah gerilya sebagai landasan moralnya dan hal itu sudah tidak ada lagi sehingga harus membuat landasan moral baru sebagai kekuatan untuk mempersatukan anggotanya.

Persoalan pelarian anggota CTN masuk hutan yang kemudian menjadikan Kahar Muzakkar bersama anggotanya dianggap sebagai musuh pemerintah. Sebagai musuh pemerintah, maka tidak ada jalan lain kecuali harus dimatikan pergerakannya. Oleh sebab itulah, akhirnya Angkatan Darat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengambil sikap tegas dalam menghadapi penghinaan pada kehormatan nasional dan ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Walaupun demikian, setiap anggota CTN yang menyadari bahwa mereka telah dikelabui oleh para pemimpinnya dan melaporkan diri dengan segera kepada pos TNI akan diterima oleh Angkatan darat (Harvey, 1989:186).

Bisnis Militer

Ketika pemerintah ingin melakukan integrasi langsung terhadap Komando Gerilya Sulawesi Selatan, ternyata harus melalui beberapa persyaratan. Salah satunya adalah bekas pejuang tidak boleh buta huruf. Hal itu sangat bertentangan dengan kondisi para pejuang yang sebenarnya yang berada di bawah pimpinan Kahar Muzakkar maupun yang berada di bawah Komando Andi Selle. Oleh sebab itu kedua

pimpinan gerilya itu merasa sangat dirugikan atas kebijakan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) sebab mengancam anak buahnya tidak akan menjadi tentara Indonesia. Hal ini membuat dan memicu pembangkangan Andi Selle terhadap setiap perintah atasan demi mempertahankan eksistensi ketentaraan anak buahnya (Sainal, 2017:7).

Sekedar diketahui bahwa pada awal kemerdekaan Indonesia, anggaran negara sangat terbatas sehingga menjadi salah satu kendala untuk merealisasikan keinginan para gerilyawan yang jumlahnya ribuan orang untuk diangkat menjadi tentara secara resmi. Andi Selle sendiri pada awalnya ketika dibebani tugas untuk memimpin satu batalion (ketika itu hanya tiga kompi) yang beranggotakan kurang lebih 300 pasukan. Jumlah ini sangat kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, tetapi sebaliknya jika ditambah jumlahnya akan berimplikasi kepada pengeluaran negara untuk menggaji para tentara.

Meski demikian kenyataannya, Andi Selle yang telah diserahi tugas dan tanggungjawab sebagai komandan batalion beberapa kali, yaitu Komandan Batalion X02 Pacekke (1950) wilayahnya adalah Pinrang; Komandan Batalion I Bau Massepe, wilayahnya tetap Pinrang; Komandan Batalion 719, wilayahnya Pinrang dan Komandan Batalion 710, awal pembentukannya berlokasi di daerah Maros, yang kemudian dipindahkan ke daerah Polman, Majene dan Mamuju. Ketika bertugas di daerah inilah, pasukan 710 tidak mampu mengamankan wilayahnya yang begitu luas sehingga Andi Selle berpikir bagaimana caranya untuk mengamankan wilayahnya itu.

Untuk memenuhi tuntutan jumlah pasukan yang memadai untuk mengawal wilayah kerjanya, maka Andi Selle lalu menerima pasukan cadangan nonorganik yang dia sebut Tentara Bantuan Operasi disingkat TBO. Pasukan ini sebenarnya lebih tepat jika disebut sebagai pasukan sukarela yang mempunyai tingkat kesetiaan yang sangat tinggi. Pasukan ini semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya sehingga membuat Andi Selle berpikir keras bagaimana cara untuk menggaji mereka. Pasukan organiknya saja yang berjumlah tiga kompi dengan kekuatan sekitar 300 pasukan yang penghasilannya dari negara masih sangat kurang. Pasukan organik inilah yang dikemudian hari dicarikan tambahan penghasilan agar mencukupi biaya hidup keluarga mereka.

Untuk membiayai operasional kegiatan dan biaya-biaya pasukan,

baik organik maupun nonorganik, diperlukan suatu biaya yang sangat besar. Untuk menutupi permasalahan tersebut, Andi Selle lalu melakukan perdagangan - perdagangan antar wilayah, bahkan ke luar negeri seperti ke Singapura, Tawao Malaysia dan Filipina. Jenis-jenis barang yang diperdagangkan adalah berupa; beras dan terutama kopra yang dibeli dengan harga yang sangat murah. Harga-harga yang dipasang oleh Andi Selle melalui anak buahnya, memang sangat merugikan rakyat. Bahkan ada di antara anak buahnya yang melakukan pemerasan terhadap masyarakat yang mengatasnamakan Andi Selle.

Bisnis Andi Selle dari hari ke hari semakin menguntungkan karena barang dagangan diperoleh dengan harga yang sangat rendah, lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran. Sistem perdagangan yang dipergunakan beliau adalah sebagian dilakukan dengan sistem barter dan jual langsung kepada pedagang ditempat tujuan niaga. Barang yang dibarter biasa terdiri dari senjata berbagai ukuran, pakaian dinas ketentaraan dan pakaian biasa lainnya. Senjata hasil barteran lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan pasukannya dan sebagian lagi untuk dibarter keperluan Kahar Muzakkar dengan bahan-bahan kopra dan hasil pertanian lainnya.

Untuk memperluas usaha bisnisnya, Andi Selle lalu mempergunakan suatu wadah atau perusahaan yang bernama PT. Pembangunan. Perusahaan inilah yang mengumpulkan semua jenis barang dagangannya (komoditas unggulannya adalah kopra). Setelah barang-barang dagangan terkumpul, kemudian diekspor ke Singapura. Barang-barang dagangan tersebut diangkut ke luar negeri dengan memakai kapal-kapal asing yang sandar di Pelabuhan Polewali, Majene dan pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di sekitarnya.

Supaya PT. Pembangunan lebih efektif manfaatnya sebagai gudang penyimpanan barang dagangan Andi Selle, maka dikeluarkanlah aturan terhadap masyarakat bahwa kopra yang dihasilkan oleh masyarakat hanya dapat dijual kepada Andi Selle melalui orang-orangnya dari golongan Tentara Bantuan Operasional (TBO). Bagi masyarakat, suka atau tidak suka kopranya harus dijual kepada Andi Selle, sebab kalau tidak minimal hukumannya adalah penyiksaan hingga nyawa dapat melayang, tergantung kasih sayang dari TBO. Banyak masyarakat yang disiksa dan bahkan dibunuh ketika ketahuan menjual kopranya kepada pihak lain. (wawancara Nurdin Hama, Tinambung, 7-5-2018)

Melalui perusahaan itulah, Andi Selle dapat mengendalikan dan

melaksanakan perdagangan. Di gudang perusahaan itulah semua kopra dikumpulkan yang diberli dari produsen dengan harga yang miring. Sementara itu, perdagangan dan penyelundupan ketika itu sangat marak dilakukan karena tidak mendapat hambatan dari penguasa setempat. Paling sering datang adalah kapal-kapal dari Singapura dan inilah paling banyak melakukan penyelundupan, baik barang dari luar negeri maupun ketika kembali ke negaranya. Menurut La Djide bahwa” *Mega memang kappala Singapura toli engka mallabu okko sekitar daerah Majene sibawa Mamuju dan marrupa-rupa barang nabawa, engka nabalu langsung mega toni napolisiele bawang barang barangna masyarakatE*” (Dokumen wawancara: La Djide, di Pinrang, 2002)¹.

Bisnis Andi Selle Mattola sebenarnya dimulai jauh sebelum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Gatot Subroto. Di Sulawesi Selatan, pada masa perang kemerdekaan hingga tahun 50an pasukan reguler dan laskar rakyat sangat memerlukan dana untuk perjuangan. Itulah sebabnya sehingga setiap laskar rakyat atau kesatuan memiliki satu bagian aktivitas adalah melakukan bisnis. Untuk keperluan logistik organisasi selain untuk kesejahteraan anggota. Untuk mendapat sokongan dana yang cepat dan besar, paling gampang melalui penyelundupan dan bisnis perdagangan kopra yang pada masa itu sangat menguntungkan. Dari bisnis kopra inilah Andi Selle dapat menukarkan berbagai keperluan, termasuk senjata.

Ketika badan-badan kesatuan ini meleburkan diri ke dalam Tentara Republik Indonesia (TRI) Sulawesi Selatan dan Tenggara yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), kebiasaan berbisnis ini terbawa dan bahkan menjadi bagian penting dalam organisasi. Bahkan kegiatan bisnis ini berlanjut terus hingga proses konsolidasi organisasi angkatan bersenjata 1950. Bahkan ketika AH. Nasution menjabat Kepala Staf Angkatan Darat dan mencanangkan konsep wilayah teritorial, maka di Sulawesi Selatan dibentuk tujuh wilayah Tentara dan Teritorial (TT) yang diberikan keharusan untuk melakukan operasi gerilya dengan menangani sendiri keperluannya, seperti dana operasional serta indeviden dari markas besar. Menyikapi persoalan itu, Panglima TT VI Wirabuana membentuk sebuah organisasi yang disebut OPI X TT VII yang dipimpin oleh Saleh Lahade (Sulistyo, 2000: 325). Wadah ini lebih banyak bergerak untuk menatakelola bisnis perdagangan kopra.

¹ Beliau adalah pengawal Andi Selle Mattola di daerah Pinrang bagian Utara, ia pula yang menghadari Konperensi Paccekke di Barru bersama Andi Selle. Beliau sempat menerima tunjangan Veteran Golongan A sampai akhirnya beliau meninggal dunia.

Keterlibatan militer dalam bisnis melalui yayasan dan koperasi, juga penempatan perwira-perwira dalam struktur perusahaan, menjadikan militer sebagai salah satu pelaku ekonomi penting di Indonesia. Pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto, bisnis yang dipimpinnya seperti; Yayasan Dharmais, Yayasan Dakap, Yayasan Supersemar dan sebagainya. Sedang kalangan militer pusat, berbagai yayasan dikelolaknya, misalnya melalui Yayasan Kartika Eka Paksi, Yayasan Markas Besar ABRI (Yamabri), Yayasan Dharma Putra Kostrad, dan lain-lain (Widoyoko,dkk.tt:1).

Ketika badan-badan kesatuan ini meliburkan diri ke dalam Tentara Republik Indonesia (TRI) Sulawesi Selatan dan Tenggara yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), kesatuan-badan ini terdapat dan bahkan menjadi bagian penting dalam organisasi. Bahkan kegiatan bisnis ini bahkan terus hingga proses konsolidasi organisasi angkatan bersenjata 1990. Bahkan ketika Ali Nasution menjabat Kepala Staf Angkatan Darat dan merencanakan konsep wilayah teritorial, maka di Sulawesi Selatan dibentuk tujuh wilayah Tentara dan Teritorial (TT) yang diberikan kewenangan untuk melakukan operasi militer dengan menggunakan sedikit kekuasaannya, seperti dalam operasional serta inventaris dan markas besar. Memiliki organisasi yang itu, Panglima TT VI Wirabuna membentuk sebuah organisasi yang disebut OPTX TT VII yang dipimpin oleh Saleh Sahade (Sulistyio, 2000: 452). Wadah ini lebih banyak berperan untuk menaekelola bisnis perdagangan kopra.

Salah seorang pangkajal Andi Sella Mattola di daerah Pampang bagian Utara, ia pula yang mendirikan Komando Pasukan di Batang berama Andi Sella. Beliau sempat menerima tawaran tawaran Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjadi kepala

IV GERAKAN BATALYON 710

Terbentuknya Batalyon 710

Periode 1945-1949 dalam sejarah nasional Indonesia lazim disebut “Periode Revolusi Fisik”. Periode tersebut merupakan suatu periode yang dilalui oleh bangsa Indonesia dengan penuh berbagai perjuangan secara fisik. Hal tersebut disebabkan negara yang baru diproklamasikan perlu untuk dipertahankan demi terwujudnya suatu negara yang berdaulat tanpa ada campur tangan dari bangsa dan negara lain. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan membutuhkan bahkan meninggalkan banyak korban yang kemudian digelar pahlawan.

Untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai, bangsa Indonesia menempuh berbagai cara, salah satu wujud nyata dalam usaha mempertahankan kemerdekaan adalah terbentuknya berbagai lasykar perjuangan pasca proklamasi kemerdekaan. Lasykar perjuangan yang terbentuk didukung oleh pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang tidak menginginkan kembalinya bangsa asing di bumi Indonesia. Pemuda bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Hal tersebut

terbukti dengan berdirinya berbagai laskar perjuangan yang dipelopori oleh para pemuda revolusioner.

Keinginan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan merupakan suatu gambaran jiwa revolusioner yang sudah terpatrit dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Munculnya berbagai laskar perjuangan di bumi Indonesia, merupakan suatu bukti nyata bahwa ada keinginan luhur dari rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerilyawan yang tergabung dalam berbagai laskar perjuangan mendatangkan suatu masalah yang cukup serius bagi pemerintah Indonesia. Khusus, di Sulawesi Selatan, masalah gerilya merupakan suatu catatan tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Banyaknya gerilyawan yang tergabung dalam berbagai laskar perjuangan tentunya merupakan suatu beban tersendiri bagi pemerintah. Walaupun diakui bahwa mereka telah berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Namun di sisi lain juga menimbulkan masalah yang berat bagi pemerintah Indonesia, hal ini disebabkan timbulnya berbagai macam tuntutan sehubungan dengan status mereka.

Mewujudkan suatu badan militer yang mencakup semua unit kelaskaran di Sulawesi Selatan sudah diusahakan sebelum terjadinya pengakuan kedaulatan. Cikal bakal terbentuknya KGSS, dimulai ketika pemuda-pemuda Sulawesi Selatan yang tergabung dalam berbagai laskar perjuangan baik yang berjuang di Jawa kembali ke Sulawesi Selatan. Usaha nyata yang dilakukan untuk mewujudkan suatu badan militer di Sulawesi Selatan adalah adanya penyusupan perwira ke daerah Sulawesi Selatan. Penyusunan kekuatan gerilya semakin serius ketika memasuki awal tahun 1949, ketika Letnan Kolonel Abdul Kahar Muzakkar mengambil inisiatif untuk mengorganisasikan para gerilyawan yang terpencar di Sulawesi Selatan melalui penyusupan perwira yang sudah berpengalaman di Jawa.

Penyusupan itu dilakukan oleh anggota-anggota pasukan KGS (Komando Grup Seberang) pimpinan Kahar Muzakkar. Adapun tugas dari perwira-perwira tersebut adalah:

1. Mengadakan konsolidasi dari seluruh sisa-sisa pasukan kelaskaran TRI/ALRI yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan.
2. Membangkitkan semangat perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan.
3. Meningkatkan aktifitas perlawanan dan sabotase-sabotase

terhadap setiap kedudukan Belanda.

4. Melakukan infiltrasi ke dalam tubuh pasukan KNIL dan polisi NIT yang dapat dipengaruhi dan memihak Belanda. (Harvey, 1987: 149)

Usaha untuk mengorganisasikan para gerilyawan yang terpencar di Sulawesi Selatan, semakin nyata ketika Kahar Muzakkar memerintahkan Saleh Syahban ke Sulawesi Selatan guna menghimpun para gerilyawan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Gonggong (1992: 94) sebagai berikut:

Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar ketika itu berkedudukan sebagai Komando Group Seberang. Ia menugaskan salah seorang staf kepercayaannya, yaitu Letnan Satu Saleh Sjahban, untuk melakukan persiapan. Dalam usaha itu Letnan Satu Saleh Sjahban segera menghubungi komandan-komandan lasykar sesampainya di Sulawesi Selatan, dan ternyata berhasil baik. Saleh Syahban berangkat ke Sulawesi Selatan pada bula Februari 1949, dan beliau tiba pada 4 April 1949.

Mandat yang dibawa oleh Saleh Syahban dari Kahar Muzakkar adalah untuk mengkoordinasikan pasukan gerilya di Sulawesi Selatan. Karena situasi perjuangan gerilyawan di Sulawesi Selatan ketika itu bergerak sendiri-sendiri tanpa ada satu komando inti yang menggerakkannya.

Realisasi dari usaha yang dilakukan oleh Saleh Syahban tampak nyata ketika diadakan konferensi di Maros yang akhirnya melahirkan satu kesatuan gerilya yang dinamakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Seperti yang dikemukakan oleh Gonggong bahwa pada bulan Agustus 1949 di dalam suatu konperensi komandan-komandan kelayakaran yang dilakukan di Maros, terbentuklah Kesatoean Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang memiliki kekuatan sebanyak 10 batalyon (1992: 94). Lebih lanjut diungkapkan oleh Harvey (1989: 161) bahwa, "Saleh Syahban, atas perintah Kahar Muzakkar sebagai kepala KGS, mulai mengorganisasikan kaum gerilyawan Sulawesi Selatan menjadi satuan-satuan batalyon pada akhir 1949". Terbentuknya KGSS sebagai penjelmaan dari seluruh lasykar yang ada di Sulawesi Selatan membuka babak baru dalam sejarah militer di Sulawesi Selatan.

Setelah terbentuknya KGSS, Saleh Syahban bersama Kamaruddin Daeng Mambani menghubungi komandan Harimau Indonesia Sektor Utara, yaitu Muhammad Syah. Kemudian mereka menghubungi pula

komandan-komandan kelasykaran lainnya. Dengan berbagai rintangan usaha tersebut akhirnya dapat mempersatukan kaum pejuang di Sulawesi Selatan pada bulan Agustus dan sekaligus menetapkan status kelasykaran dalam bentuk batalyon. Batalyon-batalyon yang baru terbentuk adalah sebagai berikut:

- Batalyon X.01. Harimau Indonesia di Makassar
- Batalyon X.02. Bonthain di Bonthain
- Batalyon X.03. Bone di Bone
- Batalyon X.04. Paccekke di Pare-pare
- Batalyon X.05. Batu Putih di Palopo
- Batalyon X.06. Mandar di Majene
- Batalyon X.07. di Kolaka/Kendari
- Batalyon Anshar di Sulawesi Selatan
- Batalyon MBR di Sulawesi Selatan
- Batalyon Combat Troep di Sulawesi Selatan. (Pawiloi, 1979: 151)

Pada bulan September 1949 diadakan pertemuan di Maros yang sekaligus mengangkat M. Saleh Syahban sebagai komandan induk dan Mustafa Tari sebagai Kepala Staf KGSS. Perkembangan berikutnya terjadi konflik antara KGSS dengan APRIS sehingga memunculkan masalah dalam gerilyawan di Sulawesi Selatan (Jarrah Dam XIV Hasanuddin, 1982:34). Sehubungan dengan masalah penyelesaian gerilya yang meresahkan masyarakat tersebut, beberapa partai politik di Sulawesi Selatan membentuk Komisi Djasa-djasa Baik yang diketuai Nyonya Salawati Daud yang juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan. Komisi ini berupaya membantu mencari jalan keluar bagi penyelesaian masalah gerilya secepatnya demi keselamatan bangsa dan negara.

Pembentukan Komisi Jasa Baik untuk menyelesaikan sengketa antara KGSS dengan Gerilya, diuraikan dalam Arsip NIT. No. Reg. 97 bahwa "Pada tanggal 18 Agustus 1950, oleh Kepala Daerah Sulawesi Selatan telah diadakan suatu rapat yang dihadiri oleh Wakil-wakil dari 21 Partai dan organisasi-organisasi di Kota Makassar untuk membitjarakan soal Apris-Gerilja, yang berakhir dengan pembentukan satu Komisi Djasa Baik Apris-Gerilja yang diketuai oleh Njonja Salawati. Sumber lain juga menjelaskan bahwa Partai-partai politik di Makassar mulai mendiskusikan apa yang dapat dilakukan. Pada tanggal 18 Agustus, suatu mosi diajukan di DPRD(S) (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) Sulawesi Selatan yang mengimbau pemerintah agar

menyelesaikan persoalan status para gerilyawan. Sekelompok partai dan organisasi di Makassar membentuk “Komite Djaso”, yang diketuai oleh Ny. Salawati Daud (Harvey, 1989:179).

Ketika berbagai insiden yang terjadi antara APRIS dan gerilya (KGSS), Parlemen menyerukan kepada APRIS dan pejuang gerilya segera mengakhiri pertempuran. Selanjutnya, peranan tim interdepartemental pada tanggal 1 November 1950 digantikan oleh Parlemen dengan membentuk sebuah komisi yang diketuai oleh Mr. Sunario, dan wakilnya adalah Bebasa Daeng Lalo, paman Arief Rate (Kementerian Penerangan, 1961: 340-341). “Mr. Sunario adalah orang yang tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Selatan, ia adalah ketua PNI pada tahun 1930-an dan Parindra di Makassar pada masa sebelum Perang Dunia II” (Sulistyo, 2000: 307). Penunjukan Mr. Sunario sebagai ketua komisi merupakan suatu taktik politis bahwa dengan kepemimpinan politiknya diharapkan mampu menyelesaikan masalah gerilya karena adanya hubungan yang akrab dengan para pemimpin politik di Sulawesi Selatan.

Bebasa Daeng Lalo sebagai wakil ketua komisi, yang juga anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dari seksi keamanan mengingatkan APRIS yang sibuk menghadapi pemberontakan KNIL dan RMS dengan memberikan sugesti bahwa jiwa barisan gerilya masih murni dan seluruhnya harus tetap dipelihara oleh pemerintah agar tidak dipengaruhi KNIL dan anasir-anasir yang reaksioner. Lebih jauh Bebasa Daeng Lalo menyerukan agar gerilyawan sedapat mungkin diterima ke dalam APRIS. Bebasa Daeng Lalo menyerukan supaya gerilyawan yang berjumlah kira-kira 10000 orang diterima masuk APRIS dan sesudah itu baru diadakan saringan; sebab bagi gerilya yang pokok sekarang adalah kehormatan menjadi Angkatan Perang dan sesudah itu sebagian besar dari mereka akan ikhlas meninggalkan Angkatan Perang. Dalam penempatan gerilya ke dalam APRIS sedapat mungkin jangan sampai dikurangi kedudukannya. (Sulistyo, 2000: 307).

Seruan Parlemen tersebut mendapat sambutan pihak pemerintah. Kabinet Natsir yang terbentuk pada bulan September 1950, mulai memberikan perhatian yang serius mengenai penyelesaian masalah gerilya di Sulawesi Selatan. Usaha Kabinet Natsir untuk menyelesaikan masalah gerilya di Sulawesi Selatan semakin nyata ketika dikeluarkannya surat keputusan tentang penyelesaian masalah gerilya. Setelah

mempelajari dengan baik mengenai keadaan gerilya di Sulawesi Selatan, maka pemerintah pusat sesuai dengan putusan Perdana Menteri Natsir tertanggal 13 November 1950 No. 16/PM/1950, menetapkan penyelesaian peristiwa gerilya Sulawesi Selatan dengan memasukkan mereka ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Isi keputusan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Para pejuang nasional di Sulawesi Selatan diterima sebagai anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Tidak akan diadakan tuntutan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum masuk. (Departemen Penerangan 1953: 340).

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan pedoman penerimaan sebagai berikut:

1. Pada waktu para pejuang nasional di Sulawesi Selatan diterima menjadi TNI, kedudukan mereka adalah sebagai batalyon-batalyon latihan.
2. Akan ada masa peralihan yang mempersiapkan batalyon-batalyon latihan itu menjadi batalyon infanteri TNI; masa peralihan apabila suatu batalyon diresmikan menjadi batalyon infanteri.
3. Di Sulawesi Selatan akan dibentuk sebuah Brigade Hasanuddin dan batalyon-batalyon yang telah diresmikan akan menjadi batalyon infanteri TNI.
4. Selama masa peralihan pemimpin-pemimpin para pejuang yang sekarang akan kedudukannya tetap seperti sekarang. (Departemen Penerangan, 1953: 340 - 341).

Pada tanggal 8 Desember 1950, ketika Asaat, Menteri Dalam Negeri dari kabinet Natsir, datang ke Makassar, dan menyatakan bahwa soal gerilya sudah selesai. Hal ini merupakan suatu pertanda berakhirnya penyelesaian masalah gerilya oleh pihak pemerintah. Pemerintah menerima konsep Parlemen meski dengan beberapa catatan perbaikan.

Sehubungan hal tersebut, Bebas Daeng Lalo sebagai Wakil Ketua Misi Parlemen, dalam sidang Parlemen melaporkan beberapa hal yang menyangkut tentang penyelesaian masalah gerilya. Adapun isi laporan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Supaya pasukan gerilya di Sulawesi Selatan diakui dan segera dijelmakan menjadi Brigade Hasanuddin;
2. Kahar Muzakkar jadi Komandan Brigade dengan pangkat mayor, kepala staf dan kepala-kepala batalyon berpangkat

kapten, pangkat tersebut dimaksudkan sekedar supaya belajar bertanggungjawab dalam berbangsa dan bernegara;

3. Brigade Hasanuddin langsung diawasi komandan TT VII Indonesia Timur;
4. Untuk kepentingan latihan tentara dibekas pasukan gerilya ditempatkan pelatih perwira dan bintara dari KTT VII Indonesia Timur;
5. Supaya dilupakan segala persengketaan terhadap gerilya di Sulawesi Selatan dan Kahar Muzakkar dengan pasukan gerilyanya diberi amnesti;
6. Susunan Brigade Hasanuddin diadakan satu depot batalyon sementara untuk kembalinya sebagian gerilya ke dalam masyarakat;
7. Masalah Irian Barat jika tidak dapat diselesaikan secara politis, maka mantan pasukan gerilya yang telah dikembalikan ke masyarakat supaya menjadi tentara sukarela;
8. Untuk menjaga jangan sampai ada sentimen sehubungan dengan peristiwa yang lalu diusulkan *afdeling-afdeling* Pare-pare, Mandar, Luwu dan daerah sekitarnya untuk sementara dijadikan tempat kedudukan dan tempat melatih pasukan-pasukan Brigade Hasanuddin;
9. Urusan perumahan dan asrama untuk kesatuan-kesatuan Brigade Hasanuddin akan diatur dan ditanggung sendiri;
10. Jaminan dan keuangan Depot Intelegen dan segala urusan keuangan Brigade Hasanuddin juga akan diatur dan tanggung jawab sendiri. (Sulistyo, 2000: 307).

Realisasi dari usaha pemerintah untuk menerima gerilya ke dalam APRIS akhirnya menemui titik terang dengan diumumkannya pada tingkat nasional tentang pembentukan Corps Tjadangan Nasional (CTN) pada akhir tahun 1950. Di Sulawesi Selatan penerimaan CTN ke dalam APRIS tanpa melalui saringan.

Pasukan gerilya yang telah memasuki rayon yang telah ditentukan, terbentuk dalam lima Batalyon, kemudian dilantik menjadi CTN pada tanggal 24 Maret 1951 di lapangan Hasanuddin. Pimpinan gerilya yang hadir antara lain: Kahar Muzakkar, Andi Sose, Andi Selle, Saleh Syahban dan lain-lain. Setelah pelantikan terjadi perubahan dalam penempatan. Perubahan tersebut disesuaikan dengan rayon dan susunan-susunan Batalyon. Adapun susunan Batalyon dan penempatannya adalah

sebagai berikut:

- Batalyon I Bau Massepe di daerah Pinrang
- Batalyon II Batu Putih dipusatkan di daerah Makale-Rantepao
- Batalyon III Arief Rate di daerah Limbung
- Batalyon IV Monginsidi
- Batalyon V 40.000.
- Batalyon IV dan V dipusatkan di Enrekang (Harvey, 1989: 178).

Pada perkembangan berikutnya, Batalyon Bau Massepe di bawah pimpinan Andi Selle menjadi Korem 4 Mappesonae yang didalamnya tergabung Batalyon 710 yang menguasai wilayah Mandar.

Latar Belakang Pemberontakan Batalyon 710

Salah satu persoalan dalam tubuh militer di Sulawesi Selatan adalah tingkat kesejahteraan para anggota militer yang masih jauh dari harapan. Berdasarkan hal itu, pihak militer dibenarkan apabila melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan persenjataan dengan cara sendiri. Oleh karena itu, beberapa petinggi militer di daerah melakukan kegiatan bisnis kopra dan beras. Termasuk Andi Selle dan pasukannya melakukan bisnis secara monopoli di wilayah kekuasaannya.

Andi Selle sebenarnya adalah seorang tipe pemimpin yang baik dan beliau sangat anti komunis. Itulah sebabnya sehingga ketika ditawarkan suatu jabatan di Kodam (dulu Komando Daerah Indonesia Timur) dia menolak sebab dianggap telah disusupi unsur-unsur komunis. Beliau juga mengetahui dengan pasti bahwa sejumlah pimpinan komandan tentara di Jakarta, termasuk Soekarno sudah disusupi unsur komunis (Tangke,dkk.,2011: 87). Selain itu, beliau juga sudah terlena dengan bisnis yang ditekuninya bersama anak buahnya yang membuat ia menjadi kaya raya sehingga digelar batalion dollar.

Selain itu, Andi Selle menolak segala bentuk kerjasama dengan pemerintah, terutama tentara sebab ia tidak mau diperintah oleh tentara yang tidak pernah berjuang di Sulawesi Selatan. Beliau beranggapan bahwa masa kita yang berjuang di daerah Sulawesi Selatan, tapi yang mau memerintah kita adalah tentara yang tidak punya andil. Alasan itu pula yang menyebabkan sehingga ia lebih memilih berjalan sendiri dengan aturan sendiri pula. Apalagi ia tidak pusing masalah gaji anak buahnya sebab ia memiliki kekayaan yang cukup banyak yang diperoleh dari hasil monopoli perdagangan.

Perdagangan monopoli yang dilakukan oleh Andi Selle pada awalnya dilakukan atas anjuran panglima yang menginginkan agar setiap komandan berusaha mensejahterakan anak buahnya dengan jalan bisnis, tapi yang legal. Itulah sebabnya sehingga penguasa militer di daerah tertentu membentuk perusahaan yang mengelola perdagangan hasil bumi jenis tertentu. Tokoh-tokoh militer yang melakukan kegiatan seperti ini antara lain Letnan Kolonel Andi Selle dan Letnan Kolonel Andi Sose, keduanya adalah komandan-komandan militer setempat. Andi Selle menguasai Mamuju, Majene dan Polmas. Ia dan keluarganya menguasai monopoli hasil beras dan kopra dari daerah ini. Andi Selle mengadakan kerjasama dalam bidang perdagangan dengan Kahar Muzakkar yang ketika itu menguasai wilayah pedalaman. (Gonggong, 2004, 65)

Untuk mencari dukungan logistik, Andi Selle mengembangkan bisnisnya melalui Batalyon 710. Hal itu sejalan dengan pencaangan Kepala Staf Angkatan Darat, AH Nasution, kepada seluruh Panglima Teritorium agar mencari dana pengembangan sendiri. Cara paling tepat ditempuh Andi Selle untuk memperoleh dana dalam waktu yang singkat adalah menerapkan sistem monopoli dalam perdagangan dan penyelundupan. Monopoli pembelian kopra, beras, dan barang komoditas lainnya dilakukan dengan cara melarang pedagang lainnya membeli hasil dari petani, kecuali pedagang yang telah dibentuk Andi Selle sebagai penguasa keamanan. Petani juga dilarang menjual hasil kebunnya kepada pedagang yang tidak mendapat izin dari Komandan Batalyon. 710 Andi Selle.

Dua kewenangan militer di atas merupakan pembuka jalan bagi militer untuk bergairah lebih luas dalam bisnis. Memegang kekuasaan politik sudah barang tentu menjadi modal besar untuk menguasai masalah-masalah ekonomi. Ini terlihat dari implementasi perdagangan Batalyon 710 di bawah komando Andi Selle yang sewenang-wenang menetapkan sistem monopoli pembelian kopra dan beras di daerah Mandar. Monopoli yang mengandung unsur paksaan itu menjadi pemicu munculnya konflik antara masyarakat, terutama petani dengan anggota Batalyon 710 yang mengakibatkan masyarakat tidak pernah merasa aman dan dipenuhi kecemasan yang berkepanjangan.

Produksi petani seperti kopra, beras, kopi, dan lainnya harus dijual kepada pedagang yang berlabel Batalyon 710 dengan harga murah di bawah harga pasar yang tentunya sangat merugikan petani. Petani yang

tidak bersedia menyerahkan kelapanya untuk diolah menjadi kopra, langsung dipetik sendiri oleh pihak Batalyon 710 dengan menggunakan tenaga-tenaga TBO. Dalam waktu yang lama, TBO ditugasnya mengolah kelapa milik rakyat yang ditinggalkan dan perkebunan kelapa seluas 1.030 hektar. Setelah kelapa diolah menjadi kopra anggota TBO dapat menjualnya kepada pihak pedagang Batalyon 710 dengan harga yang sudah ditentukan. Cara ini dilakukan sebagai bantuan kesejahteraan bagi anggota TBO yang belum mendapat gaji tetap dari pemerintah. Sebagai akibat dari perlakuan sewenang-wenang Batalyon 710 kepada masyarakat petani, maka tidak sedikit petani yang meninggalkan kampung halamannya mencari tempat yang lebih aman dari TNI. (Asba, 2007: 227)

Di saat bisnis yang dikelola mengalami puncak kesuksesan, terjadi pertentangan antara beliau dengan pemerintah terutama Panglima Yusuf. Bisnis yang dikelolanya semakin maju, di sisi lain sangat menyengsarakan rakyat Mandar sehingga pemerintah harus memperingatinya. Kenyataan itulah mendasari alasan Panglima Yusuf harus mengambil tindakan nyata terhadap Andi Selle yang dibuktikan dengan memutasikan beliau dari kedudukannya sebagai Komandan Korem IV Mappesonae di Polewali dan ditarik masuk ke dalam jajaran Kodam dengan jabatan Asisten Personil Kodam di Makassar. Ia kecewa dengan pengalihan jabatan tersebut, sehingga ia menolak untuk pindah ke Makassar. Akhirnya ia diberhentikan dengan hormat sebagai anggota TNI.

Meskipun Andi Selle sudah diberhentikan sebagai anggota TNI, namun semua bekas anak buahnya masih berada di bawah kendalinya, apalagi yang berstatus sebagai anggota TBO. Oleh sebab itu, meskipun Andi Selle sudah tidak lagi menjadi anggota TNI, namun Panglima Yusuf menganggap Andi Selle masih terlalu kuat untuk dihentikan dari segala tindakannya yang dianggap melanggar aturan pemerintah. Panglima Yusuf mengakui bahwa hubungannya dengan Andi Selle mengalami ketidakcocokan atau ada *chemistry* namun beliau tidak tahu apa itu. Hanya beredar kabar angin menyatakan bahwa salah satu penyebab ketidakcocokan itu di latari oleh keputusan pengangkatan Yusuf menjadi Panglima menggantikan Andi Mattalatta. Sementara Andi Selle diangkat sebagai Asisten Personil di Kodam sehingga secara otomatis menempatkan dirinya di bawah kedudukan Yusuf (Sumarkijo, 2006:82-83). Kenyataan itu jelas tidak bisa diterima oleh Andi Selle karena menganggap bahwa yang memimpin kita adalah orang tidak

pernah berjuang di Sulawesi Selatan, sementara kita yang bertahun-tahun berjuang hanya mau dijadikan sebagai anak buah atau bawahan.

Gerakan Andi Selle di daerah Mandar dipandang sangat meresahkan masyarakat, sehingga melahirkan perbedaan pandangan antara Letkol Andi Yusuf selaku Panglima Kodam XIV Hasanuddin menggantikan Kolonel Andi Mattalatta. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu, Panglima Kodam XIV Hasanuddin mengunjungi Andi Selle di Pinrang yang merupakan tempat kelahirannya. Dilakukan perundingan pada tanggal 5 April 1964 di sebuah gudang Dolog di Leppangeng, delapan kilometer dari kota Pinrang poros Polmas. Diantara isi pembicaraan tersebut, Panglima Kodam XIV Hasanuddin ini mengajak Andi Selle untuk meninggalkan Korem 4 Polewali dan bertugas di Kodam XIV Hasanuddin sebagai Asisten III. Tawaran Kolonel Andi Muhammad Jusuf ini, rupanya ditolak oleh Andi Selle dengan alasan tertentu. Andi Selle lebih senang sebagai Komandan Korem 4 Polewali yang dijabatnya sudah beberapa tahun itu. Meski demikian, antara keduanya tetap terjalin keakraban sesama keturunan bangsawan Bugis yang ditandai saling sapa dengan *Ndi* dan *Daeng* (adek dan kakak) (Gonggong, 1992:172).

Setelah pertemuan berakhir, mereka mendapat undangan dari Bupati Pinrang Haji Andi Makkulawu (menantu Andi Mappanyuki) untuk makan siang bersama di kediamannya di kota Pinrang. Dengan menumpang kendaraan dinas Gubernur Militer Sulawesi, Andi Selle, Andi Muhammad Jusuf, Komandan CPM Kolonel Sugiri, Komisaris Besar Polisi Marjaman, dan Komandan Batalyon 403 Kapten Andi Patonangi mereka semobil menuju kediaman Bupati Pinrang. Di depan mobil mereka dikawal mobil CPM yang melaju perlahan. Namun beberapa pasukan Andi Selle yang dipimpin Andi Napi (adik kandung Andi Selle) tetap waspada dan berjaga-jaga disekitar jalan poros menuju Makassar untuk menjaga segala kemungkinan siapa tahu bakal terjadi sesuatu (Sumarkijo, 2006: 88-89).

Ketika mobil yang ditumpangi rombongan mendekati rumah kediaman Bupati Pinrang, mobil pengawal di depan mereka melaju terus, sehingga mobil yang ditumpangi panglima dan Andi Selle ikut terus. Padahal seharusnya belok kanan masuk ke rumah bupati. Panglima Kodam XIV Hasanuddin kemudian menyuruh supir bernama Sersan Langnga berhenti. Sebelum turun untuk menegur sopir pengawal yang tidak belok kanan itu, ia meminta agar jangan ada

yang turun. Namun belum berapa langkah Kolonel M. Jusuf berjalan menuju mobil CPM yang sudah berhenti itu, Andi Selle ikut turun. Pasukan Andi Selle yang sudah berjaga-jaga dan siaga di sekitar jalanan, seketika mendapat komando dari Andi Napi untuk menembak mobil Panglima. Salah satu peluru dari pasukan Andi Selle menerjang tu buh Komandan CPM Kolonel Sugiri dan meninggal seketika, Komisaris Besar Polisi Marjaman terluka. Sementara Andi Patonangi yang melihat situasi gawat segera mengacung-acungkan tangannya agar pasukan Andi Selle jangan menembak, terkena pula peluru sehingga tangannya terluka (Sumarkijo, 2006:89).

Menurut Sersan Langnga, Panglima Kodam XIV Hasanuddin Kolonel Andi Muhammad Jusuf yang terkepung peluru segera dilindungi seorang anggota CPM dan membawanya ke mobil pengawal, selanjutnya dilarikan ke arah Makassar. Sementara Andi Selle berlari menyelamatkan diri ke arah berlawanan menuju Leppangeng diikuti pasukannya. Beberapa saat terjadi saling tembak menembak antara kedua belah pihak. Panglima Kodam XIV Hasanuddin ini terus dibawa ke Parepare oleh para pengawalnya untuk istirahat, sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Makassar (Tangke, dkk.2011: 4)

Baik Andi Selle maupun Andi Muhammad Jusuf tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Pinrang 5 April 1964. Dan sejak itu, Andi Selle dan pasukannya mengumumkan untuk memisahkan diri dengan pasukan TNI dan masuk hutan bergerilya. Demikian pula pihak TNI sejak itu menyatakan Andi Selle dan pasukannya sebagai pemberontak yang melawan pemerintahan yang sah.

Penumpasan Pemberontakan Batalyon 710

Setelah penyelesaian masalah TKR, maka persoalan yang dihadapi di Sulawesi Selatan dan Tenggara adalah sisa-sisa gerilya DI/TII Kahar Muzakkar. Pada tahun 1959 timbul suatu masalah dengan macetnya sidang Dewan Konstituante di Bandung untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Oleh sebab itulah sehingga lahir Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu diambil sebagai dasar kebijakan nasional untuk menghindari saling bermusuhan, memperlakukan dengan baik dan wajar para pembangkang atau pemberontak yang telah insyaf dan atau yang telah menyerahkan diri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebaliknya terhadap mereka yang tetap membangkang terhadap APRI, tidak ada jalan lain harus ditumpas

dan dihancurkan dengan cara APRI yang legal.

APRI dengan dukungan masyarakat luas, telah melakukan berbagai upaya untuk menghancurkan para pembangkang tersebut melalui berbagai macam operasi, seperti; operasi merdeka, Halilintar dan Bawakaraeng. Operasi-operasi tersebut telah memaksa pasukan Kahar Muzakkar terdesak jauh masuk ke dalam hutan-hutan pedalaman dan telah memotong jalur-jalur suplai logistik, memperkecil moril dan daya tempur. Bahkan ada di antaranya yang telah menyerahkan diri kepada pemerintah (Jarrah Dam XIV Hasanuddin, 1982:317). Ketiga jenis operasi itu, tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi pada tahun-tahun berikutnya dilakukan lagi berbagai operasi untuk mengamankan kondisi Sulawesi Selatan dari para pembangkang anggota pasukan Kahar Muzakkar.

Pada 1962 Kodam XIV Hasanuddin belum mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) pimpinan Kahar Muzakkar, maka dibentuklah Komando Operasi Tumpas. Di dalam Operasi Tumpas termasuk Operasi Kilat, rupanya Operasi Kilat dinilai paling efektif dari semua operasi yang dibentuk tentara di Indonesia Timur. Selain karena operasi ini lebih mampu mengkonsolidasi diri dengan masuknya sejumlah bekas anak buah Kahar Muzakkar, juga Operasi Kilat ini langsung dipimpin Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Dari seluruh operasi yang dibentuk, baru Operasi Kilat yang langsung dipimpin Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Dan operasi ini pula yang mengakhiri hidup dan perjuangan Kahar Muzakkar dan para pengikutnya. (Jarrah Dam XIV Hasanuddin, 1982:367)

Di balik sasaran utama Operasi Kilat ini adalah penumpasan perjuangan DI/TII, ternyata juga menumpas gerakan Andi Selle. Ketika Andi Selle tidak bersedia menerima tawaran Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Andi Muhammad Jusuf untuk berdamai dan meninggalkan pasukannya Batalyon 710, pasukan Operasi Kilat juga mengarahkan senjatanya ke arah pasukan Andi Selle, sehingga di beberapa tempat terjadi kontak senjata. Itu dimulai setelah Peristiwa Pinrang 5 April 1964 yang berakhir tragis. Yang menarik, karena pasukan Andi Selle dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern dari yang dimiliki ABRI. Meskipun demikian, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pasukan Andi Selle masih di bawah TNI, sehingga hanya mampu bertahan dua bulan mereka menghadapi Operasi Kilat. Ketika Andi Selle dikabarkan meninggal, September 1964, maka seiring

berakhir pula keberadaan pasukannya yang sudah tidak terkonsentrasi lagi. Pasukan-pasukan Andi Selle secara bertahap menyerahkan diri sehingga pemberontakan Andi Selle pun juga berakhir (Tangke, 2011)

Selain karena operasi ini lebih mampu mengkonsolidasi diri dengan masuknya sejumlah bekas anak buah Kahar Muzakkar, juga Operasi Kilat ini langsung dipimpin Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Dari seluruh operasi yang dibentuk, baru Operasi Kilat yang langsung dipimpin Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Dan operasi ini pula yang mengakhiri hidup dan perjuangan Kahar Muzakkar dan para pengikutnya. Di balik sasaran utama Operasi Kilat ini adalah penumpasan perjuangan DI/TII, ternyata juga menumpas gerakan Andi Selle. Ketika Andi Selle tidak bersedia menerima tawaran Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Andi Muhammad Jusuf untuk berdamai dan meninggalkan pasukan Batalyon 710, pasukan Operasi Kilat juga mengarahkan senjatanya ke arah pasukan Andi Selle, sehingga di beberapa tempat terjadi kontak senjata. Itu dimulai setelah Peristiwa 5 April 1964 di Pinrang yang berakhir tragis. Yang menarik, karena pasukan Andi Selle dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern dari yang dimiliki ABRI. Meskipun demikian, karena kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pasukan Andi Selle masih di bawah TNI, sehingga hanya mampu bertahan beberapa bulan mereka menghadapi Operasi Kilat. Ketika Andi Selle dikabarkan meninggal, September 1964, maka seiring berakhir pula keberadaan pasukannya yang sudah tidak terkonsentrasi lagi. Pasukan-pasukan Andi Selle secara bertahap menyerahkan diri sehingga pemberontakan Andi Selle pun juga berakhir (Gonggong, 1992:173).

Dampak yang ditimbulkan

Setelah berakhirnya pemberontakan Batalyon 710 di bawah pimpinan Andi Selle, maka perekonomian masyarakat Mandar pada umumnya yang bergerak dalam bidang kopra dan beras dapat berjalan dengan normal. Masyarakat dapat menikmati kebebasan yang mereka tidak temukan selama Andi Selle berkuasa di daerah Mandar.

Salah satu efek buruk dari pemberontakan ini adalah kebencian etnis karena sikap penguasaan yang dilakukan Andi Selle. Selama 10 tahun (1954-1964) terjadi proses kebencian orang-orang Mandar terhadap tentara-tentara Bugis yang dianggap memeras rakyat Mandar melalui perdagangan kopra dan beras yang merupakan hasil utama daerah Mandar. Riri Amien Daud, Ibu Depu, Baharuddin Lopa adalah tokoh-

tokoh masyarakat Mandar yang menentang kekuasaan Bugis Andi Selle terhadap Mandar. Untuk itu tokoh-tokoh masyarakat Mandar membentuk organisasi bernama Front Pembebasan Rakjat Tertindas Mandar (FPRTM) yang berpusat di Makassar (Gonggong, 2004: 337).

Berakhirnya pemberontakan Andi Selle yang hanya berusia 2 bulan dan akhirnya meninggal karena serangan jantung, sangat mendukung operasi TNI dalam penumpasan DI/TII. Karena selama kekuasaan Andi Selle di Mandar, Gerakan DI/TII mendapat sumber penghasilan finansial karena mengadakan kerjasama perdagangan kopra dan beras. Akan tetapi setelah pemberontakan Andi Selle telah ditumpas, perdagangan kopra tidak lagi dikuasai oleh militer (anggot Batalyon 710) sehingga memperlemah keberadaan DI/TII.

Pertanyaan Tak Terjawab

Tragedi tak terduga yang terjadi di Pinrang pada 5 April 1964, hingga kini masih menyisahkan beberapa pertanyaan yang jawabannya tidak pernah tuntas. Pertanyaan itu adalah siapa yang memulai tembakan; benarkah Andi Selle dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Suppa; Siapa yang muncul mengaku Andi Selle pada 23 Oktober 2003, dan sempat menggegerkan kota Pinrang ketika itu. Kenyataan itu menimbulkan prokontra, baik di kalangan keluarga besarnya, maupun mantan anak buahnya serta para pengawal dan orang-orang terdekatnya.

Peristiwa atau tragedi 5 April 1964 adalah suatu peristiwa yang terjadi tanpa ada perencanaan dari pihak Andi Selle dan pasukannya yang dipimpin oleh Andi Napi (adik Andi Selle). Tragedi itu bermula ketika kesepakatan yang telah buat antara Andi Selle dan Panglima Yusuf untuk melakukan makan siang bersama di rumah jabatan Bupati Pinrang Andi Makkulau. Sebenarnya rencana makan siang itu adalah undangan bupati Andi Makkulau sehingga keduanya sepakat untuk memenuhinya selepas pertemuan antara keduanya di Kampung Leppang arah jalan poros Pinrang – Polmas. Pertemuan itu dilakukan di sebuah gedung Dolog yang lebih dikenal dengan nama sebutan *bola tellue*.

Isi pertemuan antara keduanya tidak pernah dipublikasikan. Tetapi banyak orang menduga bahwa pertemuan itu adalah untuk membahas tentang sepak terjang Batalyon 710 yang dipimpin oleh Andi Selle. Umum mengetahui bahwa batalyon yang dipimpinnya cenderung bersebelahan dengan pemerintah karena gerakannya dianggap tidak

pro rakyat kecil. Oleh sebab itu pertemuan dilakukan untuk mengajak Andi Selle dan pasukannya agar fokus untuk melakukan perlindungan dan perbaikan kehidupan masyarakat di mana ia ditempatkan. Selain itu, pertemuan itu juga terselenggara antara kedua pihak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun juga sehingga Panglima Yusuf mengajukan kepada Andi Selle agar mau menerima jabatan baru sebagai Asisten III Kodam XIV Hasanuddin.

Jabatan baru itu ditolak oleh Andi Selle dan ia lebih senang memimpin pasukannya sebagai Komandan Batalion 710. Mutasi yang ditawarkan oleh Panglima Yusuf itu sebenarnya adalah politik untuk memisahkan Andi Selle dengan pasukannya. Cara itu dengan muda terbaca oleh Andi Selle dan pasukannya. Meski pun jabatan itu ditolak oleh Andi Selle namun pertemuan itu tetap diakhiri dengan suatu kondisi yang tenang namun tetap penuh tanda tanya antara kedua pihak. Usai pertemuan itulah keduanya berangkat ke kota Pinrang memenuhi undangan bupati Pinrang untuk makan siang bersama di rumah jabatan bupati (Andi Makkulau *addatuang* Sawitto).

Dalam Perjalanan menuju rumah jabatan bupati untuk makan siang bersama, mobil yang ditumpanginya oleh Panglima Yusuf bersama Andi Selle, bukan berbelok ke rumah jabatan bupati seperti yang telah disepakati oleh mereka berdua, tetapi mobil melaju terus ke arah Parepare. Kenyataan itu membuat semua orang, terutama pihak Andi Selle merasa dibohongi oleh Panglima Yusuf sebab kenapa mobil tidak berhenti atau berbelok ke rumah jabatan bupati seperti yang telah disepakati di tempat pertemuan. Berdasarkan penuturan supir mobil Panglima Yusuf bahwa” Panglima juga heran sebab mengapa mobil pengawal tidak berbelok ke rumah jabatan dan sudah terlewati agak jauh. Panglima lalu memerintahkan kepada sopirnya berhenti untuk bertanya kepada sopir mobil pengawal yang ada di depan mereka”.

Mobil Dinas milik Gubernur yang bermerk Dodge itu lalu berhenti dan Panglima turun dari atas mobil sambil berkata “jangan ada yang turun”. Ucapan itu rupanya tidak dituruti oleh Andi Selle, mungkin nalurinya menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sebab Panglima turun dari mobil sementara kita dilarang untuk turun. (Tangke, 2011: 70-71). Ketika itulah mobil Andi Napi datang dan memotong jalan di depan mobil Panglima dan ketika itu pula terjadi tembakan, pihak Panglima menyatakan ada perintah “tembak Panglima”, namun pihak Andi Selle menyatakan tidak pernah ada perintah tembak.

Versi Panglima menyatakan bahwa memang ia mengeluarkan perintah kepada pasukannya agar menangkap Selle ketika mobil berhenti, namun belum sempat terlaksana Selle juga keluar dari mobil sambil berteriak "Tembak Panglima". Ketika itulah terjadi tembak menembak antara kedua pihak dengan sasaran utama mobil dinas yang ditumpangi mereka bersama didampingi beberapa orang (Sumarkijo, 2006: 90). Ketika terjadi tembak menembak di area yang sempit itulah, badan mobil dinas sebelah kanan itu berlubang-lubang akibat terjangan peluru.

Terkait dengan undangan makan siang di rumah jabatan bupati Pinrang, Panglima Yusuf tidak mengakuinya dan menyatakan bahwa "Tidak ada iturencanakesana, tetapi Andi Selle yang mengajaknya untuk kembali ke kota. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud "kembali ke kota" (Sumarkijo, 2006: 88). Menurut Panglima Yusuf, sebetulnya Andi Selle mengajak naik mobilnya untuk kembali ke Pinrang dan itulah yang terjadi. Pernyataan ini terdapat kesalahan fatal sebab mengapa mobil dinas yang dinaiki oleh mereka bersama tidak singgah di kota Pinrang padahal sudah terlewati. Inilah yang menjadi pemicu terjadinya tragedi ini dan sampai sekarang tidak terjawab.

Seandainya tidak ada janji untuk makan siang bersama di rumah jabatan bupati, mustahil Andi Selle mau bersama naik mobil dinas Panglima menuju kota Pinrang. Dan semua pasukan Andi Selle yang mengawalnya mengetahui bahwa mereka akan memenuhi undangan bupati Pinrang untuk makan bersama di rumah jabatan, tetapi ini tidak diakui oleh Panglima Yusuf. Dengan demikian, siapa sebenarnya yang keseleo mengeluarkan pernyataan yang bertentangan soal itu, apakah pihak Andi Selle atau pihak Panglima. Yang pasti bahwa semua pejuang yang berlabel Pejuang Kemerdekaan yang ada di kota Pinrang mengetahui bahwa mereka berdua sepakat untuk makan siang bersama di rumah bupati Pinrang.

Sebaliknya jika dilihat mobil dinas yang ditumpangi oleh mereka, badan mobil bagian kanan penuh lubang-lubang akibat terjangan peluru senjata. Kalau dianalisis kenyataan itu, bahwa lubang-lubang bekas peluru itu sangat besar kemungkinannya berasal dari pasukan Raiders pengawal Panglima Yusuf. Kesimpulan itu diambil, karena pasukan Raiders berada di bagian kanan pinggir jalan poros Pinrang-Ujung Pandang. Selain itu, posisi duduk Andi Selle dalam mobil dinas itu, adalah berada di samping kanan Panglima Yusuf. Ini artinya, Andi

Selle memang yang mau dihabisi, bukan Panglima Yusuf. Dengan demikian, fakta sejarah telah diputarbalik untuk kepentingan tertentu.

Salah satu anggota pasukan Andi Selle menuturkan bahwa” Seandainya kami dari pihak Andi Selle mau membunuh Panglima Yusuf ketika akan dilaksanakan pertemuan di Leppangeng, sangat muda bagi kami sebab medan kami kuasai. Ditambah persenjataan modern yang lengkap kami miliki yang dibantu oleh lima unit mobil panzer yang belum dimiliki oleh Kodan XIV Hasanuddin yang dikomandoi oleh Panglima Yusuf ketika itu”. Mengapa kami dituduh mau membunuh Panglima di saat yang sulit, yaitu ketika kami semua berada di tengah kota Pinrang yang notabene dikuasa pasukan Panglima Yusuf. Tuduhan itu sangat naif dan mengada-ada, sangat wajar sebab kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan, yaitu dituduh disersi (Dokumen hasil wawancara La Djida, Pinrang; 2009). Lebih lanjut sumber ini menyatakan bahwa” *Narekko Panglimae maelo riuno, magampang ilakukan nasaba lokasi ikuasai maneng nasabah idi pattentui onroang partamuangnge ri Lepangang*”. Artinya sangat muda bagi kami jika ingin membunuh Panglima sebab medan kami yanh kuasai, dan tempat perteuhan juga kami yang tentukan. Selain itu, persenjataan yang kami miliki sangat modern dengan 4 (empat) buah panzer.

Operasional, bahkan lebih jauh ada yang mengartikan sebagai Tentara Banyak Uang (uang). Pengertian terakhir itu dikaitkan dengan julukan bagi Batalyon 710 sebagai “batalyon dollar”. Artinya batalyon yang memiliki kemampuan keuangan yang banyak sehingga dapat menggaji sendiri anggota TBO-nya yang berjumlah ribuan orang.

Sumber penghasilan Batalyon 710 adalah melalui gerakan monopoli perdagangan hasil bumi daerah Mandar (terutama kopra). Ketika bisnis kopra inilah terjadi berbagai pelanggaran terhadap kehidupan masyarakat Mandar yang dilakukan oleh anggota-anggota TBO Andi Selle. Bahkan gerakan Andi Selle Mattola yang mengadakan hubungan dengan Kahar Muzakkar, diketahui oleh petinggi Kodam XIV Hasanuddin sehingga ia mendapat teguran, namun tidak dihiraukan. Bukan hanya itu, berkali-kali Andi Selle diperingati namun tidak dihiraukan, termasuk ketika batalyonnya mau diorganisir menjadi Korem IV Mappesona. Dari kejadian itulah sehingga ia dipensiunkan secara dini dengan pangkat Letnan Kolonel.

Meskipun sudah dipensiunkan dari jabatannya, namun ia tetap menguasai pasukannya bersama anggota TBO-nya dengan membentuk batalyon baru yang disebut Batalion 003. Ketika ia mengetahui telah dipensiunkan dari kesatuannya, ia berkata “Tidak apa-apa, saya sendiri dapat menggaji anggota saya yang jumlahnya ribuan orang”. Sejak itulah beliau melepaskan diri dari kesatuannya dan berjalan di atas perintah dan kemauannya sendiri. Kenyataan itu sangat mencemaskan Panglima Kodam sehingga ia mengajak bertemu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh pasukannya.

Pertemuan akhirnya dilaksanakan di gedung tua Dolog, Kampung Lepang sekitar 8 km. dari kota Pinrang arah Polmas. Akhir pertemuan berlangsung aman dan damai antara kedua pihak. Insiden kemudian muncul justru terjadi ketika mereka bersama dalam satu mobil menuju kota Pinrang untuk makan siang atas undangan Bupati Pinrang. Dalam perjalanan inilah yang memicu terjadinya tragedi Pinrang 5 April 1964 karena ketika mobil memasuki kota Pinrang, semua iring-iringan mobil tidak ada yang singgah di rumah jabatan bupati Pinrang, tapi justru berjalan melaju menuju arah Parepare-Makassar. Ketika melewati ruja bupati, Panglima lalu memerintahkan supirnya agar singgah untuk bertanya kepada supir mobil pengawal (CPM) yang berada di depan. Panglima Yusuf lalu turun dari mobil dinas dan memerintahkan penumpang lainnya agar tidak turun. Namun himbauan itu tidak

dihiraukan oleh Andi Selle sehingga ia juga ikut turun melalui pintu mobil bagian kanan.

Ketika keduanya turun, terjadi tembak menembak antara kedua pihak dalam areal yang sempit. Tembak menembak terjadi antara keduanya dan sulit mengenal siapa lawan dan kawan sebab terjadi secara tak terencana. Korban kedua pihak berjatuh dan bahkan ketika tembak menembak usai, mayat-mayat berserakan di jalanan tanpa ada yang menghiraukan. Andi Selle dan Panglima Yusuf dapat meloloskan diri sehingga selamat dari terjangan peluru. Sejak itulah, Andi Selle bersama pasukannya dinyatakan sebagai pemberontak dan harus diselesaikan berdasarkan aturan pemerintah. Hanya dalam waktu kurang lebih enam bulan lamanya, Andi Selle terjatuh ke dalam jurang ketika dikepung oleh pasukan TNI sehingga menemui ajalnya. Pasukannya pun lalu menyerahkan diri kepada pemerintah dan diampuni dosa-dosanya.

Saran-saran

1. Penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun dari para pembaca atau semua pihak karena disadari bahwa kajian ini masih sangat kurang data sehingga analisisnya sangat dangkal.
2. Untuk memahami perkembangan atau dinamika militer lokal di Sulawesi Selatan, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut sebab hingga kini kajian secara khusus menyangkut Andi Selle dan gerakannya di Sulawesi Selatan masih sangat kurang. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya mengadakan penelitian-penelitian tentang dinamika militer di Sulawesi Selatan secara komprehensif dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rosihan.1980. *Sebelum Prahar: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Asba, Rasyid. 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah; Kajian Sejarah EkonomiPolitik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Amir, Muhammad. 2001. Pertempuran Di Markas LossoE (Suatu Kajian Perjuangan Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan dalam “Bulletin Bosara (Media Informasi Sejarah dan Budaya Sulsel), Nomor 16 Tahun VII/2000”. Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Bahtiar. 2004. *TRIPS Dalam Perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: De La Macca.
- Bunga,Ambo.2001. “Perjuangan Bersenjata di daerah Suppa” (dokumen tidak terbit).
- Djarwadi,Radik,dkk. 1972. *Naskah Sejarah Corps Hasanuddin, Prajurit*

Tempur dan Pembangunan. Ujung Pandang: Sekretaris Jenderal Corhas MCMLXXII.

Gonggong, Anhar. 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jogyakarta: Ombak.

Gonggong, Anhar. 1992. . *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.

Hafid, Rosdiana.2015. *Bahar Mattalioe: Sahabat dan Seteru Kahar Muzakkar dalam Jurnal Walasuji*, Vol.6, Nomor 1, Juni 2015. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Jarah Dam XIV Hasanuddin.1982.25 Tahun Kodam XIV Hasanuddin 1857-1982. Bandung: Percetakan Offset Bandung

Kila, Syahrir. 1996. *Kelaskaran 45 Di Sulawesi Selatan: BPRI Suppa dan BP. Ganggawa*). Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Limbugau, Daud. 2000. "Keterlibatan TNI Dalam Perdagangan Di Sulawesi Selatan Dari Masa Revolusi Sampai Tahun 1970-an" dalam *Dunia Militer di Indonesia; Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press.

Pawiloi, Sarita. 1987.*Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang:DHD Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Selatan.

Poeponegoro, Marwati Djoenut dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta : Balai Pustaka.

Purwanto, Bambang.2000." Historiografi dan Legitimasi Peran Sosial Politik Militer di Indonesia" dalam *Dunia Militer di Indonesia; Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi Selatan*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press.

Republik Indonesia.1953. *Propinsi Sulawesi*. Makassar: Jawatan Penerangan Republik Indonesia.

Sainal,A. 2017. "Andi Selle Dalam Pergolakan Bersenjata Di Sulawesi Selatan (1950-1964)" dalam *YUPA: Historical Studies Journal*, 1 (1), 2017.

Sumarkijo, Atmaji. 2006. *Jenderal M. Jusuf Panglima Para Prajurit*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka.

Sulistyo, Bambang. 2000. "Dari Pahlawan ke Pemberontak: Perubahan Sebagai Pendukung Republik ke DI/TII di Sulawesi Selatan" dalam *Dunia Militer di Indonesia; Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tangke, dkk. 2011. *M. Jusuf dan Andi Selle; Dalam Tragedi 5 April 1964 di Pinrang*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Informan

1. Nama : Nurdin Hamma
2. Umur : 91 tahun
3. Alamat : Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman
4. Status informan : wawancara langsung 2018 (masih hidup)

1. Nama : Kila Ali
2. Umur : 89 tahun
3. Alamat : Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
4. Status informan : Wawancara langsung 2001 (sudah meninggal)

1. Nama : La Matta
2. Umur : 80 tahun
3. Alamat : Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang
4. Status informan : Wawancara langsung 1997 (sudah meninggal)

1. Nama : La Djide (Cakkodo)
2. Umur : 88 tahun
3. Alamat : Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
4. Status informan : Wawancara langsung 2002 (sudah meninggal)

1. Nama : La Hasang
2. Umur : 79
3. Alamat : Malimpung, Kabupaten Pinrang
4. Status informan : Wawancara langsung 1999 (sudah meninggal)

Bahar, Jalin di Kanda, 2 November
 1964. Menamatkan ST SMP SMA di Makassar.
 Menyelesaikan ST di Fakultas Sastra jurusan
 Sejarah Universitas Hasanudin. Menjadi staf
 di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
 Ambo (1968-1969), tahun 2000 staf di Balai
 Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi
 Selatan hingga sekarang. Beberapa karya tulis
 ilmiah yang pernah di tulis diantaranya:



BIODATA PENULIS

Gertan sebagai Republik Maluku
 Selatan (2003). Perlawanan Sintai Terhadap
 Belanda (1850-1852) (2004). Andi Abdul Muis Tennidong; Probi
 Patot. Konsekuensi Hingga Tersebut Garah Terakir (2010). Kahan
 40.000 jiwa Di Sulawesi Selatan (2011). Kephikon Sekutu dan NICA di
 Sulawesi Selatan (2012). Islamisasi Di Tiro Sulawes (2012). Kerajaan
 di Babas Binanga (2014). TRIPS Dalam
 an di Sulawesi Selatan 1945-1950 (2014).
 Perjuangan Rih Amin Daud di jajah Selatan Sulawesi 1945-1950 (2015).
 Sistem Pemerintahan Masa Arung Mawo I La Palewo To Palgu dan
 IV La Tadampun Puang Ri Manggatalung (2015). We Mami Arung Dasi
 Sikandi Dalam Perjuangan Milawan Belanda (2015). Suppa Verus
 NICA di Sulawesi Selatan (1945-1947) (2015). Hubungan Bone Dengan
 Mandar Dan Setera Menjadi Terkiri (2016). Budaya Politik Kerajan
 Lawor (2017). Hubungan Anta Kerajan Gowa Dengan Wajo (2017).
 Badgare Daring Sirtu; Perjuangan dan Tokoh Agama Di Kabupaten Maros
 (1945-1950) (2017). Kedatangan Orang Melayu di Sulawesi Selatan
 (2018).



Bahtiar, lahir di Kendari, 5 November 1964. Menamatkan SD, SMP, SMA di Makassar. Menyelesaikan S1 di Fakultas Sastra jurusan Sejarah Universitas Hasanuddin. Menjadi staf di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon (1998-2000), tahun 2000 staf di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan hingga sekarang. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah di tulis diantaranya:

Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (2002), Perlawanan Sinjai Terhadap Belanda (1856-1859) (2004), Andi Abdul Muis Tenridolong; Profil Patriot Konsekuen Hingga Tetesan Darah Terakhir (2010), Korban 40.000 Jiwa Di Sulawesi Selatan (2011), Kebijakan Sekutu dan NICA di Sulawesi Selatan (2012), Islamisasi Di Tiro Bulukumba (2012), Kerajaan Sendana; Kindo Persekutuan Pitu Babana Binanga (2014), TRIPS Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan 1945-1950 (2014), Perjuangan Riri Amin Daud di Jazirah Selatan Sulawesi 1945-1950 (2015), Sistem Pemerintahan Masa Arung Matowa I La Palewo To Palipu dan IV La Tadampari Puang Ri Manggalatung (2015), We Mani Arung Data; Srikandi Dalam Perjuangan Melawan Belanda (2015), Suppa Versus NICA di Sulawesi Selatan (1945-1947) (2016), Hubungan Bone Dengan Mandar; Dari Seteru Menjadi Sekutu (2016), Budaya Politik Kerajaan Laiwoi (2017), Hubungan Antar Kerajaan; Gowa Dengan Wajo (2017), Baddare Daeng Situru; Pejuang dan Tokoh Agama Di Kabupaten Maros (1945 1950) (2017), Kedatangan Orang Melayu di Sulawesi Selatan (2018).



Muhammad Amir dilahirkan di Bone (Darampa), Sulawesi Selatan, tanggal 31 Desember 1966. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (1977) dan SMP (1981) di ArasoE, dan SMA di Mare pada 1984. Sarjana Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (1990), dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin – Program Studi Antropologi – Konsekrasi Ilmu Sejarah (2011). Lulus Pelatihan Tenaga Teknis Kesejarahan Tingkat Dasar (2001) dan Tingkat Lanjutan (2003).

Menjadi tenaga honorer pada Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kanwil Depdikbud Sulawesi Selatan (1990-1995), dan tenaga SP3 Bidang Kebudayaan di Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru (1996-1997). Staf peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Ambon (1998-2000), dan BKSNT Makassar (2000 hingga sekarang). Sejak tahun 1990 telah aktif dalam penelitian dan penulisan tentang aspek kesejarahan. Karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku baik tim maupun mandiri, antara lain; Biografi Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo (1990), Biografi Pahlawan Opu Daeng Risaju (1991), Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim (1993), Biografi Pahlawan Lanto Daeng Pasewang (1994), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan I (1995), Biografi Pahlawan La Sinrang, Bakkalolona Sawitto (1996), Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (2002), Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905 (2003), Kerajaan Gowa Pada Abad XIX (2004), Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2 ((2005), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan Jilid 2 (2005), Sejarah Polewali Mandar (2006), Biografi Pahlawan I Makkulau Sultan Husain (2007), Andi Abdullah Bau Massepe: Profil Patriot yang Konsekuen Hingga Tetesan Darah Terakhir (2008), Pahlawan Nasional Dari Sulawesi Selatan (2009), Kelaskaran di Mandar – Sulawesi Barat: Kajian Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemer dekaan (2010), Tiga Srikandi Dari Mandar – Sulawesi Barat (2011), Konfederasi Mandar: Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Barat (2011), Membela Republik Indonesia: Kajian Sejarah Perjuangan Kelaskaran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan (2012), Konflik dan Perubahan Sosial: Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan (2012), Perlawanan Rakyat Ajatappareng; Kajian Sejarah Perjuangan Menentang Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1905-1906 (2013), Gerakan Mara qdia Tokape di

Mandar – Sulawesi Barat Pada 1870-1873 (2014), dan Abdul Hamid Petta Ponggowae: Profil Panglima yang Pantang Menyerah (2015), Penataan Mandar Pada Masa Kolonial Belanda 1905-1942 (2016), Pembaharuan Perjanjian Bungaya 1824, (2017), dan Soppeng di Bawah Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda 1905-1942 (2018) Selain itu, juga sejumlah karya tulis yang dimuat dalam jurnal ilmiah.



Syahrir Kila, lahir di Lasape Pinrang, 19 Februari 1960. Ayah bernama Kila Ali dan ibu bernama Hj.Isya. Menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Pinrang. Menyelesaikan Pendidikan Tinggi pada Universitas Hasanuddin (S1) Ujung Pandang pada 1986, Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah. Melanjutkan pendidikan pada jenjang strata dua di Universitas Tujuh Belas Agustus 45 Surabaya pada 2007 jurusan Administrasi Publik. Menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 1989. Diangkat untuk pertama kali nya sebagai peneliti pada tahun 1994 Di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang kini berubah nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tiga tahun terakhir adalah Kerajaan Soppeng dari Tomanurung Hingga Penjajahan Belanda (sudah terbit 2018); Kerajaan Enrekang dari Tomanurung Hingga Kemerdekaan (tahun 2018 dalam proses terbit). Batalion 710 di Mandar (diterbitkan dalam bentuk Bunga Rampai 2019). Empat Peristiwa Sejarah Penting di Sulawesi Selatan, 2017 (terbit dalam bentuk bagian buku).



Rosdiana Hafid, lahir di Ujung

Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) diselesaikan di Ujung Pandang. Strata 1 (S1) diraih pada Universitas 17 Agustus 1945 Makassar, Jurusan Administrasi Negara. Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai staf administrasi pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) yang kemudian berubah nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT), selanjutnya berubah lagi menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi selatan sampai sekarang.

Mulai menjadi peneliti BPNB pada tahun 2012. Karya tulis ilmiah yang telah ditulis adalah Toponomi Daerah Pinrang (2012), Toponimi Daerah Majene (2014), Tomanurung Pendiri Kerajaan Bone (Jurnal Walasuji, 2011), Pemberontakan LapakokoE Arung Timurung dan Lasuni Karaeng Massepe Terhadap Arung Palakka (Jurnal Walasuji, 2014). Perkembangan Tari Jeppeng di Kotamadya Pare-Pare (dimuat dalam Prosiding Nasional di Jogjakarta, 2017). Syekh Jamaluddin Penyebar Islam di Wajo (dimuat dalam jurnal Walasuji, 2016). Tari Kaliboe Pada Masyarakat Nuha di Kecamatan Wasuponda Luwu Timur (Bagian dari buku terbit 2018). Rosdiana Hafid saat ini tengah mengikuti Program Magister (S2).

DINAMIKA KEMILITERAN:

**DARI KELASKARAN HINGGA BATALYON 710
DI SULAWESI SELATAN**

**PERJUANGAN LASKAR PEMBERONTAK RAKYAT
INDONESIA SULAWESI (LAPRIS) DI SULAWESI SELATAN**
Bahtiar

**PERJUANGAN KELASKARAN BPRI:
Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan di Parepare
dan Daerah Sekitarnya**
Muhammad Amir

ANDI SELLE DALAM BATALION 710
Syahrir Kila, Rosdiana Hafid